

Perencanaan Sektor Pendidikan  
Untuk Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia

*jogja*  
istimewa

# PENANDA PAKARTI



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta

2018



# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Maksud.....	I-8
1.3. Tujuan.....	I-8
1.4. Manfaat .....	I-9
1.5. Kerangka Pikir .....	I-9
1.6. Sistematika Penulisan .....	I-10
<b>BAB II KERANGKA KONSEPTUAL.....</b>	<b>II-12</b>
2.1. Pengantar .....	II-12
2.2. Ragam Paradigma Pembangunan .....	II-12
2.3. Basis Paradigma “Pembangunan yang Berpusat pada Manusia” .....	II-16
2.4. Prioritas Pendekatan Pembangunan Manusia .....	II-23
2.5. Formulasi Penguatan People-Center Development.....	II-29
2.6. Urgensi Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup Sosial .....	II-31
2.7. Catatan Penutup.....	II-34
<b>BAB III EKSPLORASI PROGRAM PENDUKUNG VARIABEL-VARIABEL INDEKS     PEMBANGUNAN MANUSIA DIY .....</b>	<b>III-36</b>
3.1. Pengantar .....	III-36
3.2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia hingga 2017 .....	III-38
3.3. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia DIY hingga 2017 .....	III-43
3.3.1. Angka Harapan Hidup (UHH) DIY .....	III-45
3.3.2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) DIY .....	III-47
3.3.3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) DIY .....	III-48
3.3.4. Angka Pengeluaran Perkapita DIY .....	III-50

3.4. Eksplorasi Program Pendukung Variabel-Variabel IPM DIY .....	III-51
3.4.1. Eksplorasi Program Pendukung Variabel IPM: Kesehatan .....	III-53
3.4.2. Eksplorasi Program Pendukung Variabel IPM: Pendidikan dan Perpustakaan .....	III-55
3.4.3. Eksplorasi Program Pendukung Variabel IPM: Perekonomian.....	III-56
<b>BAB IV FORMULASI RANCANGAN PROGRAM PENENTU INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DIY .....</b>	<b>IV-59</b>
4.1. Pengantar .....	IV-59
4.2. Formulasi Rancangan Program Kesehatan Penentu IPM DIY.....	IV-59
4.3. Formulasi Rancangan Program Pendidikan dan Perpustakaan Penentu IPM DIY .....	IV-60
4.4. Formulasi Rancangan Program Perekonomian Penentu IPM DIY .....	IV-63
4.5. Sinkronisasi Program-Program Penentu IPM DIY .....	IV-68
4.6. Rincian Formulasi Rancangan Program Penentu IPM DIY.....	IV-71
4.6.1. PEMETAAN PROGRAM KESEHATAN .....	IV-72
4.6.2. PEMETAAN PROGRAM PENDIDIKAN .....	IV-81
4.6.3. PEMETAAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH .....	IV-97
4.6.4. PEMETAAN PROGRAM BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL .....	IV-104
4.6.5. PEMETAAN PROGRAM PEREKONOMIAN.....	IV-108
<b>BAB V STRATEGI PENGEMBANGAN LAYANAN PENDIDIKAN DIY .....</b>	<b>V-164</b>
5.1. Pengantar .....	V-164
5.2. Persoalan dan Isu Strategis Sektor Pendidikan .....	V-164
5.2.1. Isu-Isu Strategis Pembangunan DIY .....	V-164
5.2.2. Persoalan-Persoalan Pendidikan di DIY .....	V-165
5.2.3. Isu-Isu Strategis Sektor Pendidikan DIY .....	V-168
5.3. Strategi Pengembangan Layanan Pendidikan DIY.....	V-173
5.4. Sinkronisasi Program Kegiatan Pendukung IPM .....	V-182
5.4.1. SINKRONISASI KEGIATAN PENDUKUNG IPM SEKTOR PENDIDIKAN .....	V-183
5.4.2. SINKRONISASI PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG IPM URUSAN PERPUSTAKAAN.....	V-235
5.4.3. SINKRONISASI PROGRAM KEGIATAN URUSAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH.....	V-251
<b>BAB VI CATATAN PENUTUP .....</b>	<b>VI-257</b>

DAFTAR PUSAKA .....	258
---------------------	-----

## BAB I

# PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tahapan dan strategi RPJMD 2017-2022 merupakan bagian atau kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJMD 2013-2017, dimana tahun terakhir RPJMD 2013-2017 akan menjadi tahun awal tahapan dan strategi Tahun 2017-2022. Memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan RPJPD 2005-2025, RPJMD 2013-2017, maka tahapan dan strategi Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari tahapan RPJPD Lima Tahun III dan tahapan RPJPD Lima Tahun IV.

Dalam konteks tahapan dan strategi pembangunan tahun 2017-2022 tersebut, Bappeda DIY merasa urgen untuk mengakselerasi perbaikan kualitas perencanaan pembangunan. Hal itu ditempuh dengan harapan Visi dan Misi Gubernur DIY pada periode pembangunan 2017-2011 bisa disasar dan diimplementasikan secara efektif, hingga pada akhirnya perbaikan kualitas kesejahteraan warga yang dilayani benar-benar bisa terwujud.

Urgensi akselerasi perbaikan kualitas perencanaan pembangunan Bappeda ini mempertimbangkan setidaknya dua pertimbangan pokok berikut ini: **pertama**, evaluasi umum yang ditegaskan oleh Presiden RI, Joko Widodo, pada saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang diselenggarakan di Jakarta pada 26 April 2018 silam. Dengan lugas, Presiden menegaskan bahwa: “Laju pembangunan di tingkat pusat belum bisa diikuti seluruh daerah. Kurangnya efektivitas itu terjadi lantaran pemerintah daerah (Pemda) memiliki terlalu banyak program prioritas. Hal itu menyebabkan implementasi pembangunan menjadi tidak terfokus dan berakibat tidak efektif”. Lebih jauh, Presiden menyatakan bahwa bila ada kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mesti dialokasikan untuk mempercepat penyelesaian program prioritas tersebut. Secara implisit

dinyatakan pula bahwa untuk dinas-dinas yang tidak menjadi lead sektor dalam program prioritas tersebut, mereka tetap melanjutkan program peningkatan pelayanan publik sesuai tupoksinya (Jawa Pos, 26/04/2018).

Dalam kesempatan yang sama, ditegaskan pula perihal pentingnya momen Musrenbangnas perlu dijadikan sebagai arena/ajang untuk mengintegrasikan program prioritas nasional dan prioritas daerah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, pengintegrasian tersebut merupakan bentuk partisipasi aktif daerah maupun pusat dalam program pembangunan. Kesuksesan program prioritas tidak akan pernah bisa dilepaskan dari tahapan awal proses perencanaan program pembangunan di daerah (Jawa Pos, 26/04/2018).

**Kedua**, sejalan dengan amanat tersebut, Bappeda perlu mempertajam fokus perencanaan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan DIY sebagaimana yang telah termaktub dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022. Dengan bertolak pada pertimbangan isu-isu teraktual seperti: kemiskinan, ketimpangan, kemacetan, perilaku sosial masyarakat, potensi selatan Yogyakarta yang belum optimal, dan daya dukung lingkungan, formulasi paradigma pembangunan sebagaimana termaktub dalam RPJMD 2017-2022 berbunyi sebagai berikut: **“Menyongsong Abad Samudra Hindia untuk Kemuliaan Martabat manusia Jogja”**. Berpijak pada paradigma tersebut maka Visi Gubernur pada periode 2017-2022 adalah **“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”**.

Ditilik dari sekuel perencanaan lima tahun sebelumnya (RPJMD 2012-2017), DIY mengusung spirit Renaisans yang menekankan tentang upaya merengkuh Perdaban Baru yang Bermartabat, Berbudaya, Mandiri, & Sejahtera (hal 58). Maka pada perencanaan lima tahun tahap ke tiga (RPJMD 2017-2022), DIY melanjutkannya dengan spirit menyongsong Abad Samudra Hindia. Dalam konteks itu, basis perencanaan pembangunan diperkuat dengan menggarap aspek budaya maritim (RPJMD 2017-2022; 64:4). Melalui kebijakan afirmatif, DIY

berupaya meletakkan pondasi, implementasi, dan inovasi pembangunan terfokus pada prioritas pembangunan di sisi wilayah selatan Yogyakarta.

Target dan sasaran utamanya adalah untuk menyisir sejumlah kantong-kantong kemiskinan demi mengakselerasi percepatan peningkatan martabat masyarakat Jogja. Oleh karena itu, persis dalam konteks itu **Panca Mulia** diformulasikan untuk mewujudkan **“Manusia yang bermartabat dan wilayah terkemuka di ASIA TENGGARA”**. Visi dan misi pembangunan lima tahunan tahap III itu tentu saja sejalan dengan sasaran cita-cita jangka panjang dalam RPJP DIY yang berbunyi **“Masyarakat yang maju mandiri dan sejahtera”**.

Bila dijabarkan berdasarkan tinjauan teknokratis, maka penjelasan atas Visi Gubernur DIY tersebut bisa divisualisasikan lanjut dalam gambar Gambar 1.1 berikut ini.

**Gambar 1.1 Penjelasan Teknokratis Visi Gubernur 2017-2022**



Lebih jauh, berkaitan dengan program pembangunan Panca Mulia yang dikorelasikan dengan Misi dan Tujuan pembangunan DIY akan segera terjabarkan dalam paparan berikut. Secara garis besar, formulasi Panca Mulia tersebut memuat lima poin pokok berikut:

1. Kualitas hidup, kehidupan, penghidupan masyarakat;
2. Kualitas & keragaman perekonomian masyarakat;
3. Harmoni masyarakat & birokrasi;
4. Tata & perilaku yang demokratis;
5. Perilaku bermartabat ASN.

Kelima poin pokok dalam Panca Arah tersebut menjadi penopang bagi terimplementasikannya dua Misi Gubernur berikut ini:

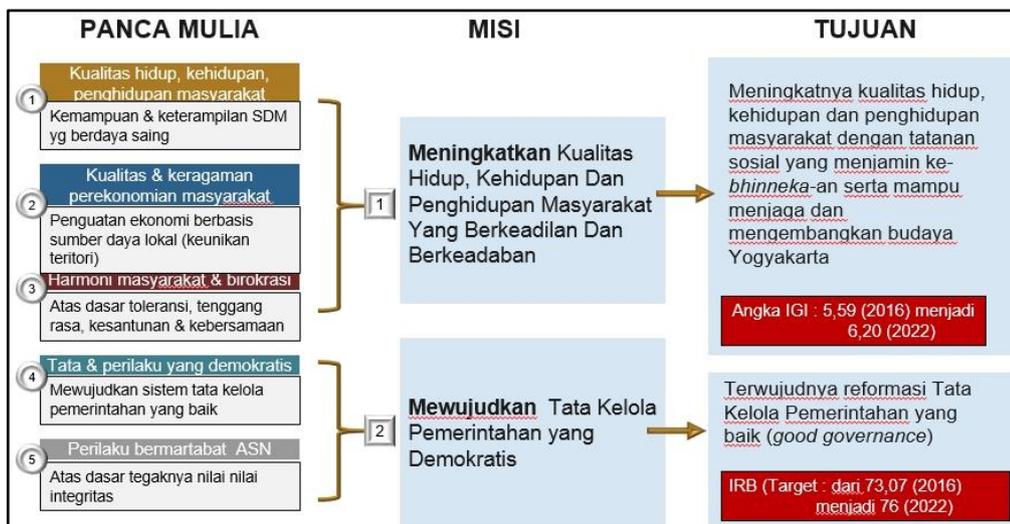
1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis.

Melalui dua misi tersebut, program pembangunan akan menysasar pada tujuan pembangunan berikut:

1. Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-*bhinneka*-an serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta;
2. Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*)

Untuk mendapatkan penjelasan dalam ilustrasi sederhana, keterpaduan antara Panca Mulia, Misi, dan Tujuan tersebut bisa dicermati dalam Gambar 1.2 berikut.

**Gambar 1.2 Keterkaitan Panca Mulia, Misi, dan Tujuan Pembangunan DIY**



Persis dalam kerangka keterkaitan antara Panca Mulia, Misi, dan Tujuan Pembangunan DIY itulah, Perencanaan Pembangunan Bidang SDM Sub Bidang Pendidikan Bappeda DIY perlu memformulasikan berbagai program intervensi kebijakan yang memadai dalam laporan ini.

Bappeda sangat menyadari bahwa terwujudnya Visi besar **“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”** yang terformulasikan dalam **Misi 1 “Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-*bhinneka-an* serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta”** sepenuhnya bertumpu pada pondasi program pendidikan DIY. Program-program pendidikan akan sangat menentukan tingkat dan kualitas Indeks Pembangunan Manusia di DIY.

Dengan kata lain, Visi dan Misi 1 itu sesungguhnya memposisikan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) DIY sebagai pertaruhan penting yang harus dilibati secara intensif, substansif, dan sinergis. Dalam hal ini, untuk mewujudkan IPM yang semakin meningkat dan berkualitas tersebut, Pemerintah DIY perlu mendaya upayakan segenap sumberdaya dan program-program yang relevan untuk dimobilisasi, diorganisir, dan dikonsolidasikan dalam kerja-kerja terpadu lintas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait. Koordinasi dan konsolidasi lintas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) tersebut akan menentukan proses hilirisasi yang sinergis dan efektif dari segenap program kerja masing-masing OPD, mulai dari Bappeda, Biro Kesra, Disdikpora, Dinkes, Disbud, BPAD, BPPM, Disnaker, dll.

Untuk mewujudkan peningkatan IPM yang berkualitas itulah Bappeda Pemerintah DIY perlu merumuskan secara rinci berbagai hal seperti: kebijakan besar, program, kegiatan, dan aktivitas apa saja yang musti diimplementasikan oleh segenap OPD Pemerintah DIY. Selain itu, Pemerintah DIY juga penting untuk menjawab tantangan tentang bagaimana program-program kerja tersebut bisa diimplementasikan secara sinergis sehingga bisa efektif menjangkau sasaran yang diprioritaskan sebagaimana yang termaktub dalam RPJMD 2017-2022.

Dalam kerangka besar itulah, laporan perencanaan Bappeda ini akan menjabarkan secara lebih rinci basis pondasi paradigmatis, ragam kebijakan, program, kegiatan, aktivitas, hingga model pendekatan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam beberapa tahun mendatang.

Dalam proses perencanaan pembangunan SDM Sub Bidang Pendidikan ini tentu saja Bappeda DIY merujuk pada berbagai regulasi kebijakan ataupun dokumen perencanaan pembangunan internasional, nasional, dan daerah seperti:

1. Platform pembangunan internasional tentang *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang secara khusus memosisikan pembangunan pendidikan yang berkualitas sebagai prioritas penting ke empat;
2. Panduan pembangunan nasional maupun dengan sembilan agenda prioritas (Nawacita), UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 Tahun 2005 Jo No.32 Tahun 2013: Standar Nasional Pendidikan, PP No. 17 Tahun 2010 Jo. No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
3. UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Perda DIY No. 2 Tahun 2009 tentang RPJP DIY Tahun 2005 – 2025, Perda DIY No. 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya, Perda DIY No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya, Perdais DIY No. 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY (jo. Perdais No 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Perdais), Perda DIY No.10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan, Pergub DIY No. 68 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penerapan Nilai-nilai Luhur Budaya dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pergub DIY No. 77 Tahun 2012 tentang Renstra Pembangunan Pendidikan Daerah, Pergub DIY No. 64 Tahun 2013: Mata Pelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah, dan Pergub DIY No. 41 Tahun 2013 tentang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.

Dengan mengacu pada beragam kebijakan secara eklektik, Bappeda DIY berupaya mengelaborasi, melakukan penyesuaian (*adjustment*), membenahan sistem tatakelola secara lebih mendasar dan terintegrasi. Dalam penyusunan perencanaan pendidikan ini, Bappeda berupaya memahami kelemahan dan kelebihan potensi yang dimiliki tanpa mengesampingkan sejumlah peluang dan tantangan ke depan. Hal itu penting untuk menyikapi dinamika pembangunan dan permasalahan pendidikan pada tingkat lokal, antar wilayah, nasional, bahkan hingga relasinya dengan perubahan mondial. Dengan demikian, arah kebijakan yang diambil dapat memberikan gambaran program dan strategi yang dapat diimplementasikan secara optimal sebagai solusi persoalan dan antisipasi risiko/tantangan pembangunan daerah di tahun-tahun mendatang.

Segegap daya upaya itu perlu dan penting untuk ditempuh untuk memastikan terbangunnya arah sasaran dan strategi pencapaian berbagai target pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas. Dengan demikian persoalan sektor pendidikan yang menjadi isu strategis bisa terpetakan secara utuh dan menyeluruh, hingga menjadi landasan bagi penyusunan perencanaan pembangunan yang holistik dan terintegrasi.

Dengan mengacu pada proses konsolidasi dan sinkronisasi atau penyalarsan beragam kebijakan tersebut, perencanaan pembangunan sub sektor Pendidikan Bappeda DIY selanjutnya akan mengkaji dan mengeksplorasi “Kerangka Kerja Logic” program-program pendidikan DIY secara lebih rinci dan jelas. Dalam konteks ini, “Kerangka Kerja Logic” ini menelisik secara spesifik berbagai faktor, variabel, dan indikator yang berpeluang atau berpotensi untuk

mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di DIY di tahun-tahun mendatang.

## **1.2. Maksud**

Penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mempertajam “Kerangka Kerja Logic” perencanaan program-program pendidikan demi tercapainya target dan sasaran prioritas pembangunan Pemerintah DIY, utamanya klausul Misi 1 yang berbunyi: “Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-an serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta”.

Untuk tujuan tersebut, perencanaan program pendidikan ini akan mengeksplorasi dan menyelaraskan berbagai faktor, variabel, dan indikator yang berpotensi dan/atau berpeluang mendongkrak peningkatan Indeks Pembangunan Manusia DIY. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini akan mampu memberikan arah yang jelas menuju pencapaian visi misi Pemerintah DIY 2017-2022.

## **1.3. Tujuan**

Perencanaan pembangunan pendidikan ini bertujuan:

1. Menyusun bahan perencanaan lintas sektor dan sinkronisasi perencanaan lintas sektor yang relevan dengan pembangunan pendidikan DIY di tahun-tahun mendatang;
2. Menyasar Misi Pemerintah DIY “Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-an serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta”;
3. Mengoptimalkan pelayanan publik di DIY sebagaimana telah dirumuskan misi pembangunan daerah sehingga seluruh warga bisa merasakan dampak perbaikan layanan yang dilakukan pemerintah

tersebut, dan peta jalan (*road map*) kesejahteraan bagi seluruh warga di DIY menjadi semakin jelas.

#### **1.4. Manfaat**

1. Tercapainya perencanaan pembangunan pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkualitas;
2. Meningkatnya keterpaduan dan sinergitas program/kegiatan pembangunan pendidikan dan berbagai sektor lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Terumuskannya sebuah acuan penyusunan program/kegiatan pendidikan, Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun selanjutnya.

#### **1.5. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir Penyusunan Perencanaan Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sektor pendidikan ini diawali dengan memaparkan basis paradigma pembangunan yang adekuat sebagai pondasi utama bagi perencanaan program pendidikan yang menysasar pada tercapainya misi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di DIY. Secara khusus, paparan akang menggunakan kerangka paradigma “pembangunan yang berpusat pada manusia” (*people-centered development*) yang memprioritaskan warga negara (*citizen*) sebagai kiblat perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi berbagai program pembangunan di DIY.

Selanjutnya, paparan akan mengeksplorasi berbagai faktor, vareabel, indikator program yang berkaitan erat dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Dalam hal ini, penjelasan akan memerinci data-data teraktual (*existing data*) terkait Indeks Pembangunan Manusia di DIY, terutama aspek-aspek kunci dari Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH) di DIY.

Dari hasil pencermatan data-data tersebut, laporan perencanaan ini akan memformulasikan sejumlah program pendidikan yang berpotensi besar bisa

mengakselerasi capaian peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di DIY selama beberapa tahun mendatang.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta ini meliputi 4 (empat) bab berikut: 1). Pendahuluan; 2). Kerangka Konseptual; 3). Eksplorasi Variabel-Variabel Penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DIY; 4). Formulasi Rancangan Program Penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DIY; 5). Penutup

Pada **Bab I. Pendahuluan**, paparan menyajikan latarbelakang pentingnya penyusunan laporan perencanaan program pendidikan di DIY. Sejumlah catatan penting dalam latarbelakang tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar penjas tentang maksud, tujuan, manfaat, kerangka pikir, dan sistematika penulisan dari penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan di DIY.

Pada **Bab II Kerangka Konseptual**, tulisan akan memaparkan basis paradigma pembangunan yang berpusat atau berorientasi pada manusia (*people-centered development*). Dengan basis paradigma itu, paparan akan menyertakan sejumlah kerangka konseptual yang penting sebagai bahan acuan dalam mengembangkan arah kebijakan, strategi, program-program, dan berbagai kegiatan pembangunan pendidikan di DIY.

Pada **Bab III Eksplorasi Variabel-Variabel Penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**, tulisan akan mendiskripsikan himpunan data-data yang relevan dengan perkembangan terkini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DIY. Sejumlah “data keras”, angka statistik, yang mengilustrasikan dinamika perkembangan dan gerak kecenderungan capaian IPM di DIY selama beberapa tahun terakhir. Melalui sajian data itu, tulisan akan menegaskan sejumlah potensi dan peluang yang bisa dielaborasi untuk merumuskan intervensi program yang suportif bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di DIY.

Pada **Bab IV Formulasi Rancangan Program Penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DIY**, tulisan akan menyajikan formulasi perencanaan program

sesuai kondisi aktual, urgensi, relevansi dampak positif, kesesuaian, inklusi, dan sensitivitas seputar persoalan-persoalan pendidikan untuk mengakselerasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DIY.

Pada **Bab V Strategi Pengembangan Layanan Pendidikan DIY**, tulisan akan menguraikan secara lebih rinci tentang program-program kegiatan yang berfungsi sebagai upaya pengembangan layanan pendidikan DIY untuk mengoptimalkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dalam periode lima tahun mendatang.

Akhirnya, pada **Bab VI Catatan Penutup**, tulisan akan menyajikan catatan singkat tentang arti penting dokumen ini bagi perencanaan terintegrasi atas sejumlah program pembangunan lintas OPD dalam proses pembangunan ke depan.

## BAB II

# KERANGKA KONSEPTUAL

### 2.1. Pengantar

Paparan Bab II Kerangka Konseptual ini secara sistematis akan menjelaskan sejumlah diskursus terkait: **pertama**, ragam paradigma pembangunan yang biasa diimplementasikan. **Kedua**, setelah ragam paradigma pembangunan tersebut dijelaskan, pokok bahasan akan dikerucutkan pada penjelasan tentang paradigma pembangunan “*people-centered development*”.

**Ketiga**, paparan pembangunan berpusat pada manusia tersebut selanjutnya akan dipertajam lagi ke dalam pembahasan tentang Indeks Pembangunan Manusia yang dilengkapi dengan basis nilai-nilai pembentuk sehingga proses pembangunan dan implikasi intervensi kebijakan yang dipilih berpotensi merealisasikan cita-cita dan gagasan *people-centered development* tersebut. **Keempat**, paparan selanjutnya akan menekankan tentang prioritas pendekatan pembangunan manusia.

Guna meluaskan pembahasan, pada sub bab **kelima**, paparan akan menyajikan formulasi penguatan *people-center development* dan pada sub bab **Keenam**, urgensi penguatan kualitas lingkungan hidup sosial perlu mendapatkan penjelasan tersendiri untuk menegaskan perihal pembangunan berkelanjutan sebagai topan penting bagi terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas. Pada sub bab **ketujuh**, tulisan akan menyajikan catatan penutup yang berisikan saripati penegas tentang hakekat dari *people-centered development* dalam pengertian yang ringkas.

### 2.2. Ragam Paradigma Pembangunan

Pembangunan sering dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan

ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 1994: 90). Dalam pengertian lain, pembangunan juga didefinisikan sebagai pertumbuhan plus perubahan, yang merupakan kombinasi berbagai proses ekonomi, sosial dan politik, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (United Nations, 1972).

Dalam terminologi serupa, pembangunan bisa diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Hanya saja, kemajuan yang dimaksudkan itu seringkali bias pada kemajuan material saja. Singkatnya, pembangunan diartikan sebagai kemajuan yang dicapai satu masyarakat di bidang ekonomi; bahkan dalam beberapa situasi yang sangat umum pembangunan diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang diharapkan bagi 'sebagian orang tersingkir' dan sebagai ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya (Budiman, 1995: 1-2).

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok: pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material; pembangunan harus menciptakan kondisi-kondisi manusia bisa mengembangkan kreativitasnya (Budiman, 1995: 13-14).

Dalam praktek pembangunan di banyak negara, setidaknya pada tahap awal pembangunan umumnya berfokus pada peningkatan produksi. Meskipun banyak varian pemikiran, pada dasarnya kata kunci dalam pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Peranan sumber daya manusia (SDM)

dalam strategi semacam ini hanyalah sebagai “instrumen” atau salah satu “faktor produksi” saja. Manusia ditempatkan sebagai posisi instrumen dan bukan merupakan subyek dari pembangunan. Titik berat pada nilai produksi dan produktivitas telah mereduksi manusia sebagai penghambat maksimisasi kepuasan maupun maksimisasi keuntungan.

Konsekuensinya, peningkatan kualitas SDM diarahkan dalam rangka peningkatan produksi. Inilah yang disebut sebagai pengembangan SDM dalam kerangka production centered development (Tjokrowinoto, 1996). Bisa dipahami apabila topik pembicaraan dalam perspektif paradigma pembangunan yang semacam itu terbatas pada masalah pendidikan, peningkatan keterampilan, kesehatan, link and match, dan sebagainya. Kualitas manusia yang meningkat merupakan prasyarat utama dalam proses produksi dan memenuhi tuntutan masyarakat industrial. Alternatif lain dalam strategi pembangunan manusia adalah apa yang disebut sebagai people-centered development atau putting people first (Korten, 1981 dalam Kuncoro, 2004). Artinya, manusia (manusia) merupakan tujuan utama dari pembangunan, dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan sumber daya yang paling penting Dimensi pembangunan yang semacam ini jelas lebih luas daripada sekedar membentuk manusia profesional dan terampil sehingga bermanfaat dalam proses produksi. Penempatan manusia sebagai subyek pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (*empowerment*) manusia, yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya.

Menurut Kuncoro (2003), terdapat sejumlah paradigma dalam sejarah pembangunan dunia. Paradigma itu antara lain: paradigma pertumbuhan dengan distribusi, paradigma kebutuhan pokok (*basic needs*), paradigma pembangunan mandiri (*self-reliant development*), paradigma pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap ekologi (*eco-development*), paradigma pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (*ethno-develomment*). Terdapat pula pengkategorian paradigma dalam tiga model

pembangunan, yaitu *Economic Growth, Basic Needs dan People Centered*. Perbedaan ketiga paradigma ini bisa disimak dalam paparan dan tabel berikut (Kartono & Nurcholis, 2016: 14-15).

1. *Economic growth (model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan)*. Model pembangunan ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional (perspektif ekonomi) dalam jangka waktu tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi, antara lain melalui:
  - a. akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan SDM;
  - b. peningkatan tenaga kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas;
  - c. kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tradisional.
2. *Basic needs (model pembangunan kebutuhan dasar/kesejahteraan)*. Model pembangunan yang diinisiasi Gunnar Myrdall ini mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarakat miskin (pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain)
3. *People centered (model pembangunan yang berpusat pada manusia)*. Model pembangunan ini adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial. Dalam konteks ini, posisi pemerintah berperan sebagai fasilitator yang berupaya menciptakan

lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar.

**Tabel 2.1. Perbandingan Tiga Paradigma Pembangunan**

Karakteristik	Strategi		
	Economic Growth	Basic Needs	People Centered
<i>Fokus</i>	industri	Pelayanan Publik dan service	Human empowering (pemberdayaan)
<i>Nilai</i>	Berpusat pada industri	Berkiblat pada manusia	Berpusat pada manusia
<i>Indikator</i>	Ekonomi makro (pertumbuhan)	Indikator sosial	Hubungan manusia dengan sumberdaya
<i>Peran Pemerintah</i>	Entrepreneur	Service provider	Fasilitator/Enabler
<i>Sumber Utama</i>	Modal	Kemampuan administratif dan anggaran	Kreativitas dan komitmen
<i>Kendala</i>	- konsentrasi dan marginalisasi - konsentrasi kekayaan elit - dehumanisasi	Keterbatasan anggaran dan inkompetensi aparat	Struktur dan prosedur yang mendukung

Sumber: Kartono & Nurcholis (2016: 15).

### 2.3. Basis Paradigma “Pembangunan yang Berpusat pada Manusia”

Konsep “pembangunan berpusat pada manusia” (people-centered development) memposisikan tujuan utama dan terutama pembangunan adalah membantu segenap umat manusia (warga negara) menggapai kemakmuran dan kebahagiaan dalam hidupnya. Gagasan paradigma pembangunan ini pertama-tama mengemuka dalam laporan tahunan United Nations Development Programme (UNDP) yaitu The Human Development Report yang diterbitkan pada tahun 1990 ([www.mofa.go.jp](http://www.mofa.go.jp)).

Secara tegas, laporan itu menunjukkan bahwa derajat atau tingkat pembangunan negara-negara diukur berdasarkan indeks pembangunan manusianya. Dalam perjalanannya, konsep tersebut didorong dan diajukan pada KTT Dunia Pembangunan Sosial (*World Summit for Social Development*) pada tahun 1995 dan serangkaian konferensi internasional yang berkaitan dengan pembangunan yang diselenggarakan di beberapa tahun setelahnya. “Pembangunan berpusat pada manusia” (*people-centered development*) akhirnya pun menjadi tema sentral dalam berbagai diskusi isu pembangunan di lingkup komunitas internasional pada tahun 1990an ([www.mofa.go.jp](http://www.mofa.go.jp))

Laporan Pembangunan Manusia UNDP (The Human Development Report of the UNDP) memperkenalkan konsep tersebut di Tokyo tahun 1996, yang secara mendasar memusatkan perhatian pada pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Apa yang sebenarnya hendak didesakkan UNDP adalah bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan sedangkan pertumbuhan ekonomi sekadar sebagai alat/sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Bila dikalimatkan kembali dengan bertitik tolak pada keberlanjutan dari pertumbuhan ekonomi (*sustainability of economic growth*), demikian laporan itu menegaskan, *“Short-term advances in human development are possible -- but they will not be sustainable without further growth. Conversely, economic growth is not sustainable without human development.”*

Dalam translasi, ungkapan tersebut berbunyi: “Dalam jangka pendek, keuntungan-keuntungan dalam pembangunan manusia itu mungkin—tetapi itu tidak akan berkelanjutan tanpa adanya pertumbuhan yang lebih jauh. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan tanpa pembangunan manusia.”

Apa yang ditekankan dalam penjelasan tersebut bahwa gagasan besar dari “pembangunan berpusat pada manusia” (*people-centered development*) bukan berarti menegaskan pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, laporan UNDP itu

menekankan tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi bagi pembangunan yang berkelanjutan dalam makna pengertian sebenarnya.

Kepedulian utama yang terkandung dalam gagasan “pembangunan yang berpusat pada manusia” adalah ada tidaknya keuntungan kue ekonomi yang meningkat oleh pertumbuhan ekonomi akan menyalurkannya pada individu-individu berupa peningkatan tenaga kerja dan pendapatan. Kepentingannya juga terletak pada ada tidaknya individu-individu akan dimungkinkan untuk ikut serta dalam proses pembangunan seturut kapasitas mereka masing-masing.

Dengan kata lain, paradigma “Pembangunan yang Berpusat pada Manusia” ini menekankan tentang pentingnya peningkatan kapasitas manusia sebagai fokus utamanya (Purwowibowo, Hendrijanto, dan Soelistijono, 2018: 283-300). Dalam penjelasan lebih lanjut, Pembangunan yang Berpusat pada Manusia sesungguhnya lebih menekankan pada pemberdayaan manusia melalui peningkatan kapasitasnya, sehingga mampu mengendalikan kehidupan mereka sendiri dengan melakukan pengelolaan terhadap sumber dayanya. Dalam hal ini, mereka mampu menciptakan sumber kehidupan rumah tangganya dan secara langsung dapat mengejar pembangunan nasional yang diprogramkan sebagai suatu upaya mencapai kesejahteraan sebagai wujud dan realisasi dari tujuan akhir Pembangunan yang Berpusat pada Manusia (McGinty, 2002).

Kehadiran paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia ini merupakan kritikan terhadap paradigma pembangunan konvensional yang berpusat pada produksi ekonomi semata. Kritik telak atas paradigma pembangunan yang berbasis produksi ini, ditegaskan oleh Korten (1993) dalam tujuh poin pokok berikut (Purwowibowo, Hendrijanto, dan Soelistijono, 2018: 293):

1. Industrialisasi seringkali mengalahkan bidang pertanian, padahal bidang tersebut merupakan bidang sangat penting karena sebagian besar masyarakat di dunia ini menggantungkan kehidupannya.
2. Wilayah perkotaan memang merupakan komunitas yang lebih kompleks daripada perdesaan, namun jangan dikesampingkan bahwa wilayah

perdesaan merupakan tempat sebagian besar penduduk hidup dan mensuplai kebutuhan masyarakat kota.

3. Sistem sosialis dan kapitalis dalam pembangunan konvensional seringkali melewati batas kepemilikan mengenai aset produktif dan komunal, sehingga hasil produksi atau produktivitasnya hanya menguntungkan sedikit orang kota daripada kepentingan banyak orang.
4. Penggunaan modal melebihi batas optimal sumber daya manusia yang digunakan, akibatnya modal mendominasi dan sangat kuat sehingga pada akhirnya memperdaya orang miskin yang tidak memiliki modal.
5. Eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan terjadi sangat masif padahal kegiatan demikian hanya untuk mencapai kekayaan material yang berjangka pendek. Sedangkan untuk memulihkan kembali sumber daya yang ada dan rusak dibutuhkan waktu dan biaya yang sangat banyak. Memulihkan kembali lebih berat daripada melakukan konservasi awal.
6. Model pembangunan konvensional berbagai program saling ketergantungan dalam skala produksi sangat besar dan didasarkan pada kemajuan kebutuhan internasional yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan produksi dalam skala kecil dan lokal dengan melakukan adaptasi serta mengorganisir kepercayaan lokal yang kuat sehingga menghasilkan kondisi ekonomi yang tangguh. Selama ini, pembangunan di banyak negara berkembang menghasilkan kondisi ekonomi yang rapuh dan mudah terpengaruh kekuatan ekonomi kapitalis dunia.
7. Banyak ditemui di dalam produksi massal ternyata menggunakan teknologi yang tidak efisien sehingga memerlukan biaya operasional tinggi, mengotori lingkungan dan tidak adaptif. Namun anggapan demikian dapat pula dimanipulasi secara praktik politik di berbagai sistem sosial.

Berdasarkan hal tersebut, model pembangunan yang berpusat pada manusia merupakan suatu alternatif baru untuk meningkatkan hasil produksi pembangunan guna memenuhi kebutuhan penduduk yang sangat banyak dan terus bertambah, akan tetapi peningkatan itu harus dicapai dengan cara-cara

yang sesuai dengan asas-asas dasar partisipasi dan keadilan dan hasil-hasil itu harus dapat dilestarikan untuk kelangsungan hidup manusia di dunia ini.

Model pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia lebih menekankan kepada pemberdayaan, yaitu menekankan kenyataan pengalaman masyarakat dalam sejarah penjajahan dan posisinya dalam tata ekonomi internasional. Karena itu pendekatan ini berpendapat bahwa masyarakat harus menggugat struktur dan situasi keterbelakangan secara simultan dalam berbagai tahapan (Hikmat, 2014: 4).

Korten (1993) menyatakan konsep pembangunan berpusat pada manusia memandang inisiatif kreatif dari manusia sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Lebih jauh, Korten mengemukakan tiga tema pokok yang dianggap menentukan bagi konsep perencanaan yang berpusat pada manusia, yaitu:

1. Penekanan akan dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri;
2. Kesadaran bahwa walaupun sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagai besar rumah tangga miskin;
3. Kebutuhan akan kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal.

Dalam konteks tiga tema pokok Korten tersebut, manusia dan lingkungan merupakan variabel endogen yang utama, yaitu sebagai titik tolak bagi perencanaan pembangunan, sehingga perspektif dasar dan metode analisis dalam pendekatan pembangunan ini yaitu Ekologi Manusia yaitu kajian mengenai interaksi antara sistem manusia dan ekosistem. Pendekatan ini juga

mempersoalkan dua asumsi yang terkandung dalam model-model pembangunan ekonomi; pertama, bahwa pembangunan dengan sendirinya membantu setiap orang, dan kedua, bahwa masyarakat ingin diintegrasikan dalam arus utama suatu pembangunan model barat, dimana mereka tidak punya pilihan untuk merumuskan jenis masyarakat yang mereka inginkan.

Dengan menggunakan waktu sebagai ukuran dasar perubahan, dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia dibedakan antara strategi jangka panjang dengan strategi jangka pendek. Strategi jangka panjang diperlukan untuk menghancurkan struktur ketimpangan sosial, kelas dan bangsa. Prasyarat dasar bagi proses ini termasuk pembebasan nasional dari dominasi kolonialisme dan neokolonialisme, pergeseran dari strategi pertanian yang berorientasi ekspor, dan kontrol yang lebih besar terhadap aktivitas-aktivitas perusahaan-perusahaan multinasional. Strategi jangka pendek didefinisikan sebagai kebutuhan untuk menemukan cara-cara menghadapi krisis-krisis yang sedang berlangsung, dengan membantu masyarakat dalam produksi pangan melalui peningkatan diversifikasi pertanian, sebagaimana juga kesempatan kerja di sektor formal dan informal (Hikmat, 2014: 5).

Berikut ini adalah penajaman perbandingan paradigma pembangunan berorientasi produksi dengan paradigma pembangunan berpusat pada manusia yang ditilik dari beberapa dimensi berikut: logika, tujuan, sistem ekonomi, birokrasi, kriteria, teknik sosial, proses pembuatan keputusan, teknologi organisasi.

**Tabel 2.2 Penajaman Perbandingan paradigma pembangunan berorientasi produksi dengan paradigma pembangunan berpusat pada manusia**

<b>Dimensi-dimensi</b>	<b>Pembangunan berpusat pada produksi</b>	<b>Pembangunan berpusat pada manusia</b>
Logika	Ekonomi-Produksi : eksploitasi dan manipulasi sumber daya alam	Ekologi Manusia : Pemanfaatan sumber daya informasi dan prakarsa kreatif
Tujuan	Maksimalisasi arus barang	Peningkatan potensi manusiawi

<b>Dimensi-dimensi</b>	<b>Pembangunan berpusat pada produksi</b>	<b>Pembangunan berpusat pada manusia</b>
	dan jasa	(individu sebagai aktor). Pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan prakarsa dan perbedaan lokal
Sistem ekonomi	Konvensional : - skala besar - spesialisasi - investasi - keunggulan komparatif - interdependensi global	Swadaya : - logika tempat - rakyat - sumber daya (sistem ekologi manusia)
Birokrasi	Birokrasi besar : masyarakat diorganisasikan dalam satuan produksi yang efisien dengan pengawasan terpusat	Sistem swa-organisasi yang ada di sekitar satuan-satuan organisasi manusia dan berskala komunitas
Kriteria	Efisiensi Maksimalisasi laju kenaikan produktivitas sistem	Nilai Produk Partisipasi Mutu kehidupan kerja
Teknik sosial	- Bentuk organisasi sistem komando - Metode analisis keputusan "bebas nilai" dan positivistic - Pengetahuan dikembangkan berdasarkan perspektif fungsional - Sistem produksi didefinisikan secara fungsional - Perangkat analisis tidak mempertimbangkan manusia dan lingkungan	- Bentuk organisasi swadaya - Peran individu dalam proses pembuatan keputusan, dengan "nilai manusiawi" sebagai ukuran - Pengetahuan dikembangkan berdasarkan perspektif teritorial - Pilihan-pilihan produksi dan prestasi didasarkan pada kerangka ekologi, yaitu melibatkan manusia dan menempatkan manusia sebagai proses analisis
Proses pembuatan keputusan	- Sentralisasi - Didominasi para ahli - Tidak konsultatif - Kendali pejabat yang tidak menanggung akibat keputusan	- Memberi rakyat kapasitas hak memasukkan nilai-nilai kebutuhan lokal dalam proses pembuatan keputusan - Kendali pada rakyat yang hidupnya dipengaruhi oleh keputusan itu
Teknologi organisasi	- Diarahkan pada kebutuhan sistem komando	- Sistem belajar swa-organisasi - Struktur formal itu dilengkapi

Dimensi-dimensi	Pembangunan berpusat pada produksi	Pembangunan berpusat pada manusia
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menekankan aturan main hukum</li> <li>- Wewenang pengawasan pada struktur formal</li> </ul>	<p>dengan berbagai teknologi organisasi yang kurang formal dan cepat adaptasi diri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan informasi yang dibangun di sekeliling arus manusia, nilai dan informasi sebagai tanggapan terhadap kepentingan dan kebutuhan khusus sesuai dengan keadaan</li> <li>- Kelompok-kelompok sosial yang lebih permanen, seperti keluarga, RT, organisasi sukarela, dsb.</li> </ul>

Sumber: Korten dalam Hikmat (2014: 5)

#### 2.4. Prioritas Pendekatan Pembangunan Manusia

Sebagaimana telah disebut di awal, konsep pembangunan manusia diinisiasi dalam the Human Development Report tahun 1990. Manusia menjadi pusat dari paradigma ini, dan pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan-pilihan manusia. Pilihan-pilihan yang penting mencakup usia harapan hidup dan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak (UNDP 1990, UI Haq 1995a). Pokok perhatian utama paradigma pembangunan ini adalah membangun kapabilitas manusia, yang mencakup serangkaian “aktivitas kekarayaan” (*doings*) dan “kondisi kehidupan” (*beings*) yang membantu manusia mendapatkan nilai kebermaknaan dalam hidupnya (Sen 1989, 1997, 1999). Dalam Human Development Report pertama secara spesifik mendefinisikan pembangunan manusia sebagai:

*“suatu proses perluasan pilihan-pilihan manusia. Pada prinsipnya, pilihan-pilihan itu bisa jadi tidak terbatas dan berubah-ubah dari waktu ke waktu. Namun pada seluruh tingkatan pembangunan, setidaknya ada tiga pilihan esensial, yaitu pilihan manusia untuk harapan hidup yang panjang dan kondisi hidup yang sehat, pilihan manusia untuk mendapatkan pengetahuan guna mengakses berbagai sumberdaya yang dibutuhkan*

*guna mendapatkan standar hidup yang layak dan bermartabat. Jika ketiga pilihan itu tidak tersedia, maka banyak kesempatan lainnya niscaya tidak terakses” (UNDP 1990, p. 10).*

Peran pendapatan dalam konsep pembangunan manusia ini semata-mata bersifat instrumental, membentuk suatu proksi bagi sejumlah kapabilitas yang tidak sepenuhnya tercermin dalam tolok ukur kuantitatif sebagaimana yang diacu dalam the Human Development Index (HDI) (Anand dan Sen 2000). Kapabilitas-kapabilitas bisa menjadi fundamental bebas dari kelaparan atau kebutuhan atas papan tempat tinggal. Lebih jauh, pendapatan mencerminkan sumberdaya-sumberdaya dasar manusia yang bisa diakses untuk mencapai berbagai kemanfaatan lainnya yang mereka bisa meraka nilai. Salah satu perhatian utama dari Human Development Reports adalah menyebarluaskan tujuan baru dari pembangunan manusia ini dan mendorong dunia untuk meningkatkan kapabilitas manusia untuk mendapatkan hidup dan penghidupan yang lebih baik melalui kebebasan pilihan yang lebih banyak (Ul Haq 1995a, Anand dan Sen 2000).

Meskipun paradigma pembangunan manusia mencapai popularitas melalui Human Development Reports, namun sesungguhnya jangkar gagasannya dikembangkan oleh Amartya Sen dan koleganya yaitu direktur pertama kantor the Human Development Report, Mahbub Ul Haq. Keduanya berkontribusi dalam memantapkan gagasan paradigma pembangunan manusia itu. Dengan penuh kehati-hatian, Sen mengembangkan landasan teoretis bagi pendekatan kapabilitas ini. Sedangkan Ul Haq secara antusias mengujicobakan secara praktis paradigma tersebut dan menjadikannya terakses bagi para pembuat kebijakan pada skala global.

Bagi Sen, pendekatan kapabilitas berlawanan dengan basis-sumberdaya yang sering dijadikan sebagai basis pendekatan kaum utilitarian, yang akan mempertanyakan sumberdaya-sumberdaya yang ada. Pesolannya adalah bagaimana dan apakah orang bisa mengubah sumberdaya ini menjadi fungsi-

fungsi yang bernilai bagi mereka (Sen 1989, 1997, 2008, 2009; lihat juga Nussbaum 2000). Bila dibandingkan dengan pendekatan utilitas, pendekatan kapabilitas ini tidak banyak berfokus pada aspek-aspek material (Ranis et al. 2006). Perbedaan antara pendekatan kapabilitas dan utilitarian menjadi semakin gamblang ketika melibatkan pertimbangan peran barang-barang kebutuhan pokok dalam pembangunan. Meskipun Sen seringkali mengatakan berhutang gagasan pada John Rawls, karyanya jauh lebih tajam dari filsafat Rawl tentang barang-barang kebutuhan dasar untuk perbandingan antar orang perorangan (Sen 1980, 1992, 2004; lihat juga Robeyns 2005 dan Nussbaum 2015). Sen menunjukkan bahwa barang-barang kebutuhan pokok merupakan alat dan bukan tujuan pembangunan dan bahwa mereka tidak dapat dijadikan acuan umat manusia yang beragam. Orang yang berbeda mungkin membutuhkan beragam jenis dan jumlah barang-barang kebutuhan pokok yang berbeda untuk mencapai level sejahtera yang sama. Lebih jauh, utilitas tidak menghitung bahwa orang boleh jadi melakukan penyesuaian pada kondisi status quo, acuan adaptif yang berkembang, yang akan menjadi pilihan pertama ketika mereka berada dalam kondisi-kondisi pilihannya bebas sepenuhnya (Sen 1990, 1999; Nussbaum 2003).

Seseorang bisa mengakui pondasi kerangka teori Human Development Report dalam buku Sen, *The Idea of Justice*, yang dipublikasikan beberapa tahun pasCa kemunculan laporan pertama tahun 1990 (Sen 2008, 2009). Dalam buku ini, Sen menspesifikasi empat ciri dari apa yang diargumenkan sebagai konsepsi keadilan yang melatari karya Ul Haq:

1. Fokus pada hidup dan kebebasan. Fokus ini memperhitungkan variasi yang luas bahwa manusia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mengubah kebebasan-kebebasan menjadi kebermanfaatan yang mereka nilai.

2. Keterkaitan tanggungjawab untuk kekuasaan yang efektif. Konsepsi ini berbasis pada tanggung jawab untuk memproteksi mereka yang kurang berdaya secara tidak proporsional ketimbang lainnya.
3. Suatu pendekatan komparatif berlawanan dengan pendekatan transendental.
4. Ruang lingkup global yang tidak tertutup.

Untuk memahami masing-masing pilar, penting kiranya untuk mencermati secara lebih rinci tentang pendekatan kapabilitas. Berkaitan dengan poin pertama, pertanyaan pokok soal pendekatan kapabilitas adalah bahwa seseorang benar-benar mampu untuk bertindak dan menjadi (*do and be*), apa kebermanfaatannya yang dikembangkan oleh dia (laki-laki atau perempuan) bisa memunculkan sejumlah kapabilitas. Berdasarkan karya Aristotle, kebermanfaatannya “menjadi dan bertindak” (*beings and doings*), seperti merawat atau mampu bekerja adalah faktor pembentuk seseorang. Menakar pembangunan berbasis pada kemanfaatan yang dicapai seseorang bisa menyesatkan, demikian menurut Sen. Karena penilaian semacam itu tidak mempertimbangkan kebebasan seseorang untuk memutuskan kemanfaatan pada nilai. Demikian pula itu tidak mempertimbangkan kemanfaatan sesungguhnya diterjemahkan menjadi kesejahteraan (*well-being*). Sebagaimana dijelaskan di atas, aspek ini membedakan pendekatan kapabilitas Sen lebih signifikan dari pendekatan utilitarian (Sen 1992, lihat juga Alkire 2005).

Poin kedua, upaya mengkaitkan tanggungjawab dengan kekuasaan efektif, dapat diinterpretasikan sebagai tanggungjawab seseorang dalam kekuasaan untuk memproteksi warga-warga mereka, dan dengan demikian peran para pembuat kebijakan dalam mengelaborasi kebijakan-kebijakan mewujudkan pembangunan manusia. Poin ketiga menekankan suatu pendekatan komparatif yang secara empiris membandingkan negara-negara yang berbeda di seluruh dunia, menunjukkan tataran pembangunan mana negara-negara itu saat ini berada. Terakhir, poin keempat, menegaskan bahwa pendekatan kapabilitas

bersifat universal karena peningkatan kapabilitas itu penting bagi semua orang dimanapun di seluruh dunia dan kapanpun. Hal itu merujuk semata pada kapabilitas. Dan itu pun tidak menspesifikasi kemanfaatan terkait, karena itu akan menuntut harapan semua orang untuk merujuk pada kemanfaatan-kemanfaatan tertentu atas yang lainnya, sementara kapabilitas hanya mengekspresikan kemungkinan pencapaian atas berbagai kemanfaatan seseorang yang beralasan untuk menilai (Nussbaum 2011). Sehingga The Human Development Reports harus membiarkan terbuka sebagai seperangkat kemanfaatan yang bersifat spesifik untuk mengembangkannya, menerimanya sebagai preferensi personal yang sangat tergantung pada masing-masing orang, sebagai keadaan-keadaan yang bersifat lokal dan tataran pembangunan masing-masing negara.

Menurut Alkire (2010), yang melakukan kajian konsep pembangunan manusia dalam the Global Human Development Reports tahun 2010, konsep pembangunan manusia “sederhana namun kaya, penuh namun senantiasa terbuka, fleksibel namun bertanggungjawab, normatif namun visioner, inspiratif namun praktis” (hlm 1). Dari waktu ke waktu, paradigma pembangunan manusia menunjukkan adanya keberlangsungan dan perubahan di dalam laporan dan literatur akademik. Dalam laporan terdahulu, tetap sangat stabil, menyesuaikan sekalipun perubahan terus terjadi dalam politik dan pembangunan internasional sejak dirilis tahun 1990. Paradigma itu terbuka terhadap perubahan kebijakan baru dan tantangan-tantangan yang muncul dari dunia yang berubah, terutama dalam era globalisasi dan keberkelanjutan. Hal itu tercermin dalam isu-isu beragam yang dijadikan tema-tema sentral dari setiap laporan, dari keamanan manusia hingga gender, teknologi-teknologi baru hingga air maupun “kebangkitan Negara-Negara Selatan” (lihat lampiran II).

Dalam literatur akademik, paradigma pembangunan manusia dan landasan teoretiknya berkembang seiring waktu. Literatur tentang kapabilitas berkembang secara signifikan oleh filsuf Martha Nussbaum. Pendekatan Nussbaum

membedakan diri dari Sen yang menetapkan teori parsial tentang keadilan berbasis filsafat moral, hukum, dan politik constitutes. Secara khusus ia berargumen bahwa pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan dan menjamin prinsip-prinsip politik tertentu bagi para warga negara mereka (Nussbaum 2000, 2011). Menurut Nussbaum, aturan-aturan eksternal sangat penting bagi warga negara untuk melatih kapabilitas-kapabilitas internal mereka tanpa adanya hambatan-hambatan eksternal. Warga negara hidup dibawah rejim represif, misalnya, memiliki kapabilitas internal namun tidak dengan kapabilitas eksternal untuk mengekspresikan diri mereka sendiri secara bebas tanpa ada rasa takut terhadap hukuman. Berbeda dengan pendekatan Sen yang lebih luas dan tidak mengklaim sebagai teori keadilan, tidak pula berfokus pada klaim-klaim tentang pemerintah. Lebih dari itu, ia berfokus pada partisipasi yang tinggi dan membiarkan itu terjadi pada rakyat untuk menentukan apakah pemerintah, pasar, atau institusi-institusi lain harus memfasilitasi pencapaian kapabilitas-kapabilitas yang terseleksi (Sen 2009).

Nussbaum juga membedakan dirinya dengan Sen dalam menawarkan suatu kerangka operasional bagi pendekatan kapabilitas, berisikan suatu daftar kapabilitas yang ia identifikasikan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk menghidupi kehidupan yang dianggap bernilai bagi seseorang (Nussbaum 2003, 2015). Berbasis pada asumsinya tentang keberagaman, Sen selalu enggan untuk memasukkan semacam kerangka operasional dalam pendekatan kapabilitas, kendati pun ia tidak secara langsung dikritik daftar landasarn substantif Nussbaum. Lebih jauh, Nussbaum berargumen bahwa normativitas akan lambat laun muncul, termasuk dalam Human Development Reports dan tolok ukur pembangunan manusia, yang secara implisi merekomendasikan sejumlah tujuan-tujuan pembangunan untuk seluruh bangsa, seperti kesehatan dan pendidikan (Nussbaum 2015).

Hal penting lainnya dari perbedaan antara Sen dan Nussbaum adalah subyek dari kemerdekaan dan kebebasan. Keduanya sepakat tentang apa itu

kemerdekaan, yang mengimplikasikan penghormatan terhadap keberagaman sepanjang semua orang harus bebas untuk hidup menurut gagasan-gagasan dan pilihan-pilihan mereka sendiri. Kendati demikian, Nussbaum menegaskan: “terkecuali ketika hak-hak setara orang lain atau keberadaan pertimbangan publik yang sangat urgen, seperti perdamaian dan keamanan, tengah menjadi pertarungan” (ibid hlm. 8). Ekonom, Paul Streeten, yang terlibat dalam sejumlah Human Development Reports, juga mencermati tujuan kebebasan pilihan yang tak terbatas, menunjuk pada ketidakmungkinan atau sifat yang tidak realistis dari suatu masyarakat yang memiliki kebebasan pilihan yang tak terbatas.

*“Bahkan, pilihan-pilihan tanpa batas dan hambatan bisa menjadi tidak ada artinya dan tidak berdasar. Pilihan-pilihan harus dikombinasikan dengan kepatuhan, hak-hak dengan tugas-tugas, pilihan dengan obligasi, kebebasan dengan pengikat. Adalah benar bahwa keterikatan-keterikatan tanpa disertai pilihan-pilihan itu menindas; namun pilihan-pilihan tanpa ikatan-ikatan itu anarkis. Dengan demikian, pilihan-pilihan tanpa keterikatan-keterikatan bisa menjadi se-menindas keterikatan-keterikatan tanpa pilihan-pilihan” (Streeten 2003, hlm. 101).*

Para penulis ini menentukan sejumlah batas-batas bagi kebebasan pilihan. Persoalan pembatasan kebebasan-kebebasan menjadi semakin relevan dalam kasus kesaling-terkaitan masyarakat yang dihadapkan pada persoalan perubahan iklim, terorisme, kritis keuangan, dan wabah penyakit. Berbagai persoalan itu membuat semakin pentingnya membatasi sejumlah kebebasan-kebebasan kita demi perdamaian, keamanan, kesamaan hak-hak bagi semua.

## **2.5. Formulasi Penguatan People-Center Development**

Tulisan berikut adalah ringkasan dari gagasan Forum Internasional untuk Pembangunan yang mendesakkan pentingnya people-centered development. Dalam tulisan pengantar buku, *“Introduction: Toward a People-Centered Approach to Development”*, Deepak Nayyar & Ha-Joon Chang memerinci

sejumlah poin besar berikut untuk memperkuat implementasi program people-centered development (Hershberg & Thornton; 2005: 1-9):

Terdapat sejumlah pesan penting yang muncul dari diskusi pada pertemuan tahunan dari International Forum for Development.

1. Pekerjaan harus ditempatkan sebagai persoalan utama. Itu harus dilihat sebagai suatu tujuan yang memiliki suatu kepentingan strategis dalam dirinya sendiri, ketimbang sebagai capaian sampingan dari pertumbuhan ekonomi atau kebijakan ekonomi.
2. Satu-satunya solusi berkesinambungan terhadap pengurangan kemiskinan adalah penciptaan pekerjaan, demikian pula hanya itulah pondasi riil bagi kerja bermartabat.
3. Dimensi-dimensi gender dari pekerjaan sangatlah penting karena pekerjaan perempuan merupakan bagian integral dari suatu proses pembangunan yang egalitarian.
4. Terdapat suatu kebutuhan untuk mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial. Untuk mencapai itu, sangat penting menciptakan mekanisme institusional yang memediasi antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Jejaring pengaman tidaklah memadai.
5. Bagi para pendatang baru dalam pembangunan, penting untuk membangun kapabilitas-kapabilitas pada tataran mikro dan institusi-institusi pada takaran meso.
6. Penting untuk meredefinisikan peran ekonomi negara di era pasar (bebas) dan globalisasi ini. Bahkan, peran negara sangat krusial ketika pembangunan hendak menciptakan perbaikan kondisi-kondisi hidup dan penghidupan para warga negara.
7. Aturan-aturan main dalam ekonomi dunia, terutama dalam arena perdagangan tapi juga arena-arena lainnya, tidak adil. Kita membutuhkan aturan-aturan main yang adil. Kita benar-benar

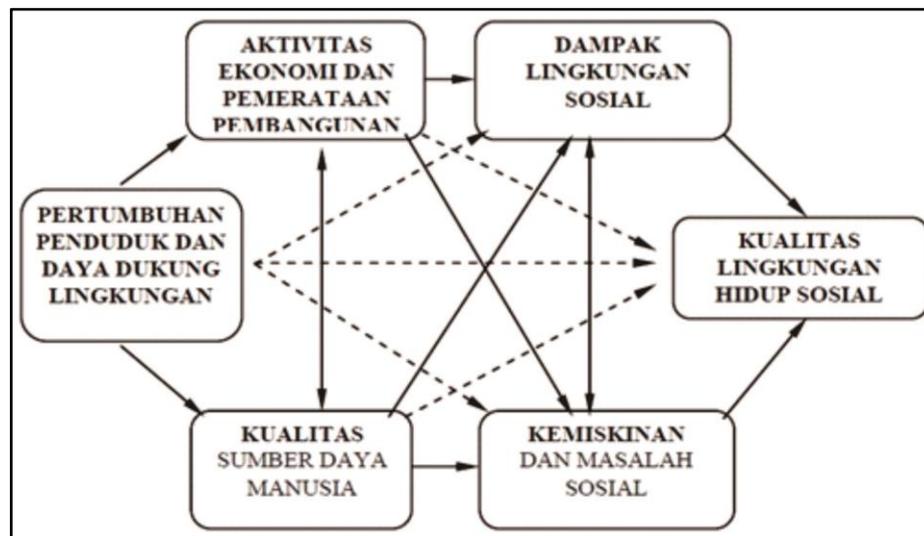
membutuhkan tindakan afirmatif untuk negara-negara berkembang secara umum dan negara-negara terbelakang khususnya.

8. Negara-negara pendatang baru dalam industrialisasi membutuhkan ruang kebijakan untuk menggapai tujuan pembangunan nasionalnya. Negara-negara dan warga negara memiliki sama-sama memiliki hak untuk salah sehingga mereka dapat belajar dari kesalahan itu.

## **2.6. Urgensi Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup Sosial**

Berikut ini paparan akan menegaskan tentang penguatan dimensi pembangunan sosial. Tulisan ini merujuk pada tulisan Harry Hikmat (2014: 14-16) bertajuk: *“Analisis Dampak Lingkungan Sosial: Strategi Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat (People Centred Development)”*. Secara spesifik, paparan akan mengambil gagasan tentang urgensi penguatan kualitas lingkungan hidup sosial.

Dalam paparannya Hikmat (2014:14) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan merupakan masalah pokok yang dihadapi setiap usaha pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu wilayah pembangunan selayaknya diikuti dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup sosial dan berkurangnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, serta dapat teratasinya depresiasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari proses pembangunan. Karena itu keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu diketahui dan diperhitungkan secara empiris dan objektif. Diskripsi tentang keseimbangan pembangunan bisa disimak dalam ilustrasi Gambar berikut.



Sumber: Hikmat (2014:15)

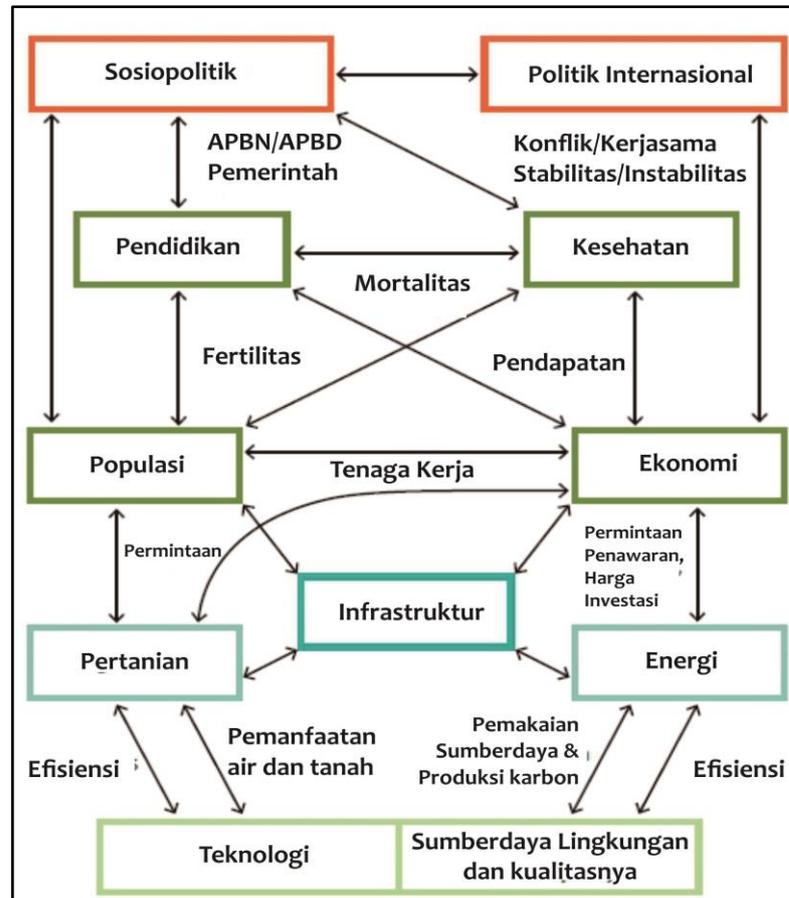
Perlunya menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kualitas lingkungan hidup sosial pada nasional maupun tingkat regional (analisis spasial), didasarkan atas pertanyaan yang mendasar: “Apakah pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, cenderung memperbaiki, memperburuk atau tidak memberi pengaruh yang berarti atas kualitas sumber daya manusia, masalah kemiskinan, dampak lingkungan sosial dan kualitas hidup sosial?”.

Dengan semakin berkembangnya indikator-indikator pembangunan sosial, yang lebih menekankan kepada aspek kualitas hidup manusia, maka banyak kritik ditujukan kepada indikator-indikator ekonomi tersebut di atas. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya penelitian yang menunjukkan adanya inkonsistensi antara hasil pembangunan yang dicapai menurut indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita; dengan penurunan jumlah penduduk miskin atau peningkatan kualitas hidup penduduk.

Rujukan lain yang juga penting untuk disajikan di sini adalah paparan dari Barry Hughes (2013) yang bertajuk *“Development-Oriented Policies and Alternative Human Development Paths: Aggressive but Reasonable Interventions”*. Hughes secara rinci mengilustrasikan kesalingterkaitan berbagai

aspek yang berpengaruh pada pembangunan manusia. Untuk memperkuat capaian pembangunan manusia itu, Hughes menjabarkan pentingnya mentautkan antar intervensi-intervensi kebijakan pembangunan yang memposisikan pembangunan manusia sebagai fokus utama atau pusatnya.

**Gambar 2.1. Kerangka Besar Penguatan Pembangunan Manusia**



Sumber: Barry Hughes (2013: 4)

## 2.7. Catatan Penutup

Bertolak dari seluruh paparan di atas, berikut ini adalah catatan ringkas perihal paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia. Pemahaman sederhana dipinjam dari paparan Bappenas dan UNDP (2012) yang terartikulasikan dalam buku Panduan Penyusunan Laporan Pembangunan Manusia Tingkat Provinsi (LPMP).

Pembangunan manusia (*human development*) dirumuskan sebagai upaya untuk menciptakan/memberikan perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people's choice*). Konsepsi berpikir ini terbentuk dari pemahaman bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan atau sistem sosial ke arah yang lebih baik, yang

dimaknai dengan adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan (growth) dan diversifikasi (diversification). Perluasan pilihan penduduk yang dimaksud meliputi pilihan untuk berumur panjang dan hidup sehat, berilmu pengetahuan, mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak, memiliki kebebasan untuk berpolitik, serta jaminan perlindungan atas hak asasi manusia dan harga diri. Jadi tujuan utama pembangunan manusia adalah memperbanyak pilihan kepada masyarakat untuk bebas memilih sesuatu hal yang diinginkan dan bagaimana cara untuk menjalani hidup (Bappenas & UNDP, 2012:1).

Sedangkan, paradigma pembangunan manusia merupakan proses atau kegiatan pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus utama, dan bukan hanya sebagai sasaran akhir, dari seluruh kegiatan tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat), serta meningkatkan pendidikan (ketrampilan dan baca tulis) untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi. Paradigma pembangunan manusia terdiri atas empat komponen utama yaitu (Bappenas & UNDP, 2012:1):

1. Produktivitas, masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi secara penuh dalam memperoleh penghasilan atau pekerjaan yang berupah.
2. Ekuitas, masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil.
3. Kesenambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang.
4. Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi hidup masyarakat itu sendiri.

## BAB III

# EKSPLORASI PROGRAM PENDUKUNG VARIABEL-VARIABEL INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DIY

### 3.1. Pengantar

Bab III ini akan mendiskripsikan kondisi terkini perkembangan Indeks Pembangunan Manusia baik di tilik dari tataran nasional maupun provinsi. Sebagaimana telah diulas pada terdahulu, konsep pembangunan manusia jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan (*economic growth*), kebutuhan dasar (*basic needs*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), atau pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*) (Wahyu, 2017).

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*) (Depkes, 2018).

Secara sistematis, bab ini akan tersaji ke dalam sub bab berikut: **pertama**, gambaran pencapaian Indeks Pembangunan Manusia pada tataran nasional hingga tahun 2017. **Kedua**, gambaran pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui data statistik makro, aspek-aspek penting yang secara spesifik akan mendapatkan penekanan dalam paparan adalah variabel-variabel penting yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia yaitu: 1). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS); 2). Rata-Rata Lama Sekolah (RLS); dan 3) Angka Harapan Hidup (AHH).

**Ketiga**, setelah data statistik makro tersebut diuraikan, paparan akan berlanjut dengan eksplorasi program pendukung atas variabel-variabel penentu IPM yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun intervensi program pemerintah. Sehingga intervensi program tersebut bisa diturunkan hingga ke level program pendukung yang lebih bersifat operasional. Harapannya formulasi program tersebut bisa diimplementasikan secara efektif hingga akhirnya mampu merealisasikan pembangunan manusia DIY yang berkualitas.

Dalam kerangka besar penguatan pembangunan berpusat pada manusia (*people-centered development*), maka realisasi visi pembangunan DIY 2017-2022 yang berbunyi **“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”** dan formulasi Misi 1 yang berbunyi **“Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-*bhinneka-an* serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta”** urgen untuk diformulasikan secara lebih operasional.

Sejumlah intervensi kebijakan yang perlu dipikirkan secara sungguh-sungguh itu di antaranya adalah: **1) Pengurangan kemiskinan: keluasan pendekatan pembangunan manusia; 2). Perbaikan kualitas kesehatan: fokus pada pemicu terdekat; 3) Peningkatan pendidikan berkualitas: intervensi kelompok sasaran; 4). Pembangunan infrastruktur: perbaikan akses; dan 5). Intervensi kebijakan: Kebijakan Afirmatif**

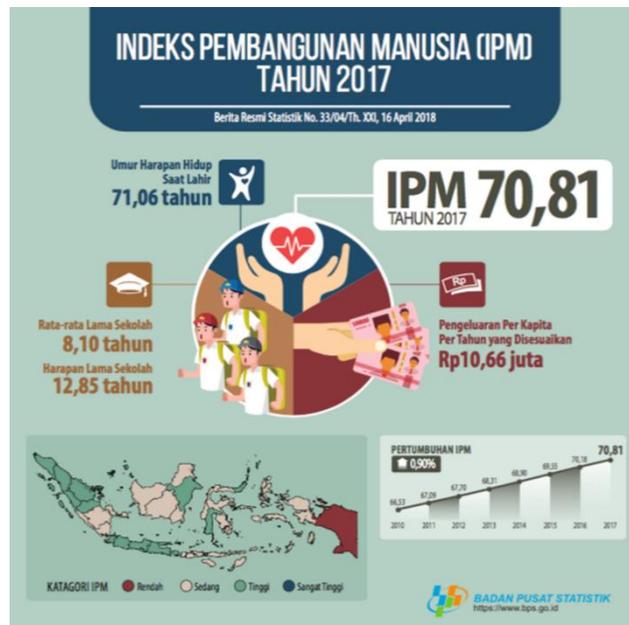
### 3.2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia hingga 2017

Seperti telah dipaparkan pada bab terdahulu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Secara prinsipil, IPM adalah tolok ukur yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Sebagai tolok ukur, IPM ini dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu: 1). Umur panjang dan hidup sehat; 2). Pengetahuan; dan 3). Standar hidup layak. Ketiga dimensi dasar dalam IPM tersebut bermanfaat setidaknya untuk tiga hal berikut: **pertama**, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). **Kedua**, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. **Ketiga**, untuk konteks Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) ([bps.go.id/subject/26/](https://bps.go.id/subject/26/)).

Menurut data yang dikeluarkan BPS (16/04/2018), Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2017, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 70,81. Angka ini meningkat sebesar 0,63 poin atau tumbuh sebesar 0,90 persen dibandingkan tahun 2016. Peningkatan IPM Indonesia tersebut didukung oleh membaiknya tiga indikator komponen IPM mulai dari indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran.

**Gambar 3.1. Capaian IPM Indonesia tahun 2017**



Sumber: BPS, 2018

Peningkatan IPM itu menandakan harapan untuk hidup, baik dari dimensi kesehatan, harapan hidup, sekolah, maupun hidup layak semakin panjang. Untuk mengetahui perihal perkembangan/peningkatan dimensi-dimensi IPM Indonesia pada tahun 2010 hingga 2017, tabel berikut bisa memberikan ilustrasi secara rinci (Aditya & Purnomo dalam [www.cnbcindonesia.com/news/20180416150138-4-11165/](http://www.cnbcindonesia.com/news/20180416150138-4-11165/))

**Tabel 3.1. Perkembangan IPM Indonesia menurut Komponen, 2010-2017**

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	69,81	70,01	70,20	70,40	70,59	70,78	70,90	71,06
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,29	11,44	11,68	12,10	12,39	12,55	12,72	12,85
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,46	7,52	7,59	7,61	7,73	7,84	7,95	8,10
Pengeluaran per Kapita	Rp 000	9 437	9 647	9 815	9 858	9 903	10 150	10 420	10 664
<b>IPM</b>		<b>66,53</b>	<b>67,09</b>	<b>67,70</b>	<b>68,31</b>	<b>68,90</b>	<b>69,55</b>	<b>70,18</b>	<b>70,81</b>
<b>Pertumbuhan IPM</b>	%	–	<b>0,84</b>	<b>0,90</b>	<b>0,91</b>	<b>0,87</b>	<b>0,93</b>	<b>0,91</b>	<b>0,90</b>

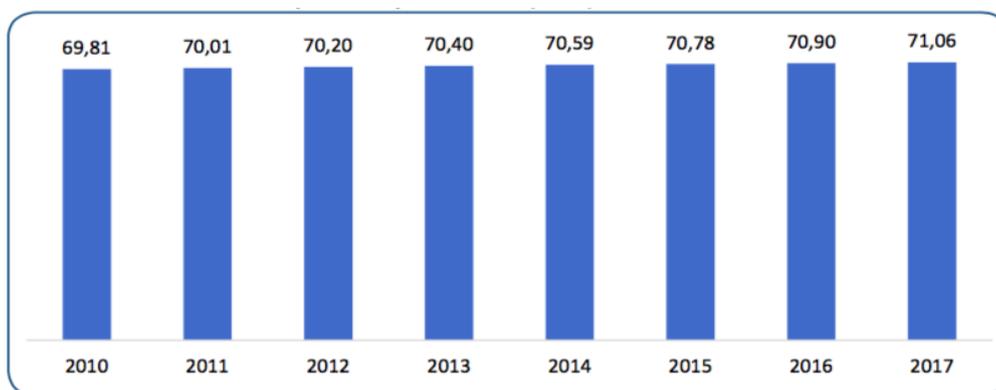
Sumber: (Aditya & Purnomo, 2018)

Tergambarkan pada tabel di atas, IPM Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, utamanya dalam kurun waktu 2010 hingga 2017. Tertera tahun 2010, tingkat IPM Indonesia masih berada di level 66,53 dan secara bertahap meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 70,81 pada 2017.

Bila masing-masing komponen—yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak—ditilik secara lebih rinci, terilustrasikan pada tabel tersebut bahwa: **pertama**, dimensi umur panjang dan hidup sehat tahun 2017 mencapai 71,06. Itu berarti, bayi yang lahir pada tahun 2017 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,06 tahun, lebih lama 0,16 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya. Pertumbuhannya dari 2010 sampai 2017 tercatat sebesar 0,25 persen per tahun.

Tabel berikut menunjukkan peningkatan Angka Harapan Hidup saat Lahir penduduk Indonesia dari tahun 2010-2017.

**Gambar 3.2. Angka Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Indonesia, 2010-2017**



Sumber: BPS, 2018

**Kedua**, dimensi pengetahuan—yang terpilah ke dalam indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas—antara tahun 2010-2017, harapan lama sekolah rata-rata tumbuh 1,87 persen per tahun. Terindikasikan dalam tabel bahwa anak-anak yang pada tahun 2017 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,85

tahun (Diploma I), lebih lama 0,13 tahun dibandingkan dengan yang berumur sama pada tahun 2016. Sementara itu, antara tahun 2010-2017, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas tumbuh 1,18 persen per tahun. Dalam konteks itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,10 tahun (kelas IX), lebih lama 0,15 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

**Ketiga**, berkaitan dengan dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan dengan besarnya pengeluaran per kapita, pada tahun 2010 pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia sebesar Rp. 9, 437 juta per tahun dan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 10,66 juta per tahun pada tahun 2017. Besaran pengeluaran per kapita pada tahun 2017 itu meningkat 244 ribu rupiah dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya 2016 ([bps.go.id/pressrelease/2018/04/16/1535](https://bps.go.id/pressrelease/2018/04/16/1535)). Lebih jauh, bila dirata-rata, maka terjadi peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat dalam tujuh tahun terakhir sebesar 1,76 persen per tahun (Putera dalam [ekonomi.kompas.com/read/2018/04/16](https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/16)).

Bila IPM Indonesia tersebut diperinci ke dalam pencapaian IPM di tingkat Provinsi, maka pencapaian masing-masing provinsi tersebut cukup bervariasi. Tabel berikut memaparkan capaian IPM provinsi di seluruh Indonesia.

**Tabel 3.2. Pencapaian IPM tingkat Provinsi 2017**

Provinsi	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp000)		IPM		
									Capaian		Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	69,51	69,52	13,89	14,13	8,86	8,98	8 768	8 957	70,00	70,60	0,86
Sumatera Utara	68,33	68,37	13,00	13,10	9,12	9,25	9 744	10 036	70,00	70,57	0,81
Sumatera Barat	68,73	68,78	13,79	13,94	8,59	8,72	10 126	10 306	70,73	71,24	0,72
Riau	70,97	70,99	12,86	13,03	8,59	8,76	10 465	10 677	71,20	71,79	0,83
Jambi	70,71	70,76	12,72	12,87	8,07	8,15	9 795	9 880	69,62	69,99	0,53
Sumatera Selatan	69,16	69,18	12,23	12,35	7,83	7,99	9 935	10 220	68,24	68,86	0,91
Bengkulu	68,56	68,59	13,38	13,57	8,37	8,47	9 492	9 778	69,33	69,95	0,89
Lampung	69,94	69,95	12,35	12,46	7,63	7,79	9 156	9 413	67,65	68,25	0,89
Kep. Bangka Belitung	69,92	69,95	11,71	11,83	7,62	7,78	11 960	12 066	69,55	69,99	0,63
Kepulauan Riau	69,45	69,48	12,66	12,81	9,67	9,79	13 359	13 566	73,99	74,45	0,62
DKI Jakarta	72,49	72,55	12,73	12,86	10,88	11,02	17 468	17 707	79,60	80,06	0,58
Jawa Barat	72,44	72,47	12,30	12,42	7,95	8,14	10 035	10 285	70,05	70,69	0,91
Jawa Tengah	74,02	74,08	12,45	12,57	7,15	7,27	10 153	10 377	69,98	70,52	0,77
DI Yogyakarta	74,71	74,74	15,23	15,42	9,12	9,19	13 229	13 521	78,38	78,89	0,65
Jawa Timur	70,74	70,80	12,98	13,09	7,23	7,34	10 715	10 973	69,74	70,27	0,76
Banten	69,46	69,49	12,70	12,78	8,37	8,53	11 469	11 659	70,96	71,42	0,65
Bali	71,41	71,46	13,04	13,21	8,36	8,55	13 279	13 573	73,65	74,30	0,88
Nusa Tenggara Barat	65,48	65,55	13,16	13,46	6,79	6,90	9 575	9 877	65,81	66,58	1,17
Nusa Tenggara Timur	66,04	66,07	12,97	13,07	7,02	7,15	7 122	7 350	63,13	63,73	0,95
Kalimantan Barat	69,90	69,92	12,37	12,50	6,98	7,05	8 348	8 472	65,88	66,26	0,58
Kalimantan Tengah	69,57	69,59	12,33	12,45	8,13	8,29	10 155	10 492	69,13	69,79	0,95
Kalimantan Selatan	67,92	68,02	12,29	12,46	7,89	7,99	11 307	11 600	69,05	69,65	0,87
Kalimantan Timur	73,68	73,70	13,35	13,49	9,24	9,36	11 355	11 612	74,59	75,12	0,71
Kalimantan Utara	72,43	72,47	12,59	12,79	8,49	8,62	8 434	8 643	69,20	69,84	0,92
Sulawesi Utara	71,02	71,04	12,55	12,66	8,96	9,14	10 148	10 422	71,05	71,66	0,86
Sulawesi Tengah	67,31	67,32	12,92	13,04	8,12	8,29	9 034	9 311	67,47	68,11	0,95
Sulawesi Selatan	69,82	69,84	13,16	13,28	7,75	7,95	10 281	10 489	69,76	70,34	0,83
Sulawesi Tenggara	70,46	70,47	13,24	13,36	8,32	8,46	8 871	9 094	69,31	69,86	0,79
Gorontalo	67,13	67,14	12,88	13,01	7,12	7,28	9 175	9 532	66,29	67,01	1,09
Sulawesi Barat	64,31	64,34	12,34	12,48	7,14	7,31	8 450	8 736	63,60	64,30	1,10
Maluku	65,35	65,40	13,73	13,91	9,27	9,38	8 215	8 433	67,60	68,19	0,87
Maluku Utara	67,51	67,54	13,45	13,56	8,52	8,61	7 545	7 792	66,63	67,20	0,86
Papua Barat	65,30	65,32	12,26	12,47	7,06	7,15	7 175	7 493	62,21	62,99	1,25
Papua	65,12	65,14	10,23	10,54	6,15	6,27	6 637	6 996	58,05	59,09	1,79
<b>INDONESIA</b>	<b>70,90</b>	<b>71,06</b>	<b>12,72</b>	<b>12,85</b>	<b>7,95</b>	<b>8,10</b>	<b>10 420</b>	<b>10 664</b>	<b>70,18</b>	<b>70,81</b>	<b>0,90</b>

Sumber: BPS, 2018

IPM pada level provinsi berkisar antara 59,09 (Papua) hingga 80,06 (DKI Jakarta). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Angka Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 64,34 tahun (Sulawesi Barat) hingga 74,74 tahun (DI Yogyakarta). Tertera dalam tabel, provinsi dengan IPM tertinggi pada 2017

adalah DKI Jakarta dengan indeks 80,06 sementara terendah adalah Papua dengan indeks 59,09 (<https://databoks.katadata.co.id>).

Tabel berikut menunjukkan enam provinsi peringkat teratas dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2016-2017.

**Tabel 3.3 Provinsi Peringkat IPM teratas 2017**

<b>INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
IPM DKI Jakarta	79,60	80,06
IPM Daerah Istimewa Yogyakarta	78,38	78,89
Kalimantan Timur	74,59	75,12
Kepulauan Riau	73,99	74,45
Bali	73,65	74,30
Riau	71,20	71,79
<b>IPM INDONESIA</b>	<b>70,18</b>	<b>70,81</b>

*Sumber: BPS, 2018*

### 3.3. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia DIY hingga 2017

Pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta) terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) D.I. Yogyakarta. Pada tahun 2017, IPM D.I. Yogyakarta telah mencapai 78,89, tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. IPM D.I. Yogyakarta juga lebih tinggi dibanding IPM Indonesia yang sebesar 70,81. Angka IPM tersebut meningkat sebesar 0,51 poin atau tumbuh sebesar 0,65 persen dibandingkan IPM tahun lalu yang sebesar 78,38 ([yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/](http://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/)).

Untuk mengetahui secara lebih rinci tentang pencapaian Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Indonesia, Tabel 3.4. berikut menyajikan data komparasinya.

**Tabel 3.4. Komparasi Indeks Pembangunan Manusia DIY 2017**

PROVINSI	UUH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (000)		IPM		
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	Capaian	Pertumb. (%)	2016-2017
DKI Jakarta	72,49	72,55	12,73	12,86	10,88	11,02	17,468	17,707	79,6	80,06	0,58
DI. Yogyakarta	74,71	74,74	15,23	15,42	9,12	9,19	13,229	13,521	78,38	78,89	0,68
INDONESIA	70,90	71,06	12,72	12,85	7,95	8,10	10,42	10,664	70,18	70,81	0,90

Sumber: BPS, 2018.

Bayi yang lahir di D.I. Yogyakarta pada tahun 2017 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,74 tahun, merupakan tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Anak-anak yang pada tahun 2017 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 15,42 tahun, ini juga tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia.

Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,19 tahun, lebih tinggi dibanding rata-rata lama sekolah di tingkat nasional yang sebesar 8,10 tahun. Pada tahun 2017, masyarakat D.I. Yogyakarta memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 13,52 juta rupiah per tahun, meningkat 292 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya (*yogyakarta.bps.go.id*).

**Tabel 3.5. Indeks Pembangunan Manusia DIY 2014-2017**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	TAHUN			
	2014	2015	2016	2017
<b>IPM Daerah Istimewa Yogyakarta</b>	<b>76,81</b>	<b>77,59</b>	<b>78,38</b>	<b>78,89</b>
IPM Kabupaten Bantul	77,11	77,99	78,42	78,67
IPM Kabupaten Sleman	80,73	81,20	82,15	82,85
IPM Kabupaten Gunung Kidul	67,03	67,41	67,82	68,73
IPM Kabupaten Kulon Progo	70,68	71,52	72,38	73,23
IPM Kota Yogyakarta	83,78	84,56	85,32	85,49

Sumber: BPS, 2018.

Lebih jauh, IPM pada level kabupaten/kota di DIY berkisar antara 68,73 (Gunungkidul) hingga 85,49 (Kota Yogyakarta). IPM Kota Yogyakarta merupakan tertinggi dari seluruh kabupaten/ kota di Indonesia. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Angka Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 73,56 tahun

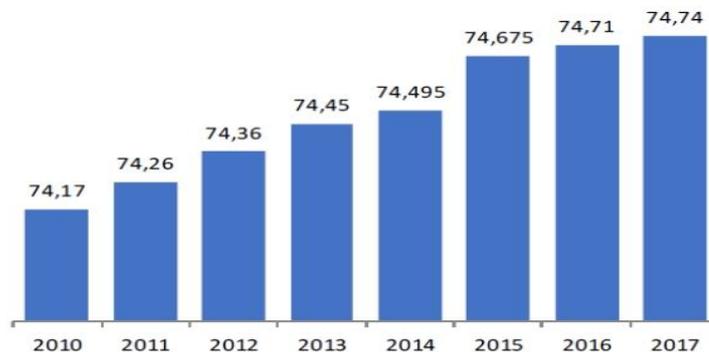
(Bantul) hingga 75,06 tahun (Kulon Progo). Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo merupakan tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sementara itu pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 12,94 tahun (Gunungkidul) hingga 16,82 tahun (Kota Yogyakarta). Harapan Lama Sekolah Kota Yogyakarta juga merupakan yang tertinggi di Indonesia. Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 6,99 tahun (Gunungkidul) hingga 11,43 tahun (Kota Yogyakarta). Pengeluaran per kapita di tingkat kabupaten/ kota di D.I. Yogyakarta berkisar antara 8,79 juta rupiah per tahun (Gunungkidul) hingga 18,0 juta rupiah per tahun (Kota Yogyakarta) (Depkes, 2018).

### 3.3.1. Angka Harapan Hidup (UHH) DIY

Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai acuan keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan ekonomi yang secara tidak langsung dapat meningkatkan Angka Harapan hidup (UHH). Menurut BPS, Angka Harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan hidup di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk (Depkes, 2018).

Angka Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2017, D.I. Yogyakarta telah meningkatkan Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,57 tahun atau tumbuh sebesar 0,11 persen per tahun. Pada tahun 2010, Angka Harapan Hidup saat lahir di D.I. Yogyakarta hanya sebesar 74,17 tahun, dan pada tahun 2017 telah mencapai 74,74 tahun.

**Gambar 3.3. Angka Angka Harapan Hidup DIY 2010-2017**



Sumber: BPS DIY, 2018

Merujuk data BPS (2018), Angka Harapan hidup (UHH) di DIY lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Harapan hidup nasional dimana Angka Harapan hidup nasional adalah 69.43 tahun pada tahun 2010 (Kementerian Kesehatan, 2010) dan menjadi 71,06 tahun pada tahun 2017 (BPS, 2018). Lebih jauh, Angka Harapan hidup di DIY juga tergolong tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Selain DIY, provinsi lain yang memiliki Angka Harapan hidup tinggi adalah DKI Jakarta dan Bali. Angka Harapan hidup di DKI Jakarta adalah 72,55 tahun. Sedangkan Angka Harapan hidup di Bali adalah 71,46 tahun (BPS, 2018).

**Tabel 3.6. Angka Usia Harapan Hidup DIY 2016-2017**

PROVINSI	Usia Harapan Hidup (Tahun)		IPM		
			Capaian		Pertumb. (%)
	2016	2017	2016	2017	2016-2017
<b>D.I. Yogyakarta</b>	74,71	74,74	78,38	78,89	0,68
<b>INDONESIA</b>	70,90	71,06	70,18	70,81	0,90

Sumber: BPS, 2018.

Menurut data Depkes (2018), Angka Harapan hidup di DIY mengalami peningkatan sejak 40 tahun terakhir. Peningkatan ini terjadi di semua jenis kelamin. Meskipun begitu, Angka Harapan hidup perempuan (76 tahun) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (72 tahun). Peningkatan Angka Harapan

hidup yang terjadi di DIY dipengaruhi oleh banyak hal. Kesehatan menjadi salah satu hal yang memiliki peran penting dalam peningkatan tersebut. Peran pengaruh kesehatan dalam meningkatkan usia harapan hidup ditunjukkan dari semakin menurunnya angka kematian, perbaikan pelayanan kesehatan, dan perbaikan gizi di masyarakat (Depkes, 2018)

### 3.3.2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) DIY

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) adalah tolok ukur yang digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Tabel berikut menunjukkan potret perkembangan angka harapan lama sekolah (HLS) DIY tahun 2016-2017. Pada tahun 2017, Harapan Lama Sekolah di D.I. Yogyakarta telah mencapai 15,42 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D3 atau D4 (Depkes, 2018).

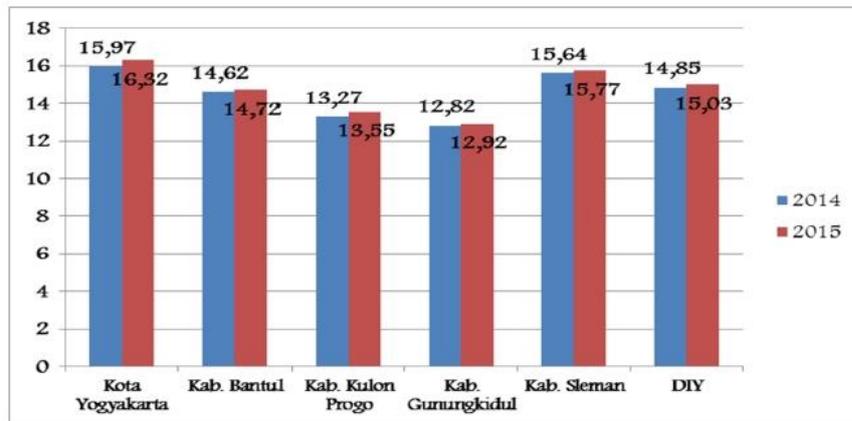
**Tabel 3.7. Angka Harapan Lama Sekolah DIY 2016-2017**

PROVINSI	HLS (Tahun)		IPM		
			Capaian		Pertumb. (%)
	2016	2017	2016	2017	2016-2017
D.I. Yogyakarta	15,23	15,42	78,38	78,89	0,68
INDONESIA	12,72	12,85	70,18	70,81	0,90

Sumber: BPS, 2018

Bila capaian 2016-2017 itu diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, 2014-2015, AHLS DIY tahun 2015 adalah sebesar 15,03 tahun, meningkat 0,18 poin dari 14,85 tahun. Untuk kabupaten/kota, capaian tertinggi oleh Kota Yogyakarta sebesar 15,97 tahun dan capaian terendah oleh Kabupaten Gunungkidul sebesar 12,82 tahun.

**Gambar 3.4. Harapan Lama Sekolah Kab/Kota di DIY 2014-2015**



Lebih jauh, dengan mengutip pada hasil kajian Depkes (2018) selama periode satu windu, 2010 hingga 2017, Harapan Lama Sekolah DIY secara rata-rata tumbuh sebesar 1,24 persen per tahun (Depkes, 2018).

### 3.3.3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) DIY

Menurut definisi, Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijazah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki (BPS, 2018).

Hasil kalkulasi berdasarkan tolok ukur tersebut, Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di D.I. Yogyakarta tumbuh 1,10 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2017. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia D.I. Yogyakarta yang lebih baik. Pada tahun 2017, secara rata-rata lama sekolah penduduk D.I. Yogyakarta usia 25 tahun ke atas mencapai 9,19 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga lulus SMP.

**Tabel. 3.9. Angka Rata-Rata Lama Sekolah DIY 2016-2017**

PROVINSI	RLS (Tahun)		IPM		
			Capaian		Pertumb. (%)
	2016	2017	2016	2017	2016-2017
D.I. Yogyakarta	9,12	9,19	78,38	78,89	0,68
INDONESIA	7,95	8,10	70,18	70,81	0,90

Sumber: BPS, 2018.

Selama 2010-2017 terjadi tren peningkatan capaian Rata-Rata Lama Sekolah DIY yaitu dari 8,51 di tahun 2010 berturut-turut meningkat menjadi 9 pada tahun 2015, dan kembali lagi meningkat menjadi 9,19 pada tahun 2017. Gambar berikut menunjukkan peningkatan capaian RLS DIY pada tahun 2010-2017.

**Gambar 3.5. Grafik Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah DIY 2010 - 2017**

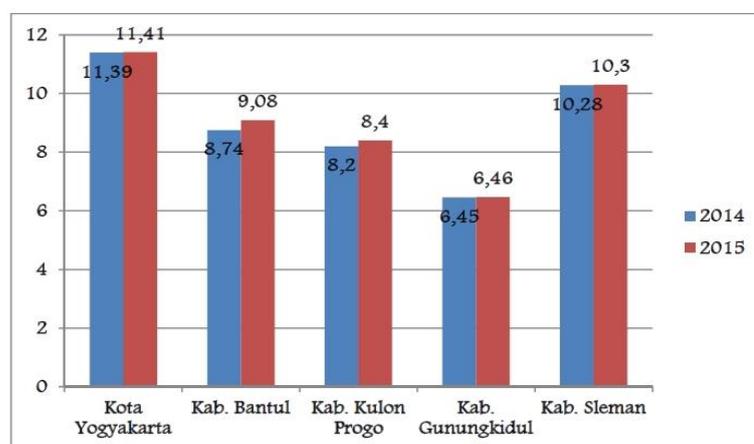


Sumber: Depkes, 2018

Sekadar melakukan komparasi dengan dua tahu periode sebelumnya, periode tahun 2014-2015, apabila dilihat data per kabupaten/kota, capaian rata-rata lama sekolah tahun 2015 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 11,41 tahun sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten

Gunungkidul sebesar 6,46 tahun, dengan kata lain terdapat ketimpangan yang mencolok antara Kota Yogyakarta yang rata-rata penduduknya menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dengan Kabupaten Gunungkidul yang rata-rata penduduknya menyelesaikan pendidikan hanya di tingkat dasar. Tabel berikut menunjukkan potret capaian RLS per kabupaten/kota DIY hingga tahun 2014 hingga 2015.

**Tabel. 3.10. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kab/Kota di DIY 2014-2015**



#### 3.3.4. Angka Pengeluaran Perkapita DIY

Berdasarkan definisi, pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Kegunaan dari data pengeluaran per kapita ini dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan ([sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=197](http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=197)).

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh

pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan (*Ibid*).

Seperti telah disebutkan pada sub bab di atas, pada tahun 2017, masyarakat DIY memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 13,52 juta rupiah per tahun, meningkat 292 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya, 2016, yang mencapai sebesar Rp. 13,229 juta per tahun. Tabel 3.11. berikut menunjukkan angka pengeluaran per kapita DIY tahun 2016-2017 (BPS, 2018).

**Tabel. 3.11. Angka Pengeluaran Perkapita DIY 2016-2017**

PROVINSI	UUH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (000)		IPM		
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	Capaian		Pertumb. (%) 2016-2017
									2016	2017	
DKI Jakarta	72,4 9	72,5 5	12,7 3	12,8 6	10,8 8	11,0 2	17,46 8	17,70 7	79,6	80,0 6	0,58
DI. Yogyakarta	74,7 1	74,7 4	15,2 3	15,4 2	9,12	9,19	13,22 9	13,52 1	78,3 8	78,8 9	0,68
INDONESIA	70,9 0	71,0 6	12,7 2	12,8 5	7,95	8,10	10,42	10,66 4	70,1 8	70,8 1	0,90

Sumber: BPS, 2018.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil kajian Depkes RI, pengeluaran per kapita di tingkat kabupaten/ kota di D.I. Yogyakarta berkisar antara 8,79 juta rupiah per tahun (Gunungkidul) hingga 18,0 juta rupiah per tahun (Kota Yogyakarta) (Depkes, 2018).

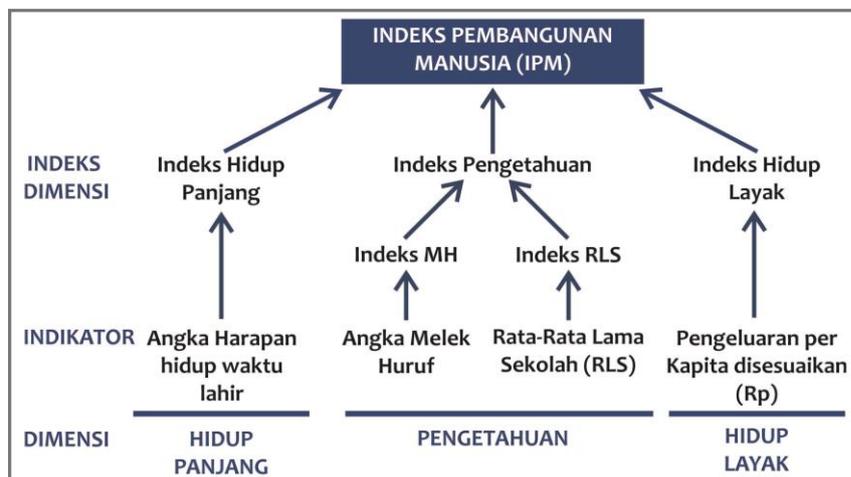
### 3.4. Eksplorasi Program Pendukung Variabel-Variabel IPM DIY

Sub bab berikut akan mengeksplorasi sejumlah program pendukung yang akan memperkuat variabel-variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sistematis sub bab ini akan mengekspos

beberapa program pendukung untuk penguatan kebijakan di tiga bidang pembangunan utama yang berkaitan erat dengan IPM di DIY.

Ketika DIY telah memposisikan nilai IPM sebagai prioritas utama pembangunannya, maka IPM tersebut ditempatkan sebagai suatu indikator dampak yang mesti diacu dari seluruh kinerja program-program yang telah diimplementasikan oleh segenap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait di DIY. Kinerja tersebut menyangkut hidup panjang dan sehat, pengetahuan dan hidup yang layak, seperti terilustrasikan dalam Gambar 3.6. berikut ini.

**Gambar 3.6. Dimensi, Indikator, dan Indeks Dimensi IPM**



Sumber: Dibagikan ulang dari Bappenas & UNDP (2012)

Sebagaimana terilustrasikan pada Gambar 3.6. di atas, Indeks Pembangunan Manusia pada dasarnya mencakup tiga komponen dasar manusia yang secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia, yaitu komponen (1) peluang hidup atau hidup panjang (*longevity*), (2) pengetahuan (*knowledge*), dan (3) standar hidup layak (*decent living*) (Bappenas & UNDP, 2012).

Berpijak pada tiga komponen tersebut, paparan berikut akan menjelaskan tentang sejumlah aspek/dimensi penting yang menjadi bahan pertimbangan Pemerintah DIY dalam merumuskan program-program yang pendukung bagi

pencapaian Indeks Pembangunan Manusia yang semakin tinggi dan berkualitas di masa mendatang.

Secara spesifik, Pemerintah DIY berupaya memfokuskan prioritas pada tiga bidang pembangunan utama berikut ini: 1). Kesehatan; 2). Pendidikan dan Perpustakaan; dan 3). Perekonomian. Tentu saja, ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu sama yang lain. Selain itu, juga dalam pembangunan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah daerah.

Sejauh ini, Pemerintah DIY senantiasa berupaya mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, dimana terjadi peningkatan usia rata-rata, peningkatan pengetahuan yang bisa memperkuat pencapaian SDM berkualitas, hingga terwujud SDM yang berkualitas dan mampu meningkatkan produktivitasnya untuk mencapai hidup dan penghidupan yang semakin layak dan manusiawi (Bappeda DIY, 2015).

Dalam merumuskan kegiatan yang memiliki pencapaian *output* maksimal dan ketercapaian *outcome*, perlu melakukan analisis faktor-faktor utama yang memiliki daya ungkit terhadap pencapaian *output* terbesar. Tujuannya agar penyusunan kegiatan dan program dapat lebih efektif dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki (Bappenas & UNDP, 2012).

Berikut ini akan segera terpapar faktor-faktor utama yang memiliki daya ungkit terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih berkualitas. Eksplorasi program pendukung variabel-variabel IPM akan terpilah kedalam tiga bidang utama pembangunan tersebut di atas.

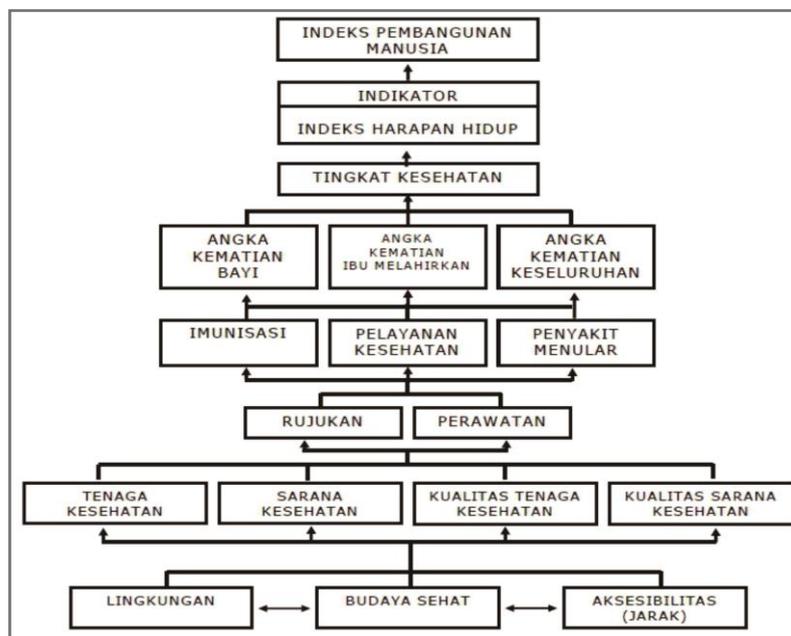
#### 3.4.1. Eksplorasi Program Pendukung Variabel IPM: Kesehatan

Secara definitif, komponen peluang hidup diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel (a) rata-rata anak lahir hidup dan (b) rata-rata anak yang masih hidup (Bappenas & UNDP, 2012:1).

Sebagai salah satu komponen IPM, Angka Harapan Hidup (AHH) pada dasarnya merupakan indikator *impact*. Oleh karena itu, beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai basis indikator outcome-nya antara lain adalah: (1). Angka kematian bayi; (2). Angka bayi berat lahir kurang; (3). Angka keluhan kesehatan, dll. Berkaitan dengan hal itu, Pemerintah DIY selalu berupaya menurunkan berbagai indikator input, proses maupun output yang relevan dengan beberapa indikator outcome di atas (Bappenas & UNDP, 2012:36).

Dalam lingkup yang holistik, Sampurno (2008:33) mengajukan bagan komprehensif (lihat Gambar 3.7) yang bisa dijadikan rujukan dalam perumusan intervensi program pemerintah untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) maupun IPM.

**Gambar 3.7. Faktor-Faktor Pendukung Angka Harapan Hidup**



Sumber: Sampurno, 2008:33.

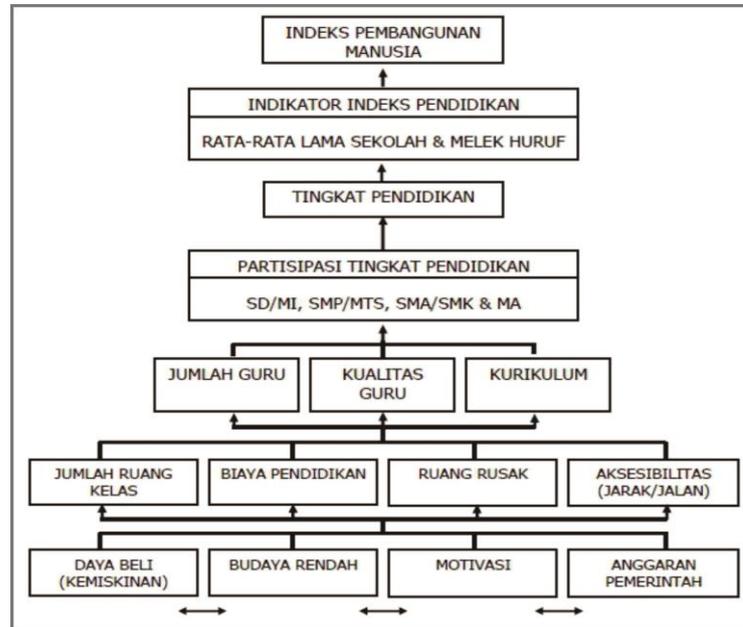
### *3.4.2. Eksplorasi Program Pendukung Variabel IPM: Pendidikan dan Perpustakaan*

Secara definitif, komponen pengetahuan diukur dengan (a) indikator melek huruf, yang diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, dan (b) indikator rata-rata lama sekolah, yang dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan (Bappenas & UNDP, 2012:1).

Berkait dengan rata-rata lama sekolah, sejumlah faktor yang seringkali berpengaruh di antaranya adalah faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Penelusuran terhadap faktor-faktor tersebut ternyata sangat terkait dengan faktor orang tua, fasilitas pendidikan, faktor pembiayaan dan nilai pendidikan dan upaya-upaya pribadi (Bappenas & UNDP, 2012:18).

Kembali lagi, cuplikan bagan Sampurno (2008:43) berikut memberikan ilustrasi yang komprehensif tentang faktor-faktor yang terkait dengan pencapaian pengetahuan (rata-rata lama sekolah/RLS dan melek huruf/MH).

**Gambar 3.8. Faktor-Faktor Pendukung RLS & MH**



Sumber: Sampurno, 2008:43.

### 3.4.3. Eksplorasi Program Pendukung Variabel IPM: Perekonomian

Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan (adjusted real Gross Domestic Product (GDP) per capita). Perhitungan ini didasarkan pada Purchasing Power Parity – PPP sehingga dapat perbandingan antar negara (Bappenas & UNDP, 2012:1).

Pada aspek kehidupan yang layak, indikator *outcome* pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan menggambarkan sejauh mana masyarakat dapat memenuhi kehidupan ekonominya. Dalam konteks itu, pemerintah perlu mempertimbangkan indikator *outcome* ini sebagai ukuran apakah pendapatan masyarakat meningkat atau tidak. Dengan kata lain ukuran ini lebih peka menggambarkan daya beli masyarakat, bahkan sejalan dengan ukuran yang digunakan dalam batas minimal konsumsi dalam indikator kemiskinan. Dengan cara yang sama pemerintah bisa memonitor pencapaian target pengeluaran riil per kapita penduduk dan mengevaluasi

mengapa indikator *outcome* tersebut mengalami kemajuan atau tidak (Bappenas & UNDP, 2012:35).

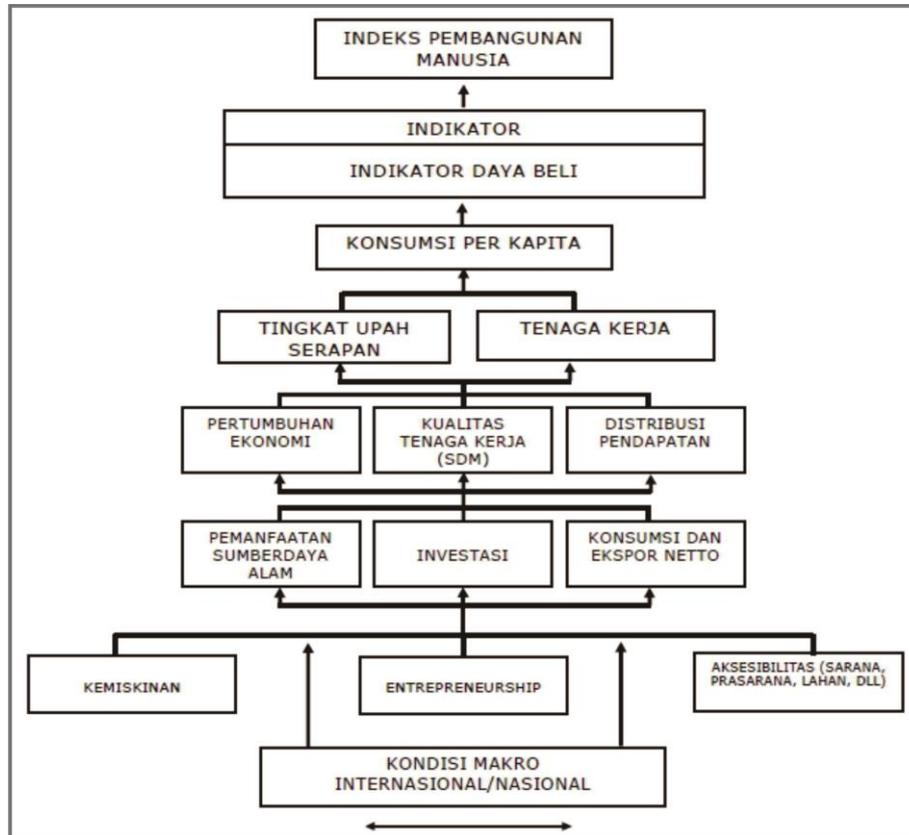
Untuk melakukan evaluasi, pemerintah perlu mencermati sejauh mana pencapaian output dari sektor-sektor usaha yang menjadi mata pencaharian dominan penduduk (seperti sektor pertanian, industri pengolahan, sektor jasa, dll). Evaluasi tersebut dilakukan dengan menelaah sejauhmana input maupun proses telah diberikan dengan baik, agar output sektor-sektor usaha penduduk menjadi lebih baik (*Ibid*).

Terilustrasikan dalam gambar bahwa aktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Daya Beli memiliki ruang lingkup yang luas, mulai dari level daerah, nasional hingga internasional. Di samping itu terdapat faktor pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat mempengaruhi Indeks Daya Beli. Dari ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi tingkat perkembangan ekonomi suatu daerah termasuk kualitas tenaga kerja (SDM) dan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah.

Tinggi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah, kualitas tenaga kerja (SDM), dan distribusi pendapatan masyarakat akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja (berkurangnya angka pengangguran) dan tingkat upah, dan pada akhirnya akan mempengaruhi konsumsi perkapita yang diukur melalui Indeks Daya Beli.

Dalam ilustrasi yang komprehensif, cuplikan Gambar 3.9. dari Sampurno (2008: 51) berikut ini bisa memerinci lebih lanjut sejumlah faktor yang berkaitan dengan Purchasing Power Parity.

Gambar 3.9. Faktor-Faktor Pendukung *Purchasing Power Parity*



Sumber: Sampurno, 2008:51.

## BAB IV

# FORMULASI RANCANGAN PROGRAM PENENTU INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DIY

### 4.1. Pengantar

Bab IV ini akan menguraikan secara lebih rinci tentang formulasi rancangan program-program penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dalam periode lima tahun mendatang, tahun 2018-2022. Sebagaimana telah disebutkan pada bab terdahulu, rancangan intervensi program penentu IPM DIY ini mengacu pada klasifikasi tiga fokus utama pembangunan yaitu: (1). Bidang Kesehatan; (2). Pendidikan dan Perpustakaan; (3). Perekonomian.

Dengan mengacu pada ketiga substansi pokok tersebut, maka sistematika tulisan ini pun akan terpilah ke dalam tiga sub bab berikut: *pertama*, formulasi rancangan program kesehatan penentu IPM DIY. *Kedua*, formulasi rancangan program pendidikan dan perpustakaan penentu IPM DIY. *Ketiga*, formulasi rancangan program perekonomian penentu IPM DIY.

### 4.2. Formulasi Rancangan Program Kesehatan Penentu IPM DIY

Secara spesifik Pemerintah DIY menginisiasi sejumlah intervensi program yang diharapkan bisa meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) tersebut. Pemerintah DIY menetapkan dua target utama yang akan mendukung sasaran perangkat daerah dalam mewujudkan peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH). Kedua target utama itu adalah: (1). Terwujudnya perilaku sadar sehat dan (2). Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu.

Untuk menyasar kedua target utama tersebut, program kesehatan ini terpilah ke dalam 7 program yang diampu oleh satu OPD, utamanya Dinas Kesehatan, tanpa menutup pintu bagi pelibatan lintas sektor yang lebih luas

dengan OPD lain terkait. Ketujuh program tersebut dikontribusikan untuk menjawab tantangan Pemerintah DIY dalam Meningkatkan Derajat Kualitas SDM.

**Tabel 4.1. Target dan Program Kesehatan DIY Pendukung Variabel IPM**

<b>GUB</b>	<b>Meningkatnya Derajat Kualitas SDM</b> Indeks Pembangunan Manusia (ISP)
<b>SET/AS</b>	<b>Peningkatan Usia Harapan Hidup</b> Angka Harapan Hidup (IP)
<b>ESELON II</b>	<b>Terwujudnya perilaku sadar sehat</b> Persentase puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga (ISP)
<b>ESELON III</b>	1 Program Kesehatan Masyarakat 2 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
<b>ESELON II</b>	<b>Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu</b> Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi
<b>ESELON III</b>	3 Program Pelayanan Kesehatan 4 Program Pengembangan sumber daya kesehatan 5 Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan pada BLUD Bapelkes 6 Program Pelayanan pada BLUD Bapeljamkesos 7 Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Balabkes

#### **4.3. Formulasi Rancangan Program Pendidikan dan Perpustakaan Penentu IPM DIY**

Program pendidikan dan perpustakaan ini diampu utamanya oleh tiga Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yaitu: (1). Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; (2). Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan (3). Biro Bina Mental Spiritual. Dalam implementasinya, program-program di ketiga OPD itu dirancang terbuka terhadap pelibatan sejumlah OPD lain yang terkait.

Sebagai gambaran umum, agregat program sebanyak 18 program diarahkan untuk menasar pada tiga target pokok berikut: (1). Tercapainya partisipasi layanan pendidikan khusus, pendidikan menengah, peningkatan mutu layanan pendidikan, peningkatan partisipasi pemuda dalam pendidikan kepemudaan, dan peningkatan prestasi olahraga DIY ; (2). Meningkatnya jumlah

pemustaka ke perpustakaan; (3). Meningkatnya rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental dan spiritual.

Ke-delapan belas (18) program dengan tiga target capain itu didayaupayakan untuk menjawab dua kebutuhan utama berikut: *pertama*, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan *kedua*, program pembangunan sosial masyarakat. Pada akhirnya, Indeks Kinerja Utama Pemerintah DIY untuk “Meningkatkan Derajat Kualitas SDM” bisa teralisir dengan baik.

**Tabel 4.2. Target dan Program Pendidikan dan Perpustakaan Penentu IPM DIY (Pengampu Disdikpora)**

<b>GUB</b>	<b>Meningkatnya Derajat Kualitas SDM</b> Indeks Pembangunan Manusia (ISP)
<b>SET/AS.</b>	<b>Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan</b> 1. Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Pendidikan Nasional (SNP) 2. Harapan Lama Sekolah 3. Peningkatan jumlah pemuda kader aktif 4. Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju
<b>ESELON II</b>	<b>Terwujudnya Ketercapaian 5 hal berikut:</b> 1. Ketercapaian partisipasi layanan pendidikan khusus 2. Ketercapaian partisipasi layanan pendidikan menengah 3. Ketercapaian peningkatan mutu layanan pendidikan 4. Peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaaan 5. Prestasi olahraga DIY
<b>ESELON III</b>	1 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 2 Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Pendidikan Teknik 3 Program Layanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta 4 Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul 5 Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul 6 Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo 7 Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman 8 Program Pembinaan Kepemudaaan 9 Program Pembinaan Keolahragaan

**Tabel 4.3. Target dan Program Pendidikan dan Perpustakaan Penentu IPM DIY  
(Pengampu Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah)**

<b>GUB</b>	<b>Meningkatnya Derajat Kualitas SDM</b> Indeks Pembangunan Manusia (ISP)
<b>SET/AS.</b>	<b>Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan</b> 1. Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Pendidikan Nasional (SNP) 2. Harapan Lama Sekolah 3. Peningkatan jumlah pemuda kader aktif 4. Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju
<b>ESELON II</b>	<b>Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan</b> Presentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan
<b>ESELON III</b>	1 Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan 2 Program Pengembangan bahan pustaka dan informasi 3 Program Layanan Perpustakaan 4 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan 5 Pelestarian dan Layanan Arsip

**Tabel 4.4. Target dan Program Pendidikan dan Perpustakaan Penentu IPM DIY  
(Pengampu Biro Bina Mental Spiritual)**

<b>GUB</b>	<b>Meningkatnya Derajat Kualitas SDM</b> Indeks Pembangunan Manusia (ISP)
<b>SET/AS.</b>	<b>Program Pembangunan Sosial Masyarakat</b> 1. Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas 2. Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif 3. Total Fertility Rate 4. Peningkatan jumlah desa/kelurahan cepat berkembang 5. Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (crime rate)
<b>ESELON II</b>	<b>Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual</b> Presentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi bahan kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual
<b>ESELON III</b>	1 Program Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Pembinaan Sarana Keagamaan 2 Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Kesehatan Masyarakat 3 Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Sumber Daya Manusia

#### 4.4. Formulasi Rancangan Program Perekonomian Penentu IPM DIY

Program perekonomian penentu IPM DIY ini diampu utamanya oleh tujuh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yaitu: (1). Dinas Perijinan dan Penanaman Modal; (2). Dinas Koperasi dan UMKM; (3). Dinas Perindustrian dan Perdagangan; (4). Dinas Pariwisata; (5). Dinas Kelautan dan Perikanan; (6). Disnakerstrans ; (7). Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sebagai gambaran umum, agregat program hingga sebanyak 41 program diarahkan untuk menysasar pada 14 target pokok di mana masing-masing OPD memiliki dua target utama.

Keempat belas target pokok tersebut adalah sebagai berikut: (1). Meningkatnya realisasi investasi; (2). Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan; (3). Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UKM; (4). Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap jumlah UKM; (5). Meningkatnya Industri pengolahan; (6). Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri; (7). Meningkatnya jumlah belanja wisatawan; (8). Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian; (9). Terkelolanya kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (10). Meningkatnya nilai produksi perikanan; (11). Meningkatnya daya saing tenaga kerja; (12). Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja; (13). Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultural, perkebunan dan peternakan; dan (14). Terwujudnya ketahanan pangan.

Keempat puluh satu (41) program dan 14 target pokok tersebut diformulasikan untuk menjawab kebutuhan: **pertama**, pengembangan pusat pertumbuhan; **kedua**, pengembangan sektor-sektor dominan (seperti pertanian, industri pengolahan, dan jasa); dan **ketiga**, tatakelola lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Dengan demikian akan terwujud dua Indeks Kinerja Utama Pemerintah DIY yaitu: (1). Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah; dan (2).

Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan. Berikut ini adalah daftar tujuh Organisasi Pemerintah Daerah yang mengampu program pengembangan perekonomian penentu IPM DIY.

**Tabel 4.5. Target dan Program Perekonomian Penentu Penentu IPM DIY  
(Dinas Perijinan dan Penanaman Modal)**

<b>GUB</b>	<b>Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah</b> Indeks Williamson
<b>SET/AS.</b>	<b>Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan</b> 1. Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul) 2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi
<b>ESELON II</b>	<b>Meningkatnya realisasi investasi</b> Nilai PMTB dalam PDRB DIY
<b>ESELON III</b>	1 Program Peningkatan Iklim Investasi 2 Program Promosi Investasi
<b>ESELON II</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan</b> Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal dan Eksternal)
<b>ESELON III</b>	3 Program Pelayanan Perijinan 4 Program Kemudahan Berusaha dan Pelayanan Pengaduan

**Tabel 4.6. Target dan Program Perekonomian Penentu Penentu IPM DIY  
(Dinas Koperasi dan UMKM)**

<b>GUB</b>	<b>Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan</b> Pertumbuhan Ekonomi
<b>SET/AS.</b>	<b>Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)</b> Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY
<b>ESELON II</b>	<b>Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UKM</b> 1. Omzet koperasi 2. Omzet UKM
<b>ESELON III</b>	1 Pengembangan UKM 2 Program Pengembangan Perkoperasian 3 Peningkatan Akses Pembiayaan
<b>ESELON II</b>	<b>Meningkatnya Kontribusi Wirausaha Baru Terhadap Jumlah UKM</b> Kontribusi jumlah Wirausaha Baru (WUB) terhadap jumlah UKM
<b>ESELON III</b>	4 Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru

**Tabel 4.7. Target dan Program Perekonomian Penentu Penentu IPM DIY (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)**

<b>GUB</b>	<b>Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan</b> Pertumbuhan Ekonomi
<b>SET/AS.</b>	<b>Program Pengembangan sektor Dominan</b> Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY
<b>ESELON II</b>	<b>Meningkatnya industri pengolahan</b> Nilai industri pengolahan dalam PDRB DIY (ADHK)
<b>ESELON III</b>	1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2 Program Peningkatan Teknologi Industri 3 Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual
<b>ESELON II</b>	<b>Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri</b> Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY
<b>ESELON III</b>	4 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 5 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 6 Program Perlindungan dan Pengamanan Konsumen

**Tabel 4.8. Target dan Program Perekonomian Penentu Penentu IPM DIY (Dinas Pariwisata)**

<b>GUB</b>	<b>Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah</b> Indeks Williamson
<b>SET/AS.</b>	<b>Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan</b> 1. Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul) 2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi
<b>ESELON II</b>	<b>Meningkatnya jumlah belanja wisatawan</b> Spending money wisatawan
<b>ESELON III</b>	1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
<b>ESELON II</b>	<b>Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian</b> Nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY (Sumber BPS)
<b>ESELON III</b>	2 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3 Program Pengembangan Industri Pariwisata 4 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata

**Tabel 4.9. Target dan Program Perekonomian Penentu Penentu IPM DIY (Dinas Kelautan dan Perikanan)**

<b>GUB</b>	<b>Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan</b> Pertumbuhan Ekonomi
<b>SET/AS.</b>	<b>Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana</b> 1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks kualitas udara 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 4. Indeks Resiko Bencana
<b>ESELON II</b>	<b>Terkelolanya kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil</b> Peningkatan status kawasan konservasi
<b>ESELON III</b>	Program Konservasi Ekosistem dan Pengawasan Sumber Daya 1 Kelautan dan Perikanan
<b>ESELON II</b>	<b>Meningkatnya nilai produksi perikanan</b> Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (Sumber BPS)
<b>ESELON III</b>	2 Program Pengelolaan Pelabuhan 3 Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 4 Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 5 Program Pengembangan perbenihan perikanan budidaya 6 Program Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

**Tabel 4.10. Target dan Program Perekonomian Penentu Penentu IPM DIY  
(Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi)**

<b>GUB</b>	<b>Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan</b> Pertumbuhan Ekonomi
<b>SET/AS.</b>	<b>Program Pengembangan Sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan, Jasa)</b> Tingkat Penganggur Terbuka
<b>ESELON II</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja</b> Jumlah Lulusan pelatihan yang ditempatkan
<b>ESELON III</b>	1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2 Program Pembinaan Pelatihan Standarisasi dan Pemagangan
<b>ESELON II</b>	<b>Terwujudnya Hubungan Industrial Yang kondusif Untuk Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja</b> Jumlah Kasus Yang diselesaikan diluar pengadilan Hubungan Industrial
<b>ESELON III</b>	3 Program Pengujian Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja 4 Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan 5 Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 6 Program Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran

**Tabel 4.11. Target dan Program Perekonomian Penentu Penentu IPM DIY  
(Dinas Kelautan dan Perikanan)**

<b>GUB</b>	<b>Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan</b> Pertumbuhan Ekonomi
<b>SET/AS.</b>	<b>Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)</b> Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY
<b>ESELON II</b>	<b>Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.</b> Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Sumber BPS)
<b>ESELON III</b>	1 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2 Program Peningkatan Produksi Hortikultura 3 Program Peningkatan Produksi Perkebunan 4 Program Peningkatan Populasi Peternakan 5 Program Pengembangan perbenihan pertanian 6 Program Pengembangan SDM pertanian dan penyuluhan 7 Program Pengawasan dan sertifikasi benih pertanian 8 Program Perlindungan Tanaman Pertanian 9 Program Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan
<b>ESELON II</b>	<b>Terwujudnya ketahanan pangan</b> Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
<b>ESELON III</b>	10 Program Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan 11 Program pemberdayaan daerah rawan pangan

#### 4.5. Sinkronisasi Program-Program Penentu IPM DIY

Untuk mewujudkan tercapainya Indeks Pembangunan Manusia DIY yang berkualitas selama lima tahun mendatang, Pemerintah DIY perlu menempuh upaya sinkronisasi program penentu IPM sejak awal tanpa menutup peluang bagi dilakukannya proses penyesuaian sesuai dengan konteks kebutuhan dan waktu semasa.

Dalam hal ini kesebelas OPD yang terlibat dalam mulai dari tahapan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program perlu selalu melakukan proses koordinasi, sinkronisasi, dan konsolidasi program lintas sektoral (OPD). Sehingga berbagai persolan, tantangan, dan hambatan bisa

diantisipasi, direspon, dan dipecahkan secara sinergis dan terintegrasi. Dengan demikian sejumlah target utama dari elemen IPM DIY bisa tercapai seluruhnya.

Sebagai ilustrasi sederhana, bagan berikut menjelaskan langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk memastikan berbagai target dan sasaran tersebut bisa tercapai secara efektif. Sejumlah aspek kunci yang perlu diperhatikan agar program bisa berlangsung efektif di antaranya adalah sebagai berikut.

**Pertama**, perihal rujukan, penentuan tentang manusia/warga DIY mana yang tengah menjadi target utama dari program-program dan kegiatan yang telah direncanakan. **Kedua**, perihal input, penentuan sumberdaya-sumberdaya apa saja yang bisa berkontribusi secara efektif dalam pencapaian output program yang diimplementasikan.

**Tabel 4.12. Aspek-Aspek Kunci agar Program Bisa Efektif**



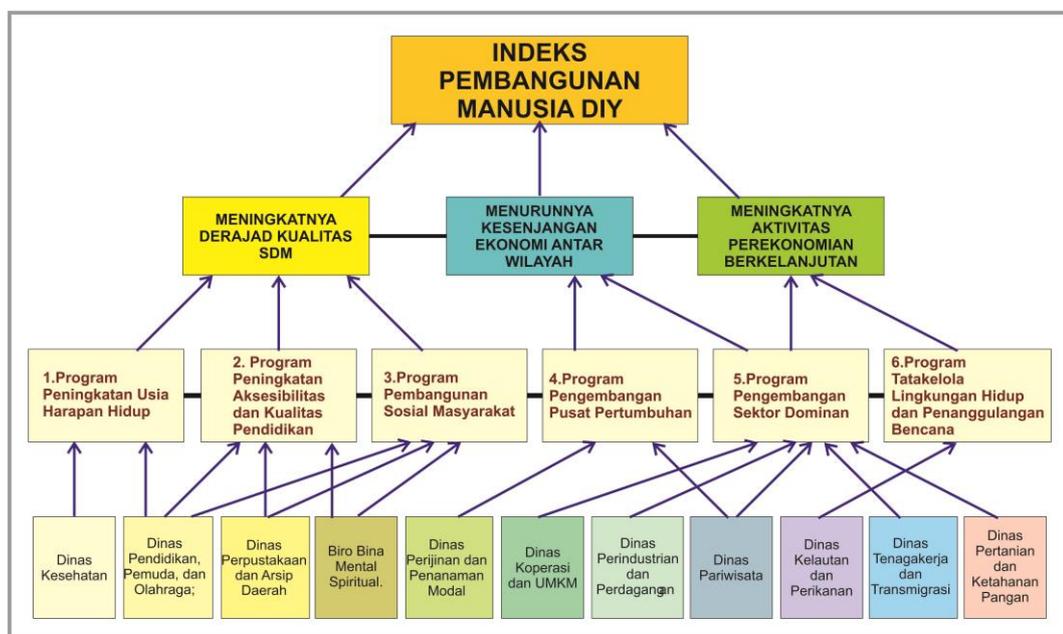
**Ketiga**, perihal proses, aktivitas-aktivitas apa saja yang direncanakan dan diimplementasikan masing-masing OPD bersama dengan warga penerima manfaat agar pencapaian output tersebut bisa efektif. **Keempat**, perihal output,

apa saja hasil/produk/barang/jasa yang dihasilkan dari program tersebut yang bisa memposisikan warga penerima manfaat sebagai prioritas maupun indikator utamanya.

**Kelima**, perihal *outcome*, apa proyeksi manfaat yang diperoleh warga penerima manfaat dalam jangka menengah dari output program tersebut. **Keenam**, perihal *impact*, apa proyeksi hasil-hasil pembangunan yang dirasakan warga penerima manfaat dalam jangka panjang sebagai hasil dari pencapaian *outcome* program tersebut.

Selain beberapa aspek tersebut di atas, hal penting lainnya adalah perlunya Pemerintah DIY menyusun konsolidasi program lintas sektoral yang berkontribusi dalam mewujudkan capaian IPM DIY yang berkualitas selama lima tahun mendatang. Berikut ini adalah pembaganan pengintegrasian program-program lintas OPD yang dirancang untuk memperkuat capaian Indeks Pembangunan Manusia DIY yang lebih berkualitas di tahun-tahun mendatang. meskipun perlu penyesuaian konteks kebutuhan saat implementasi program.

**Gambar 4.1. Sinkronisasi Program Penentu IPM DIY**



#### **4.6. Rincian Formulasi Rancangan Program Penentu IPM DIY**

Untuk mendapatkan paparan yang lebih rinci tentang formulasi rancangan program penentu IPM DIY, sub bab ini akan menyajikan tabel-tabel komposit dari tiga fokus pembangunan DIY yaitu: pembangunan bidang kesehatan, bidang pendidikan dan perpustakaan, dan bidang perekonomian.

Secara beruntun, matrik pemetaan program penentu Indeks Pembangunan Manusia DIY akan tersaji dalam beberapa poin berikut:

1. Pemetaan Program Kesehatan
2. Pemetaan Program Pendidikan
3. Pemetaan Program Perpustakaan dan Arsip Daerah
4. Pemetaan Program Biro Bina Mental Spiritual
5. Pemetaan Program Perekonomian
  - a. Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal
  - b. Dinas Koperasi Dan Umkm
  - c. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
  - d. Dinas Pariwisata
  - e. Dinas Kelautan Dan Perikanan
  - f. Disnakertrans
  - g. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

4.6.1. PEMETAAN PROGRAM KESEHATAN

<b>IKU</b>	<b>META PROGRAM</b>											
GUBERNUR	SASARAN PEMDA	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM										
	INDIKATOR SASARAN PEMDA	TAHUN	2018		2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	satuan
	Indeks Pembangunan Manusia	80.29	persen	80.72	persen	81.08	persen	81.40	persen	81.68	persen	
SETDA/ASISTEN	PROGRAM PEMDA	Peningkatan Usia Harapan Hidup										
	INDIKATOR PROGRAM PEMDA	Angka Harapan Hidup	75.06	persen	75.20	persen	75.32	persen	75.41	persen	75.49	persen
ESELON II	MENDUKUNG SASARAN PERANGKAT DAERAH	Terwujudnya perilaku sadar sehat										
	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TAHUN	2018		2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	satuan
		Persentase puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga	67,77 (82)	persen	100 (121)	persen						
META INDIKATOR	Jumlah Puskesmas yang mengimplementasi kan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK/ Jogja Sehat) dibagi jumlah seluruh Puskesmas DIY x 100%											

	SASARAN PERANGKAT DAERAH	<p>Catatan :</p> <p>-Lebih realistis apabila indikatornya menggunakan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dengan kriteria memenuhi 12 indikator PISPK. Akan tetapi sampai dengan tahun 2018, penghitungan masih dalam proses sehingga belum diketahui hasilnya dan tidak bisa dibuat proyeksi pada 5 tahun kedepan.</p> <p>-PISPK adalah Program Keluarga Sehat dengan Pendekatan Keluarga sesuai Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015. Puskesmas adalah pelaksana dari PISPK yang memiliki 12 indikator sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)</li> <li>2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan</li> <li>3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap</li> <li>4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif</li> <li>5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan</li> <li>6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar</li> <li>7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur</li> <li>8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan</li> <li>9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok</li> <li>10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</li> <li>11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih</li> <li>12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat</li> </ol> <p>indikator Jogja Sehat ada tambahan 1 indikator yaitu disabilitas (belum dapat diperhitungkan untuk tahun 2018/2019)</p>										
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Kesehatan Masyarakat										
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2018		2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan								
		1. Persentase Balita Sehat	38.94	persen	39.48	persen	40.06	persen	40.64	persen	41.22	persen
	2. Persentase Desa	25.91	persen	52.83	persen	54.66	persen	56.43	persen	58.21	persen	

	Sehat Mandiri											
META INDIKATOR PROGRAM	<p>1. Meta Indikator untuk Persentase Balita Sehat adalah : Penjumlahan dari 4 indikator kegiatan dikalikan masing-masing bobotnya dibagi 10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunnya Balita Kurus dengan bobot nilai 3</li> <li>- Menurunnya Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dengan bobot 2</li> <li>- Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Antenatal Minimal 4 Kali dengan bobot 3</li> <li>- Persentase Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1 dengan bobot 2</li> </ul> <p>2. Meta Indikator untuk Persentase Desa Sehat Mandiri adalah : Penjumlahan dari 5 indikator kegiatan dibagi 5 . Indikator adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Desa/Kelurahan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)</li> <li>- Persentase Tempat- Tempat Umum (sekolah, hotel, pasar, rumah sakit, dan puskesmas) yang memenuhi syarat</li> <li>- Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri</li> <li>- Terbentuknya Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas</li> <li>- Persentase Puskesmas Melaksanakan Kesehatan Olah Raga bagi anak SD (puskesmas mendorong desa untuk melaksanakan).</li> </ul>											
TUJUAN PROGRAM	<p>Meningkatnya kesehatan masyarakat yang diukur dengan meningkatnya Persentase Balita Sehat dan Persentase Desa Sehat Mandiri.</p> <p>Catatan :</p> <p>1. Balita sehat adalah indikator program sebagai implementasi penerapan pendekatan pelayanan kesehatan keluarga yang terintegrasi dan berkesinambungan (continuum of care). Artinya pelayanan kesehatan keluarga harus dilakukan terhadap seluruh tahapan siklus hidup manusia, sejak masih dalam kandungan – bayi - anak balita - anak usia sekolah – remaja - dewasa muda - dewasa tua atau usia lanjut. Maka Balita Sehat menjadi representasi kualitas peningkatan kesehatan masyarakat. Persentase Balita Sehat diturunkan dalam 4 indikator hasil yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Menurunnya Balita Kurus (bobot nilai 3),</li> <li>-Menurunnya Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (bobot nilai 2),</li> <li>-Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Antenatal Minimal 4 kali (bobot nilai 3)</li> </ul>											

		<p>-Persentase Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1 (bobot 2) . Data Prevalensi balita Kurang Energi Protein (Gizi Buruk dan Kurang) di DIY Pada tahun 2016 KEP DIY sebesar 8,83 dan kembali turun menjadi 8,26 pada tahun 2017.</p> <p>2. Desa Sehat Mandiri adalah kondisi desa yang diharapkan mampu secara mandiri memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya melalui peningkatan perilaku kesehatan Masyarakat. (Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan). Diukur dari: -Sanitasi -Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat -Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri -Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) -Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD (puskesmas mendorong desa dan sekolah di wilayah kerjanya untuk melaksanakan UKK).</p>										
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit										
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2018		2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan								
		Persentase keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular	53.58	persen	56.33	persen	58.92	persen	61.26	persen	62.84	persen
META INDIKATOR PROGRAM	Persentase keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular adalah Persentase anak di bawah 1 tahun mendapat imunisasi dasar lengkap + Persentase Baduta yang mendapat imunisasi lanjutan+ Persentase kejadian penyakit potensial wabah + Jumlah fasyankes melakukan tata laksana kasus TB sesuai standar+ Ketercapaian Persentase kematian kasus DBD (Case fatality rate / CFR)+ Jumlah fasyankes melakukan tata laksana kasus Pneumonia sesuai standar+Persentase cakupan pengobatan HIV+											

		ketercapaian API malaria+ Persentase penemuan kasus kesehatan jiwa+ Persentase penemuan kasus DM+ Persentase penemuan kasus kanker+ Persentase penemuan kasus hipertensi/12										
	TUJUAN PROGRAM	Tercapainya keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui upaya: imunisasi dasar lengkap, imunisasi lanjutan, pengendalian kejadian penyakit potensial wabah, mendorong fasyankes melakukan tata laksana kasus TB sesuai standar, pencegahan kematian kasus DBD (Case fatality rate / CFR), mendorong fasyankes melakukan tata laksana kasus Pneumonia sesuai standar, pengobatan HIV, pencegahan dan pengendalian malaria, penanganan kesehatan jiwa, penemuan dan penanganan kasus DM, kasus kanker dan kasus hipertensi. -kategori penyakit menular yang angkanya tinggi dan masuk SPM Kab/Kota di DIY : DBD, HIV, Malaria, TB -kategori penyakit tidak menular yang angkanya tinggi dan masuk SPM Kab/Kota di DIY : Hipertensi (PJPD), kanker, DM, jiwa										
ESELON II	MENDUKUNG SASARAN PERANGKAT DAERAH	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu										
	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TAHUN	2018		2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan								
		Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi	64,89 (170)	persen	67,18 (176)	persen	69,08 (181)	persen	70,99 (186)	persen	73,28 (192)	persen
META INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), tingkat lanjut (FKTL) dan pelayanan kesehatan lain yang sudah terakreditasi dibagi seluruh FKTP/FKTL dan Fasilitas Kesehatan Lain dikali 100											
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Pelayanan Kesehatan										
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2018		2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan								

		Persentase pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan, dan Pelayanan Kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan	38.37	persen	41.08	persen	48.08	persen	52.37	persen	54.85	persen
	META INDIKATOR PROGRAM	Jumlah FKTP (Puskesmas dan klinik), FKTL (Rumah Sakit) dan Fasyankes lainnya (Labkesda) yang memenuhi standar manajemen mutu dan manajemen pelayanan dibagi jumlah keseluruhan dikali 100										
	TUJUAN PROGRAM	<p>Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui berbagai dukungan terhadap perbaikan dan peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut.</p> <p>Pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di wilayah DIY meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Sarana pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan oleh Puskesmas dan jajarannya Sementara itu, pelayanan kesehatan rujukan diampu oleh Rumah Sakit. Jumlah sarana kesehatan dasar di DIY relatif tidak mengalami peningkatan tetapi dari sisi kualitas sudah semakin meningkat, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah puskesmas yang telah melaksanakan akreditasi puskesmas. Pada tahun 2017 seluruh puskesmas di DIY sudah terakreditasi. Sedangkan Pelayanan kesehatan rujukan Jumlah Rumah Sakit di DIY adalah 76, terdiri dari 54 RS Umum dan 22 RS Khusus</p> <p>Peningkatan angka kematian dini akibat kecelakaan sesungguhnya masih dapat dicegah. Dinas Kesehatan DIY melakukan upaya peningkatan peran sistem rujukan gawat darurat, penanganan pra rujukan, dan kualitas pelayanan di sarana pelayanan kesehatan untuk memperingan penderitaan korban dan meminimalisir angka kematian dini akibat kecelakaan tersebut. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu pada Dinas Kesehatan DIY dengan menyediakan layanan call center</p>										
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Pengembangan sumber daya kesehatan										
	INDIKATOR	TAHUN	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>					

	PROGRAM	TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	satuan
		Persentase Fasilitas Pelayanan kesehatan (Fasyankes) memenuhi standar perijinan, SDM tenaga dan sarana	40.58	persen	50.24	persen	62.32	persen	71.98	persen	80.19	persen
	META INDIKATOR PROGRAM	Jumlah FKTP, FKTL dan Fasyankes lainnya yang memenuhi standar perijinan, SDM tenaga dan sarana dibagi jumlah Fasyankes dikali 100										
	TUJUAN PROGRAM	<p>Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui berbagai dukungan terhadap perbaikan dan peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut.</p> <p>Pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di wilayah DIY meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Sarana pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan oleh Puskesmas dan jajarannya Sementara itu, pelayanan kesehatan rujukan diampu oleh Rumah Sakit. Jumlah sarana kesehatan dasar di DIY relatif tidak mengalami peningkatan tetapi dari sisi kualitas sudah semakin meningkat, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah puskesmas yang telah melaksanakan akreditasi puskesmas. Pada tahun 2017 seluruh puskesmas di DIY sudah terakreditasi. Sedangkan Pelayanan kesehatan rujukan Jumlah Rumah Sakit di DIY adalah 76, terdiri dari 54 RS Umum dan 22 RS Khusus</p> <p>Peningkatan angka kematian dini akibat kecelakaan sesungguhnya masih dapat dicegah. Dinas Kesehatan DIY melakukan upaya peningkatan peran sistem rujukan gawat darurat, penanganan pra rujukan, dan kualitas pelayanan di sarana pelayanan kesehatan untuk memperingan penderitaan korban dan meminimalisir angka kematian dini akibat kecelakaan tersebut. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu pada Dinas Kesehatan DIY dengan menyediakan layanan call center</p>										
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan pada BLUD Bapelkes										
	INDIKATOR	TAHUN	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>					

	PROGRAM	TARGET/SATUAN	Target	Satuan								
		Persentase Mantan linatih yang meningkat kompetensinya	60	persen	62	persen	64	persen	66	persen	68	persen
	META INDIKATOR PROGRAM	1. Meta Indikator untuk Jumlah SDM Kesehatan Aparatur yang meningkat kompetensinya dibagi jumlah seluruh SDM Pelatihan Kesehatan Aparatur yang dievaluasi dikali 100%										
	TUJUAN PROGRAM	Meningkatnya kompetensi mantan linatih (orang yang dilatih) di Bapelkes sesuai dengan muatan materi pelatihannya baik yang ditujukan untuk tenaga kesehatan maupun untuk masyarakat. Peningkatan dinilai melalui indikator yang telah ditetapkan.										
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Pelayanan pada BLUD Bapeljamkesos										
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2018		2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan								
		1. persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100	persen								
	2. jenis layanan jaminan kesehatan Komplemen dan Suplemen kesehatan	20	persen	22	persen	24	persen	25	persen	26	persen	
META INDIKATOR PROGRAM	<p>1. Meta Indikator untuk persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan adalah :</p> <p>- Persentase Penduduk Miskin DIY Yang memenuhi kriteria Pergub 63 Tahun 2016 mendapat layanan jaminan di Bapel Jamkesos</p> <p>2. Meta Indikator untuk jenis layanan jaminan kesehatan Komplemen dan Suplemen kesehatan adalah : Penjumlahan dari 5 indikator kegiatan dibagi 5 .</p>											

		Indikator adalah - Jumlah jenis layanan jaminan kesehatan komplemen dan suplemen kesehatan										
	TUJUAN PROGRAM	Terlayannya penduduk Miskin DIY yang memenuhi kriteria Pergub 63 Tahun 2016 di Bapel Jamkesos dengan jenis layanan jaminan kesehatan komplemen dan suplemen										
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Balabkes										
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2018		2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan								
		1. Jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat	9	persen	11	persen	13	persen	14	persen	15	persen
	META INDIKATOR PROGRAM	1. Meta Indikator untuk Persentase Mantan linatih yang meningkat kompetensinya adalah : - Jumlah SDM Kesehatan Aparatur yang meningkat kompetensinya dibagi jumlah seluruh SDM Pelatihan Kesehatan Aparatur yang dievaluasi dikali 100%										
TUJUAN PROGRAM	Terlayannya kebutuhan pemeriksaan laboratorium untuk dukungan program, rujukan pemeriksaan dan kebutuhan masyarakat melalui pengembangan laboratorium.											

4.6.2. PEMETAAN PROGRAM PENDIDIKAN

<b>IKU</b>	<b>META PROGRAM</b>									
GUBERNUR	SASARAN PEMDA	Meningkatnya derajat kualitas SDM								
	INDIKATOR SASARAN PEMDA	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
	IPM	80,72	%	80,72	%	81,06	%	81,68	%	
SETDA/ ASISTEN	PROGRAM PEMDA	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan								
	INDIKATOR PROGRAM PEMDA	Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Pendidikan Nasional (SNP)	11,49	%	12,10	%	12,59	%	13,20	%
		Harapan Lama Sekolah	15,66	tahun	15,82	tahun	15,97	tahun	16,12	tahun
		Peningkatan jumlah pemuda kader aktif	205	orang	210	orang	215	orang	220	orang
		Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	6,71	%	7,47	%	8,22	%	8,98	%
ESELON II	MENDUKUNG SASARAN PERANGKAT DAERAH	1. Terwujudnya kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas untuk semua dan non-diskriminatif. 2. Terwujudnya pendidikan kejuruan yang sinergi dengan pembangunan daerah 3. Terwujudnya peningkatan profesionalisme mnagement pendidikan 4. Meningkatnya kapasitas olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter								

		5. Meningkatnya kapasitas pemuda yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter								
INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>		
	<b>TARGET/SATUAN</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	
	Ketercapaian partisipasi layanan pendidikan khusus	84.48	%	84.5	%	84.52	%	84.54	%	
	Ketercapaian partisipasi layanan pendidikan menengah	81.64	%	82.14	%	82.64		83.14	%	
	Ketercapaian peningkatan mutu layanan pendidikan	99.56	%	99.62	%	99.68		99.74	%	
	Peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	1350	orang	1400	orang	1450	orang	1500	orang	
	Prestasi olahraga DIY	Peringkat 9	POPNAS	Peringkat 2	POPWIL	Peringkat 9	POPNAS	Peringkat 2	POPWIL	
META INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	1. Jumlah peserta didik yang mendapat pendidikan di tingkat SM dan SLB dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah usia 15-18th 2. Jumlah pendidikan kejuruan yang sesuai dengan potensi daerah 3. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki sertifikasi mengajar 4. Jumlah medali yang diraih di tingkat nasional dan internasional 5. Jumlah pemuda yang telah mendapat pelatihan kepemudaan									
ESELON III	<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>Program Pendidikan Menengah</b>								
	INDIKATOR PROGRAM	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
		Persentase sekolah menengah dengan	78,95	%	80,30	%	81,65	%	83	%

	Akreditasi A								
	Jumlah medali dalam kompetensi tingkat nasional dan internasional jenjang sekolah menengah	37	medali	40	medali	42	medali	45	medali
	Angka Putus Sekolah	0.22	%	0.2	%	0.19	%	0.17	%
META INDIKATOR PROGRAM	1.Jumlah SMA dan program keahlian SMK dengan akreditasi A tahun N dibagi jumlah seluruh SMA dan SMK (Negri dan Swasta) dikali 100 2.Jumlah medali pada tahun N 3.Jumlah siswa putus sekolah jenjang pendidikan menengah dibagi jumlah siswa sekolah jenjang pendidikan menengah kali 100 % pada tahun N Sumber data : Profil Pendidikan DIY 2017/2018								
TUJUAN PROGRAM	Program pendidikan menengah bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan pada jenjang SMA dan SMK yang kompetitif dan komparatif. <b>Comparative</b> Hal ini dapat dilakukan dengan pemenuhan 8 standard nasional pendidikan yang diwujudkan melalui Akreditasi sekolah yang terdiri dari stadard Kompetensi lulusan, standard isi, standard proses, standard penilaian pendidikan, standard PTK, standatd Pendanaan, standard pengelolaan, standard Sarpras. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan menengah melalui peringkat Akreditasi, dimana sekolah dengan akreditasi B dan C ditingkatkan untuk naik satu tingkat diatas dan mempertahankan akreditasi A bagi sekolah menengah yang sudah mencapainya. Berdasarkan data. 216 SMA terdapat 150 Akreditasi A, 42 Kreditasi B, 11 Akreditasi C dan 13 yang belum terakreditasi. 218 SMK terdapat 137 Akreditasi A, 56 Akreditasi B, 6 Akreditasi C, dan 12 yang belum terakreditasi. <b>Comparative</b> selain itu perlu peningkaan kualitas pendidikan juga dapat dilihat dari peningkatan prestasi siswa melalui kompetisi pada level nasional Internasional (kompetitif). Perolehan prestasi DIY pada kompetisi siswa di tingkat nasional sebanyak 35 medali pada tahun 2017,diharapkan melalui seleksi dan pembinaan siswa dapat meningkatkan								

		<p>perolehan me</p> <p>Sebagai upaya untuk mengakselerasi dan memotivasi siswa berprestasi dan berbakat di DIY perlu memberikan beasiswa.</p> <p>selain itu peningkatan kualitas, pemerintah DIY masih perlu meningkatkan aksesibilitas pendidikan terutama pada siswa dari keluarga tidak mampu. Hal inidilakukan melalui pemberian beasiswa untuk anak dari keluarga tidak mampu sehingga angka putus sekolah bisa ditekan. JUmlah anak putus sekolah pada tahun belajar 2017 sebanyak 117 siswa atau 0,082 % daritotal siswa (32 siswa SMA dan 85 siswa SMK)</p> <p>Secara spesifik tujuan ini dapat dicapai melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendanaan pendidikan di Sekolah Swasta dan Negeri (BOSNAS dan BOSDA) sebagai biaya operasional Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)</li> <li>2) pemenuhan sarana prasarana fisik</li> <li>3) Pengembangan Kurikulum SM untuk memenuhi standard proses dan standard isi</li> <li>4) Pembinaan siswa SMA dan SMK untuk peningkatan kompetensi lulusan dan prestasi pada ajang kompetisi di tingkat nasional dan internasional</li> <li>5) Penurunan angka anak putus sekolah di tingkat SMA dan SMK dengan penyediaan beasiswa kartu cerdas dan beasiswa siswa berprestasi</li> </ol>								
ESSELON III	<b>NAMA PROGRAM No. 2</b>	<b>Program Layanan Pendidikan Khusus</b>								
	INDIKATOR PROGRAM	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
		Persentase jumlah SLB dengan Akreditasi A	46,15	%	52,56	%	58,97	%	65,38	%
Persentase jumlah medali pada tingkat nasional dan internasional jenjang	7	medali	9	medali	11	medali	13	medali		

		pendidikan khusus								
	META INDIKATOR PROGRAM	<p>1. Persentase SLB dengan akreditasi A pada tahun n dibagi jumlah seluruh SLB (negeri dan swasta) diklaim 100%</p> <p>2. Jumlah medali pada tahun n</p> <p>Sumber data : Profil Pendidikan DIY 2017/2018</p>								
	TUJUAN PROGRAM	<p>Pemerataan kesempatan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus masih sangat diperlukan. mengingat jumlah anak kebutuhan khusus di DIY sebesar 1700 anak dimana akses pendidikannya masih terbatas. karena faktor ekonomi menyebabkan orang tua tidak dapat menyekolahkan anak berkebutuhan khusus di sekolah khusus maupun reguler (inklusi). Keberadaan sekolah bagi anak berkebutuhan khusus umumnya masih terdapat di kota kabupaten sehingga layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di desa atau kecamatan masih terbatas. saat ini layanan pendidikan khusus (SLB) terdapat 79 sekolah yang terdiri dari 9 SLB negeri dan 70 SLB Swasta.</p> <p>Tujuan program Program Layanan Pendidikan Khusus adalah memberikan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (SLB) baik di sekolah negeri dan swasta . hal ini dapat dilakukan dengan pemenuhan 8 standard nasional pendidikan yang diwujudkan melalui pencapaian Akreditasi SLB (kompetitif). Selain itu pemerintah juga akan peningkatan prestasi siswa melalui kompensasi pada level nasional Internasional (komparatif). Upaya pemenuhan layanan pendidikan khusus juga perlu melakukan peningkatan akses layanan pendidikan khusus, pemberdayaan &amp; penguatan anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan, pelatihan dan pemagangan.</p> <p>Secara spesifik tujuan ini dapat dicapai melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendanaan pendidikan di Sekolah Swasta dan Negeri (BOSDA) sebagai biaya operasional Kegiatan Belajar Mengajar (KBM);</li> <li>2) Penjaminan layanan pendidikan yang berkualitas melalui</li> <li>3) Pelayanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui pemberian beasiswa inklusi, biaya asrama, suplemen makanan tambahan dan beasiswa magang</li> <li>4) Pemberian layanan pendidikan Khusus anak Autis</li> <li>5) Mendorong gerakan pembudayaan pendidikan inklusif di 5 kabupaten kota di DIY</li> <li>6) Mendorong prestasi anak berkebutuhan khusus dengan mengukutsertakan pada ajang kompetisi di level nasional dan internasional</li> </ol>								
ESELON III	NAMA	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidikan</b>								

	PROGRAM No. 3									
	INDIKATOR PROGRAM	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
		Angka kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.53	%	99,56	%	99,59	%	99,62	%
		Jumlah Medali kompetisi nasional dan internasional	52	medali	57	medali	61	medali	65	medali
	META INDIKATOR PROGRAM	1) Jumlah peserta ujian nasional yang lulus tahun n untuk jenjang SMA, SMK dan SLB dibagi Jumlah peserta ujian nasional pada tahun n dikali 100 2) Jumlah medali yang diperoleh setiap tahun dari lomba/kompetisi jenjang SD, SMP, dan PNFI Sumber data : Profil Pendidikan DIY 2017/2018								
	TUJUAN PROGRAM	Program peningkatan mutu pendidikan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (life skill yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang integral (integrated personality) yaitu mereka yang mampu mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal. Mutu pendidikan di DIY dilihat dari APK dan APM SM adalah sebagai berikut, dimana APK SM sebesar 98,8% dan APM SM 76,5%  Secara spesifik tujuan ini dapat dicapai melalui: 1. Seleksi, pembinaan, pengiriman lomba/kompetisi dan pemberian penghargaan bagi peserta didik dan pendidik/tenaga kependidikan yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional 2. Pembiayaan operasional penyelenggaraan PAUD sebagai model percontohan tingkat Provinsi 3. Penyediaan informasi pendidikan melalui media elektronik dan cetak yang dapat diakses oleh masyarakat serta pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SM berbasis online 4. Penyelenggaraan ujian nasional sebagai bentuk evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar jenjang SD/MI/SDLB 5. penghargaan dan peningkatan kualitas peserta didik dan PTK yang berprestasi di tingkat nasional dan								

		internasional 6. peningkatan karakter siswa dan perluasan akses pendidikan tinggi.								
ESELON III	NAMA PROGRAM No. 4	<b>Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>								
	INDIKATOR PROGRAM	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
		Pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten	87,46	%	87,54	%	87,61	%	87,68	%
META INDIKATOR PROGRAM	1. Verifikasi dan validasi data TPG SMA, dengan jumlah yang sudah bersertifikasi dibagi guru yang belum bersertifikasi dikali 100% 2. Verifikasi dan validasi data TPG SMK, dengan jumlah yang sudah bersertifikasi dibagi guru yang belum bersertifikasi dikali 100% 3. Verifikasi dan validasi data TPG SLB, dengan jumlah yang sudah bersertifikasi dibagi guru yang belum bersertifikasi dikali 100% 4. PTK SLB mendapat pendidikan dan pelatihan terkait pelayanan dan pelaksanaan PK-PLK sejumlah 673 orang 5. Insent GTY/PTY dan GTT/PTT di lingkungan Dinas Dikpora DIY sebanyak 4.162 orang Sumber data : Profil Pendidikan DIY 2017/2018									
<b>TUJUAN PROGRAM</b>	Kompetensi guru yang dikatakann sebagai modal dalam pengelolaan pendidikan dan pengajaran banyak macamnya. Secara garis besar dapat di lihat dari dua segi yaitu dari segi kompetensi pribadi dan dari kompetensi professional. Adapun macam-macam kompetensi tersebut ialah: 1. Mengembangkan kepribadian 2. Berintraksi dan berkomunikasi 3. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan 4. Melaksanakan administrasi sekolah 5. Melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran 6. Menguasai landasan kependidikan									

		<p>7. Menguasai bahan pengajaran  8. Menyusun program pengajaran  9. Melaksanakan program pengajaran  10. Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan</p> <p>Tujuan utama adanya program ini adalah tersedianya guru profesional-guru yang tersertifikasi Pendidik dan tenaga pendidik merupakan salah satu elemen penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Profesionalisme guru menjadi tuntutan dalam meningkatkan layanan pendidikan guna menunjang ketuntasan proses belajar. Oleh karenanya perlu melakukan akselerasi mutu pendidik dan tenaga kependidikan di DIY. Saat ini jumlah PTK yang telah mendapatkan sertifikasi adalah sebagai berikut:  a) SLB sertifikasi PNS 583 orang, non PNS 110 orang,  b) SMA PNS 2.348 orang, Non PNS 369 orang  c) SMK 3463 orang , Non PNS 738 orang</p> <p>Dari data tersebut masih banyak guru yang belum tersertifikasi ada 848 guru (629 guru belum Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan 219 guru on proses PPG). oleh itu perlu dilakukan upaya penguatan peran pendidik dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu, profesional dan peningkatan kualitas pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang meluas, merata dan berkeadilan, secara spesifik dapat dicapai melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengembangan mutu PTK SLB, SMA dan SMK</li> <li>2. Pembinaan karir pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemberian honor dan insentif GTY/PTY dan GTT/PTT, seleksi pembinaan dan pengiriman lomba PTK tingkat nasional, penilaian angka kredit bagi guru dan pengawas, serta seleksi dan penilaian calon kepala sekolah.</li> </ol>								
ESELON III	NAMA PROGRAM No. 5	<b>Program Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</b>								
	INDIKATOR PROGRAM	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
		Persentase sekolah menengah dan	74	%	81	%	88	%	95	%

		khusus yang melaksanakan pendidikan berbasis TIK								
	META INDIKATOR PROGRAM	jumlah sekolah menengah dan khusus yang melaksanakan pendidikan berbasis TIK pada tahun n dibagi jumlah sekolah menengah dan khusus pada tahun n kali 100								
	TUJUAN PROGRAM	<p>Sumber data : Profil Pendidikan DIY 2017/2018</p> <p>Teknologi informasi adalah ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat". Informasi dapat dikatakan sebagai data yang telah diolah. Data atau informasi tersebut dapat berupa tulisan, suara, gambar, video dan sebagainya. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi dalam bidang pendidikan, seperti pemanfaatan komputer dan jaringan computer memberikan kesempatan kepada setiap pembelajar untuk mengakses materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk interaktif melalui jaringan Komputer. Dari penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa TIK merupakan media yang berupa teknologi seperti komputer beserta jaringannya yang dapat digunakan untuk proses pengolahan dan pemrosesan data yang berguna untuk pemanfaatan berbagai bidang sosial, ekonomi, budaya dan tentunya pendidikan.</p> <p>Teknologi Informasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari internet spreadsheet, wordprocessor dan database. Komputer dan teknologi telah menjadi bagian dari proses belajar sehari-hari. kondisi ini memberikan peluang untuk dunia pendidikan untuk menggunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah. DIY mengintegrasikan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem kegiatan belajar mengajar, dalam rangka mencapai efektifitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar, penyediaan sumber data dan pengetahuan melalui penggunaan internet dan media pembelajaran berbasis online.</p> <p>Secara spesifik tujuan ini dapat dicapai melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produksi media pembelajaran berbasis online (web jogja belajar)</li> <li>2. Pelayanan dan publikasi media pembelajaran berbasis TIK</li> </ol>								
ESELON III	NAMA PROGRAM No. 6	<b>Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Pendidikan Teknik</b>								
	INDIKATOR	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>				

PROGRAM	TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	
	Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar	2045	siswa	2080	siswa	2113	siswa	2148	siswa	
META INDIKATOR PROGRAM	Jumlah peserta didik sekolah kejuruan yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar di BLPT pada tahun n Data : BLPT									
TUJUAN PROGRAM	<p>Tujuan program adalah penguatan kebutuhan akan perkembangan pembangunan daerah, menciptakan tenaga kerja siap pakai dan ketrampilan yang berstandart sehingga dapat menunjang dan mengisi kebutuhan dari industri kreatif maupun industri otomotif.</p> <p>Penguatan peran BLPT sebagai lembaga pelatihan dan pendidikan teknik antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai Tempat Praktik Siswa Banyak SMK yang tidak memiliki peralatan dan mesin untuk praktik dalam memenuhi standar kompetensi atau tujuan yang ditentukan, menggunakan industri sebagai tempat praktik (outsourcing).</li> <li>2. Sebagai Tempat Magang Kerja Sistem Magang (apprenticeship) merupakan sistem pendidikan kejuruan yang paling tua dalam sejarah pendidikan vokasi. Sistem magang merupakan sistem yang cukup efektif untuk mendidik dan menyiapkan seseorang untuk memperdalam dan menguasai keterampilan yang lebih rumit yang tidak mungkin atau tidak pernah dilakukan melalui pendidikan masal di sekolah.</li> <li>3. Sebagai Tempat Belajar Manajemen Industri dan Wawasan Dunia Kerja Siswa juga belajar tentang manajemen dan organisasi industri untuk belajar tentang dunia usaha dan cara pengelolaan usaha, sehingga mereka memiliki wawasan dan pengetahuan tentang dunia usaha. Melalui belajar manajemen dan organisasi ini juga bisa menambah wawasan siswa pada dunia wirausaha.</li> </ol>									
ESELON III	NAMA PROGRAM No. 7	Program Layanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta								
	INDIKATOR PROGRAM	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>				
		<b>TARGET/SATUAN</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>

		Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kota Yogyakarta	84,83%		86,90	%	88,97	%	91,03	%
	META INDIKATOR PROGRAM	Jumlah SMA dan SMK (Program keahlian) yang memenuhi SNP di tahun n / Jumlah SMA dan SMK di kota Yogyakarta di tahun n dikali 100								
		Sumber data : Balai Dikmen Kota Yogyakarta								
	TUJUAN PROGRAM	<p>Tujuan program adalah meningkatkan mutu layanan dan aksesibilitas pendidikan menengah yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Yogyakarta.</p> <p>Permasalahan pendidikan dan jumlah beban kerja yang bertambah menjadikan balai layanan pendidikan menengah sebagai sarana penghubung untuk mempermudah jangkauan layanan dan penanganan berbagai permasalahan pendidikan di sekolah. Balai layanan pendidikan menengah juga mendukung kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY sebagai penunjang administrasi dan kegiatan bidang pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk jenjang SMA dan SMK di Kota Yogyakarta.</p>								
ESELON III	NAMA PROGRAM No. 8	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul								
	INDIKATOR PROGRAM	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
		Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Bantul	78,67		80,67	%	82,67	%	84,97	%
		Jumlah SMA dan SMK (Program keahlian) yang memenuhi SNP di tahun n / Jumlah SMA dan SMK di Bantul di tahun n dikali 100								
		Sumber data : Balai Dikmen Kabupaten Bantul								
	TUJUAN	Tujuan program adalah meningkatkan mutu layanan dan aksesibilitas pendidikan menengah yang berkualitas dan								

	PROGRAM	<p>mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bantul.</p> <p>Permasalahan pendidikan dan jumlah beban kerja yang bertambah menjadikan balai layanan pendidikan menengah sebagai sarana penghubung untuk mempermudah jangkauan layanan dan penanganan berbagai permasalahan pendidikan di sekolah. Balai layanan pendidikan menengah juga mendukung kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY sebagai penunjang administrasi dan kegiatan bidang pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk jenjang SMA dan SMK di Kabupaten Bantul.</p>								
ESELON III	NAMA PROGRAM No. 9	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Gunungkidul	81,00		83,22	%	85,31	%	87,41	%
	META INDIKATOR PROGRAM	<p>Jumlah SMA dan SMK (Program keahlian) yang memenuhi SNP di tahun n / Jumlah SMA dan SMK di Gunungkidul di tahun n dikali 100</p> <p>Sumber data : Balai Dikmen Kabupaten Gunungkidul</p>								
TUJUAN PROGRAM	<p>Tujuan program adalah meningkatkan mutu layanan dan aksesibilitas pendidikan menengah yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.</p> <p>Permasalahan pendidikan dan jumlah beban kerja yang bertambah menjadikan balai layanan pendidikan menengah sebagai sarana penghubung untuk mempermudah jangkauan layanan dan penanganan berbagai permasalahan pendidikan di sekolah. Balai layanan pendidikan menengah juga mendukung kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY sebagai penunjang administrasi dan kegiatan bidang pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk jenjang SMA dan SMK di Kabupaten Gunungkidul.</p>									

ESELON III	NAMA PROGRAM No. 10	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo								
	INDIKATOR PROGRAM	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
		Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Kulon Progo	72,67	%	75,67	%	78,67	%	81,67	%
META INDIKATOR PROGRAM	Mendukung kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY sebagai penunjang administrasi dan kegiatan bidang pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk jenjang SMA dan SMK di Kabupaten Kulon Progo									
	Jumlah SMA dan SMK (Program keahlian) yang memenuhi SNP di tahun n / Jumlah SMA dan SMK di Kabupaten Kulon Progo di tahun n dikali 100									
	Sumber data : Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo									
TUJUAN PROGRAM	<p>Tujuan program adalah meningkatkan mutu layanan dan aksesibilitas pendidikan menengah yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.</p> <p>Permasalahan pendidikan dan jumlah beban kerja yang bertambah menjadikan balai layanan pendidikan menengah sebagai sarana penghubung untuk mempermudah jangkauan layanan dan penanganan berbagai permasalahan pendidikan di sekolah. Balai layanan pendidikan menengah juga mendukung kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY sebagai penunjang administrasi dan kegiatan bidang pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk jenjang SMA dan SMK di Kabupaten Kulon Progo.</p>									
ESELON III	NAMA PROGRAM No. 11	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman								
	INDIKATOR PROGRAM	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
	Persentase sekolah	83,33		85,00	%	86,67	%	88,33	%	

		dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Sleman								
	META INDIKATOR PROGRAM	Mendukung kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY sebagai penunjang administrasi dan kegiatan bidang pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk jenjang SMA dan SMK di Kabupaten Sleman								
		Jumlah SMA dan SMK (Program keahlian) yang memenuhi SNP di tahun n / Jumlah SMA dan SMK di Sleman di tahun n dikali 100								
		Sumber data : Balai Dikmen Kabupaten Sleman								
	TUJUAN PROGRAM	<p>Tujuan program adalah meningkatkan mutu layanan dan aksesibilitas pendidikan menengah yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sleman.</p> <p>Permasalahan pendidikan dan jumlah beban kerja yang bertambah menjadikan balai layanan pendidikan menengah sebagai sarana penghubung untuk mempermudah jangkauan layanan dan penanganan berbagai permasalahan pendidikan di sekolah. Balai layanan pendidikan menengah juga mendukung kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY sebagai penunjang administrasi dan kegiatan bidang pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk jenjang SMA dan SMK di Kabupaten Sleman.</p>								
ESELON III	NAMA PROGRAM No. 12	Program Pembinaan Kepemudaan								
	INDIKATOR PROGRAM	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
		Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	24	%	26	%	28	%	30	%
META INDIKATOR	Jumlah pemuda yang mendapat pendidikan kepemudaan di tahun n									
	Sumber data : BPO Disdikpora DIY									

	PROGRAM									
	TUJUAN PROGRAM	<p>Sesuai dengan amanat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (5), dan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemerintah daerah perlu menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing perlu penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda secara terencana, sistematis, bertahap, terpadu, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Saat ini DIY telah memiliki 46 sentra pemuda, setiap tahun pemerintah daerah perlu menyediakan sentra pemberdayaan pemuda untuk mempertahankan kualitas pembangunan kepemudaan/Indeks kualitas pemuda (DIY menduduki peringkat 1 indeks pembangunan pemuda se Indonesia)</p> <p>Secara spesifik tujuan program dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. meningkatkan tingkat kemandirian pemuda dengan pelatihan kewirausahaan (<i>Skill</i>)</li> <li>2. Penanaman nilai karakter kebangsaan dikalangan pemuda</li> <li>3. Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman pemuda dalam kegiatan yang bersifat nasional dan internasional,</li> </ol>								
ESELON III	NAMA PROGRAM No. 13	Program Pembinaan Keolahragaan								
	INDIKATOR PROGRAM	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
		Peningkatan prestasi olahraga	17	medali	18	medali	19	medali	20	medali
META INDIKATOR PROGRAM	<p>Jumlah medali yang diperoleh di POPNAS, PEPARPENAS, POSPENAS, POPWIL, POPDA, POSPEDA, PEPARDA, Lomba Olahraga Tradisional, Kejurda Olahraga Pelajar, Tri Lomba Juang, Haornas, dan Kejuaraan Bola Voli Piala Raja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan atlet berbakat usia 10-18th selama 8 bulan disiapkan sebagai kerangka team POPNAS agar tersandart sesuai cabor (16 cabor).</li> <li>2. Pengiriman kontingen olahraga tradisional 3 nomor lomba.</li> <li>3. Pembinaan dan pengiriman kontingen untuk PEPARPENAS di Papua, 3 cabor</li> <li>4. Pembinaan dan pengiriman kontingen POSPENAS, 11 cabor.</li> <li>5. Pembinaan dan pengiriman kontingen POPNAS, 23 cabor.</li> <li>6. Kejuaraan olahraga tingkat daerah, 7 kejuaraan.</li> </ol>									

		Sumber data : BPO Disdikpora DIY
	TUJUAN PROGRAM	<p>Keolahragaan mengajarkan nilai-nilai positif seperti kreatif, disiplin, tanggung jawab, kritis, sportif, kompetitif dan mendukung pembentukan karakter manusia. Namun pengelolaan prestasi olahraga belum optimal. Pada PON 2016, DIY berada pada peringkat 9 dengan perolehan total medali sebanyak 56 medali (Rinciannya yakni 16 medali emas, 15 medali perak dan 25 medali perunggu). hal ini disebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pembinaan belum terkoordinasi dengan baik dan terarah pada pembibitan prestasi olahrag</li> <li>2) masih minimnya sarana dan prasarana olahraga</li> <li>3) masih sulitnya pemanfaatan fasilitas olahraga karena masih terbatas</li> <li>4) belum maksimalnya prestasi olahraga di DIY</li> </ol> <p>Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu Program ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga</li> <li>2. pembinaan atlet pada kompetisi olahraga nasional</li> <li>3. Pengiriman atlet DIY pada berbagai kompetisi tingkat nasional</li> </ol>

4.6.3. PEMETAAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

IKU	META PROGRAM									
GUBERNUR	SASARAN PEMDA	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM								
	INDIKATOR	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
	SASARAN PEMDA	TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80.72	%	81.08	%	81.4	%	81.68	%
SETDA/ ASISTEN	PROGRAM PEMDA	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan								
	INDIKATOR PROGRAM PEMDA	Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan ( SNP )	11.49	%	12.10	%	12.59	%	13.20	%
		Harapan Lama Sekolah	15.66	tahun	15.82	tahun	15.97	tahun	16.12	tahun
		Peningkatan jumlah pemuda kader aktif	205	orang	210	orang	215	orang	220	orang
		Presentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis dengan kategori maju	6.71	%	7.47	%	8.22	%	8.98	%
ESELON II	MENDUKUNG SASARAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan								
	INDIKATOR	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
	SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	24	%	25	%	26	%	27	%
	META	Peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan dibagi jumlah penduduk usia potensial membaca x 100 %								

	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	ket: jumlah pemustaka dilihat dari pengunjung Grhtama Pustaka dan layanan ekstensi (perpus keliling, pojok baca , digital library iJogja, dll) sedangkan penduduk usia potensial berdasarkan data seluruh DIY. Usia potensial membaca = <b>5 - 45 tahun</b> . Sedangkan data penduduk usia potensial dari BPS thun n-1. <b>Pada tahun 2017 data pengunjung BPAD sebanyak 512.057 pemustaka, sedangkan penduduk usia potensial DIY (Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani) adalah sebanyak 2.245.100. Sehingga baseline pada tahun 2017 adalah (512.057 pemustaka/2.245.100 orangX100%= 22,80%)</b>								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
	Jumlah perpustakaan yang terstandard	39	Perpus-takaan	49	Perpus-takaan	59	Perpus-takaan	69	Perpus-takaan	
INDIKATOR PROGRAM	jumlah perpustakaan terstandard sesuai dengan peraturan sampai dengan tahun n (data dari baseline (semula) berjumlah 19 dan diproyeksi akan bertambah sepuluh (10) perpustakaan setiap tahunnya sehingga pada akhir periode ditargetkan terdapat 69 perpustakaan yang sesuai dengan standart). <b>Standar Perpustakaan mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. (Untuk Perpustakaan di tingkat satuan pendidikan menengah, standar perpustakaan ditambah dengan Pergub DIY no 18 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah)</b> Sumber data berasal dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah									
TUJUAN PROGRAM	Kondisi Umum : Jumlah Perpustakaan Sekolah SMA/SMK/MA/SLB ada 522 perpustakaan, Perpustakaan Instansi /OPD ada 41 perpustakaan, dimana kondisi perpustakaan pada umumnya belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan, dari jumlah tersebut sampai dengan Tahun 2017 baru ada 19 perpustakaan yang memenuhi standard perpustakaan sekolah dan 1 perpustakaan OPD. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh dengan peningkatan minat baca, sehingga perlu pembinaan dan pendampingan secara kontinu.  Tujuan program adalah untuk Pengembangan dan Pembinaan perpustakaan dalam rangka percepatan pemasyarakatan Budaya Baca dengan indikator Pengelolaan Perpustakaan sekolah setingkat SMA/SMK/MA									

		<p>terstandard sesuai dengan Pergub DIY no 18 tahun 2018 dan Standar Perpustakaan Nasional. Standar perpustakaan sesuai SPN harus memenuhi kriteria/indikator sebagai berikut:</p> <p>1. Manajemen Perpustakaan; 2. Gedung/Ruang, sarana prasarana; 3. Sumber Daya Manusia; 4. Anggaran; 5. Koleksi; 6. Pengorganisasian bahan pustaka; 7. Layanan; 8. Kerjasama; 9. Perawatan koleksi perpustakaan</p> <p>Kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program tersebut di atas dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti kegiatan Pembinaan Perpustakaan dan Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca. Keterkaitan kedua kegiatan, perpustakaan yang sudah terakreditasi salah satu indikator yang terpenuhi adalah jumlah kunjungan</p>								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Pengembangan bahan pustaka dan informasi								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan	10,174	Eksemplar	10,174	Eksemplar	10,174	Eksemplar	10,174	Eksemplar
	META INDIKATOR PROGRAM	<p>Jumlah penambahan koleksi dan jumlah koleksi hasil alih media, alih bahasa, dan alih tulisan pada tahun n</p> <p>Penambahan jumlah koleksi diproyeksikan bertambah dari baseline sebanyak 247,876 eksemplar dan bertambah sebanyak 10,174 eksemplar tiap tahunnya dan diproyeksi akan menjadi 298,746 pada akhir tahun 2022. (sumber data : Bidang Perpustakaan DPAD DIY)</p>								
TUJUAN PROGRAM	<p>Hingga tahun 2017 jumlah koleksi bahan pustaka BPAD DIY adalah sebanyak 247.876 eksemplar. Sedangkan jumlah penduduk usia potensial DIY yang menjadi sasaran layanan perpustakaan adalah sebanyak 2.245.100. Jumlah koleksi ini tentu masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Belum lagi dinamika pertumbuhan berbagai jenis perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi di DIY masih tergolong berjalan sangat lambat, sedangkan di sisi lain pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan jumlah produksi buku. Jumlah produksi buku hanya ± 6.000 judul pertahun. Hal ini membuat Program pengembangan koleksi perpustakaan baik melalui pengadaan bahan pustaka, melakukan Alih Media buku-buku langka, maupun upaya pelestarian atau penyelamatan bahan pustaka yang terangkum dalam program Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi ini sangat dibutuhkan untuk dapat</p>									

		<p>memenuhi kebutuhan masyarakat DIY.</p> <p>Tujuan program adalah Terwujudnya kemudahan akses bahan pustaka dan informasi melalui Pengadaan koleksi perpustakaan misalnya e-book, e-journal, pembelian buku. Dan pelestarian Bhn pustaka misalnya fumigasi, alih media, alih tulisan, alih bahasa, preservasi digital.</p> <p>Sedangkan Kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program tersebut di atas dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti kegiatan Pelestarian Bahan Pustaka dan kegiatan Pengelolaan Bahan Pustaka dan Pengembangan Koleksi.</p>								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Layanan Perpustakaan								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Jumlah anggota baru perpustakaan	6,000	orang	6,000	orang	6,000	orang	6,000	orang
	Jumlah perpustakaan anggota Jogja Library For All (JLA) yang menindaklanjuti kerjasama	5	Perpustakaan	6	Perpustakaan	7	Perpustakaan	8	Perpustakaan	
META INDIKATOR PROGRAM	<p>Jumlah anggota baru perpustakaan umum DIY pada tahun n</p> <p>Note: jumlah anggota baru diproyeksikan bertambah 6000 anggota baru tiap tahunnya, sehingga diharapkan meningkat dari baseline 33.656 orang pada tahun 2017 menjadi 63.656 orang pada tahun 2022. (Sumber data: Bidan Perpustakaan DPAD DIY)</p>									
	<p>Jumlah perpustakaan anggota Jogja Library For All (JLA) yang menindaklanjuti kerjasama sampai dengan tahun n</p> <p>Note: jumlah perpustakaan anggota Jogja Library For All (JLA) diproyeksikan bertambah 1 anggota tiap tahunnya, sehingga diharapkan meningkat dari baseline 3 perpustakaan pada tahun 2017 menjadi 8 perpustakaan pada tahun 2022. (Sumber data: Bidan Perpustakaan DPAD DIY)</p>									
TUJUAN PROGRAM	<p>Gambaran umum kegiatan yang dikelola oleh subbidang layanan BPAD DIY ini hingga tahun 2017 tercatat terdapat 33.656 jumlah anggota perpustakaan. Sedangkan untuk urusan kerjasama perpustakaan yang berada dalam Jogja Library for All atau disebut JLA, hingga tahun 2017 terdapat 3 perpustakaan yang telah menindaklanjuti kerjasama ini dengan melakukan kolaborasi katalog dan juga layanan pinjam silang, yakni salah</p>									

		<p>satu bentuk layanan dimana masing-masing anggota JLA bisa saling meminjamkan koleksi bahan pustakanya tanpa harus pergi ke perpustakaan yang bersangkutan namun bisa langsung memesan buku yang dimaksud dengan menggunakan fasilitas delivery order.</p> <p>Peningkatan layanan layanan dan fasilitas peminjaman seperti ini dirasakan perlu untuk ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dewasa ini yang sangat mobile dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan juga layanan yang ada di BPAD DIY.</p> <p>Tujuan program adalah Peningkatan Budaya Baca Masyarakat melalui sejumlah aktivitas yang dilaksanakan yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Koordinasi diantara anggota JLA dengan tujuan menambah Layanan Pinjam diantara anggota JLA ,</li> <li>2. pelaksanaan layanan Pojok Baca di 10 Titik dan</li> <li>3. Fasilitas Layanan Delivery Order.</li> <li>4. pelaksanaan layanan perpustakaan Grhatama pustaka</li> <li>5. Pelayanan perpustakaan ekstensi</li> </ol> <p>Kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program tersebut di atas dilakukan melalui kegiatan Layanan Perpustakaan.</p>								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Peningkatan jumlah OPD/UPTD/Sekolah yang melakukan pengelolaan arsip sesuai dengan standard	70	Institusi	90	Institusi	110	Institusi	130	Institusi
	META INDIKATOR PROGRAM	Peningkatan jumlah OPD/UPTD/Sekolah yang melakukan pengelolaan arsip sesuai dengan standard (penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip) pada tahun n Data diambil dari bidang Kearsipan DPAD DIY								
TUJUAN PROGRAM	Program pembinaan dan pengembangan sistem kearsipan diperlukan karena petugas kearsipan di instansi masih belum semua mendapatkan bimbingan dan sering terjadi adanya petugas arsip yang mutasi, sehingga petugas arsip yang baru perlu mendapat bimbingan agar mereka dapat bekerja lebih optimal. Pembinaan SDM Kearsipan dimaksudkan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan ketrampilan, mengoptimalkan fungsi seluruh									

		<p>subsistem bidang kearsipan serta meningkatkan minat dan etos kerja sumber daya manusia kearsipan dalam rangka pelaksanaan sistem kearsipan pola baru secara utuh dan konsisten. Adapun Tujuan dilaksanakannya pembinaan adalah untuk menciptakan tertib administrasi (kearsipan) pada instansi; meningkatkan koordinasi dan kemampuan teknis SDM kearsipan; meningkatkan mutu pengelolaan arsip instansi; meningkatkan mutu pelayanan kearsipan; memantau dan mengendalikan pelaksanaan Sistem Kearsipan Pola Baru; meningkatkan upaya mengubah citra arsip menjadi informasi yang tertata. Dengan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sistem kearsipan di Pemerintah Daerah DIY ini diharapkan DIY dapat menyelamatkan jati diri daerah yang merupakan salah satu aset bangsa. Program yang dilaksanakan berupa pembinaan dan pengembangan sistem kearsipan. Program ini memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang kearsipan dalam hal ini melalui pembinaan dan pemberdayaan sistem kearsipan terhadap pencipta arsip instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hingga tahun 2017, telah terdapat 25 institusi yang telah menerima pembinaan kearsipan. Pembinaan dan Pengembangan kearsipan bertujuan untuk membina penyelenggaraan sistem kearsipan pada setiap pencipta arsip OPD/lembaga kearsipan Daerah /Sekolah sesuai dengan arah dan sasaran pembangunan nasional di bidang kearsipan sehingga dapat mewujudkan tertib administrasi kearsipan untuk mendukung akuntabilitas kinerja; Sedangkan Kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program tersebut di atas dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti kegiatan Penilaian dan Penyusutan Arsip dan kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan.</p>								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Pelestarian dan Layanan Arsip								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	8,000	berkas	8,000	berkas	8,000	berkas	8,000	berkas
META INDIKATOR PROGRAM	<p>Arsip hasil akuisisi yang sudah dibuatkan daftar khasanah arsip dan dilestarikan pada tahun n</p> <p>Note: jumlah arsip yang diolah dan dilestarikan diproyeksikan mengalami peningkatan sebanyak 4000 lembar pada tahun 2018, dan 8000 lembar pada tahun-tahun berikutnya sehingga total jumlah arsip yang diolah dan dilestarikan pada tahun 2022 diproyeksi akan ada sebanyak 89.968 berkas</p>									

		data diambil dari bidang Kearsipan DPAD DIY
	TUJUAN PROGRAM	<p>Gambaran secara umum arsip yang telah diolah dan dilestarikan yang berada di BPAD DIY hingga tahun 2017 terdapat 53.968 berkas. Program ini merupakan program yang sangat penting dan signifikan untuk penguatan identitas Yogyakarta sebagai sebuah kota budaya. Karena melalui program ini pemerintah mengembangkan kearsipan sebagai upaya mendukung, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal. Strateginya yaitu kearsipan dikelola, baik dengan alih media ataupun digitalisasi arsip dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal sebagai upaya penyelamatan arsip bernilai guna sekunder dan bersejarah untuk penguatan keistimewaan DIY.</p> <p>Tujuan dari program ini adalah agar arsip yang telah diolah tersebut dapat diselamatkan nilai sejarah maupun nilai gunanya. Mengingat arsip merupakan sumber ingatan yang sangat penting, sehingga pengelola arsip bertugas menjaga kondisi arsip maupun sarana penunjang lainnya tetap baik, mengingat arsip identik dengan kertas-kertas sehingga dikhawatirkan cepat rusak jika tidak dirawat. Arsip kertas akan cepat rusak jika dimakan rayap serta serangga pengganggu lainnya. Oleh karena itu penyemprotan anti serangga dan pemberian bahan pengawet (kapur barus) harus dilaksanakan secara rutin. Sementara itu layanan arsip kepada masyarakat dilaksanakan setelah arsip diolah. Kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program tersebut di atas dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti kegiatan Akuisisi dan Penyelamatan Arsip dan kegiatan Pengelolaan Arsip Statis dan Naskah Sumber Arsip.</p>

4.6.4. PEMETAAN PROGRAM BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL

<b>IKU</b>	<b>META PROGRAM</b>									
GUBERNUR	SASARAN PEMDA	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM								
	INDIKATOR SASARAN PEMDA	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		IPM	80.72	persen	81.08	persen	81.40	persen	81.68	persen
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70.02	persen	70.12	persen	70.22	persen	70.32	persen	
SETDA/ ASISTEN	PROGRAM PEMDA	Program Pembangunan Sosial Masyarakat								
	INDIKATOR PROGRAM PEMDA	Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas	3	Kabupaten/ Kota	4	Kabupaten/ Kota	5	Kabupaten/ Kota	5	Kabupaten/ Kota
		Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	21.17	persen	21.62	persen	21.62	persen	21.62	persen
		Total Fertility Rate	2,1	angka	2,1	angka	2,1	angka	2,1	angka
		Peningkatan jumlah desa/kelurahan cepat berkembang	113	desa/ kelurahan	119	desa/ kelurahan	125	desa/ kelurahan	131	desa/ kelurahan
		Angka Kejahatan	10.95		9.6		8.39		7.33	

		per 100.000 penduduk (crime rate)								
ESELON II	MENDUKUNG SASARAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan yang mernjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual								
	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi bahan kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	75% dari 6 rumusan bahan	%	84% dari 6 rumusan bahan	%	92% dari 6 rumusan bahan	%	100% dari 6 rumusan bahan	%
META INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah bahan kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual yang menjadi rumusan kebijakan ditambah fasilitasi kehidupan beragama tahun n dibagi 2  Catatan: Fasilitasi kehidupan beragama terdiri dari 4 kegiatan yaitu fasilitas peribadatan dan lembaga keagamaan, pelayanan jamaah haji, pembinaan mental 5 agama, penyelenggaraan festival keagamaan									
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Pembinaan Sarana Keagamaan								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
Rumusan bahan kebijakan bina mental	2	buah	2	buah	2	buah	2	buah		

		dan sarana keagamaan yang ditindaklanjuti								
		Terlayannya lembaga keagamaan 5 agama	4	layanan	4	layanan	4	layanan	4	layanan
	META	Jumlah rumusan bahan kebijakan bina mental yang ditindaklanjuti pada tahun n								
	INDIKATOR PROGRAM	Jumlah layanan lembaga keagamaan 5 agama (fasilitas peribadatan dan lembaga keagamaan, pelayanan jamaah haji, pembinaan mental 5 agama, penyelenggaraan festival keagamaan) tahun n								
	TUJUAN PROGRAM	<p>Upaya pembinaan mental spiritual perlu terus dilakukan dalam upaya mewujudkan SDM yang berakhlak baik dengan kondisi mental rohani yang berkualitas. Demikian pula dengan sarana keagamaan yang ada perlu untuk ditingkatkan kualitas fisik maupun pelayanan yang diberikan kepada umat beragama. Untuk itu, diperlukan rumusan bahan kebijakan yang berkesinambungan terkait dengan pembinaan mental rohani maupun pembinaan sarana keagamaan Secara spesifik :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan rumusan bahan kebijakan bina mental spiritual dan yang berkualitas (sesuai dan mampu menjawab isu strategis, memiliki informasi yang jelas sehingga mampu diimplementasikan, memiliki dukungan sumber daya maupun stakeholders yang terkait dengan proses implementasi kebijakan).</li> <li>2. Meningkatkan pembinaan mental dan rohani melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan mental dan rohani (pengajian, misa, atau bentuk pembinaan mental rohani agama lain sesuai dengan agama masing-masing)</li> <li>3. Memfasilitasi pembangunan fasilitas peribadatan dan pelayanan lembaga keagamaan</li> <li>4. Memfasilitasi pelayanan bagi jamaah haji</li> <li>5. Memfasilitasi penyelenggaraan festival keagamaan melalui fasilitasi penyelenggaraan festival tingkat daerah (sharing dana dengan kabupaten/kota penyelenggara untuk penyelenggaraan festival) dan fasilitasi penyelenggaraan festival tingkat nasional (pengiriman kafilah/kontingen festival)</li> </ol>								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Kesehatan Masyarakat								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Rumusan bahan pengelolaan dan	2	buah	2	buah	2	buah	2	buah

		penguatan kebijakan kesehatan masyarakat yang ditindaklanjuti								
	META INDIKATOR PROGRAM	Jumlah rumusan bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan kesehatan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun n								
	TUJUAN PROGRAM	Capaian indikator kesehatan seperti AKI masih perlu mendapat perhatian karena pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah. Jumlah kematian bayi dan balita pun masih besar meskipun memiliki kecenderungan menurun. Selain itu, permasalahan lain seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, skema pembiayaan penanganan kesehatan dan kesakitan, pelayanan rumah sakit yang belum optimal, ketersediaan tenaga kesehatan yang belum memenuhi standar nasional, dan prevalensi penyakit tidak menular yang terus meningkat juga masih harus menjadi perhatian. Untuk itu, diperlukan rumusan kebijakan strategis yang berkualitas dan berkesinambungan untuk mengatasi permasalahan yang ada.								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Sumber Daya Manusia								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Rumusan bahan kebijakan pengelolaan dan penguatan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	2	buah	2	buah	2	buah	2	buah
	META INDIKATOR PROGRAM	Jumlah rumusan bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan SDM yang ditindaklanjuti pada tahun n								
TUJUAN PROGRAM	SDM adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, kualitas SDM perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi. Adapun peningkatan kualitas SDM ini dapat dilakukan									

		<p>melalui pembinaan mental spiritual, meningkatkan kualitas pendidikan dan juga peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Akan tetapi, kondisi yang ada hingga saat ini menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan di dalam capaian indikator pendidikan seperti halnya angka harapan lama sekolah (AHLS) dan angka rata-rata lama sekolah. Berdasarkan data, AHLS di Gunungkidul, Bantul dan Kulon Progo masih berada di bawah AHLS DIY. Sedangkan untuk angka rata-rata lama sekolah, capaian Gunungkidul masih berada pada angka 6,46 tahun atau rata-rata penduduknya menyelesaikan pendidikan hanya di tingkat dasar. Selain itu, sebagai upaya meningkatkan akses perluasan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan dan penguasaan teknologi anak didik maka perlu ditingkatkan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan di SMK dan vokasional berbasis keunggulan lokal. Untuk itu, diperlukan rumusan kebijakan strategis yang berkualitas dan berkesinambungan untuk mengatasi permasalahan yang ada</p>
--	--	---

#### 4.6.5. PEMETAAN PROGRAM PEREKONOMIAN

##### 1. DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

IKU	META PROGRAM									
GUBERNUR	SASARAN PEMDA	<b>Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah</b>								
	INDIKATOR SASARAN PEMDA	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Indeks Williamson	0.4542		0.4524		0.4506		0.4489	
SETDA/ ASISTEN	PROGRAM PEMDA	<b>Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan</b>								
	INDIKATOR PROGRAM PEMDA	Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	40.23	persen	40.24	persen	40.25	persen	40.26	persen
		Persentase	67	persen	72	persen	78	persen	83	persen

		penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi								
ESELON II	MENDUKUNG SASARAN PERANGKAT DAERAH	<b>Meningkatnya realisasi investasi</b>								
	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		nilai PMTB dalam PDRB DIY	38,698,221	(Rp Juta rupiah)	40,633,132	(Rp Juta rupiah)	42,664,788	(Rp Juta rupiah)	44,798,028	(Rp Juta rupiah)
	META INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	nilai PMTB dalam PDRB DIY tahun n (Atas dasar harga berlaku) : sumber BPS DIY								
ESELON III	NAMA PROGRAM	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi</b>								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA & PMDN tahun n	941819.445	Juta Rupiah	988910.4173	Juta Rupiah	1038355.938	Juta Rupiah	1090273.735	Juta Rupiah
	META INDIKATOR	akumulasi nilai realisasi investasi PMA & PMDN tahun n dikurangi tahun (n-1)								

	PROGRAM									
	TUJUAN PROGRAM	<p>Dalam program ini bertujuan mengatasi ketimpangan wilayah dan persebaran investasi merata di wilayah DIY</p> <p>Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyusun potensi investasi yang siap jual</li> <li>2. menyusun Rencana penanaman modal</li> <li>3. melaksanakan pemantauan PM</li> <li>4. melaksanakan penanganan permasalahan PM</li> </ol>								
Eselon III	NAMA PROGRAM	<b>Program Promosi Investasi</b>								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Nilai Rencana Investasi tahun n	1036356	Juta Rupiah	1243628	Juta Rupiah	1492353	Juta Rupiah	1790824	Juta Rupiah
	META INDIKATOR PROGRAM	nilai rencana investasi baru yang diajukan dalam ijin penanaman modal tahun n								
	TUJUAN PROGRAM	<p>Dalam program ini bertujuan memperkenalkan potensi investasi yang siap jual</p> <p>Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memamerkan potensi investasi yang siap jual</li> <li>2) mempertemukan investor yang berminat berinvestasi</li> <li>3) melakukan kerjasama luar negeri</li> </ol>								
ESELON II	MENDUKUNG SASARAN PERANGKAT DAERAH	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan</b>								
	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal	83	nilai	84	nilai	85	nilai	85	nilai

		dan Eksternal)								
	META INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	Formula Penghitungan: Survey Indeks Kepuasan Masyarakat								
Eselon III	NAMA PROGRAM	<b>Program Pelayanan Perijinan</b>								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	95%	persen	97%	persen	99%	persen	100%	persen
	META INDIKATOR PROGRAM	(Waktu penyelesaian ijin sesuai SOP dibagi waktu realisasi) dikali 100%								
	TUJUAN PROGRAM	<p>Dalam program ini bertujuan melaksanakan pelayanan perijinan dan non perijinan</p> <p>Proses utama pelaksanaan progam ini mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melaksanakan pelayanan perijinan dan non perijinan</li> <li>2) menyusun SOP pelayanan perijinan dan non perijinan</li> <li>3).melaksanakan Survey kepuasan masyarakat</li> <li>4. melaksanakan koordinasi proses penyelenggaraan perijinan dan non perijinan</li> <li>5. melaksanakan pengendalian dan pembinaan pelayanan perijinan dan non perijinan</li> </ol>								
Eselon III	NAMA PROGRAM	<b>Program Kemudahan Berusaha dan Pelayanan Pengaduan</b>								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Waktu penyelesaian	5	hari	3	hari	2	hari	1	hari

		ijin usaha								
	META INDIKATOR PROGRAM	durasi waktu penyelesaian ijin usaha								
	TUJUAN PROGRAM	<p>Dalam program ini bertujuan mempermudah investor dalam berusaha dan melakukan pelayanan pengaduan</p> <p>Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:</p> <p>1) menyusun Manajemen Pengendalian Mutu dan kualitas pelayanan</p> <p>2) melaksanakan percepatan perizinan berusaha</p> <p>3) melakukan pelayanan pengaduan perijinan</p>								

## 2. DINAS KOPERASI DAN UMKM

<b>IKU</b>	<b>META PROGRAM</b>									
GUBERNUR	SASARAN PEMDA	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan								
	INDIKATOR SASARAN PEMDA	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Pertumbuhan Ekonomi	5.26	persen	5.29	persen	5.31	persen	5.34	persen
SETDA/ASISTEN	PROGRAM PEMDA	Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)								
	INDIKATOR PROGRAM PEMDA	kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan	44.00	Persen	45.00	Persen	46.00	Persen	47.00	Persen

		akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY								
ESELON II	MENDUKUNG SASARAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UKM								
	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		omzet koperasi	3,716,227	Rp Juta	3,734,809	Rp Juta	3,753,483	Rp Juta	3,772,250	Rp Juta
	omzet UKM	10,692	Rp Milyar	10,906	Rp Milyar	11,124	Rp Milyar	11,347	Rp Milyar	
META INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	Omset Koperasi dihitung dari total omzet koperasi pada tahun n berdasarkan laporan tahunan koperasi Omset UKM dihitung dari total omzet UKM sumber data: Dinas Koperasi dan UKM									
ESELON III	NAMA PROGRAM	Pengembangan UKM								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Nilai omzet UKM Tahun n	83,349	Juta Rupiah	87,516	Juta Rupiah	91,892	Juta Rupiah	96,487	Juta Rupiah
META INDIKATOR	nilai omzet UKM tahun n (Juta Rupiah) Sumber data berasal dari Dinas Koperasi									

	PROGRAM									
	TUJUAN PROGRAM	<p>UKM sebagai salah satu pilar perekonomian lokal. Program Pengembangan UKM bertujuan untuk meningkatkan omset usaha UKM yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal. Jumlah UKM di DIY pada tahun 2017 sebanyak 248.217. berikut permasalahan yang dihadapi UKM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya daya saing usaha dan kualitas Sumber Daya Manusia UKM</li> <li>2. Belum optimalnya akses pasar</li> </ol> <p>pengembangan UKM diprioritaskan pada sektor unggulan daerah yaitu sektor kerajinan, Fashion, Olahan pangan, dan meubelair.</p> <p>Dalam program ini bertujuan untuk mengembangkan UKM.</p> <p>Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelatihan pengembangan potensi SDM UKM baik pada sisi manajemen, usaha, produksi, permodalan, pemasaran dan networking.</li> <li>2) Peningkatan akses pasar melalui pemasaran</li> </ol>								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Pengembangan Perkoperasian								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/ SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	2,036,097	Juta Rupiah	2,046,177		2,056,257	Juta Rupiah	2,066,336	Juta Rupiah
	META INDIKATOR PROGRAM	Nilai omset koperasi dihitung berdasarkan laporan keuangan koperasi akhir tahun n.								
	TUJUAN PROGRAM	<p>Program pengembangan perkoperasian bertujuan untuk meningkatkan skala usaha koperasi yang ditunjukan dengan peningkatan nilai omset koperasi. Jumlah Koperasi Aktif di DIY pada tahun 2017 sebanyak 1.783 Koperasi. Adapun permasalahan yang dihadapi Koperasi saat ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya daya saing usaha dan kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi</li> </ol>								

		<p>2. Masih adanya koperasi yang belum sehat atau pasif pengembangan Koperasi diprioritaskan pada Koperasi sektor riil dan Koperasi sekunder. Dalam program ini bertujuan untuk mengembangkan Koperasi agar kapasitasnya meningkat. Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:</p> <p>1) Pelatihan pengembangan SDM Koperasi baik pada sisi manajemen, usaha, produksi, permodalan, pemasaran dan networking.</p> <p>2) Pengawasan koperasi</p>								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Peningkatan Akses Pembiayaan								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM yang dibina	15.870.000.000	Rp	18.250.500.000	Rp	20.988.075.000	Rp	24.136.286.250	Rp
	META INDIKATOR PROGRAM	<p>Jumlah Pembiayaan adalah besarnya dana modal/pendanaan yang diperoleh UKM dan Koperasi yang berasal dari Dana Bergulir, Pinjaman Perbankan, CSR, Sumber data: Dinas Koperasi dan UKM</p>								
TUJUAN PROGRAM	<p>Modal adalah aspek yang penting dalam pengembangan usaha koperasi dan UKM. Masih banyak keterbatasan koperasi dan UKM dalam memperoleh pembiayaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan koperasi dan UKM. Capaian Pembiayaan yang diberikan kepada Koperasi dan UMKM pada tahun 2017 sebesar Rp. 12.000.000.000. diharapkan pada tahun 2019 menjadi Rp.15.870.000.000.</p> <p>Beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh Koperasi dan UKM terkait dengan akses pembiayaan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya pengetahuan Koperasi dan UKM terkait dgn sumber-sumber pembiayaan</li> <li>2. Masih kurangnya manajemen keuangan Koperasi dan UKM sehingga belum layak (belum bankable)</li> </ol>									

		untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya: 1. Mempertemukan antara Koperasi dan UKM dengan lembaga-lembaga sumber pembiayaan 2. Peningkatan kapasitas Koperasi dan UKM terkait dengan kemampuan pengelolaan keuangan								
ESELON II	MENDUKUNG SASARAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya Kontribusi Wirausaha Baru Terhadap Jumlah UKM								
	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Kontribusi jumlah Wirausaha Baru (WUB) terhadap jumlah UKM	0,3 (sebesar 749 dari 248.217 UKM)	%	0,3 (sebesar 747 dari 248966 UKM)	%	0,4 (sebesar 999 dari 249713 UKM)	%	0,4 (sebesar 1003 dari 250712 UKM)	%
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru.								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Jumlah Wirausaha Baru (Jumlah kumulatif)	749	Wira-usaha	899		1079		1295	
		Jumlah peningkatan wirausaha baru tahun N	229	Wira-usaha	150		180		216	
		Penumbuhan	150	Wira-	100		120		141	

		(data penumbuhan adalah merupakan data parsial dalam arti penambahan wirausaha baru yang tumbuh pada tahun n, bukan data akumulasi)		usaha						
		Pengembangan (data pengembangan adalah merupakan data parsial dalam arti penambahan wirausaha baru yang berkembang pada tahun n, bukan data akumulasi)	79	Wira-usaha	50		60		75	
	META INDIKATOR PROGRAM	Jumlah Wirausaha Baru tahun N (semula 427 dan menjadi 749 Yang teregister). Sumber data berasal dari Dinas Koperasi								
		Jumlah peningkatan wirausaha baru tahun N sebanyak 322 WUB								

		Jumlah wirausaha baru yang berkembang pada tahun 2019 sebanyak 20 WUB
	TUJUAN PROGRAM	<p>Permasalahan terkait dengan kewirausahaan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. masih rendahnya jumlah wirausaha</li> <li>b. kurangnya pengetahuan dan ketrampilan usaha pada WUB</li> <li>c. WUB masih memiliki kendala pengembangan bisnis</li> <li>d. lemahnya sinergi dalam upaya untuk menumbuh kembangkan WUB</li> </ul> <p>Program ini dilakukan untuk menjawab permasalahan diatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi potensi dan calon wirausaha baru</li> <li>b. Pelaksanaan Inkubator Bisnis melalui beberapa tahapan diklat</li> <li>c. Bimbingan teknis Desa Preneur</li> <li>d. pendampingan bagi wirausaha baru dalam pengembangan usaha.</li> </ul> <p>Penumbuhan wirausaha baru akan diprioritaskan pada sektor Fashion dan Olahan Pangan.</p>

### 3. DINAS PERIDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

IKU	META PROGRAM									
GUBERNUR	SASARAN PEMDA	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan								
	INDIKATOR SASARAN PEMDA	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
	Pertumbuhan Ekonomi	5.26		5.29		5.31		5.34		
SETDA/ASISTEN	PROGRAM PEMDA	Program Pengembangan sektor Dominan								
	INDIKATOR PROGRAM PEMDA	kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	44.00	persen	45.00	persen	46.00	persen	47.00	persen
ESELON II	MENDUKUNG SASARAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya industri pengolahan								
	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
	nilai industri pengolahan dalam PDRB DIY (ADHK)	12,637,626	Juta rupiah	13,143,131	Juta rupiah	13,668,856	Juta rupiah	14,215,611	Juta rupiah	

	META INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	<p>Nilai Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB DIY. PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah dalam jangka waktu satu tahun. Nilai yang digunakan dalam indikator ini adalah khusus untuk kelompok yang masuk dalam lapangan usaha Industri Pengolahan. Sumber Data: BPS, metode Aras Dasar Harga Konstan</p>								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/ SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Nilai Produksi IKM	12,979,156	Juta Rupiah	13,238,739	Juta Rupiah	13,503,514	Juta Rupiah	13,773,585	Juta Rupiah
		Niai Produksi IKM ILSA	4,153,330	Juta Rupiah	4,236,396	Juta Rupiah	4,321,124	Juta Rupiah	4,407,547	Juta Rupiah
		Niai Produksi IKM AGROKIM	8,825,826	Juta Rupiah	9,002,343	Juta Rupiah	9,182,390	Juta Rupiah	9,366,038	Juta Rupiah
	META INDIKATOR PROGRAM	<p>Nilai produksi IKM pada tahun N . Data dasar pada tahun 2017 adalah sebanyak Rp.12.463.258 Juta Rupiah.            Sumber data berasal dari Buku Potensi IKM</p> <p>Nilai produksi IKM ILSA pada tahun N . Sumber data berasal dari Buku Potensi IKM</p> <p>Nilai produksi IKM Agrokim pada tahun N . Sumber data berasal dari Buku Potensi IKM</p>								
TUJUAN PROGRAM	<p>Untuk mendorong pertumbuhan sektor Industri Pengolahan dalam PDRB DIY diperlukan peningkatan nilai produksi diantaranya dari pelaku IKM. Pelaku Industri Kecil Menengah di DIY berjumlah 91.214 unit usaha. DIY didominasi oleh IKM Pangan dengan jumlah IKM sebanyak 36,637 UU, Sandang dan kulit sebanyak 8,782 UU, Kimia dan bahan bangunan sebanyak 16,673 UU, Logam dan Elektronika sebanyak 11,675 UU, dan Kerajinan sebanyak 17,447 UU. Pengembangan usaha IKM sangat diperlukan dalam peningkatan aktivitas ekonomi di DIY.</p> <p>Akan tetapi hal ini dihadapkan pada berbagai masalah, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kurangnya Daya saing produk IKM;</li> <li>2) Ketersediaan bahan baku industri produk kurang</li> <li>3) Kemitraan antara industri kecil dengan industri besar belum berjalan baik</li> </ol>									

		<p>Dalam program ini bertujuan untuk pengembangan usaha pelaku usaha industri kecil menengah.          Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelatihan kemampuan produksi, diversifikasi produk, desain produk</li> <li>2) pendampingan penerapan Standarisasi dan Sertifikasi</li> <li>3) Test Pasar (Pameran bagi IKM yang telah mengikuti pelatihan)</li> <li>4) kerjasama antar sektor, lintas sektor dan lintas daerah di bidang Industri</li> </ol>								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Peningkatan Teknologi Industri								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan	21	produk ATG	24	produk ATG	27	produk ATG	30	produk ATG
		Jumlah pelayanan Jasa kemasan	1,210,000	unit pesan-an	1,331,000	unit pesan-an	1,464,100	unit pesan-an	1,610,510	unit pesan-an
	Jenis Pelayanan Teknologi Perak dan Logam	4	Layanan	4	Layanan	4	Layanan	4	Layanan	
	META INDIKATOR PROGRAM	Jumlah ATG yang direkayasa dan dimanfaatkan oleh pengguna (rumah tangga dan UKM). Pemanfaatan ditunjukkan dengan adanya penjualan ATG dan layanan jasa perbengkelan. Sumber data : BPTTG								
Jumlah pesanan kemasan (ponds, UV, laminasi, sliter, sloter, dan cutting) oleh pengguna (rumah tangga dan UKM). Pemanfaatan ditunjukkan dengan adanya jumlah pesanan kemasan dalam satu tahun. Sumber data : BPTTG										
dihitung dari jenis Pelayanan Teknologi Perak dan Logam setiap tahun										
TUJUAN PROGRAM	Adanya penerapan teknologi dalam proses produksi diharapkan meningkatkan efisiensi dan produktifitas IKM yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan nilai produksi IKM. Meskipun memiliki peran penting, belum seluruh IKM di DIY memanfaatkan teknologi produksi yang terbaru. Program ini secara umum bertujuan untuk									

		<p>pengembangan teknologi tepat guna dan menerapkannya bagi IKM.</p> <p>Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rekayasa teknologi tepat guna;</li> <li>2. sosialisasi dan promosi hasil pengembangan teknologi tepat guna;</li> <li>3. pemanfaatan dan penerapan teknologi tepat guna;</li> <li>4. pelayanan perbaikan alat teknologi tepat guna;</li> <li>5. layanan pembuatan kemasan;</li> </ol>								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Jumlah HKI yang terdaftar	100		120		150		180	
	META INDIKATOR PROGRAM	<p>Jumlah HKI ( Merk, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, dan Co Branding) yang terdaftar melalui Fasilitas Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual setiap tahunnya. Untuk tahun dasar yaitu tahun 2017 Jumlah HKI yang terdaftar melalui Fasilitas Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual adalah sebanyak 82, yaitu 60 Merk, 2 Merk Kolektif, 4 Paten, 6 Hak Cipta, 2 Desain Industri, dan 8 Co Branding.</p>								
TUJUAN PROGRAM	<p>Perlindungan HKI merupakan penghargaan terhadap kreativitas seseorang. Perlindungan HKI menciptakan kondisi yang kondusif bagi penciptaan inovasi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan daya saing produk lokal. Selain itu, HKI juga mempunyai nilai ekonomis sehingga perlu dilindungi. Pengembangan usaha melalui perlindungan hak kekayaan intelektual sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk dan jasa. Namun hal ini dihadapkan pada permasalahan dimana belum optimalnya peningkatan daya saing produk melalui perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI);</p> <p>Data Pemohon HKI di DIY sampai tahun 2017 adalah sebanyak 1.464 pelaku usaha / IKM. Fasilitas pendaftaran HKI Disperindag DIY pada tahun 2017 adalah sebanyak 82 IKM.</p> <p>Dalam program ini bertujuan untuk pengembangan usaha pelaku usaha industri kecil menengah melalui perlindungan hak kekayaan intelektual.</p> <p>Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:</p>									

		1. Pelayanan bimbingan konsultasi kekayaan intelektual 2. Pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual 3. Pembinaan dan advokasi kekayaan intelektual								
ESELON II	MENDUKUNG SASARAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri								
	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY	8,528,946	Juta rupiah	8,955,393	Juta rupiah	9,403,163	Juta rupiah	9,873,321	Juta rupiah
META INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	Nilai Sektor Perdagangan dalam PDRB DIY berdasarkan lapangan usaha. PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah dalam jangka waktu satu tahun. Nilai yang digunakan dalam indikator ini adalah khusus untuk kelompok yang masuk dalam lapangan usaha Perdagangan. Sumber Data: BPS DIY dengan metode Atas Dasar Harga Konstan									
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Jumlah omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina	1.75	Milyar Rupiah	1.95	Milyar Rupiah	2.25	Milyar Rupiah	2.50	Milyar Rupiah
peningkatan omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina	200	juta rupiah	200	juta rupiah	300	juta rupiah	250	Juta rupiah		
META INDIKATOR	dihitung dari jumlah omzet pelaku usaha perdagangan yang dibina yang terdiri dari pedagang dan peserta pameran.									

	PROGRAM	dihitung dari peningkatan jumlah omest pelaku usaha perdagangan yang dibina								
	TUJUAN PROGRAM	<p>Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB DIY dipengaruhi oleh aktifitas perdagangan dalam negeri. Untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB DIY diperlukan peningkatan omset pelaku usaha perdagangan dalam negeri. Saat ini permasalahan yang dihadapi pelaku usaha perdagangan dalam negeri antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan akses pasar dan jaringan pemasaran;</li> <li>2. Sarana dan prasarana perdagangan masih kurang;</li> <li>3. Rendahnya kapasitas berbisnis pelaku usaha perdagangan</li> </ol> <p>Berbagai aktivitas dalam rangka peningkatan perdagangan dalam negeri perlu dilakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasaran produk</li> <li>2. Rehab dan peningkatan sarana perdagangan</li> <li>3. Pembinaan pelaku usaha perdagangan dalam negeri</li> </ol>								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		nilai ekspor perdagangan luar negeri tahun n	308.59	Juta US\$	314.76	Juta US\$	321.06	Juta US\$	327.48	Juta US\$
	META INDIKATOR PROGRAM	Nilai ekspor DIY pada tahun n. Sumber data: Laporan Realisasi Ekspor yang diterbitkan oleh Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.								
TUJUAN PROGRAM	Untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB DIY diperlukan peningkatan perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri merupakan pendorong peningkatan aktivitas ekonomi di DIY. Perkembangan ekspor DIY menunjukkan trend yang positif. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan nilai ekspor. Nilai ekspor DIY pada tahun 2017 meningkat 17,62% dibanding tahun sebelumnya. Nilai ekspor DIY pada tahun 2017 adalah sebesar US\$ 296,61 Juta sedangkan pada tahun 2016 adalah sebesar US\$ 252,18 Juta. Komoditi unggulan ekspor DIY diantaranya adalah Pakaian Jadi Tekstil, Mebel Kayu, Sarung Tangan Kulit, Minyak Atsiri, STK Sintetis, Kerajinan									

		<p>Kertas, Produk Tekstil Lainnya, Kerajinan Kayu, Papan Kemas, dan Kerajinan Batu. Negara tujuan ekspor utama DIY adalah Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Inggris, Korea Selatan, Belanda, Perancis, Australia, China, dan India. Peningkatan volume usaha bidang perdagangan luar negeri sangat penting untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di DIY.</p> <p>Akan tetapi terdapat berbagai kendala, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Potensi IKM DIY sangat tinggi (91.127 UU) akan tetapi jumlah eksportir masih terbatas, pada tahun 2017 hanya sebanyak 314 Eksportir.</li> <li>2) Kurangnya kemampuan eksportir dalam mengakses pasar luar negeri.</li> <li>3) Minimnya pengetahuan eksportir tentang kondisi perekonomian global serta kebijakan yang berkaitan dengan ekspor dan pengaruhnya pada komoditas yang diekspor.</li> </ol> <p>Berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada, diperlukan upaya dari Pemerintah Daerah untuk mendorong berkembangnya sektor perdagangan luar negeri DIY.</p> <p>Program peningkatan dan pengembangan ekspor diperlukan untuk mendukung upaya tersebut. Aktivitas utama program ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan eksportir</li> <li>2. Fasilitasi perizinan ekspor dan impor</li> <li>3. Pemasaran produk ekspor &amp; temu bisnis</li> </ol>								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Perlindungan dan Pengamanan Konsumen								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Prosentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standar	5.61	persen	5.55	persen	5.50	persen	5.46	persen
		Jumlah Pengaduan Sengketa Konsumen	28	sengketa	27	sengketa	26	sengketa	25	sengketa
Stabilnya harga komoditi yang	0,3	persen	0,3	persen	0,3	persen	0,3	persen		

		dipantau								
	META INDIKATOR PROGRAM	dihitung dari jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standar pada saat pelaksanaan pengawasan barang beredar dibagi dengan jumlah sampel dikali 100%								
		dihitung dari Jumlah Pengaduan Sengketa Konsumen								
		dihitung dari rata-rata persentase perubahan harga komoditi yang dipantau setiap hari selama satu tahun								
	TUJUAN PROGRAM	<p>Sektor perdagangan cukup rentan terhadap gejolak seperti fluktuasi harga, ketersediaan barang serta isu keamanan barang/jasa. Program ini bertujuan untuk menjamin kestabilan pasokan dan harga serta menjamin hak-hak konsumen. Beberapa permasalahan terkait dengan pengawasan barang/jasa serta perlindungan konsumen adalah berikut ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga</li> <li>2. perlindungan konsumen masih kurang</li> <li>3 Belum optimalnya pengamanan pasar domestic</li> </ol> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, perlindungan konsumen dalam rangka keamanan dan kepastian hukum serta stabilisasi harga kebutuhan pokok dan penting sangat diperlukan.</p> <p>Program ini mewedahi aktivitas dalam rangka penciptaan keamanan dan kepastian hukum bagi konsumen dan stabilisasi harga kebutuhan pokok, sebagai berikut ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan dan sosialisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan serta koordinasi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga;</li> <li>3. penyelesaian sengketa konsumen dan pembinaan pemberdayaan konsumen</li> <li>4. Pengawasan terhadap pelanggaran peraturan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen</li> </ol>								

#### 4. DINAS PARIWISATA

<b>IKU</b>	<b>META PROGRAM</b>									
GUBERNUR	<b>SASARAN PEMDA</b>	Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah								
	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan

	<b>PEMDA</b>	Indeks Williamson	0.4542	%	0.4524	%	0.4506	%	0.4489	%
SETDA/ ASISTEN	<b>PROGRAM PEMDA</b>	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan								
	<b>INDIKATOR PROGRAM PEMDA</b>	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	40.23	%	40.24	%	40.25	%	40.26	%
ESELON II	<b>MENDUKUNG SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	Meningkatnya jumlah belanja wisatawan								
	<b>INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
			spending money wisatawan	7,672,683	juta rupiah	8,123,974	juta rupiah	8,498,797	juta rupiah	8,830,595
<b>META INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	(rata-rata pengeluaran Wisman + rata-rata pengeluaran Wisnus)/2									
ESELON III	<b>NAMA PROGRAM</b>	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata								
	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		LOS wisatawan	2.14	hari	2.22	hari	2.30	hari	2.45	hari

		mananegara dan nusantara tahun n								
	<b>META INDIKATOR PROGRAM</b>	(LOS wisatawan mancanegara tahun n ditambah LOS wisatawan nusantara tahun n) dibagi 2								
	<b>TUJUAN PROGRAM</b>	<p>Destinasi pariwisata adalah suatu entitas yang mencakup wilayah geografis tertentu yang didalamnya terdapat komponen produk pariwisata (attraction, amenities, accessibilities) dan layanan, serta unsur pendukung lainnya (masyarakat, pelaku industri pariwisata, dan institusi pengembang) yang membentuk sistem yang sinergis dalam menciptakan motivasi kunjungan serta totalitas pengalaman kunjungan bagi wisatawan.</p> <p>Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya jumlah DTW dan daya dukungnya yang berkualitas</li> <li>2. Rendahnya kualitas dan kuantitas fasilitas umum pendukung pariwisata (parkir, toilet, pedestrian, dll)</li> <li>3. Rendahnya kualitas aksesibilitas menuju lokasi DTW</li> <li>4. Belum optimalnya manajemen event pariwisata di DIY</li> <li>5. Terbatasnya jumlah event pariwisata yang berkualitas internasional dan nasional</li> </ol> <p>Aktivitas yang dilakukan dalam program ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan dokumen perencanaan pembangunan sarpras DTW dan fasum pendukung pariwisata</li> <li>2. Pembangunan sarpras DTW yang berkualitas dan terstandarisasi ;</li> <li>3. Pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata (parkir, toilet, pedestrian, dll) yang berstandar internasional</li> <li>4. pengelolaan destinasi wisata DIY;</li> <li>5. Pengelolaan manajemen event pariwisata</li> <li>6. Penyelenggaraan event berkualitas internasional dan nasional</li> </ol>								
ESELON II	<b>MENDUKUNG SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian								
	<b>INDIKATOR</b>	TAHUN	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>				

	<b>SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY (Sumber BPS)	9,855,064	juta rupiah	10,446,367	juta rupiah	11,073,149	juta rupiah	11,737,538	juta rupiah
	<b>META INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	Nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY tahun n (Atas dasar harga konstan)								
ESELON III	<b>NAMA PROGRAM</b>	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata								
	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	5,926,228	orang	6,542,327	orang	7,289,849	orang	8,377,099	orang
		jumlah wisatawan mancanegara tahun n	498,410	orang	598,092	orang	747614	orang	971,899	orang
		jumlah wisatawan nusantara tahun n	5,427,818	orang	5,944,235	orang	6,542,235	orang	7,405,200	orang
	<b>META INDIKATOR PROGRAM</b>	jumlah wisatawan mancanegara tahun n ditambah jumlah wisatawan nusantara tahun n								
<b>TUJUAN PROGRAM</b>	jumlah wisatawan mancanegara tahun n jumlah wisatawan nusantara tahun n									
		Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian, salah satunya didukung dengan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Untuk menarik kunjungan wisatawan, maka diperlukan aktivitas Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara pada tahun 2017 sebanyak 5.229.298 orang wisatawan (397.951 orang wisman dan 4.831.347 wisnus) meningkat sebesar 14,94% dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara pada								

		<p>tahun 2016 sebanyak 4.549.574 orang wisatawan (355.313 orang wisman dan 4.194.261 wisnus)  Sedangkan Permasalahan yang dihadapi dalam pemasaran, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi</li> <li>2. kurangnya sinergi kemitraan pemasaran pariwisata</li> <li>3. kurangnya akses pasar dan jaringan pemasaran</li> </ol> <p>Aktivitas yang perlu dilaksanakan dalam pengembangan pariwisata adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan analisis pengembangan pasar pariwisata yang mendukung pembangunan pariwisata</li> <li>2. pelaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata</li> <li>3. pengelolaan pusat informasi pariwisata</li> <li>4. pelaksanaan pengembangan promosi melalui media online</li> <li>5. melakukan kemitraan pemasaran</li> </ol> <p>Untuk aktivitas promosi pariwisata di luar negeri dilakukan melalui dana APBN.</p>								
ESELON III	<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>Program Pengembangan Industri Pariwisata</b>								
	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	100	UJP	150	UJP	200	UJP	250	UJP	
	<b>META INDIKATOR PROGRAM</b>	Jumlah UJP yang tersertifikasi tahun n								
<b>TUJUAN PROGRAM</b>	Menurut Undang-Undang Pariwisata no 10 tahun 2009, Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Peringkat sektor pariwisata dalam menyumbang Product Domestic Regional Bruto (PDRB) di Yogyakarta mengalami kenaikan. Dari 17 sektor lapangan usaha, sektor jasa pariwisata berada di peringkat kedua penyumbang PDRB di bawah industri pengolahan namun pertumbuhan di tahun 2017 cukup									

		<p>bagus karena mencapai 8,9 % seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke DIY. Ditengah pesatnya perkembangan industri jasa pariwisata, perlu ada sertifikasi usaha jasa pariwisata kepada para pelaku usaha sebagai upaya mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui penilaian kesesuaian standar usaha.</p> <p>Permasalahan :</p> <p>1. Kurangnya pemahaman para pengelola Usaha Jasa Pariwisata terkait standar usaha pariwisata (mutu, produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata)</p> <p>Aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan ini:</p> <p>1. pembinaan usaha jasa pariwisata 2. pengawasan Industri Pariwisata</p>								
ESELON III	<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata</b>								
	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata	17.00	persen	19.61	persen	21.36	persen	23.04	persen
		jumlah kunjungan wisatawan ke desa wisata	4,945,512	orang	5,786,250	orang	6,943,499	orang	8,401,634	orang
		desa wisata yang naik kelas (maju)	36	desa	45	desa	56	desa	67	desa
		Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi	1,030	orang	1,230	orang	1430	orang	1630	orang
		<b>META</b>	(persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke desa wisata ditambah persentase peningkatan desa							

	INDIKATOR PROGRAM	wisata yang naik kelas) dibagi 2
		persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke desa wisata
		persentase peningkatan desa wisata yang naik kelas
		Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi tahun n
	TUJUAN PROGRAM	<p>Indikator target dari Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata, dapat diukur melalui (persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke desa wisata ditambah persentase peningkatan desa wisata yang naik kelas) dibagi 2. Untuk mencapai target program tersebut dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata.</p> <p>Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya jumlah SDM Pariwisata yang berkualitas</li> <li>2. Masih rendahnya kesadaran wisata dan penerapan sapta pesona oleh stakeholder kepariwisataan dan masyarakat</li> <li>3. Rendahnya hubungan kemitraan/kerjasama terkait pengembangan kelembagaan kepariwisataan</li> <li>4. Terbatasnya jumlah kelembagaan pariwisata yang terkelola dengan baik dan berkelanjutan</li> </ol> <p>Aktivitas yang dilakukan dalam Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembinaan sumber daya manusia pariwisata dan kelembagaan pariwisata</li> <li>2. pendampingan desa wisata</li> <li>3. Pengawasan standart mutu SDM dan Kelembagaan Pariwisata</li> </ol> <p>Sementara itu rata-rata peningkatan kunjungan desa wisata sejumlah 607.344 orang dari tahun 2018 sejumlah 4.338.169 orang menjadi 4.945.512 orang pada tahun 2019 dan rata-rata peningkatan desa wisata yang naik kelas sejumlah 6 desa wisata dari tahun 2018 sejumlah 30 desa wisata menjadi 36 desa wisata pada tahun 2019 /2018 yaitu 17%</p>

##### **5. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

<b>IKU</b>	<b>META PROGRAM</b>	
GUBERNUR	SASARAN	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan

	PEMDA									
	INDIKATOR SASARAN PEMDA	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
	TARGET/ SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	
	Pertumbuhan Ekonomi	5.26	%	5.29	%	5.31	%	5.33	%	
SETDA/ ASISTEN	PROGRAM PEMDA	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana								
	INDIKATOR PROGRAM PEMDA	Indeks Kualitas Air	36.40	angka indeks	38.60	angka indeks	40.80	angka indeks	42.50	angka indeks
		Indeks kualitas udara	87.73	angka indeks	88.40	angka indeks	89.07	angka indeks	89.74	angka indeks
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	58.18	angka indeks	60.86	angka indeks	63.05	angka indeks	66.20	angka indeks
		Indeks Resiko Bencana	150 (tinggi)	angka indeks	145 (tinggi)	angka indeks	135 (tinggi)	angka indeks	125 (sedang)	angka indeks
ESELON II	MENDUKUNG SASARAN PERANGKAT DAERAH	Terkelolanya kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil								
	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
	TARGET/ SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	
	Peningkatan status kawasan konservasi	30	%	60	%	80	%	100	%	
	META	Persentase peningkatan status per tahapan kawasan konservasi:								

	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	<p>1. Tahap Penetapan RZWP3K 20% -&gt; cara mengukur : terbitnya Perda RZWP3K</p> <p>2. Identifikasi dan Inisiasi kawasan konservasi 30% -&gt; cara mengukur : adanya dokumen rekomendasi kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau2 kecil</p> <p>3. Pencadangan kawasan konservasi, 60% -&gt; cara mengukur : terbitnya SK Gubernur tentang kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau2 kecil di DIY</p> <p>3. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi 80% -&gt; cara mengukur : adanya dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi</p> <p>4. Penetapan Kawasan Konservasi 100% &gt; cara mengukur : adanya SK Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kawasan konservasi di DIY</p>								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Konservasi Ekosistem dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		1. Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan	14.00	%	14.00	%	14.00	%	14.00	%
	2. Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	10	%	10	%	10	%	10	%	
	META INDIKATOR PROGRAM	1. Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi pada tahun ke n dibagi jumlah kawasan rehabilitasi dan konservasi total, data dasar : kurang lebih ada 350 an sungai, perairan umum daratan, telaga, embung, laguna dan laut di DIY, sehingga jika diasumsikan tiap tahun ada 14% dari 300 an tadi, tiap tahun merehabilitasi dan mengkonservasi $14\% \times 350 = 50$ titik yang berupa penebaran atau pengkayaan biota air (dengan asumsi tiap tahun anggarannya cukup untuk 50 titik, dimana tiap kab kota di DIY dialokasikan @ 10 titik)								

		<p>2. Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan pada obyek yang diawasi pada tahun yang bersangkutan, data dasar : urusan tertib administrasi perikanan tangkap 18 kapal diatas 10 GT sudah mempunyai dokumen, masih ada kurang lebih 50 kapal belum memiliki dokumen urusan tertib administrasi perikanan budidaya : dari 3.000 kelompok, baru 250 kelompok yang mempunyai sertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Benar) urusan tertib administrasi mutu hasil perikanan dan kelautan : tiap tahun melakukan uji sebanyak 500 sampel (dengan asumsi selalu tersedia anggarannya) urusan tertib administrasi ijin usaha : tidak termasuk dalam pencapaian program ini karena sudah menajdi kewenangan KP2TSP urusan pengawasan Perairan: pada tahun 2017 dilaporkan ada 10 kejadian ilegal dalam usaha kelautan perikanan, diharapkan tiap tahun berkurang 1</p>								
	TUJUAN PROGRAM	<p>DIY mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, namun pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan masih ada yang tidak sesuai dengan kaidah keberlanjutan dengan adanya penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan. Selain itu, wilayah pesisir DIY mengalami tantangan abrasi dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, program ini ditujukan untuk menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta mengendalikan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan terutama di pesisir sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Proses utama pelaksanaan program ini mencakup: 1) rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan 2) pembinaan pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan pesisir 2) pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di darat maupun laut</p>								
ESELON II	MENDUKUNG SASARAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya nilai produksi perikanan								
	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/ SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan

	DAERAH	nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (Sumber BPS)	322,136	juta rupiah	325,357	juta rupiah	328,611	juta rupiah	331,897	juta rupiah
	META INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY tahun n (Atas Dasar Harga Konstan)								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Pengelolaan Pelabuhan								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan	33.31	milyar rupiah	34.78	milyar rupiah	35.25	milyar rupiah	36.73	milyar rupiah
META INDIKATOR PROGRAM	Terdapat beberapa Jenis ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng diantaranya yang dominan yaitu Cakalang, Tuna, Tongkol, Lemadang, Marlin, Cumi-cumi. Perhitungan nilai produksi ikan di PPP Sadeng sebagai berikut, jumlah produksi ikan yang melalui TPI (kg) x (kali) harga ikan (Rp). Data produksi yang dimiliki PPP Sadeng dapat diperoleh dari pendataan/pencatatan jenis dan jumlah ikan yang didaratkan kapal motor (5-10 GT), dan kapal motor (30-45 GT) di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) secara langsung oleh petugas pencatat produksi, selain itu juga diperoleh untuk kapal motor (5-10 GT) dan (30-45 GT) data produksi diperoleh dari <i>log book</i> yang sebelumnya diberikan kepada nelayan untuk diisi. Data produksi ikan dari kapal motor tempel (2 GT) diperoleh dari pencatatan yang dilakukan oleh pengepul yang ada di PPP Sadeng. Data produksi yang diperoleh selanjutnya diolah menggunakan <i>software Microsoft Excel</i> .									
TUJUAN PROGRAM	Kegiatan perikanan tangkap di laut selatan DIY saat ini masih memiliki potensi yang besar diikuti dengan permintaan konsumen akan ikan di DIY dan luar DIY semakin tinggi, namun sampai saat ini dalam pemanfaatan SDI belum dapat optimal. Salah satu penyebabnya yaitu belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana pelabuhan perikanan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan dan kualitas pelayanan pelabuhan									

		<p>sesuai dengan standar operasional prosedur.</p> <p>Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:</p> <p>1) pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana pelabuhan perikanan (pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pokok, fungsional dan pendukung pelabuhan)</p> <p>2) pembinaan pengelolaan pelabuhan (sosialisasi, pelatihan, bimtek, fasilitasi jasa kepelabuhan, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha, fasilitasi pembinaan mutu, pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil tangkapan).</p> <p>3) pelayanan pelabuhan (penerbitan surat persetujuan berlayar, penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor, SKA, fasilitasi perijinan kapal, tambat labuh, inspeksi pembongkaran ikan, perbekalan, navigasi, pemanfaatan lahan dan usaha, pelayanan jasa kepelabuhan)</p>								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/ SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		produksi perikanan budidaya	89,400	ton	89,500	ton	89,600	ton	89,700	ton
	META INDIKATOR PROGRAM	produksi perikanan budidaya tahun n								
TUJUAN PROGRAM	<p>Perikanan budidaya merupakan kontributor utama produksi perikanan DIY dengan kontribusi melebihi 90%. Di sisi lain masih terdapat berbagai permasalahan diantaranya alih fungsi lahan pertanian, kurang optimalnya sarana prasarana perikanan budidaya serta kurangnya SDM perikanan dan kurang optimalnya kelembagaan pembudidaya ikan. Selain itu, ketersediaan ikan DIY masih banyak dipasok dari luar DIY. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan budidaya dalam menjamin ketersediaan pangan daerah dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar mutu. Disamping itu juga harus menyiapkan produk perikanan yang dijual keluar daerah.</p> <p>Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:</p> <p>1) pelatihan budidaya perikanan</p>									

		2) pengembangan sarana prasarana perikanan budidaya 3) pendampingan kelembagaan perikanan budidaya 4) pendampingan standarisasi dan sertifikasi perikanan budidaya								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		produksi perikanan tangkap	6,199	ton	6,481	ton	6,863	ton	7,063	ton
	META INDIKATOR PROGRAM	produksi perikanan tangkap tahun n								
TUJUAN PROGRAM	<p>Potensi Perikanan tangkap, terutama perikanan tangkap laut di selatan Jawa mempunyai nilai potensi lestari sebesar 320.000 ton/tahun, namun tingkat pemanfaatan potensinya masih belum sampai 10%. Di sisi lain masih terdapat berbagai permasalahan diantaranya kurang optimalnya sarana prasarana perikanan tangkap (kapal dan alat penangkapan ikan) serta kurangnya kuantitas dan kualitas SDM nelayan dan kurang optimalnya kelembagaan nelayan. Selain itu, ketersediaan ikan DIY masih banyak dipasok dari luar DIY. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan tangkap dalam menjamin ketersediaan pangan daerah dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar mutu.</p> <p>Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pelatihan perikanan tangkap bagi nelayan</li> <li>2) pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap</li> <li>3) pendampingan kelembagaan nelayan</li> <li>4) pendampingan standarisasi dan sertifikasi perikanan tangkap</li> </ol>									
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Pengembangan perbenihan perikanan budidaya								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan

		Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi	84	%	86	%	88	%	90	%
	META INDIKATOR PROGRAM	benih perikanan budidaya unggulan (nila, lele, gurami, udang galah, ikan mas) yang diproduksi dari Induk bersertifikat (UPTD) dibagi total produksi benih DIY dikali 100%								
	TUJUAN PROGRAM	Perikanan budidaya merupakan kontributor utama produksi perikanan DIY dengan kontribusi melebihi 90%. Oleh karena itu dibutuhkan ketersediaan benih unggul perikanan budidaya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas benih perikanan budidaya dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar mutu. Proses utama pelaksanaan program ini mencakup: 1) pengembangan sarana prasarana perbenihan perikanan budidaya 2) pengendalian penyakit ikan 3) standarisasi dan sertifikasi perbenihan perikanan budidaya								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		tingkat konsumsi ikan masyarakat	24.55	kg/kapita/tahun	25.21	kg/kapita/tahun	25.48	kg/kapita/tahun	26.05	kg/kapita/tahun
	META INDIKATOR PROGRAM	jumlah ikan yang dikonsumsi dibagi jumlah penduduk tahun n								
TUJUAN PROGRAM	Keberadaan DIY sebagai daerah tujuan wisata dan pendidikan meningkatkan kebutuhan terhadap produk perikanan. Sementara di sisi lain, tingkat konsumsi ikan DIY masih tergolong rendah walaupun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, ketersediaan produk perikanan masih banyak dipasok dari luar DIY. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk olahan ikan dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar mutu untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan masyarakat DIY. Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:									

		1) pelatihan pengolahan dan pemasaran produk perikanan 2) kampanye/sosialisasi memasyarakatkan makan ikan 3) pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan 4) pendampingan kelembagaan pengolah dan pemasar 5) pengujian mutu hasil perikanan 6) pendampingan standarisasi dan sertifikasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
--	--	---

#### 6. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

IKU	META PROGRAM									
GUBERNUR	SASARAN PEMDA	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan								
	INDIKATOR SASARAN PEMDA	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Pertumbuhan ekonomi	5.26	indeks	5.29	indeks	5.31	indeks	5.34	%
SETDA/ ASISTEN	PROGRAM PEMDA	Program Pengembangan Sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan, Jasa)								
	INDIKATOR PROGRAM PEMDA	Tingkat Penganggur Terbuka	2.6	%	2.42	%	2.24	%	2.07	%
ESELON II	MENDUKUNG SASARAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja								
	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
			Jumlah Lulusan pelatihan yang ditempatkan	1,050	orang	1,575	orang	2,100	orang	2,625
	META	Jumlah Lulusan Pelatihan Yang Ditempatkan adalah jumlah lulusan dari pelatihan pencari kerja, pemagangan dan								

	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	sertifikasi uji kompetensi yang telah bekerja/ditempatkan pada tahun N. Cara perhitungan : (Jml lulusan pelatihan + Jml magang lulus seleksi + Jml peserta kompeten) yang bekerja(ditempatkan) Baseline data tahun 2017 jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan 288 orang (sumber data : Disnakertrans DIY) Jumlah sasaran yang harus dilatih tahun 2017 24.388 orang sedangkan kebutuhan pelatihan selama 5 tahun adalah sebanyak 52.541 orang. Kemampuan untuk melatih 1000 orang per tahun								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil Ket:lulusan pelatihan yang terampil adalah lulusan pelatihan yang berpredikat baik	3,81	persen	5,71	persen	7,61	persen	9,52	persen
	META INDIKATOR PROGRAM	jumlah lulusan pelatihan yang terampil tahun n dibandingkan terhadap kebutuhan pelatihan selama 5 tahun dikalikan 100%								
		Jumlah sasaran yang harus dilatih tahun 2017 24.388 orang sedangkan kebutuhan pelatihan selama 5 tahun adalah sebanyak 52.541 orang. Kemampuan untuk melatih 1000 orang per tahun								
		Dukungan pelatihan institusional terhadap terwujudnya Persentase jumlah lulusan pelatihan yang berpredikat baik (Jumlah Lulusan tahun N / 52.541 orang x 100%)								
		Dukungan pelatihan wirausaha terhadap terwujudnya Persentase jumlah lulusan pelatihan yang berpredikat baik (Jumlah Lulusan tahun N / 52.541 orang x 100%)								
Dukungan pengukuran productivitas terhadap terwujudnya Persentase jumlah lulusan pelatihan yang berpredikat baik (Jumlah Lulusan tahun N / 52.541 orang x 100%)										
Dukungan TOT instructure nurse terhadap terwujudnya Persentase jumlah lulusan pelatihan yang berpredikat baik(Jumlah Lulusan tahun N / 52.541 orang x 100%)										
Dukungan pelatihan nurse terhadap terwujudnya Persentase jumlah lulusan pelatihan yang berpredikat baik										

		(Jumlah Lulusan tahun N / 52.541 orang x 100%)								
		Dukungan pelatihan groundstaff terhadap terwujudnya Persentase jumlah lulusan pelatihan yang berpredikat baik (Jumlah Lulusan tahun N / 52.541 orang x 100%)								
		Dukungan pelatihan Aviation Security terhadap terwujudnya Persentase jumlah lulusan pelatihan yang berpredikat baik (Jumlah Lulusan tahun N / 52.541 orang x 100%)								
	TUJUAN PROGRAM	Kondisi ketenagakerjaan DIY berdasarkan Sakernas Agustus 2017, penganggur berjumlah 64.019 orang, dengan Tingkat Penganggur Terbuka 3.02 kondisi ini meningkat dibandingkan tahun 2016, dimana jumlah penganggur sebanyak 57.036 dengan TPT 2,72. Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran adalah belum adanya link and match antara lulusan yang dihasilkan dunia pendidikan dengan kebutuhan dari dunia kerja, sehingga diperlukan peningkatan kualitas SDM baik teknis maupun manajerial melalui pelatihan kerja (institusional) untuk mengisi jabatan pekerjaan formal dan pelatihan mobile training unit (MTU) untuk membuka kesempatan kerja di sektor informal. Untuk mendorong penempatan tenaga kerja profesional, diperlukan meningkatkan kompetensi dari tenaga kerja untuk mengisi jabatan kebandarudaraan dan bekerja ke luar negeri, sesuai standar internasional. Untuk mengetahui kualitas tenaga kerja perlu dilakukan pengukuran produktivitas. Hasil pengukuran ini dapat dijadikan masukan/ rekomendasi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja maupun perusahaan.								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Pembinaan Pelatihan Standarisasi dan Pemagangan								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi dan pemagangan	375	orang	400	orang	425	orang	450	orang
		Jumlah lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi	77	lembaga	82	lembaga	87	lembaga	90	lembaga
	META INDIKATOR PROGRAM	Jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi dan pemagangan pada tahun n								
		Lembaga Pelatihan diakreditasi oleh komite akreditasi LPK pada tahun N								
	TUJUAN PROGRAM	Pengangguran yang masih cukup tinggi sebanyak 64.019 orang (Sakernas Agustus 2017) dan sebanyak 47.360 orang penganggur di DIY berpendidikan SLTA kebawah, salah satu penyebabnya adalah kurangnya kompetensi								

		<p>pengari kerja. Sehingga diperlukan upaya pemberian pengakuan formal terhadap pekerja/ pencari kerja berupa sertifikat kompetensi. Dengan pengakuan formal maka pencari kerja/ pekerja memiliki daya saing dipasar nasional maupun global. Selain pengakuan formal, pengalaman kerja diperlukan untuk memudahkan mendapatkan pekerjaan, sehingga pemagangan (dalam dan luar negeri) merupakan alternatif yang bisa dipilih oleh pencari kerja. Untuk melaksanakan pemagangan diperlukan Koordinasi dan fasilitasi mulai dari sosialisasi, rekrutmen dan seleksi, sampai dengan pembinaan pasca pemagangan bekerjasama dengan Forum Jejaring Pemagangan, Yayasan Syuruga Miyagawa dan IM Japan. Peningkatan kompetensi tenaga kerja, juga dilakukan oleh lembaga Pelatihan Kerja sehingga untuk menjamin mutu lulusan dari lembaga tersebut diperlukan pembinaan kepada lembaga pelatihan melalui peningkatan kapasitas instruktur dan pemahaman akreditasi. Kedua hal tersebut merupakan persyaratan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja. Lembaga Pelatihan kerja di DIY pada tahun 2017 sebanyak 158, yang telah terakreditasi sebanyak 66 lembaga. Masa berlaku akreditasi tersebut selama 5 tahun. Permenaker Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja memuat ketentuan bahwa setelah 3 (tiga) tahun mendapatkan ijin, wajib memenuhi standar mutu dari Lembaga Akreditasi LPK (LA-LPK).</p>								
ESELON II	MENDUKUNG SASARAN PERANGKAT DAERAH	Terwujudnya Hubungan Industrial Yang kondusif Untuk Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja								
	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Jumlah Kasus Yang diselesaikan diluar pengadilan Hubungan Industrial	20	kasus	30	kasus	40	kasus	50	kasus
	META INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Kasus Yang diselesaikan diluar pengadilan Hubungan Industrial Baseline data tahun 2017 jumlah kasus yang diselesaikan 6 kasus ( sumber data : Disnakertrans DIY)								

ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Pengujian Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Jumlah Perusahaan Besar dan Menengah yang Mempunyai Kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Sesuai Standar	398	Perusahaan	443	Perusahaan	488	Perusahaan	533	Perusahaan
	META INDIKATOR PROGRAM	jumlah perusahaan yang mempunyai kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja sesuai standar pada tahun n								
		Data dasar tahun 2017 terdapat 308 perusahaan sesuai standar hiperkes dan keselamatan kerja dari 1443 perusahaan menengah dan besar wajib lapor								
		Dukungan prosentase kegiatan pemeriksaan kesehatan terhadap perusahaan yang Mempunyai Kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Sesuai Standar meningkat 10 perusahaan per tahun (Dukungan Kenaikan 2,83 % dari tahun sebelumnya) $100 \% = 2,83 \%$								
		Dukungan prosentase kegiatan pengujian kesehatan terhadap perusahaan yang Mempunyai Kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Sesuai Standar meningkat 30 perusahaan per tahun (Dukungan Kenaikan 8,50 % dari tahun sebelumnya) $100 \% = 8,50 \%$								
	TUJUAN PROGRAM	Dukungan prosentase kegiatan sertifikasi hiperkes dan kk terhadap perusahaan yang Mempunyai Kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Sesuai Standar meningkat 5 perusahaan per tahun (Dukungan Kenaikan 1,42 % dari tahun sebelumnya) $100 \% = 1,42 \%$								
		Perlindungan tenaga kerja terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan dan tempat kerja. Dari 4.337 Perusahaan yang terdaftar dan 221.027 pekerja perlu dilakukan pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Dengan laboratorium yang telah terakreditasi sesuai ISO 17025:2005 dan akan ditingkatkan menjadi standar ISO 17025 : 2017 maka hasil pengujian diakui secara internasional. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja maka perusahaan wajib melakukan pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali. Untuk memenuhi standar								

		kualifikasi bagi dokter, paramedis, teknisi dan pencari kerja yang akan bekerja dipusahaan, mereka wajib mengikuti pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja, sehingga dapat mewujudkan perusahaan yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar (Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja)								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja Ket:Perusahaan nihil kecelakaan kerja adalah perusahaan yang tidak ada kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban tidak dapat bekerja selama 2 x 24 jam atau lebih dalam kurun waktu 3 tahun berturut turut. (Permenakertrans No. 1 tahun 2007 tentang Pedoman pemberian penghargaan K3	61	persen	62	persen	63	persen	64	persen
META INDIKATOR PROGRAM	Perusahaan nihil kecelakaan kerja adalah perusahaan yang tidak ada kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban tidak dapat bekerja selama 2 x 24 jam atau lebih dalam kurun waktu 3 tahun berturut turut. (Permenakertrans No. 1 tahun 2007 tentang Pedoman pemberian penghargaan K3 Cara perhitungan : (Jumlah perusahaan nihil kecelakaan kerja pada tahun n dibandingkan dengan jumlah perusahaan wajib lapor pada tahun baseline ) x 100% Data baseline : jumlah perusahaan dalam daftar wajib lapor ketenagakerjaan tahun 2016 sebanyak <b>4.062 perusahaan</b>									

	TUJUAN PROGRAM	<p>Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan peundang-undangan (norma) di bidang ketenagakerjaan yang terdiri dari norma kerja dan norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) (Pasal 1 Permenaker 33 / 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan) Pengawasan memuat kegiatan yaitu Pembinaan, Pemeriksaan, Pengujian, dan Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan (Pasal 6 ayat (3)).</p> <p>Jumlah perusahaan Wajib Laport tahun 2016 sebanyak 4.062 yang terdiri dari perusahaan kecil (Tenaga Kerja &lt; 25 orang) sebanyak 2.619, Perusahaan sedang (tenaga Kerja 26 - 99 orang) sebanyak 1.008, dan perusahaan besar (Tenaga Kerja &gt;100 orang) sebanyak 435 perusahaan, dengan tenaga kerja sebanyak 205.196 orang WNI dan 273 orang WNA/TKA</p> <p>Pengawas ketenagakerjaan melaksanakan fungsi untuk memastikan perusahaan mematuhi norma kerja dan norma K3 untuk mewujudkan nihil kecelakaan kerja.</p>								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Meningkatnya jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial Ket: Sarana hubungan industrial ada 8 kriteria meliputi Serikat Pekerja/Buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama Bipartij, Tripartit, Peraturan Perusahaan,	1,388	perusahaan	1,488	perusahaan	1,588	perusahaan	1,688	perusahaan

		Perjanjian Kerja Bersama, Peraturan per UU Ketenagakerjaan, Lembaga penyelesaian perselisihan HI (UU No 13 tahun 2003)								
	META INDIKATOR PROGRAM	Jumlah perusahaan (kecil, sedang, besar) yang melaksanakan sarana hubungan industri sampai dengan tahun n Sarana hubungan industrial ada 8 (delapan) kriteria meliputi Serikat Pekerja/Buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama Bipartij, Tripartit, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Peraturan per UU Ketenagakerjaan, Lembaga penyelesaian perselisihan HI (UU No 13 tahun 2003) Data dasar : Perusahaan yang melaksanakan sarana HI : 1.288 (sumber data Disnakertrans DIY)								
	TUJUAN PROGRAM	Pembinaan Hubungan industrial (HI) tidak terlepas dari perangkat hubungan industrial yang ada di perusahaan dari 8 perangkat hubungan industrial terdapat 3 (tiga) yang diprioritaskan yaitu Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Serikat Pekerja (SP), ketiga perangkat HI ini berpengaruh besar terhadap kondisi kondusifitas Hubungan Industrial. Kondisi Tahun 2017, perusahaan yang mempunyai PP sebanyak 945, PKB sebanyak 321, dan SP sebanyak 225. Kondisi ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan terdaftar di DIY sebanyak 4.337, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan jumlah perangkat HI di perusahaan. Untuk menciptakan kondisi hubungan Industrial yang kondusif diperlukan juga penetapan upah minimum, pengembangan sistem pengupahan, penerapan struktur dan skala upah di perusahaan, fasilitasi perumahan serta pemberian tunjangan keagamaan bagi pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan (UU 13 Tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan dan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan). Kondisi ketenagakerjaan yang stabil akan menarik minat investor untuk mengembangkan usahanya di DIY. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi, peningkatan kapasitas SDM (SP/SB, Pengusaha), fasilitasi Tripartit dan Dewan Pengupahan, Deteksi Dini Perusahaan Rawan HI, Pembinaan dan Pemantauan perusahaan, serta fasilitasi kegiatan Mayday dan penyelenggaraan Liga Pekerja Indonesia (Lipesia).								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Program Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran								
	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		Jumlah penempatan tenaga	10,665	orang	10,208	orang	10,915	orang	11,040	orang

		kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran									
META INDIKATOR PROGRAM	Jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran tahun N Sumber data sektoral pada tahun N dari kegiatan										
	1. Dukungan penempatan tenaga kerja terhadap terwujudnya penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran (Jumlah penempatan N/ Target total penempatan tahun N x 100%)										
	2. Dukungan bursa kerja dan informasi pasar kerja terhadap terwujudnya penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran (Jumlah penempatan N/ Target total penempatan tahun N x 100%) orang x 100%), 100% = 55,18%										
	3. Dukungan wirausaha mandiri terhadap terwujudnya penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran (Jumlah penempatan N/ Target total penempatan tahun N x 100%)										
	4. Dukungan perluasan kerja terhadap terwujudnya penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran (Jumlah penempatan N/ Target total penempatan tahun N x 100%)										
	5. Dukungan usaha mandiri bagi penyandang disabilitas terhadap terwujudnya penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran (Jumlah penempatan N/ Target total penempatan tahun N x 100%)										
	6. Dukungan pembinaan lembaga penempatan terhadap terwujudnya penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran (Jumlah penempatan N/ Target total penempatan tahun N x 100%)										
	7. Dukungan penyelenggaraan transmigran terhadap terwujudnya penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran (Jumlah penempatan N/ Target total penempatan tahun N x 100%)										
	8. Dukungan penempatan PMI terhadap terwujudnya penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran (Jumlah penempatan N/ Target total penempatan tahun N x 100%)										
	9. Dukungan Pencegahan dan Penyelesaian PMI Unprocedural terhadap terwujudnya penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran (Jumlah penempatan N/ Target total penempatan tahun N x 100%)										
	10. Dukungan pembentukan wira usaha mandiri bagi purna PMI terhadap terwujudnya penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran (Jumlah penempatan N/ Target total penempatan tahun N x 100%)										
TUJUAN	Kondisi ketenagakerjaan DIY berdasarkan Sakernas Agustus 2017, penganggur berjumlah 64.019 orang, dengan										

	PROGRAM	<p>Tingkat Penganggur Terbuka 3.02 kondisi ini meningkat dibandingkan tahun 2016, dimana jumlah penganggur sebanyak 57.036 dengan TPT 2,72. Walaupun masih dibawah rata-rata nasional, tetapi perlu dilakukan penanganan secara komprehensif untuk menekan jumlah penganggur sehingga tidak berdampak pada makin terpuruknya perekonomian DIY secara makro. Jumlah pencari kerja terdaftar di DIY tahun 2017 sebanyak 41.367 orang. Lowongan kerja/ kesempatan kerja formal tahun 2017 sebanyak 19.645 lowongan, sehingga diperlukan Program Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi supaya kesempatan kerja yang tercipta sebanding dengan jumlah angkatan kerja/ pencari kerja. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan, penempatan, pendampingan dan monitoring dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian informasi terkait dengan lowongan pekerjaan baik melalui informasi pasar kerja maupun melalui bursa kerja</li> <li>2. Penempatan tenaga kerja sesuai dengan jabatannya, pemberian orientasi pra pemberangkatan untuk memberikan edukasi, motivasi, etos kerja, budaya kerja dan hak dan kewajiban pekerja.</li> <li>3. pembinaan bagi lembaga penempatan (LPTKS, LPPMI dan BKK) supaya bekerja profesional sesuai dengan peraturan, sebagai bentuk perlindungan terhadap pencari kerja</li> <li>4. Memberikan perlindungan pra dan pasca penempatan bagi pekerja migran indonesia</li> <li>5. Perluasan kesempatan kerja di sektor informal diperlukan karena keterbatasan kesempatan kerja pada sektor formal di DIY melalui : Pembentukan tenaga kerja mandiri, Padatkarya, penerapan teknologi tepat guna serta Pemberdayaan penyandang disabilitas</li> <li>6. Penyelenggaraan transmigrasi sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung program pemerintah pusat dalam rangka pemerataan pembangunan di Indonesia</li> </ol>
--	---------	---

## 7. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

IKU	META INDIKATOR									
GUBERNUR	SASARAN PEMDA	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan								
	INDIKATOR	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
	SASARAN PEMDA	TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan

		Pertumbuhan Ekonomi	5.26	%	5.29	%	5.31	%	5.33	%
<b>SETDA/ ASISTEN</b>	<b>PROGRAM PEMDA</b>	Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)								
	<b>INDIKATOR PROGRAM PEMDA</b>	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
		kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	44	%	45	%	46	%	47	%
<b>ESELON II</b>	<b>MENDUKUNG SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.								
	<b>INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
		Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan	7,112,249	juta rupiah	7,183,372	juta rupiah	7,255,205	juta rupiah	7,327,757	juta rupiah

		peternakan dalam PDRB (Sumber BPS)								
	<b>META INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	Peningkatan nilai produksi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB dicapai melalui penyediaan lahan, penyiapan dan penyediaan benih/bibit, budidaya (penanaman, perlindungan hama dan penyakit, serta panen), sarana prasarana (alsintan, saprodi, irigasi, Jalan Usaha Tani), pengolahan dan pasca panen, pemasaran, serta pengembangan kapasitas SDM. Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun n (ADHK)								
<b>ESELON III</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan								
	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
		produksi tanaman pangan (ton)	2,312,780	ton	2,313,050	ton	2,313,255	ton	2,313,500	ton
	<b>META INDIKATOR PROGRAM</b>	jumlah produksi 8 komoditas tanaman pangan selama 1 tahun sesuai data BPS	jumlah produksi 8 komoditas tanaman pangan selama 1 tahun (Padi 881.106 ton; jagung 311.849 ton; kedelai 8.656 ton; kacang tanah 79.907 ton; kacang hijau 301 ton; ubi kayu 1.025.641 ton; ubi jalar 5.289 ton, sorghum 31 ton)							
<b>TUJUAN PROGRAM</b>	DIY merupakan salah satu produsen tanaman pangan di tingkat nasional. Namun masih terdapat berbagai permasalahan diantaranya:1. alih fungsi lahan pertanian2. kurangnya kapasitas SDM pertanian3. kurang optimalnya sarana prasarana pertanian4. kurang optimalnya kelembagaan petani5. kurangnya kualitas produk pertanianOleh karena itu program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil tanaman pangan dalam menjamin ketersediaan pangan daerah dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar mutu. Proses utama pelaksanaan progam ini mencakup:1) pengendalian alih fungsi lahan pertanian 2) pelatihan budidaya tanaman pangan3) penyediaan serta pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana pertanian (saprodi, jaringan irigasi teknis tersier, jalan usaha tani, alat mesin pertanian, dll)4) pendampingan kelembagaan petani5) standarisasi dan									

		sertifikasi hasil pertanian 6) pendampingan pasca panen Peningkatan produksi tanaman pangan didukung anggaran dari APBN dan APBD								
<b>ESELON III</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>	Program Peningkatan Produksi Hortikultura								
	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
		produksi hortikultura (ton)	397,965	ton	399,550	ton	401,150	ton	402,750	ton
	<b>META INDIKATOR PROGRAM</b>	jumlah produksi tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman biofarmaka selama 1 tahun. Budidaya tan hortikultura adalah kegiatan tanam menanam tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan mulai dari pengolahan tanam, penanaman, pemeliharaan, panen, penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan penanganan mutu serta pemasaran hasil. Data Dasar tahun 2017 dari BPS kelompok SBS (Sayur BUah Semusim) 106.022 ton; kelompok BST (Buah dan Sayuran Tahunan) 268.858 ton; Kelompok TBF (Tanaman Bio Farmaka) 396.375 ton								
<b>TUJUAN PROGRAM</b>	DIY merupakan salah satu produsen tanaman hortikultura di tingkat nasional. Namun masih terdapat berbagai permasalahan diantaranya: 1. kurangnya kapasitas SDM 2. kurangnya sarana produksi 3. rendahnya harga pada saat panen raya 4. kurangnya kualitas produk hortikultura Oleh karena itu program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil tanaman hortikultura dalam menjamin ketersediaan pangan daerah dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar mutu serta meningkatkan pendapatan petani. Proses utama pelaksanaan progam ini mencakup: 1) pendampingan budidaya tanaman hortikultura (sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat), termasuk saprodi									

		2) register kebun 3) pendampingan pasca panen 4) standarisasi dan sertifikasi hasil pertanian								
ESELON III	<b>NAMA PROGRAM</b>	Program Peningkatan Produksi Perkebunan								
	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		produksi perkebunan (ton)	68,877	ton	69,015	ton	69,153	ton	69,290	ton
	<b>META INDIKATOR PROGRAM</b>	jumlah produksi perkebunan selama 1 tahun								
<b>TUJUAN PROGRAM</b>	<p>Perkebunan di DIY merupakan perkebunan milik rakyat dan mampu mengungkit ekonomi masyarakat. Permasalahan tanaman perkebunan rakyat produksi masih relatif rendah, disebabkan antara lain : pengelolaan kebun belum sesuai baku teknis, kemampuan SDM perkebunan relatif rendah dan tua, kepemilikan lahan yang sempit, alih fungsi lahan pertanian, serta kurang optimalnya sarana prasarana pertanian. Oleh karena itu program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan. Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bimbingan teknis budidaya tanaman perkebunan sesuai SOP.</li> <li>2) penyediaan serta pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana pertanian (saprodi, alat mesin pertanian, dll)</li> <li>3) pendampingan kelembagaan petani</li> <li>4) pengawalan pelaksanaan kegiatan (Monev)</li> <li>5) pendampingan pasca panen hasil perkebunan</li> </ol>									
ESELON III	<b>NAMA PROGRAM</b>	Program Peningkatan Populasi Peternakan								
	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan

		populasi ternak (Animal Unit)	622,842	Animal Unit	624,874	Animal Unit	626,885	Animal Unit	628,870	Animal Unit
	<b>META INDIKATOR PROGRAM</b>	pengukuran indikator dengan cara menghitung populasi ternak dalam satuan Animal Unit (AU) dimana populasi (AU) = jumlah populasi ternak (ekor)x satuan konversi (AU/ekor) dan menjumlahkan populasi ternak besar, ternak kecil dan unggas pada periode tertentu (akhir tahun)	ternak besar: 225.077 AU, ternak kecil: 71.109 AU, ternak unggas: 326.657 AU		ternak besar: 226.599 AU, ternak kecil: 71.250 AU, ternak unggas: 327.025 AU		ternak besar: 228.130 AU, ternak kecil: 71.361 AU, ternak unggas: 327.394 AU		ternak besar: 229.675 AU, ternak kecil: 71.432 AU, ternak unggas: 327.763 AU	
	<b>TUJUAN PROGRAM</b>	DIY merupakan salah satu daerah penghasil komoditas peternakan dan ikut berperan serta dalam mencukupi kebutuhan pangan asal hewan nasional. Berdasarkan data tahun 2009-2014, konsumsi daging ruminansia meningkat sebesar 18,2% dari 4,4 gram/kap/hari pada tahun 2009 menjadi 5,2 gram/kap/hari pada tahun 2014. Dilain pihak dalam kurun waktu yang sama penyediaan daging sapi lokal rata-rata baru memenuhi 65,24% kebutuhan total nasional. Sehingga kekurangannya masih dipenuhi dari impor, baik berupa sapi bakalan maupun daging beku. Sedangkan DIY, konsumsi daging sapi untuk tahun 2017 sebesar 6,85 gram/kap/hari. Peningkatan kebutuhan pangan asal hewan harus diikuti dengan peningkatan populasi dan produksi hasil peternakan. Dukungan								

		<p>peningkatan status kesehatan hewan sangat diperlukan untuk tercapainya peningkatan populasi dan produksi. Selain itu, penyediaan produk hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal serta berdaya saing juga berpengaruh terhadap kesehatan manusia serta kesejahteraan petani peternak.</p> <p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kebutuhan untuk konsumsi dan populasi ternak tidak seimbang, sehingga perlu peningkatan populasi</li> <li>2. masih banyaknya penyakit hewan ternak</li> <li>3. masih banyak produk asal hewan yang belum ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)</li> </ol> <p>Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendampingan budidaya peternakan ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas.</li> <li>2) fasilitasi sarana-prasarana peternakan dan kesehatan hewan/kesmavet (alat mesin peternakan dan kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner, pakan serta obat dan vaksin).</li> <li>3) pelayanan kesehatan hewan/kesmavet</li> <li>4) sertifikasi pada unit usaha produk asal hewan</li> </ol>								
<b>ESELON III</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>	Program Pengembangan perbenihan pertanian								
	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
		Persentase benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi	85	%	87	%	89	%	91	%
<b>META INDIKATOR PROGRAM</b>	jumlah benih tanaman pangan,	69,679	kg	72,449	kg	75,183	kg	77,714	kg	

		hortikultura, dan perkebunan bersertifikat dijual dibagi total produksi benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan siap terdistribusi dikali seratus persen								
	<b>TUJUAN PROGRAM</b>	Penggunaan benih bermutu dan unggul sangat penting, karena merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produksi hasil pertanian. Produksi benih di UPTD BP2TPH merupakan salah satu produksi benih unggul dan bermutu untuk mendukung produksi tanaman pertanian di DIY. Adapun proses produksi benih meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengolahan lahan</li> <li>2. budidaya</li> <li>3. prosesing benih</li> </ol>								
<b>ESELON III</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>	Program Pengembangan SDM pertanian dan penyuluhan								
	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
		Tingkat pengetahuan dan ketrampilan sdm pertanian	73	nilai/skor	74	nilai/skor	75	nilai/skor	76	nilai/skor
<b>META INDIKATOR</b>	Nilai rata-rata purnawidya hasil	73	nilai/skor	74	nilai/skor	75	nilai/skor	76	nilai/skor	

	<b>PROGRAM</b>	evaluasi pasca diklat pada tahun n								
	<b>TUJUAN PROGRAM</b>	Struktur perekonomian D.I Yogyakarta berdasarkan kontribusi PDRB menurut lapangan usaha Tahun 2016 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan (13,21%), pertanian (10,41%), dan akomodasi dan makan minum (10,22%). Disisi lain persentase pekerja /karyawan menurut lapangan usaha utama, sektor pertanian usaha pertanian pada bulan Agustus 2017 hanya 4,9 %, sedangkan sektor industri 32,2 % dan sektor jasa 62,9%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pengembangan SDM pertanian mealalui kegiatan pelatihan dan pendampingan petani(penyuluhan) perlu dilakukan mengingat SDM pertanian cukup besar dalam kontribusi perekonomian (PDRB 10,41%) sedangkan SDM pertanian kurang memperoleh peningkatan pembinaan karena hanya 4,9 % saja yang menggantungkan sebagai lapangan kerja utama.								
<b>ESELON III</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>	Program Pengawasan dan sertifikasi benih pertanian								
	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
		Jumlah sertifikasi benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan perkebunan	600	ha	700	ha	800	ha	900	ha
	<b>META INDIKATOR PROGRAM</b>	Jumlah sertifikasi benih Tanaman Pangan (luas areal pertanaman yang diajukan produsen untuk melakukan sertifikasi), Hortikultura (produksi benih yang bisa dimanfaatkan/ditanam kemudian di konversi ke ha, dan perkebunan tahun n								
<b>TUJUAN PROGRAM</b>	BPSBP bertugas mendukung ketersediaan benih unggul bermutu di diy baik tanaman pangan maupun hortikultura yang mempunyai luas lahan sawah seluas 55.425 ha membutuhkan benih yang cukup banyak, Luas tanam padi pada tahun 2016 seluas 166.824,5 ha , Kedele 123.879,5 ha (DIY dlm angka 2017), membutuhkan benih sebesar 4.170,61 ton padi, kedele 3.716,385 ton, Pada kenyataannya produksi benih disuatu daerah tidak hanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan didaerahnya sendiri tetapi digunakan pula untuk daerah lain. Produksi benih Tanaman									

		<p>Pangan yang dihasilkan di DIY pada tahun 2017 sebesar 26,07 ton dari luas sertifikasi 123,36 ha; sedangkan produksi benih hortikultura terdiri dari berbentuk biji sebesar 10,6 kg; 52.000 batang berbentuk batang. Disamping melakukan proses sertifikasi BPSB juga mempunyai tupoksi pengawasan peredaran terhadap benih yang beredar dikios-kios serta melakukan kegiatan kultivar untuk mendukung penambahan varietas baru dan mendukung ketersediaan benih yang kurang.</p> <p>Proses utama pelaksanaan program ini mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sertifikasi Benih Pertanian</li> <li>Pengawasan Peredaran Benih Pertanian</li> <li>Penilaian kultivar</li> </ol>								
<b>ESELON III</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>	Program Perlindungan Tanaman Pertanian								
	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
		Persentase Pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI (%)	95	%	95	%	95	%	95	%
	<b>META INDIKATOR PROGRAM</b>	(luas tanaman aman dari serangan OPT dan DPI dibagi luas total tanaman) dikali seratus persen	216,478	ha tanaman pangan						
		95,242	ha hortikultura	95,242	ha hortikultura	95,242	ha hortikultura	95,242	ha hortikultura	
		600	ha tanaman perkebunan	600	ha tanaman perkebunan	600	ha tanaman perkebunan	600	ha tanaman perkebunan	

	<b>TUJUAN PROGRAM</b>	Serangan OPT dan dampak perubahan iklim merupakan salah satu kendala dalam pencapaian sasaran produksi pertanian sesuai yang telah ditetapkan. Program perlindungan tanaman pertanian bertujuan mengamankan pertanaman dari serangan OPT dan DPI sebesar 95% (luas tanaman pertanian aman dari serangan OPT dan DPI) untuk mencapai program tersebut dilakukan beberapa kegiatan meliputi kegiatan penghitungan dan pengumpulan informasi tentang keadaan populasi atau tingkat gangguan OPT dan dampak perubahan iklim secara periodik, penyediaan sarana prasarana pengendalian OPT dan DPI, penyediaan bahan pembuatan agen hayati sebagai pestisida nabati, pemantauan peredaran pestisida, gerakan pengendalian OPT dan penerapan penanganan DPI serta pembinaan kelembagaan perlindungan tanaman yang ada seperti Lab Pengamatan hama dan penyakit Tumbuhan (LPHPT), Lab Pengujian MUtu produk tanaman (LPMPT), Regu Perlindungan Tanaman (RPT), Pos Pelayanan Agen Hayati (PPAH), Klinik Tanaman dan petani pengamat se DIY.								
<b>ESELON III</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>	Program Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan								
	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
		Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi	92	%	94	%	96	%	98	%
	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
		Persentase benih ternak bersertifikat yang terdistribusi	71	%	71	%	80	%	83	%
<b>META</b>	jumlah bibit ternak ber SKLB Ternak yang dijual dibagi total jumlah bibit ternak siap dijual dikali seratus persen									

	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	(SKLB=Surat keterangan Layak Bibit) Ternak								
		jumlah benih ternak bersertifikat yang dijual dibagi total jumlah benih ternak siap dijual dikali seratus persen (LSPro)								
	<b>TUJUAN PROGRAM</b>	Kebutuhan DIY akan pangan asal hewan termasuk tinggi antara lain karena sebagai kota budaya, kota pelajar dan kota wisata. Namun ketersediaannya belum mencukupi sehingga disuplai dari luar DIY. Salah satunya dengan peningkatan produktivitas ternak melalui ketersediaan bibit ternak berkualitas yang ber SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit) Ternak melalui Inseminasi Buatan dari pejantan berkualitas; Ketersediaan Benih Ternak (semen beku ber- Ls Pro); Terjaminnya produk asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) melalui pengujian sampel produk asal hewan dan sampel penyakit hewan. Proses Utama Pelaksanaan Kegiatan mencakup : I. Pengembangan Perbibitan ternak, meliputi : a). Produksi bibit ternak (ekor) ber SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit); b). Produksi Semen Beku/benih ternak (Dosis) bersertifikat LS Pro dan belum Ls Pro II. Pelaksanaan Pengawasan Kesehatan dan Keamanan Pangan Asal Hewan dengan cara : a). Pengendalian Lalu lintas keluar masuk ternak di Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT); b). Pengajuan/Pemeliharaan Sertifikat ditasi Laboratorium (1 tahun)c). Rekomendasi untuk Kabupaten dalam rangka pengendalian penyakit hewan dengan pengujian di laboratorium Kesehatan Hewan (Keswan) d). Rekomendasi ke Kabupaten dalam rangka Penjaminan Keamanan Pangan Asal Hewan (PAH) III. Mou dengan pengguna semen beku produksi UPTD BPBPTDK dalam rangka Pemasaran semen beku bersertifikasi LS Pro								
ESELON II	<b>MENDUKUNG SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	Terwujudnya ketahanan pangan								
	<b>INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		TARGET/SATUAN	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
		skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90.22		90.52		90.82		91.12	
	<b>META INDIKATOR SASARAN PERANGKAT</b>	Peningkatan skor Pola Pangan Harapan dicapai melalui peningkatan ketersediaan pangan, akses dan distribusi pangan, serta penganeekaragaman pangan dan penjaminan keamanan pangan. Indikator dihitung dengan % AKG X Bobot								

	DAERAH									
ESELON III	<b>NAMA PROGRAM</b>	Program Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan								
	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energy								
	<b>META</b>	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>TARGET/SATUAN</b>	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
	(Persentase peningkatan ketersediaan energi ditambah Persentase konsumsi energi) dibagi 2	0.08	%	0.08	%	0.08	%	0.08	%	
<b>TUJUAN PROGRAM</b>	<p>Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi yang dikonsumsi setiap hari oleh seseorang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh dan aktivitas untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.</p> <p>Agar kebutuhan energi individu dapat tercapai maka harus tersedia bahan pangan yang cukup untuk selanjutnya didistribusikan agar dapat diakses oleh masyarakat, diolah dan dikonsumsi sampai menghasilkan energi.</p> <p>Angka Ketersediaan Energi yang dianjurkan oleh WNPG X sebesar 2.400 kkal/kap/hari sedangkan Angka Konsumsi Energi anjuran sebesar 2.150 kkal/kap/hari.</p> <p>Kondisi di DIY tahun 2017 Angka Ketersediaan Energi sebesar 3.727 kkal/kap/hari dan Angka Konsumsi Energi sebesar 2.192,7 kkal/kap/hari. Kondisi ketersediaan ada kecenderungan menurun sejalan dengan berbagai kendala yang dihadapi dalam produksi pertanian. Masalah masih panjangnya rantai pasok pangan dan gejolak harga pangan yang masih terjadi di subsistem keterjangkauan juga memerlukan penyelesaian. Sedangkan di sub sistem konsumsi banyak dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Upaya untuk meningkatkan dan menjaga keseimbangan konsumsi energi pada kondisi optimal menjadi bagian upaya yang dapat ditempuh agar tidak menimbulkan gangguan/masalah kesehatan.</p> <p>Proses utama program ini adalah:</p>									

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis data ketersediaan, pasokan, harga, kebutuhan, dan konsumsi pangan</li> <li>2. Penyediaan cadangan pangan pemerintah dan pengembangan cadangan pangan masyarakat</li> <li>3. Stabilisasi harga pangan di tingkat produsen dan konsumen</li> <li>4. Penganekaragaman konsumsi pangan</li> <li>5. Pengawasan keamanan dan sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan</li> <li>6. Penyelenggaraan Jogja Benih</li> </ol>								
<b>ESELON III</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>	Program pemberdayaan daerah rawan pangan								
	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
		<b>TARGET/SATUAN</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
		jumlah desa rawan pangan	6	desa	4	desa	2	desa	0	desa
	<b>META INDIKATOR PROGRAM</b>	jumlah desa rawan pangan tahun n								
<b>TUJUAN PROGRAM</b>	<p>Pemantapan ketahanan pangan tidak terlepas dari penanganan kerawanan pangan karena kerawanan pangan merupakan penyebab penting instabilitas ketahanan pangan dan lebih lanjut akan berdampak pada tingkat kemiskinan. Kerawanan pangan dapat disebabkan karena kendala yang bersifat kronis seperti terbatasnya sumber daya dan kemampuan, maupun yang bersifat sementara seperti tertimpa musibah atau bencana alam. Dari indikator penyebabnya dapat dibedakan berdasarkan aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Untuk mengatasi hal ini pemerintah dan masyarakat perlu membangun suatu sistem kewaspadaan, yang mampu mendeteksi secara dini adanya gejala kerawanan pangan di sekitarnya serta dapat meresponnya dengan cepat dan efektif. Penanganan yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk menghindarkan masyarakat tersebut dari kerawanan yang lebih parah, dengan segala dampak yang mengikutinya.</p> <p>Pemantapan ketahanan pangan dapat diwujudkan melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis di bidang pangan, utamanya bagi golongan rawan pangan sementara maupun rawan pangan kronis yang masih mempunyai potensi pengembangan aktivitas ekonominya. Agribisnis pangan melibatkan banyak pelaku, usaha kecil seperti petani, pengolah dan pedagang yang berbasis pada keunggulan komparatif dan kompetitif sumberdaya lokal.</p> <p>Proses utama program ini adalah:</p>									

		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analisis data kerawanan dan kerentanan pangan</li><li>2. Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)</li><li>3. Identifikasi calon penerima manfaat hibah</li><li>4. Hibah dan pemberdayaan masyarakat di desa rawan pangan</li><li>5. Monitoring dan evaluasi</li><li>6. Penyusunan rekomendasi ketahanan pangan</li><li>7. Pelaporan</li></ol>
--	--	---

## BAB V

# STRATEGI PENGEMBANGAN LAYANAN PENDIDIKAN DIY

### 5.1. Pengantar

Bab V ini akan menguraikan secara lebih rinci tentang strategi pengembangan layanan pendidikan DIY untuk mengoptimalkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dalam periode lima tahun mendatang, tahun 2018-2022. Meskipun strategi pengembangan layanan pendidikan DIY ini menjadi substansi pokok dari bab ini, namun tulisan akan menyajikan terlebih dahulu tiga uraian berikut: (1). Isu strategis pembangunan DIY; (2). Persoalan-persoalan sektor pendidikan DIY; dan (3). Isu strategis sektor pendidikan DIY.

Dengan mempertimbangkan pada hampiran pembahasan tersebut, maka penulisan Bab ini akan tersistematisasi kedalam empat sub bab berikut: **pertama**, paparan tentang isu-isu strategis pembangunan DIY dalam kurun waktu lima tahun mendatang. **Kedua**, paparan tentang persoalan-persoalan sektor pendidikan DIY. **Ketiga**, paparan selanjutnya akan menajamkan isu-isu strategis sektor pendidikan DIY. Dan **keempat**, paparan tentang bagaimana rumusan strategi pengembangan pelayanan pendidikan DIY selama lima tahun mendatang.

### 5.2. Persoalan dan Isu Strategis Sektor Pendidikan

#### 5.2.1. Isu-Isu Strategis Pembangunan DIY

Sebelum memaparkan tentang isu-isu strategis sektor pendidikan, berikut ini perlu paparan menyeluruh tentang isu-isu strategis pembangunan DIY dalam beberapa tahun mendatang. Isu-isu strategis ini penting disampaikan sebagai bahan acuan bagi pemerincian isu-isu

strategis sektor pendidikan. Sekurangnya terdapat empat isu strategis pembangunan DIY yaitu:

1. Masalah Kemiskinan pada wilayah yang menjadi sasaran prioritas
  - a) Pemberian beasiswa;
  - b) Pemberian BOSDA;
2. Masalah Ketimpangan wilayah
  - a) Standarisasi kurikulum, bahan ajar dan pengawasan sekolah;
  - b) Pembangunan sarana prasarana sekolah yang mengalami kerusakan
3. Masalah ketimpangan pendapatan
4. Pembangunan Bandara NYIA

Dari keempat isu strategis pembangunan DIY tersebut, paparan berikut akan memerinci lebih lanjut tentang daftar persoalan/tantangan pendidikan di DIY yang perlu untuk mendapatkan respon dan intervensi kebijakan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pendidikan DIY terkait.

#### *5.2.2. Persoalan-Persoalan Pendidikan di DIY*

Berdasarkan isu strategis pembangunan DIY tersebut di atas, prioritas utama yang perlu mendapatkan fokus perhatian adalah soal disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan di DIY. Dalam konteks ini, tiga kabupaten Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius agar pembangunan pendidikan bisa mengejar ketertinggalan kabupaten/ kota lainnya di DIY.

Rumusan kebijakan afirmatif terhadap dua kabupaten tersebut tentu saja harus dipadukan dengan kerja-kerja program pemberdayaan masyarakat terutama di sejumlah wilayah-wilayah kantong kemiskinan

yang terdapat di dua kabupaten tersebut. Aspek ketimpangan pembangunan wilayah antara dua kabupaten dengan tiga kabupaten/kota lainnya di DIY ini perlu juga direlasikan dengan tingkat kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap kondisi rawan bencana di lima wilayah kabupaten/kota di DIY.

Dalam konteks itu, pemerintah perlu mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai ancaman bencana alam seperti erupsi gunung api, gempa bumi, angin rebut, banjir tanah longsor, tsunami serta kekeringan, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting agar kesadaran tentang pengurangan risiko bencana itu bisa mengantisipasi dampak risiko bencana yang berpotensi besar memerosotkan derajat kesejahteraan terutama kelompok-kelompok masyarakat miskin di wilayah rawan bencana.

Berikut ini adalah paparan rinci tentang persoalan-persoalan sektor pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian dari multistakeholder pembangunan di DIY:

1. Ketersediaan guru dan tenaga kependidikan semakin berkurang setiap tahunnya karena memasuki masa pensiun sedangkan formasi pengangkatan baru sangat terbatas dan tidak dilaksanakan setiap tahun (moratorium PNS)
2. Banyaknya peserta didik yang masuk kategori miskin atau tidak mampu secara ekonomi;
3. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
4. Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan dunia kerja belum optimal;
5. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan kearifan lokal masih kurang;

6. Pendidikan yang berorientasi pada pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, masih sangat kurang;
7. Pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan DIY masih perlu ditingkatkan mutunya;
8. Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
9. Fasilitasi, sarana dan prasarana fisik maupun nonfisik untuk pengembangan riset/penelitian guna mendukung produktifitas dan daya saing daerah belum optimal;
10. Kerjasama pengembangan pendidikan dan penelitian yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan masih kurang;
11. Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Dasar masih belum optimal.
12. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya atau ada kecenderungan terjadi kapitalisme pendidikan;
13. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi;
14. Pendidikan cenderung mekanistik;
15. Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan ketenagakerjaan yang berimplikasi kepada peningkatan animo masyarakat belajar ke DIY masih belum optimal;
16. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal yang berwawasan global masih kurang;
17. Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan wawasan keilmuan belum tercipta;

18. Belum meratanya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja sesuai kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja, sistem yang berorientasi pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, maupun sistem pendidikan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan;
19. Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun terutama bagi penduduk di wilayah perdesaan belum berjalan mantap dan sesuai harapan;
20. Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal belum dikembangkan dengan baik;
21. Pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan DIY masih perlu ditingkatkan mutunya;
22. Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
23. Penanganan secara terpadu bagi anak berkebutuhan khusus belum memadai;
24. Kembali maraknya kenakalan remaja seperti tawuran antar pelajar dan kejahatan lain yang melibatkan anak usia sekolah;
25. Adanya pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Kab/Kota ke Provinsi

### *5.2.3. Isu-Isu Strategis Sektor Pendidikan DIY*

Merujuk pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, berikut adalah lima isu strategis yang

perlu mendapat perhatian para pemangku pembangunan pendidikan di DIY (Disdikpora DIY, 2017: 3-6).

**Pertama**, *penyediaan kesempatan pendidikan berkualitas untuk semua sepanjang hayat dan nondiskriminatif*. Sebagai pusat pendidikan, DIY memang harus terbuka, siapapun dapat mengakses kesempatan menempuh pendidikan, namun sekaligus juga harus diupayakan bahwa jangan sampai pendidikan putra-putri masyarakat setempat terabaikan, termasuk mereka yang karena kondisi anak dan atau kondisi orangtuanya yang memerlukan bantuan. Dengan demikian isu yang perlu diperhatikan adalah bagaimanakah pendidikan yang harus nondiskriminatif, namun tetap peduli terhadap warga masyarakat yang kalau tidak ada bantuan afirmatif atau advokatif tidak mungkin memperoleh pendidikan yang layak. Tidak kalah pentingnya adalah bahwa orientasi egalitarian dan pendidikan prorakyat dituntut pula mampu menyediakan layanan pendidikan yang sangat peduli kualitas, peduli terhadap kebutuhan orientasi karir yang beragam dalam mempersiapkan masa depan anak-anak. Ada sebagian dirasa cukup dulu dengan pendidikan menengah karena perlu segera dapat bekerja, namun sebagian lain membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi, dan oleh karenanya memerlukan pendidikan dasar dan menengah yang cukup kuat untuk bekal belajar berbagai disiplin dan keahlian di sektor modern yang sangat ketat persaingannya. Dengan demikian pada dasarnya setiap warga masyarakat memiliki akses yang sama untuk menempuh pendidikan di setiap jalur, jenjang, maupun jenis pendidikan tanpa diskriminasi baik jenis kelamin, ras, agama, dan lainnya.

**Kedua**, *pengembangan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai budaya yang mengedepankan kedamaian dalam kemajemukan*. Pendidikan yang berkarakter, pendidikan karakter, nation and character building adalah tema-tema yang menuntut dapat diakomodasikan di dalam pendidikan di DIY secara sistemik kelembagaan. Aset kebudayaan DIY yang

tak ternilai harganya perlu dikawal jangan sampai terlibas dalam berinteraksi dengan berbagai kebudayaan lain, perlu pelestarian atas aspek-aspek yang substantif esensial, dan untuk hal-hal yang bersifat teknis instrumental bila perlu terbuka untuk berakulturasi dengan kebudayaan lain. Dengan demikian isunya adalah bagaimana peran pendidikan dalam pembangunan kebudayaan agar secara arif DIY tidak kehilangan jatidiri budayanya, namun cukup adaptif berakulturasi dengan budaya lain. Refleksi atas pengalaman historis menunjukkan bahwa kemajemukan yang tumbuh dan berkembang di DIY merupakan salah satu aset unik yang perlu menjadi salah satu parameter di dalam pengembangan pendidikan yang diharapkan mampu berkiprah dan mendapatkan pengakuan di taraf nasional dan internasional.

*Ketiga, pengembangan pusat unggulan nasional pengembangan mutu pendidikan yang komprehensif.* Perkembangan pendidikan belakangan ini menampilkan hal-hal yang cukup mengawatirkan, misalnya adanya kecenderungan perubahan yang bersifat parsial, reduktif, instan, atau pragmatis. Misalnya ada ungkapan mutu akademik rendah tidak menjadi masalah asal jujur. Ungkapan ini mengawatirkan, karena seolah-olah akademik dan moral itu pilihan, padahal harus keduanya baik. Contoh lain, mestinya hasil belajar itu akumulatif diupayakan sejak awal secara konsisten, tetapi yang terjadi dilakukan pengkarbitan pada saat-saat terakhir menjelang ujian nasional. Pengembangan pendidikan DIY diharapkan mampu menghasilkan model pendidikan bermutu yang utuh, komprehensif, dimana dimensi intelektual–emosional–moral–spiritual dan kecerdasan lain yang esensial menjadi komitmen semua pelaku dan pemangku kepentingan pendidikan.

Keempat, *pengembangan pendidikan yang relevan dengan pembangunan daerah dan nasional dalam konteks global.* Isu keempat ini mengingatkan pentingnya relevansi pendidikan dengan lingkungan

terdekat (daerah), nasional, bahkan perlu pula memperhitungkan lingkungan kawasan Asean dan global. Pembangunan senantiasa mengandung aspek-aspek ekonomi–sosial–politik. Pendidikan yang relevan adalah pendidikan yang berinteraksi secara timbal balik dengan lingkungan ekonomi–sosial–politik tersebut. Contoh sederhana pendidikan kecakapan hidup, haruslah menggali sumberdaya setempat (lokal/daerah/nasional) yang diantisipasi cocok dengan perkembangan masyarakat nasional dan internasional. Modal budaya dan modal sosial perlu diberdayakan dan didayagunakan untuk membangun pendidikan; sebaliknya pendidikan juga perlu memiliki andil dalam memperkuat modal kultural dan modal sosial tersebut, baik dalam konteks pembangunan ekonomi, sosial, maupun politik.

*Kelima, pengembangan tatakelola pendidikan yang baik untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya.* Pendidikan yang visioner membutuhkan sistem pendukung yang tepat, yang dibangun dengan cara yang tepat pula. Tatakelola atau governance itulah sistem pendukung yang dimaksud; yang tercakup di dalamnya adalah kepemimpinan dan manajemen serta pengorganisasian untuk urusan SDM, pembiayaan, sarana-prasarana, dan program-kegiatan. Di samping tatakelola yang utuh dan tepat tersebut, masih perlu pula dikembangkan pola hubungan kerja sistemik dan sinergis intra dan inter sistem birokrasi pada tingkat satuan pendidikan, tingkat daerah (kabupaten/kota), dan tingkat DIY dalam satu sistem nasional dan dalam konteks global. Sampai kini masih ada hal yang memerlukan pembenahan dalam implementasi sistem desentralisasi pendidikan. Satu hal lagi yang esensial adalah bahwa menggulirkan perubahan menuju kuatnya orientasi kultural dalam pendidikan harus menggunakan pendekatan kultural dikomplementasikan dengan pemakaian pendekatan legal struktural yang tak terhindarkan di dalam sistem birokrasi formal.

Dengan mengacu pada kelima isu strategis pendidikan DIY tersebut di atas, maka berikut ini adalah daftar target pendidikan yang perlu direspon secara tepat dan memadai dari segenap pemangku kepentingan pembangunan pendidikan di DIY.

1. Pentingnya pemerataan kuantitas dan kualitas pelayanan dan penyediaan akses pendidikan di seluruh wilayah kabupaten/kota di DIY;
2. Pentingnya penguatan pendidikan formal, informal, dan non formal untuk memperkuat pendidikan karakter (makhluk spiritualis, makhluk sosial, dan makhluk ekologis)
3. Pentingnya penguatan pendidikan formal, informal, dan non formal untuk memperkuat karakter toleran dan multikulturalisme;
4. Pentingnya penerapan pendidikan berbasis budaya di semua jenjang pendidikan (SD sd PT)
5. Pentingnya penguatan pendidikan formal, informal, dan non formal untuk memperkuat budaya minat baca di berbagai jenjang pendidikan;
6. Pentingnya peningkatan program pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PKPLK)
7. Pentingnya pengembangan dan peningkatan pelayanan pendidikan ketrampilan teknis terstandarisasi untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Pentingnya pendidikan non Formal dan Informal khususnya dalam penguasaan bahasa asing, hospitality khususnya pada desa budaya, desa wisata;
9. Pentingnya akselerasi pengembangan pendidikan terkemuka di DIY;
10. Pentingnya peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi;
11. Pentingnya pengembangan ketrampilan & sentra bisnis pemuda berbasis kuliner di berbagai kawasan potensi wisata (seperti

Gunungkidul (kawasan pesisir pantai), Bantul (Samas dan Parangtritis) dan Kulonprogo (kawasan NYIA). Dalam hal ini perlu koordinasi dengan Dinas KUKM, Dinas perikanan dan kelautan, agar dapat terfokus pada pengembangan pada spot yang sama;

12. Pentingnya pengembangan dan peningkatan keunggulan kompetitif dan komparatif sekolah melalui revitalisasi SMK
13. Pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengurangan risiko bencana;
14. Pentingnya peningkatan kualitas perpustakaan sekolah di wilayah-wilayah kantong kemiskinan dan pendidikannya tertinggal;
15. Pentingnya konektivitas antara Gratama Pustaka dengan 7 kawasan Pengembangan Bandara dan Bandara NYIA sebagai sebagai akselerasi wisata edukasi

### 5.3. Strategi Pengembangan Layanan Pendidikan DIY

Paparan berikut akan menjelaskan tentang pemerincian strategi pengembangan layanan pendidikan DIY dalam kerangka mewujudkan tercapainya pembangunan manusia yang lebih berkualitas.

No	Isu-Isu Strategis	Strategi Pengembangan
1	Pentingnya pemerataan kuantitas dan kualitas pelayanan dan penyediaan akses pendidikan di seluruh wilayah kabupaten/kota di DIY;	Memberikan prioritas perbaikan layanan kepada sekolah-sekolah di wilayah kantong kemiskinan di DIY. Prioritas itu bisa dispesifikasi dalam beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan sarana prasarana pendidikan di wilayah kantong-kantong kemiskinan, terutama untuk sekolah-sekolah yang rusak atau berada di bawah standar layanan pendidikan</li> <li>b. Peningkatan pemberian beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin (BOSDA dan</li> <li>c. Peningkatan kualitas pelayanan Bosda</li> <li>d. Peningkatan standar kurikulum dan bahan ajar serta pengawasan sekolah</li> <li>e. Peningkatan kuantitas dan kualitas guru</li> </ol>

No	Isu-Isu Strategis	Strategi Pengembangan
		<p>di sekolah-sekolah di wilayah kantong-kantong kemiskinan di DIY (Gunungkidul, Kulonprogo, Bantul)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f. Peningkatan kuantitas dan kualitas guru-guru melalui optimalisasi fungsi dan peran MGMP / KSKS Kelompok Kerja Sekolah Kejuruan di seluruh DIY</li> <li>g. Pengembangan dan peningkatan fungsi pengawas terutama di wilayah-wilayah kantong kemiskinan di DIY (Gunungkidul, Kulonprogo, Bantul)</li> <li>h. Peningkatan dan penguatan kerjasama, koordinasi, dan konsolidasi program/kegiatan antara Bappeda DIY, Disdikpora dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) di DIY</li> <li>i. Pengembangan penggalangan dana CSR untuk pemberian program beasiswa anak-anak dari keluarga tidak mampu di wilayah kantong-kantong kemiskinan di DIY (Gunungkidul, Bantul, Kulonprogo)</li> </ul>
2	<p>Pentingnya penguatan pendidikan formal, informal, dan non formal untuk memperkuat pendidikan karakter (makhluk spiritualis, makhluk sosial, dan makhluk ekologis)</p>	<p>Mengoptimalkan peningkatan layanan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keistimewaan DIY secara terpadu dan komprehensif antara pendidikan formal, informal, dan non formal. Bentuk pendidikan karakter ditujukan untuk membentuk pribadi yang spiritual, pribadi sosial dan pribadi ekologis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Optimalisasi kurikulum dan bahan ajar yang mendorong siswa untuk berpengetahuan dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat.</li> <li>b. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dalam mentransfer pengetahuan dan nilai-nilai baik di dalam sekolah, keluarga, dan masyarakat</li> <li>c. Peningkatan kualitas pendampingan “Resocialization-Youth Camp” untuk <i>role model resosialisasi anak-anak Gang Klithih</i> melalui jejaring pendidikan</li> </ul>

No	Isu-Isu Strategis	Strategi Pengembangan
		<p>karakter oleh multistakholder pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Optmalisasi identifikasi persoalan dan proses pendampingan siswi-siswi sekolah menengah yang terlibat kenakalan remaja melalui program “Resocialization-Youth Camp”</li> <li>e. ToT pendidikan karakter guru bimbingan konseling dalam menangani siswa-siswa yang terlibat dalam kenakalan remaja.</li> <li>f. Pengarusutamaan kultur pendidikan ekologis yang terintegrasi dalam pendidikan formal, informal, dan non formal untuk penguatan pembangunan lingkungan berkelanjutan</li> <li>g. Role model ekstrakurikuler pendidikan ekologis untuk siswa pendidikan menengah atas dan kejuruan</li> <li>h. Penguatan fasilitasi anak-anak bermasalah dengan sistem sekolah (seperti siswi hamil, kenakalan siswa, dll) melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/ PKBM.</li> </ul>
3	<p>Pentingnya penguatan pendidikan formal, informal, dan non formal untuk memperkuat karakter toleran dan multikulturalisme;</p>	<p>Optimalisasi program pembanguan politik perjumpaan bagi tumbuhnya toleransi dan multikulturalisme di DIY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pagelaran forum perjumpaan lintas iman, suku, dan budaya di sekolah menengah atas</li> <li>b. ToT pendidikan guru-guru agama untuk mencegah peningkatan formalisasi agama yang berdampak pada segregasi sosial</li> <li>c. Conferensi dua tahunan mahasiswa nusantara untuk multikulturalisme dan kebhinekaan</li> <li>d. Program pertukaran lintas iman berbasis keluarga, dimana peserta didik tiggal di keluarga yang berbedah iman dalam termin waktu tertentu. Pasca kegiatan itu mereka menuliskan pengalamannya tersebut dan dibukukan.</li> </ul>

No	Isu-Isu Strategis	Strategi Pengembangan
4	Pentingnya penerapan pendidikan berbasis budaya di semua jenjang pendidikan (SD sd PT)	<p>Mengoptimalkan penerapan pendidikan berbasis budaya di jenjang pendidikan tinggi di DIY</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perluasan dan peningkatan diseminasi pendidikan berbasis budaya di kalangan mahasiswa baru perguruan tinggi di DIY melalui Pelatihan Pembelajaran Sukses Mahasiswa Baru (PPSMB)</li> <li>b. ToT pendidikan berbasis budaya untuk delegasi perguruan tinggi/ universitas (misalnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat/ LPPM)</li> <li>c. ToT pendidikan berbasis budaya untuk delegasi mahasiswa daerah dari seluruh Nusantara yang ada di DIY</li> <li>d. Pengembangan budaya yang berkepribadian dengan mengakomodasi kontekstualisasi latar belakang pelajar atau mahasiswa baru dan fasilitasi pertemuan untuk mencari benang merah integrasi budaya bangsa.</li> </ol>
5	Pentingnya penguatan pendidikan formal, informal, dan non formal untuk memperkuat budaya minat baca di berbagai jenjang pendidikan;	<p>Optimalisasi pengembangan budaya baca masyarakat melalui pendekatan pendidikan formal, informal dan nonformal.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan regulasi kebijakan yang mengkonsolidasikan dan mensinergikan program-program pengembangan budaya minat baca <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan peta budaya minat baca</li> <li>- Penyusunan naskah akademik Perda</li> <li>- Penyusunan draf Perda</li> <li>- Perumusan Rencana Strategis</li> </ul> </li> <li>b. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan dan tata kelola infrastruktur perpustakaan yang disesuaikan dengan potensi ruang, sosio, ekonomi, kultural untuk memperkuat pengarusutamaan budaya minat baca masyarakat</li> <li>c. Peningkatan kuantitas, kapasitas, dan kapabilitas SDM perpustakaan sebagai agensi utama pengarusutamaan budaya</li> </ol>

No	Isu-Isu Strategis	Strategi Pengembangan
		minat baca d. Pemberdayaan tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga-lambaga organik di tingkat masyarakat dan komunitas demi memperkuat gerakan budaya minat baca e. Peningkatan kerjasama lembaga pemerintah dan lembaga Pendidikan Tinggi melalui pengoptimalan skema program KKN sebagai sarana untuk meningkatkan budaya minat baca f. Penguatan jejaring kerjasama lembaga pemerintah dan swasta melalui pengopatimalan skema program CSR untuk memperkuat gerakan budaya minat baca g. Peningkatan apresiasi tokoh/aktivis/pegiat dan perpustakaan/TBM tauladan yang berjasa memajukan minat baca masyarakat
6	Pentingnya peningkatan program pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PKPLK)	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan Peningkatan kemampuan teknis terstandarisasi bagi lulusan siswa sekolah pendidikan khusus a. Peningkatan kuantitas dan kualitas laboratorium Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) untuk siswa lulusan Sekolah Pendidikan Khusus b. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknis siswa lulusan Sekolah Pendidikan Khusus terstandar c. Peningkatan kuantitas dan kualitas Guru Pendamping Khusus di sekolah-sekolah Pendidikan Khusus d. Pembentukan Forum CSR untuk pemberdayaan kelompok kewirausahaan alumni Sekolah Pendidikan Khusus e. Rekognisi dari OPD untuk membuat promoting hasil karya dan pemasaran berkelanjutan
7	Pentingnya pengembangan dan peningkatan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas ketrampilan teknis terstandarisasi untuk lulusan sekolah menengah kejuruan

No	Isu-Isu Strategis	Strategi Pengembangan
	<p>pelayanan pendidikan ketrampilan teknis terstandarisasi untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kuantitas dan kualitas peralatan laboratorium terstandar pada Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) untuk proses akselerasi pendidikan ketrampilan teknis terstandar untuk lulusan SMK</li> <li>b. Akselerasi dan diversifikasi pendidikan ketrampilan teknis terstandar bagi lulusan SMK</li> <li>c. Akselerasi proses sertifikasi pendidikan ketrampilan teknis terstandar bagi lulusan SMK sesuai SKKNI</li> <li>d. Pengayaan pengetahuan lulusan SMK dengan pemberian materi kebijakan ketenagakerjaan.</li> </ul>
8	<p>Pentingnya pendidikan non Formal dan Informal khususnya dalam penguasaan bahasa asing, hospitality, khususnya di wilayah-wilayah potensi wisata, desa budaya, dan desa wisata;</p>	<p>Mengembangkan kemampuan penguasaan bahasa asing bagi siswa sekolah menengah dan sekolah menengah kejuruan di wilayah-wilayah potensi wisata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kajian pemetaan dan identifikasi kebutuhan (need assessment) pendidikan dan pelatihan bahasa asing untuk siswa SMK dan SMA di wilayah-wilayah potensi wisata, terutama Gunungkidul, Bantul, dan Kulonprogo;</li> <li>b. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan tenaga didik khusus bahasa Asing</li> <li>c. Pengembangan kerjasama (MoU) dengan Pusat Studi Bahasa/ Lembaga Kursus Bahasa/ Tour and Travel untuk pendidikan dan pelatihan bahasa asing bagi siswa SMK dan SMA di wilayah potensi wisata terutama Gunungkidul, Bantul, dan Kulonprogo</li> <li>d. Pengembangan proses sertifikasi penguasaan bahasa asing siswa SMK dan SMA</li> </ul>
9	<p>Pentingnya akselerasi pengembangan pendidikan terkemuka di DIY;</p>	<p>Meningkatkan dan mengembangkan role model sekolah unggulan plus terspesifikasi berbasis TI di lima kabupaten/kota (Kotamadya Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo) di DIY</p>

No	Isu-Isu Strategis	Strategi Pengembangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan role model sekolah unggulan plus terspesifikas (SMK unggulan Seni Karawitan/Musik/Rupa/Boga, SMA unggulan Ekologi, SMA unggulan Science, SMA unggulan Inklusi, SMA unggulan Sastra)</li> <li>b. Kajian akselerasi peningkatan dan pengembangan sekolah unggulan plus terspesifikasi berbasis TI</li> <li>c. Peningkatan kuantitas dan kualitas guru-guru di sekolah unggulan plus terspesifikasi berbasis TI melalui program pertukaran guru se-Asia Tenggara</li> <li>d. Peningkatan jejaring kerjasama dan kemitraan pada jenjang pendidikan sekolah unggulan plus terspesifikasi berbasis TI di tingkat Asia Tenggara</li> </ul>
10	Pentingnya peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi;	<p>Mengoptimalkan peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi siswa SMA, SMK, Sekolah Pendidikan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan kerjasama forum CSR untuk pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi siswa SMK dan SMA berprestasi dalam penguasaan bahasa asing</li> <li>b. Pengembangan bridging programs aksesibilitas pendidikan tinggi bagi siswa-siswa lulusan Sekolah Pendidikan Khusus dan Sekolah Layanan Khusus (SPK-SLK);</li> <li>c. Peningkatan bridging programs” pendidikan inklusif lintas jenjang pendidikan hingga pendidikan tinggi;</li> </ul>
11	Pentingnya pengembangan ketrampilan & sentra bisnis pemuda berbasis kuliner di berbagai kawasan potensi wisata	<p>Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan ketrampilan berbasis kuliner untuk siswa-siswa SMK dan SMA di wilayah potensi wisata di DIY Gunungkidul (kawasan pesisir pantai), Bantul (Samas dan Parangtritis) dan Kulonprogo (kawasan NYIA).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelatihan ketrampilan berbasis kuliner untuk siswa-siswa SMK dan SMA di</li> </ul>

No	Isu-Isu Strategis	Strategi Pengembangan
		<p>wilayah Gunungkidul (kawasan pesisir pantai), Bantul (Samas dan Parangtritis) dan Kulonprogo (kawasan NYIA).</p> <p>b. Peningkatan program kerjasama pengembangan sentra bisnis berbasis kuliner bagi kaum muda di wilayah potensi wisata di Gunungkidul, Bantul, dan Kulonprogo (misalnya perlu koordinasi dengan Dinas KUKM, Dinas perikanan dan kelautan, agar dapat terfokus pada pengembangan pada spot yang sama)</p>
12	<p>Pentingnya pengembangan dan peningkatan keunggulan kompetitif dan komparatif sekolah melalui revitalisasi SMK</p>	<p>Peningkatan penguasaan kompetensi dan keahlian berbasis keunggulan lokal bagi lulusan SMK dan sekolah vokasional</p> <p>a. Peningkatan sarana prasarana pendidikan/pelatihan berbasis keunggulan lokal</p> <p>b. Peningkatan ketrampilan lulusan SMK dan vokasional terkait keunggulan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja</p> <p>c. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pengajar/instruktur/ untuk memperkuat model-model pelatihan berbasis keunggulan lokal bagi siswa SMK dan vokasional melalui kerjasama pendidikan tinggi dan sektor swasta.</p> <p>d. Pengembangan bridgging program penyaluran tenaga kerja berbasis keunggulan lokal untuk masuk ke pasar kerja melalui kerjasama dengan sektor swasta</p>
13	<p>Pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengurangan risiko bencana;</p>	<p>Meningkatkan diseminasi pengurangan risiko bencana (PRB) di sejumlah wilayah rawan bencana di seluruh DIY</p> <p>a. Peningkatan kesadaran pengurangan risiko bencana di kalangan siswa sekolah terutama di kawasan rawan bencana (Gunungkidul, Bantul, Kulonprogo, Sleman)</p> <p>b. Peningkatan kesadaran pengurangan</p>

No	Isu-Isu Strategis	Strategi Pengembangan
		<p>risiko bencana di kalangan masyarakat yang rawan terdampak bencana</p>
14	<p>Pentingnya peningkatan kualitas perpustakaan sekolah, Perpustakaan Desa, dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di wilayah-wilayah kantong kemiskinan;</p>	<p>Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, dan Taman Bacaan Masyarakat di wilayah kantong kemiskinan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkat sarana prasarana perpustakaan SMA dan SMK di wilayah-wilayah kantong kemiskinan di Gunungkidul, Kulonprogo, dan Bantul</li> <li>b. Peningkatan jumlah koleksi buku perpustakaan melalui pengembangan kerjasama dengan sektor swasta khususnya kalangan penerbit</li> <li>c. Penguatan kelompok-kelompok literasi pada perpustakaan desa dan TBM di wilayah kantong-kantong kemiskinan di DIY</li> </ol>
15	<p>Pentingnya konektivitas antara Gratama Pustaka dengan 7 kawasan Pengembangan Bandara sebagai akselerasi wisata edukasi</p>	<p>Meningkatkan akselerasi wisata edukasi melalui pengembangan dan peningkatan konektivitas Gratama Pustaka dengan tujuh kawasan Pengembangan Bandara NYIA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan Gratama Pustaka dan pengembangan 7 perpustakaan di kawasan pengembangan bandara</li> <li>b. Pengembangan jaringan kerja Jogjakarta Library for All (JLA) untuk penguatan wisata edukasi di DIY</li> <li>c. Peningkatan partisipasi kunjungan perpustakaan Gratama Pustaka dan interkonektivitasnya dengan 7 perputakaan di kawasan pengembangan bandara</li> <li>d. Peningkatan jumlah koleksi buku dan prasarana edu-tainment di Gratama Pustaka dan 7 perpustakaan di kawasan pengembangan bandara</li> </ol>

#### **5.4. Sinkornisasi Program Kegiatan Pendukung IPM**

Berikut adalah matrik sinkronisasi kegiatan pendukung IPM DIY. Secara beruntun akan tersaji tiga matrik program kegiatan pendukung IPM berikut:

1. Sinkronisasi Program Kegiatan Pendukung IPM Sektor Pendidikan
2. Sinkronisasi Program Kegiatan Pendukung IPM Urusan Perpustakaan
3. Sinkronisasi Program Kegiatan Urusan Kebijakan Otonomi Daerah

5.4.1. SINKRONISASI KEGIATAN PENDUKUNG IPM SEKTOR PENDIDIKAN

META PROGRAM DAN KEGIATAN									
NAMA PROGRAM No. 1	Program Pendidikan Menengah								
KEGIATAN 1.1	Penyediaan BOS/BOSDA								
PENAJAMAN KEGIATAN	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi keperluan biaya operasional sekolah yang dialokasikan pemerintah melalui APBD dan APBN, untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi kebutuhan biaya operasional negeri dan mengurangi kebutuhan biaya operasional sekolah swasta</li> <li>2. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan</li> <li>3. meringankan beban biaya operasional sekolah siswa miskin</li> </ol>								
TUJUAN KEGIATAN	penyediaan pendanaan pendidikan yang akan digunakan sebagai operasional KBM di sekolah negeri dan swasta yang bersumber dari BOSNAS (APBN) dan BOSDA (APBD), dengan rincian : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan BOSDA untuk sekolah swasta</li> <li>2. Penyediaan BOSNAS untuk sekolah</li> </ol> Pada APBD, pembiayaan pendidikan negeri akan masuk pada RKA masing-masing sekolah dan Pembiayaan pendidikan swasta (BOSNAS dan BOSDA) akan masuk di PPKD/BUD (HIBAH)								
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	Jumlah sekolah SMA, SMK dan MA swasta	94 SMA Swasta, 168 SMK	303 sekolah swasta jenjang	94 SMA Swasta, 168 SMK	303 sekolah swasta jenjang	94 SMA Swasta, 168 SMK	303 sekolah swasta jenjang	94 SMA Swasta, 168 SMK	303 sekolah swasta jenjang

	penerima BOSDA	Swasta dan 41 MA swasta	pendidikan menengah mendapat BOSDA	Swasta dan 41 MA swasta	pendidikan menengah mendapat BOSDA	Swasta dan 41 MA swasta	pendidikan menengah mendapat BOSDA	Swasta dan 41 MA swasta	pendidikan menengah mendapat BOSDA
	Jumlah sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan SLB negeri swasta menerima BOSNAS	1.840 SD, 430 SMP, 163 SMA, 216 SMK dan 79 SLB	2.728 sekolah negeri swasta dari 5 jenjang pendidikan mendapat BOSNAS	1.840 SD, 430 SMP, 163 SMA, 216 SMK dan 79 SLB	2.728 sekolah negeri swasta dari 5 jenjang pendidikan mendapat BOSNAS	1.840 SD, 430 SMP, 163 SMA, 216 SMK dan 79 SLB	2.728 sekolah negeri swasta dari 5 jenjang pendidikan mendapat BOSNAS	1.840 SD, 430 SMP, 163 SMA, 216 SMK dan 79 SLB	2.728 sekolah negeri swasta dari 5 jenjang pendidikan mendapat BOSNAS
META	Dihitung dari keseluruhan sekolah SMA dan SMK penerima BOSDA swasta di tahun n								
INDIKATOR KEGIATAN	Dihitung dari keseluruhan sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan SLB penerima BOSNAS baik negeri dan swasta di tahun n								
KEGIATAN 1.2	<b>Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMA ( Dukungan terhadap indikator sekolah menengah akreditasi A)</b>								
PENAJAMAN KEGIATAN	Kegiatan pembinaan dan pengembangan mutu SMA dilaksanakan dalam rangka untuk merekonstruksi implementasi manajemen pengendalian mutu di SMA baik di bidang kurikulum maupun pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan								
TUJUAN KEGIATAN	Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya sekolah (kurikulum, Guru dan tenaga kependidikan, kepala sekolah, pengawas sekolah) dalam mencapai standard isi, standard proses, standard PTK, dan standard pengelolaan di tingkat SMA, yang dilakukan melalui :								

	1. Pengembangan kurikulum SMA 2. Pengembangan muatan pendidikan SMA guna pemenuhan standard isi dan standard proses melalui Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP) 3. Peningkatan mutu dan kualitas pengawas SMA 4. Optimalisasi pengelolaan manajemen sesuai dengan standard pengelolaan melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA								
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	1) tersedianya kurikulum SMA agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan dalam KBM agar sesuai dengan nilai-nilai umum, konsep-konsep, masalah dan keterampilan 2) tersedianya muatan pendidikan SMA yang sesuai	1. pengembangan kurikulum 2. peningkatan kapasitas guru dalam pengembangan muatan pendidikan 3. Forum kerja pengawas sekolah 4.	1. 6 mapel *) 2. 300 orang 3. 50 orang 3. 69 kepala sekolah *) setiap tahun menyusun pengembangan muatan pendidikan yang berbeda	1. pengembangan kurikulum 2. peningkatan kapasitas guru dalam pengembangan muatan pendidikan kerja pengawas sekolah 4.	1. 6 mapel *) 2. 300 orang 3. 50 orang 3. 69 kepala sekolah *) setiap tahun menyusun pengembangan muatan pendidikan yang berbeda	1. pengembangan kurikulum 2. peningkatan kapasitas guru dalam pengembangan muatan pendidikan kerja pengawas sekolah 4.	1. 6 mapel *) 2. 300 orang 3. 50 orang 3. 69 kepala sekolah *) setiap tahun menyusun pengembangan muatan pendidikan yang berbeda	1. pengembangan kurikulum 2. peningkatan kapasitas guru dalam pengembangan muatan pendidikan kerja pengawas sekolah 4.	1. 6 mapel *) 2. 300 orang 3. 50 orang 3. 69 kepala sekolah *) setiap tahun menyusun pengembangan muatan pendidikan yang berbeda

	dengan pengembangan ilmu, nilai dan keterampilan yang akan dikembangkan 3) tersedianya rekomendasi manajemen pendidikan guna meningkatkan kinerja sekolah	Peningkatan kapasitas kepala sekolah dalam peningkatan Tata Kelola Manajemen sekolah		Peningkatan kapasitas kepala sekolah dalam peningkatan Tata Kelola Manajemen sekolah		Peningkatan kapasitas kepala sekolah dalam peningkatan Tata Kelola Manajemen sekolah		Peningkatan kapasitas kepala sekolah dalam peningkatan Tata Kelola Manajemen sekolah	
META INDIKATOR KEGIATAN	jumlah Sekolah Menengah Atas yang melaksanakan pengembangankurikulum, muatan pendidikan dan tata kelola manajemen sekolah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah sekolah menengah atas di DIY (216 SMA ) tahun n								
KEGIATAN 1.3	<b>Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMK (Dukungan terhadap indikator sekolah menengah akreditasi A)</b>								
PENAJAMAN KEGIATAN	Kegiatan pembinaan dan pengembangan mutu SMK dilaksanakan dalam rangka untuk merekonstruksi implementasi manajemen pengendalian mutu di SMA baik di bidang kurikulum maupun pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan								
TUJUAN KEGIATAN	Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya sekolah (kurikulum, Guru dan tenaga kependidikan, kepala sekolah, pengawas sekolah) dalam mencapai standard isi, standard proses, standard PTK, dan standard pengelolaan di tingkat SMK, yang dilakukan melalui :								

	1. Pengembangan kurikulum SMK 2. Pengembangan muatan pendidikan SMK guna pemenuhan standard isi dan standard proses melalui Musyawarah Guru Mata pelajaran kejuruan 3. Peningkatan mutu dan kualitas pengawas SMK 4. Optimalisasi pengelolaan manajemen sesuai dengan standard pengelolaan melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMK								
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	1) tersedianya kurikulum SMK agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan dalam KBM agar sesuai dengan nilai-nilai umum, konsep-konsep, masalah dan keterampilan 2) tersedianya muatan pendidikan SMK yang sesuai	1. pengembangan kurikulum 2. peningkatan kapasitas guru dalam pengembangan muatan pendidikan 3. Forum kerja pengawas sekolah 4.	1. 10 mapel/kompetensi kejuruan *) 2. 300 orang 3. 60 Orang 3. 218 SMK negeri dan swasta *) tiap tahun akan menyusun pengembangan kurikulum	1. pengembangan kurikulum 2. peningkatan kapasitas guru dalam pengembangan muatan pendidikan 3. Forum kerja pengawas sekolah 4.	1. 10 mapel/kompetensi kejuruan *) 2. 300 orang 3. 60 Orang 3. 218 SMK negeri dan swasta *) tiap tahun akan menyusun pengembangan kurikulum	1. pengembangan kurikulum 2. peningkatan kapasitas guru dalam pengembangan muatan pendidikan 3. Forum kerja pengawas sekolah 4.	1. 10 mapel/kompetensi kejuruan *) 2. 300 orang 3. 60 Orang 3. 218 SMK negeri dan swasta *) tiap tahun akan menyusun pengembangan kurikulum	1. pengembangan kurikulum 2. peningkatan kapasitas guru dalam pengembangan muatan pendidikan 3. Forum kerja pengawas sekolah 4.	1. 10 mapel/kompetensi kejuruan *) 2. 300 orang 3. 60 Orang 3. 218 SMK negeri dan swasta *) tiap tahun akan menyusun pengembangan kurikulum

	dengan pengembangan ilmu, nilai dan keterampilan yang akan dikembangkan 3) tersedianya rekomendasi manajemen pendidikan guna meningkatkan kinerja sekolah	Peningkatan kapasitas kepala sekolah dalam peningkatan Tata Kelola Manajemen sekolah	mata pelajaran/kejuruan yang berbeda	Peningkatan kapasitas kepala sekolah dalam peningkatan Tata Kelola Manajemen sekolah	mata pelajaran/kejuruan yang berbeda	Peningkatan kapasitas kepala sekolah dalam peningkatan Tata Kelola Manajemen sekolah	mata pelajaran/kejuruan yang berbeda	Peningkatan kapasitas kepala sekolah dalam peningkatan Tata Kelola Manajemen sekolah	mata pelajaran/kejuruan yang berbeda
META INDIKATOR KEGIATAN	jumlah Sekolah Menengah Atas yang melaksanakan pengembangankurikulum, muatan pendidikan dan tata kelola manajemen sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah sekolah menengah kejuruan di DIY (218 SMK ) tahun n								
KEGIATAN 1.4	<b>Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah (angka putus sekolah)</b>								
PENAJAMAN KEGIATAN	Kegiatan penyediaan beasiswa pendidikan menengah dimaksudkan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dan meningkatkan prestasi siswa untuk lebih berprestasi								
TUJUAN KEGIATAN	Pemberian Beasiswa pendidikan menengah melalui 1. Kartu Cerdas (Beasiswa untuk siswa miskin) 2. Beasiswa prestasi (beasiswa untuk siswa berprestasi)								

INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
AN	jumlah siswa miskin yang mendapatkan Kartu cerdas jenjang dikmen	Kartu cerdas jenjang dikmen 20.000 siswa	Angka putus sekolah berkurang 0,02 % (30 orang) dan	Kartu cerdas jenjang dikmen 20.000 siswa	Angka putus sekolah berkurang 0,02 % (30 orang) dan	Kartu cerdas jenjang dikmen 20.000 siswa	Angka putus sekolah berkurang 0,02 % (30 orang) dan	Kartu cerdas jenjang dikmen 20.000 siswa	Angka putus sekolah berkurang 0,02 % (30 orang) dan
	jumlah siswa berprestasi yang mendapatkan Beasiswa prestasi	Beasiswa prestasi 1.550 siswa	siswa berprestasi pada jenjang dimen sebanyak 1.550 siswa	Beasiswa prestasi 1.550 siswa	siswa berprestasi pada jenjang dimen sebanyak 1.550 siswa	Beasiswa prestasi 1.550 siswa	siswa berprestasi pada jenjang dimen sebanyak 1.550 siswa	Beasiswa prestasi 1.550 siswa	siswa berprestasi pada jenjang dimen sebanyak 1.550 siswa
META	jumlah siswa yang mendapatkan kartu cerdas tahun n								
INDIKATOR KEGIATAN	jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa prestasi tahun n								
KEGIATAN 1.5	<b>Pembinaan Siswa SMA (Jumlah medali)</b>								
PENAJAMAN KEGIATAN	Kegiatan pembinaan siswa SMA merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan minat dan bakat peserta didik serta mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik melalui berbagai kompetisi yang diikuti								

AN									
TUJUAN KEGIAT AN	A) Seleksi, Pembinaan, Pengiriman pada lomba/kompetisi tingkat nasional yang terdiri dari lomba: 1. OSN 2. OOSN 3. FLSSN 4. Debat bahasa 5. LCC UUD 1945 6. LCC sekolah B) Pengembangan kreatifitas dan potensi siswa SMA melalui 1. Pembinaan penyusunan dan Penerbitan Jurnal dan majalah 2. Pembinaan Prestasi Minat Bakat Istimewa								
INDIKAT OR KEGIAT AN	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	Pembinaan siswa SMA melalui lomba/kompetisi, serta Pengembangan kreatifitas dan potensi siswa SMA	1. Lomba dan kompetisi jenjang SMA tk Provinsi dan Nasional 6 kejuaraan 2. Pembinaan penyusunan	Peringkat 7 dari 34 provinsi dalam lomba tk nasional	1. Lomba dan kompetisi jenjang SMA tk Provinsi dan Nasional 6 kejuaraan 2. Pembinaan penyusunan	Peringkat 7 dari 34 provinsi dalam lomba tk nasional	1. Lomba dan kompetisi jenjang SMA tk Provinsi dan Nasional 6 kejuaraan 2. Pembinaan penyusunan	Peringkat 7 dari 34 provinsi dalam lomba tk nasional	1. Lomba dan kompetisi jenjang SMA tk Provinsi dan Nasional 6 kejuaraan 2. Pembinaan penyusunan	Peringkat 7 dari 34 provinsi dalam lomba tk nasional

		n dan Penerbitan Jurnal dan majalah 50 Karya ilmiah dan 2 edisi majalah (Sagasitas dan Bias) 3. Pembinaan Prestasi Minat Bakat Istimewa 1.200 siswa		n dan Penerbitan Jurnal dan majalah 50 Karya ilmiah dan 2 edisi majalah (Sagasitas dan Bias) 3. Pembinaan Prestasi Minat Bakat Istimewa 1.200 siswa		n dan Penerbitan Jurnal dan majalah 50 Karya ilmiah dan 2 edisi majalah (Sagasitas dan Bias) 3. Pembinaan Prestasi Minat Bakat Istimewa 1.200 siswa		n dan Penerbitan Jurnal dan majalah 50 Karya ilmiah dan 2 edisi majalah (Sagasitas dan Bias) 3. Pembinaan Prestasi Minat Bakat Istimewa 1.200 siswa	
META	Jumlah medali yang diperoleh di tahun n								
INDIKATOR	Jumlah siswa yang mendapat tersalurkan bakat dan minat di tahun n								
KEGIATAN	<b>Pembinaan Siswa SMK (jumlah medali)</b>								
KEGIATAN 1.6									
PENAJAMAN	Kegiatan pembinaan siswa SMA merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan minat dan bakat peserta didik serta mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik melalui berbagai kompetisi yang diikuti								

KEGIATAN									
TUJUAN KEGIATAN	A) Seleksi, Pembinaan, Pengiriman pada lomba/kompetisi tingkat nasional yang terdiri dari lomba: 1. OOSN 2. FLSSN 3. Lomba kompetensi siswa SMK B) Pengembangan kreatifitas dan potensi siswa SMA melalui 1. Jurnal teknologi tepat guna 2. Pusat pengembangan minat dan bakat istimewa SMK								
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	Pembinaan siswa SMK melalui lomba/kompetisi, serta pengembangan kemampuan, minat dan bakat siswa	1. Lomba dan kompetisi jenjang SMK tk provinsi dan nasional 4 kejuaraan 2. Pembinaan minat dan bakat 3 cabang di	Peringkat 10 dari 34 provinsi dalam lomba tk nasional	1. Lomba dan kompetisi jenjang SMK tk provinsi dan nasional 4 kejuaraan 2. Pembinaan minat dan bakat 3 cabang di	Peringkat 10 dari 34 provinsi dalam lomba tk nasional	1. Lomba dan kompetisi jenjang SMK tk provinsi dan nasional 4 kejuaraan 2. Pembinaan minat dan bakat 3 cabang di	Peringkat 10 dari 34 provinsi dalam lomba tk nasional	1. Lomba dan kompetisi jenjang SMK tk provinsi dan nasional 4 kejuaraan 2. Pembinaan minat dan bakat 3 cabang di	Peringkat 10 dari 34 provinsi dalam lomba tk nasional

		15 sekolah 3. Penerbitan Jurnal TTG 2 edisi		15 sekolah 3. Penerbitan Jurnal TTG 2 edisi		15 sekolah 3. Penerbitan Jurnal TTG 2 edisi		15 sekolah 3. Penerbitan Jurnal TTG 2 edisi	
META	Jumlah medali yang diperoleh di tahun n								
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah siswa yang tersalurkan bakat dan minat di tahun n								
KEGIATAN 1.7	<b>Sarana Prasarana Pendidikan Menengah (Akreditasi A)</b>								
PENAJAMAN KEGIATAN	Kegiatan sarana prasarana pendidikan menengah merupakan faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah dan dapat dicapai apabila ketersediaan sarana prasarana yang memadai disertai pengelolaan secara optimal, terutama untuk penyediaan pendayagunaan, perawatan, dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan.								
TUJUAN KEGIATAN	Membangun sarana prasarana fisik sekolah yang mengalami kerusakan berat (selain sekolah yang mendapatkan DAK fisik). Keterangan = sarana fisik sekolah sebagian besar dipenuhi melalui DAK pendidikan								
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	Pembangunan sarana prasarana pendukung	Pembangunan Sarana Prasarana Fisik	Fasilitas sekolah terpenuhi	Pembangunan Sarana Prasarana Fisik	Fasilitas sekolah terpenuhi	Pembangunan Sarana Prasarana Fisik	Fasilitas sekolah terpenuhi	Pembangunan Sarana Prasarana Fisik	Fasilitas sekolah terpenuhi

	sekolah	SMA/SMK pada 3 SMA/SMK		SMA/SMK pada 3 SMA/SMK		SMA/SMK pada 3 SMA/SMK		SMA/SMK pada 3 SMA/SMK	
META INDIKAT OR KEGIAT AN	Jumlah sarana prasarana yang diperbaiki/dibangun di tahun n								
KEGIAT AN 1.7	<b>Pelayanan Pendidikan SMA</b>								
PENAJA MAN KEGIAT AN	<b>Kegiatan pelayanan pendidikan SMA dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan kualitas SMA Negeri dan meringankan beban operasional terutama bagi siswa miskin pada jenjang SMA Negeri</b>								
TUJUAN KEGIAT AN	Pelayanan Pendidikan pada SMA Negeri berupa pembiayaan operasional untuk Kegiatan Belajar Mengajar								
INDIKAT OR KEGIAT AN	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	Jumlah sekolah SMAN penerima pembiayaan operasional untuk kegiatan belajar mengajar	1)Operasional Sekolah Menengah Negeri 69 sekolah 2)	1) 69 SMAN 2) 8 SMAN KKO	1)Operasional Sekolah Menengah Negeri 69 sekolah 2)	1) 69 SMAN 2) 8 SMAN KKO	1)Operasional Sekolah Menengah Negeri 69 sekolah 2)	1) 69 SMAN 2) 8 SMAN KKO	1)Operasional Sekolah Menengah Negeri 69 sekolah 2)	1) 69 SMAN 2) 8 SMAN KKO

		Operasional 8 sekolah KKO (kelas khusus olahraga)		Operasional 8 sekolah KKO (kelas khusus olahraga)		Operasional 8 sekolah KKO (kelas khusus olahraga)		Operasional 8 sekolah KKO (kelas khusus olahraga)	
META INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah SMAN yang menerima pembiayaan operasional di tahun n								
KEGIATAN 1.7	<b>Pelayanan Pendidikan SMK</b>								
PENAJAMAN KEGIATAN	<b>Kegiatan pelayanan pendidikan SMK dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan kualitas SMK Negeri dan meringankan beban operasional terutama bagi siswa miskin pada jenjang SMK Negeri</b>								
TUJUAN KEGIATAN	Pelayanan Pendidikan pada SMK Negeri berupa pembiayaan operasional untuk Kegiatan Belajar Mengajar								
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	Jumlah sekolah SMKN penerima pembiayaan operasional	1)Operasional Sekolah Negeri 49 sekolah	1) 49 Sekolah Negeri 2) 3 SMK	1)Operasional Sekolah Negeri 49 sekolah	1) 49 Sekolah Negeri 2) 3 SMK	1)Operasional Sekolah Negeri 49 sekolah	1) 49 Sekolah Negeri 2) 3 SMK	1)Operasional Sekolah Negeri 49 sekolah	1) 49 Sekolah Negeri 2) 3 SMK

	untuk kegiatan belajar mengajar	2) Operasional 1 3 SMK Kelautan 3) Operasional 1 Edutel di 4 SMK	kelautan 3) 4 SMK perhotelan	2) Operasional 1 3 SMK Kelautan 3) Operasional 1 Edutel di 4 SMK	kelautan 3) 4 SMK perhotelan	2) Operasional 1 3 SMK Kelautan 3) Operasional 1 Edutel di 4 SMK	kelautan 3) 4 SMK perhotelan	2) Operasional 1 3 SMK Kelautan 3) Operasional 1 Edutel di 4 SMK	kelautan 3) 4 SMK perhotelan
META INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah SMAN yang menerima pembiayaan operasional di tahun n								
NAMA PROGRAM No. 2	Program Layanan Pendidikan Khusus								
KEGIATAN 2.1	Bantuan Operasional Sekolah SLB								
PENAJAMAN KEGIATAN	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi keperluan biaya operasional sekolah yang dialokasikan pemerintah melalui APBD, untuk: 1. Memenuhi kebutuhan biaya operasional negeri dan mengurangi kebutuhan biaya operasional sekolah swasta 2. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan 3. meringankan beban biaya operasional sekolah siswa miskin								
TUJUAN KEGIATAN	BOSDA untuk memenuhi pembiayaan 8 (mutu, isi, proses, sarparas, kurikulum, ) SNP pada SLB Negeri dan Swasta								

AN									
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
AN	Penyaluran bantuan operasional sekolah, tambahan makanan sehat dan susu bagi siswa, serta pemberian beasiswa dan biaya asrama	1. SLB yang mendapatkan BOSDA dan PMTAS sebanyak 70 SLB Swasta 2. pemberian beasiswa inklusi terhadap 2426 siswa 3. Pemberian beasiswa magang terhadap 234 siswa 4. biaya asrama untuk 5	1. 70 SLB swasta 2. 2426 siswa 3. 234 siswa 4. 5 SLB Negeri	1. SLB yang mendapatkan BOSDA dan PMTAS sebanyak 70 SLB Swasta 2. pemberian beasiswa inklusi terhadap 2426 siswa 3. Pemberian beasiswa magang terhadap 234 siswa 4. biaya asrama untuk 5	1. 70 SLB swasta 2. 2426 siswa 3. 234 siswa 4. 5 SLB Negeri	1. SLB yang mendapatkan BOSDA dan PMTAS sebanyak 70 SLB Swasta 2. pemberian beasiswa inklusi terhadap 2426 siswa 3. Pemberian beasiswa magang terhadap 234 siswa 4. biaya asrama untuk 5	1. 70 SLB swasta 2. 2426 siswa 3. 234 siswa 4. 5 SLB Negeri	1. SLB yang mendapatkan BOSDA dan PMTAS sebanyak 70 SLB Swasta 2. pemberian beasiswa inklusi terhadap 2426 siswa 3. Pemberian beasiswa magang terhadap 234 siswa 4. biaya asrama untuk 5	1. 70 SLB swasta 2. 2426 siswa 3. 234 siswa 4. 5 SLB Negeri

		SLBN		SLBN		SLBN		SLBN	
META INDIKAT OR KEGIAT AN	Jumlah SLB yang mendapatkan BOS di tahun n								
KEGIAT AN 2.2	<b>Pelayanan Pendidikan SLBN</b>								
PENAJA MAN KEGIAT AN	<b>Kegiatan pelayanan pendidikan SLB dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan kualitas SLB Negeri dan meringankan beban opsional terutama bagi siswa miskin pada jenjang SLB Negeri</b>								
TUJUAN KEGIAT AN	Pelayanan Pendidikan pada SLB Negeri berupa pembiayaan operasional untuk Kegiatan Belajar Mengajar (Pemenuhan 8 SNP)								
INDIKAT OR KEGIAT AN	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	Jumlah sekolah SLB penerima pembiayaan operasional untuk kegiatan belajar mengajar	Penyediaan biaya operasional bagi 9 SLB N	1) 9 SLB Negeri	Penyediaan biaya operasional bagi 9 SLB N	1) 9 SLB Negeri	Penyediaan biaya operasional bagi 9 SLB N	1) 9 SLB Negeri	Penyediaan biaya operasional bagi 9 SLB N	1) 9 SLB Negeri
META INDIKAT	SLBN yang mendapatkan pembiayaan opsional di tahun n								

OR KEGIATAN									
KEGIATAN 2.3	<b>Pengembangan Layanan Khusus Autis</b>								
PENAJAMAN KEGIATAN	<b>Kegiatan pengembangan layanan khusus Autis, kondisi eksisting yang diharapkan :</b> <b>1. Memenuhi hak-hak bagi anak autis untuk dapat memotivasi dan mengembangkan mereka dalam segala aspek kehidupan sehari-hari</b> <b>2. Mempunyai kemampuan untuk hidup mandiri, mampu berkompetisi dan serta eksis dalam kehidupan bermasyarakat minimal mampu menolong diri sendiri</b>								
TUJUAN KEGIATAN	Tersedianya layanan pendamping SLB (terkait lulusan PLA)								
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	penyelenggaraan pendidikan untuk anak autis di pusat layanan autis	Operasional kegiatan di pusat layanan autis selama 1 tahun	100 anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan	Operasional kegiatan di pusat layanan autis selama 1 tahun	100 anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan	Operasional kegiatan di pusat layanan autis selama 1 tahun	100 anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan	Operasional kegiatan di pusat layanan autis selama 1 tahun	100 anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan
META INDIKATOR	Penyelenggaraan PLA dalam tahun n								

KEGIATAN									
KEGIATAN 2.4	<b>Pembudayaan Pendidikan Inklusi (Akreditasi A)</b>								
PENAJAMAN KEGIATAN	<p><b>Kegiatan pembudayaan pendidikan inklusi, kondisi eksisting yang diharapkan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Menyelenggarakan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya dengan mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emotional, linguistik atau kondisi lainnya.</b></li> <li><b>Mewujudkan tempat belajar yang relavan bagi anak-anak bekebutuhan khusus</b></li> <li><b>Mengembangkan kepercayaan pada diri anak, agar dapat belajar secara mandiri dan memahami serta menerapkan hasil pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari.</b></li> </ol>								
TUJUAN KEGIATAN	kegiatan ini bertujuan melakukan inisiasi gerakan pembudayaan masyarakat peduli pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di Yogyakarta dan upaya penjaminan mutu terhadap layanan pendidikan inklusi								
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	1. pelaksanaan gerakan inisiasi pembudayaan pendidikan inklusi 2. Penjaminan kualitas layanan pendidikan inklusi melalui	1. Pokja inklusif SPPI sebanyak 5 pokja 2. penyelenggaraan PPMBI	1) 5 Pokja 2) 1 unit Pusat Keberbakatan 3)79 SLB	1. Pokja inklusif SPPI sebanyak 5 pokja 2. penyelenggaraan PPMBI	1) 5 Pokja 2) 1 unit Pusat Keberbakatan 3)79 SLB	1. Pokja inklusif SPPI sebanyak 5 pokja 2. penyelenggaraan PPMBI	1) 5 Pokja 2) 1 unit Pusat Keberbakatan 3)79 SLB	1. Pokja inklusif SPPI sebanyak 5 pokja 2. penyelenggaraan PPMBI	1) 5 Pokja 2) 1 unit Pusat Keberbakatan 3)79 SLB

	pebaikan manajemen sekolah	untuk anak berkebutuhan khusus di 1 unit pusat keberbakaan 3. Penjaminan mutu layanan pendidikan inklusif melalui penguatan pengelolaan manajemen SLB swasta dan negeri sebanyak 79 SLB		untuk anak berkebutuhan khusus di 1 unit pusat keberbakaan 3. Penjaminan mutu layanan pendidikan inklusif melalui penguatan pengelolaan manajemen SLB swasta dan negeri sebanyak 79 SLB		untuk anak berkebutuhan khusus di 1 unit pusat keberbakaan 3. Penjaminan mutu layanan pendidikan inklusif melalui penguatan pengelolaan manajemen SLB swasta dan negeri sebanyak 79 SLB		untuk anak berkebutuhan khusus di 1 unit pusat keberbakaan 3. Penjaminan mutu layanan pendidikan inklusif melalui penguatan pengelolaan manajemen SLB swasta dan negeri sebanyak 79 SLB	
META INDIKATOR	Jumlah siswa yang terlayani pendidikan berkebutuhan khusus di tahun n								

KEGIATAN									
KEGIATAN 2.5	<b>Pengiriman lomba PK-PLK (jumlah medali)</b>								
PENAJAMAN KEGIATAN	<b>Kegiatan pengiriman lomba PK-PLK, kondisi eksisting dan yang diharapkan :</b> <b>1. Menggali potensi siswa bidang non akademik khususnya bidang literasi, ketrampilan dan olahraga</b> <b>2. Memberikan dorongan kepada peserta agar tumbuh motivasi yang kuat dan bersaing secara sehat dalam mencapai prestasi.</b>								
TUJUAN KEGIATAN	Meningkatnya prestasi ABK								
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	pengiriman anak berkebutuhan khusus lomba/kompetisi PK-PLK tingkat nasional	pengiriman anak berkebutuhan khusus lomba/kompetisi PK-PLK tingkat nasional 6 kejuaraan 1. OOSN PK-PLK 2. FLSSN	Peringkat 12 dari 34 provinsi dalam lomba tk nasional.	pengiriman anak berkebutuhan khusus lomba/kompetisi PK-PLK tingkat nasional 6 kejuaraan 1. OOSN PK-PLK 2. FLSSN	Peringkat 12 dari 34 provinsi dalam lomba tk nasional.	pengiriman anak berkebutuhan khusus lomba/kompetisi PK-PLK tingkat nasional 6 kejuaraan 1. OOSN PK-PLK 2. FLSSN	Peringkat 12 dari 34 provinsi dalam lomba tk nasional.	pengiriman anak berkebutuhan khusus lomba/kompetisi PK-PLK tingkat nasional 6 kejuaraan 1. OOSN PK-PLK 2. FLSSN	Peringkat 12 dari 34 provinsi dalam lomba tk nasional.

		Pk-PLK 3. Lomba ketrampilan siswa PK-PLK 4. Lomba literasi PK-PLK 5. Lomba ABK berseri 6. Lomba olahraga tuna grahita		Pk-PLK 3. Lomba ketrampilan siswa PK-PLK 4. Lomba literasi PK-PLK 5. Lomba ABK berseri 6. Lomba olahraga tuna grahita		Pk-PLK 3. Lomba ketrampilan siswa PK-PLK 4. Lomba literasi PK-PLK 5. Lomba ABK berseri 6. Lomba olahraga tuna grahita		Pk-PLK 3. Lomba ketrampilan siswa PK-PLK 4. Lomba literasi PK-PLK 5. Lomba ABK berseri 6. Lomba olahraga tuna grahita	
META INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah medali yang diperoleh siswa PK-PLK dalam lomba/kompetisi PK-PLK pada tahun n								
NAMA PROGRAM No. 3	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidikan</b>								
KEGIATAN 3.1	<b>Penyelenggaraan Ujian (angka kelulusan)</b>								
PENAJA	Kegiatan penyelenggaraan ujian, kondisi existing dan yang diharapkan:								

MAN KEGIAT AN	1. Penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan 2. pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan 3. Pelaksanaan salah satu standar nasional pendidikan (standar penilaian)								
TUJUAN KEGIAT AN	Penyelenggaraan ujian nasional sebagai bentuk evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar jenjang SD/MI/SDLB								
INDIKAT OR KEGIAT AN	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	Terselenggaranya evaluasi pendidikan jenjang SD/MI/SDLB	Jenjang SD/MI/SDL B dapat mengikuti Unas	Siswa jenjang SD/MI/SDL B dapat mengikuti ujian nasional	Jenjang SD/MI/SDL B dapat mengikuti Unas	Siswa jenjang SD/MI/SDL B dapat mengikuti ujian nasional	Jenjang SD/MI/SDL B dapat mengikuti Unas	Siswa jenjang SD/MI/SDL B dapat mengikuti ujian nasional	Jenjang SD/MI/SDL B dapat mengikuti Unas	Siswa jenjang SD/MI/SDL B dapat mengikuti ujian nasional
META INDIKAT OR KEGIAT AN	Jumlah jenjang yang dapat melaksanakan ujian nasional di tahun n								
KEGIAT AN 3.1	<b>Pengiriman Lomba Dikdas dan PNFI (jumlah medali)</b>								
PENAJA MAN KEGIAT	Kegiatan Lomba Dikdas dan PNFI, kondisi existing dan yang diharapkan: 1. Memotivasi Siswa Dikdas dalam mengembangkan minat dan bakat 2. memotivasi PTK PNFI dalam meningkatkan wawasan pengetahuan, profesionalisme dan kinerja								

AN	3. menumbuhkembangkan budaya kompetitif yang sehat di kalangan siswa Dikdas dan PTK PNF 4. membangun komitmen PTK PNFI dalam meningkatkan mutu pendidikan								
TUJUAN KEGIAT AN	a) Seleksi, pembinaan, dan pengiriman lomba jenjang SD 1. OSN SD 2. OOSN SD 3. FLSSN SD 4. Lomba Sekolah sehat SD 5. Lomba dokter kecil SD b) Seleksi, pembinaan, dan pengiriman lomba jenjang SMP 1. OOSN SMP 2. OSN SMP 3. FLSSN SMP 4. OPSI SMP 5. Gala siswa SMP 6. OLSN SMP Seleksi, pembinaan, dan pengiriman lomba Pendidikan Non Formal dan Informal 1. Lomba GTK Paud dan Dikmas 2. MTQ Pelajar tingkat provinsi 3. Lomba PNFI tingkat nasional								
INDIKAT OR KEGIAT AN	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	Pembinaan siswa SD melalui lomba/kompetisi	medali dari lomba/kompetisi jenjang SD	medali yang diperoleh 19 buah	medali dari lomba/kompetisi jenjang SD	medali yang diperoleh 20 buah	medali dari lomba/kompetisi jenjang SD	medali yang diperoleh 22 buah	medali dari lomba/kompetisi jenjang SD	medali yang diperoleh 23 buah

		tingkat provinsi dan nasional 5 kejuaraan		tingkat provinsi dan nasional 5 kejuaraan		tingkat provinsi dan nasional 5 kejuaraan		tingkat provinsi dan nasional 5 kejuaraan	
	Pembinaan siswa SMP melalui lomba/kompetisi	medali dari lomba/kompetisi jenjang SMP tingkat provinsi dan nasional 6 kejuaraan	medali yang diperoleh 24 buah	medali dari lomba/kompetisi jenjang SMP tingkat provinsi dan nasional 6 kejuaraan	medali yang diperoleh 25 buah	medali dari lomba/kompetisi jenjang SMP tingkat provinsi dan nasional 6 kejuaraan	medali yang diperoleh 27 buah	medali dari lomba/kompetisi jenjang SMP tingkat provinsi dan nasional 6 kejuaraan	medali yang diperoleh 28 buah
	Jumlah medali yang diperoleh dari lomba/kompetisi jenjang PNFI	medali dari lomba/kompetisi jenjang PNFI tingkat provinsi dan nasional	3 kejuaraan	medali dari lomba/kompetisi jenjang PNFI tingkat provinsi dan nasional	3 kejuaraan	medali dari lomba/kompetisi jenjang PNFI tingkat provinsi dan nasional	3 kejuaraan	medali dari lomba/kompetisi jenjang PNFI tingkat provinsi dan nasional	3 kejuaraan
META	Jumlah medali lomba/kompetisi jenjang SD tingkat provinsi dan nasional yang diperoleh tahun n								
INDIKAT	Jumlah medali lomba/kompetisi jenjang SMP tingkat provinsi dan nasional yang diperoleh tahun n								

OR KEGIAT AN									
	Jumlah medali yang diperoleh dari lomba/kompetisi jenjang PNFI tingkat provinsi dan nasional yang diperoleh di tahun n								
KEGIAT AN 3.2	<b>Pengembangan Model PAUD</b>								
PENAJA MAN KEGIAT AN	Kegiatan Pengembangan Model PAUD, kondisi existing dan yang diharapkan: 1. dapat menjadi model percontohan PAUD di tingkat DIY								
TUJUAN KEGIAT AN	Pembiayaan operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagai model PAUD tingkat Provinsi pada: 1. TPA Hamong Putro 2. KB Bina Buah Hati 3. SPS Bina Buah Hati								
INDIKAT OR KEGIAT AN	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	Pelayanan PAUD Terpadu	Lembaga PAUD yang dapat terlayani	2 lembaga	Lembaga PAUD yang dapat terlayani	2 lembaga	Lembaga PAUD yang dapat terlayani	2 lembaga	Lembaga PAUD yang dapat terlayani	2 lembaga
META INDIKAT OR KEGIAT AN	Jumlah lembaga PAUD yang terpenuhi kebutuhan operasionalnya di tahun n								

KEGIATAN 3.3	<b>Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan (angka kelulusan)</b>								
PENAJAMAN KEGIATAN	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan, kondisi existing dan yang diharapkan adalah ketersediaan kebutuhan data yang cepat, lengkap, valid, akuntabel, dan up to date belum terpenuhi dalam rangka proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi program-program pendidikan yang terukur, tepat sasaran, efektif dan efisien								
TUJUAN KEGIATAN	Penyediaan informasi pendidikan melalui media elektronik dan cetak yang dapat diakses oleh masyarakat serta pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SM berbasis online 1. Sistem pendataan pendidikan 2. PPDB Online								
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	Pengelolaan sistem informasi pendidikan dan PPDB Online SMAN dan SMKN	Informasi yang mudah didapatkan mengenai semua jenjang pendidikan dan tata cara pendaftaran online	5 sistem pengelolaan	Informasi yang mudah didapatkan mengenai semua jenjang pendidikan dan tata cara pendaftaran online	5 sistem pengelolaan	Informasi yang mudah didapatkan mengenai semua jenjang pendidikan dan tata cara pendaftaran online	5 sistem pengelolaan	Informasi yang mudah didapatkan mengenai semua jenjang pendidikan dan tata cara pendaftaran online	5 sistem pengelolaan
META	Jumlah sistem informasi yang dikelola oleh dinas dikpora di tahun n								

INDIKATOR KEGIATAN									
KEGIATAN 3.4	<b>Pembinaan Kelembagaan Bidang Pendidikan</b>								
PENAJAMAN KEGIATAN	Kegiatan Pengembangan kelembagaan pendukung sektor pendidikan, kondisi existing dan yang diharapkan adalah lembaga pendukung sektor pendidikan agar berperan serta dalam mendukung peran pemerintah di bidang pendidikan.								
TUJUAN KEGIATAN	Pemberian bantuan kelembagaan sebagai bentuk penguatan lembaga-lembaga pendidikan pada: 1. Dewan Pendidikan 2. GOPTKI DIY (Gabungan Organisasi Penyelenggara TK Indonesia) 3. BMPS DIY (Badan Musyawarah Perguruan Swasat) 4. PGRI DIY (Persatuan Guru RI) 5. LOTA DIY (Lembaga Orang Tua Asuh)								
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
AN	Hibah kepada lembaga bidang pendidikan	Pemberian hibah kepada lembaga di bidang pendidikan	5 lembaga	Pemberian hibah kepada lembaga di bidang pendidikan	5 lembaga	Pemberian hibah kepada lembaga di bidang pendidikan	5 lembaga	Pemberian hibah kepada lembaga di bidang pendidikan	5 lembaga
META	Jumlah lembaga di bidang pendidikan yang mendapatkan hibah di tahun n								

INDIKATOR KEGIATAN									
KEGIATAN 3.5	<b>Apresiasi Prestasi dan Kreatifitas Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (jumlah medali)</b>								
PENAJAMAN KEGIATAN	Kegiatan Apresiasi Prestasi dan Kreatifitas Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, kondisi existing dan yang diharapkan adalah untuk mengapresiasi serta memberikan motivasi pendidik dan peserta didik, baik itu prestasi di bidang akademik maupun non akademik di tingkat nasional dan internasional, pemerintah daerah perlu memberikan penghargaan								
TUJUAN KEGIATAN	Pemberian penghargaan kepada peserta didik, pendidik/tenaga kependidikan sebagai bentuk motivasi atas capaian prestasi untuk mendorong keberhasilan dan kemajuan kreatifitas di bidang pendidikan, melalui : 1. Pemberian penghargaan bagi guru berprestasi 2. Perayaan hari PGRI 3. Pameran pendidikan								
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
AN	Pemberian penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan atas prestasi di tingkat nasional dan	1. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mendapat penghargaan	1. 400 orang 2. 20 sekolah	1. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mendapat penghargaan	1. 400 orang 2. 20 sekolah	1. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mendapat penghargaan	1. 400 orang 2. 20 sekolah	1. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mendapat penghargaan	1. 400 orang 2. 20 sekolah

	internasional serta pengembangan kreatifitas peserta didik	2. Jumlah sekolah yang mengikuti pameran pendidikan		2. Jumlah sekolah yang mengikuti pameran pendidikan		2. Jumlah sekolah yang mengikuti pameran pendidikan		2. Jumlah sekolah yang mengikuti pameran pendidikan	
META	Jumlah guru yang mengikuti perayaan hari PGRI di tahun n								
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah guru yang mendapatkan penghargaan atas prestasi yang dicapai di tahun n								
KEGIATAN 3.6	<b>Model Unggulan Mutu Pendidikan</b>								
PENAJAMAN KEGIATAN	Kegiatan Pengembangan Model Unggulan Mutu Pendidikan, kondisi existing dan yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas output pendidikan untuk merespon krisis dalam dimensi kualitas SDM baik krisis identitas dan moral maupun karakter								
TUJUAN KEGIATAN	Pengembangan kemampuan dan pembentukan karakter siswa yang bermartabat dengan jati diri yang tidak meninggalkan nilai-nilai luhur daerah, melalui : 1. Gladi Kawruh 2. Ngudar kawruh tembang 3. DSP 4. Profesor goes to school 5. Forum unggulan mutu								
INDIKATOR	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	KELUARAN/HASI	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target

KEGIATAN	L								
AN	Peningkatan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya	1. Penyelenggaraan DSP 2. Peningkatan mutu pendidikan melalui profs goes to school dan pemberdayaan forum pendidikan	1. 8 provinsi 2. 10 forum pendidikan	1. Penyelenggaraan DSP 2. Peningkatan mutu pendidikan melalui profs goes to school dan pemberdayaan forum pendidikan	1. 8 provinsi 2. 10 forum pendidikan	1. Penyelenggaraan DSP 2. Peningkatan mutu pendidikan melalui profs goes to school dan pemberdayaan forum pendidikan	1. 8 provinsi 2. 10 forum pendidikan	1. Penyelenggaraan DSP 2. Peningkatan mutu pendidikan melalui profs goes to school dan pemberdayaan forum pendidikan	1. 8 provinsi 2. 10 forum pendidikan
META	dihitung dari jumlah kab/kota yang turut serta dalam tahun n								
INDIKATOR	dihitung dari jumlah provinsi yang turut serta dalam tahun n								
KEGIATAN	dihitung dari jumlah forum yang dilaksanakan dalam tahun n								
KEGIATAN 3.7	<b>Penyediaan Biaya Pendidikan Mahasiswa</b>								
PENAJAMAN KEGIATAN	Kegiatan Pengembangan Model Unggulan Mutu Pendidikan, kondisi existing dan yang diharapkan adalah memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa dan calon mahasiwa baru yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi								

TUJUAN KEGIATAN	Penyediaan Beasiswa bagi masyarakat dalam rangka perluasan akses pendidikan tinggi melalui penyediaan biaya pendidikan beasiswa mahasiswa.								
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	Penyediaan Biaya Pendidikan Mahasiswa	1. Pemberian beasiswa pada mahasiswa (reguler) 2. Pemberian beasiswa pada mahasiswa (baru)	1. 274 mahasiswa 2. 60 mahasiswa	1. Pemberian beasiswa pada mahasiswa (reguler) 2. Pemberian beasiswa pada mahasiswa (baru)	1. 50 mahasiswa 2. 50 mahasiswa	1. Pemberian beasiswa pada mahasiswa (reguler) 2. Pemberian beasiswa pada mahasiswa (baru)	1. 50 mahasiswa 2. 50 mahasiswa	1. Pemberian beasiswa pada mahasiswa (reguler) 2. Pemberian beasiswa pada mahasiswa (baru)	1. 50 mahasiswa 2. 50 mahasiswa
META INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di tahun n								
NAMA PROGRAM	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan								

No.4									
KEGIATAN 4.1	<b>Verifikasi Tunjangan Penghasilan Guru dan Penyediaan Insentif</b>								
PENAJAMAN KEGIATAN	Kegiatan Verifikasi Tunjangan Penghasilan Guru dan Penyediaan Insentif, kondisi existing dan yang diharapkan adalah rendahnya kualitas guru dan tenaga pendidik masih memprihatinkan (masih banyak yang belum profesional dalam menjalankan tugasnya), baik dalam perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.								
TUJUAN KEGIATAN	Peningkatan kualitas pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan SLB melalui: 1. Verifikasi dan validasi Data TPG SLB, SMA dan SMK 2. Penyediaan Insentif GTY/PTY dan GTT/PTT 2. Kurikulum vokasional (ketrampilan, seni dan penjas) 3. Peningkatan Pendidikan kesehatan reproduksi PK (masuk ke kegiatan SLB) 4. Pelayanan pendidikan SLB (masuk ke kegiatan SLB) 5. Pendidikan inklusif (masuk ke kegiatan SLB)								
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	Peningkatan mutu PTK SLB melalui Validasi dan verifikasi data TPG SLB, pengembangan kurikulum dan kemampuan PTK SLB	1. Data TPG SLB valid dan dapat digunakan 2. Kurikulum vokasional 3. peningkata	1. 705 dokumen 2. 3 bidang (ketrampilan, seni dan penjas) 3. 250 orang	1. Data TPG SLB valid dan dapat digunakan 2. Kurikulum vokasional 3. peningkata	1. 710 dokumen 2. 3 bidang (ketrampilan, seni dan penjas) 3. 250 orang	1. Data TPG SLB valid dan dapat digunakan 2. Kurikulum vokasional 3. peningkata	1. 715 dokumen 2. 3 bidang (ketrampilan, seni dan penjas) 3. 250 orang	1. Data TPG SLB valid dan dapat digunakan 2. Kurikulum vokasional 3. peningkata	1. 720 dokumen 2. 3 bidang (ketrampilan, seni dan penjas) 3. 250 orang

		n PTK		n PTK		n PTK		n PTK	
	Peningkatan mutu PTK SMA melalui validasi dan verifikasi data TPG SMA	Data TPG SMA valid dan dapat digunakan	2225 dokumen	Data TPG SMA valid dan dapat digunakan	2227 dokumen	Data TPG SMA valid dan dapat digunakan	2230 dokumen	Data TPG SMA valid dan dapat digunakan	2233 dokumen
	Peningkatan mutu PTK SMK melalui validasi dan verifikasi data TPG SMK	Data TPG SMK valid dan dapat digunakan	2725 dokumen	Data TPG SMK valid dan dapat digunakan	2727 dokumen	Data TPG SMK valid dan dapat digunakan	2730 dokumen	Data TPG SMK valid dan dapat digunakan	2733 dokumen
META	Jumlah TPG SLB yang mendapat sertifikasi pada tahun n								
INDIKATOR	Jumlah kurikulum SLB yang dikembangkan pada tahun n								
KEGIATAN	Jumlah PTK SLB yang mendapat pendidikan dan pelatihan terkait pelayanan PK-PLK di tahun n								
	Jumlah TPG SMA yang mendapat sertifikasi pada tahun n								
	Jumlah TPG SMK yang mendapat sertifikasi pada tahun n								
KEGIATAN 4.2	<b>Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>								
PENAJAMAN KEGIATAN	Kegiatan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan, kondisi existing dan yang diharapkan : 1. pemberian tambahan penghasilan berupa insentif untuk memotivasi guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja secara profesional dalam melaksanakan tugas di sekolah 2. peningkatan kinerja pengawas diperlukan sebagai proses kegiatan monitoring terhadap seluruh kegiatan sekolah supaya terlaksana seperti yang telah direncanakan, sekaligus untuk memperbaiki apabila terjadi penyimpangan 3. peningkatan fungsi Kepala sekolah dalam melakukan pengelolaan operasional sekolah agar memenuhi standar nasional								

	pendidikan								
TUJUAN KEGIAT AN	Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang SLB, SMA dan SMK melalui : 1. Pendidikan Guru Dalam Jabatan 2. Penilaian kinerja calon KS 3. Peningkatan kinerja Pengawas sekolah 4. Assesment penilaian kinerja guru 5. Penilaian Angka kredit jabatan guru								
INDIKAT OR KEGIAT AN	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pemberian insentif, pengiriman lomba/kompetisi dan penguatan mutu dan kualitas PTK	1. Insentif GTY/PTY dan GTT/PTT di lingkungan Dinas dikpora 2. Lomba PTK tingkat nasional 3. Angka kredit guru	1. 4440 orang 2. 4 jenis lomba 3. 7000 dokumen	1. Insentif GTY/PTY dan GTT/PTT di lingkungan Dinas dikpora 2. Lomba PTK tingkat nasional 3. Angka kredit guru	1. 4440 orang 2. 4 jenis lomba 3. 7000 dokumen	1. Insentif GTY/PTY dan GTT/PTT di lingkungan Dinas dikpora 2. Lomba PTK tingkat nasional 3. Angka kredit guru	1. 4440 orang 2. 4 jenis lomba 3. 7000 dokumen	1. Insentif GTY/PTY dan GTT/PTT di lingkungan Dinas dikpora 2. Lomba PTK tingkat nasional 3. Angka kredit guru	1. 4440 orang 2. 4 jenis lomba 3. 7000 dokumen
META	Jumlah GTY/PTY dan GTT/PTT yang diberi insentif di tahun n								
INDIKAT	Jumlah medali yang diperoleh dari lomba PTK tingkat nasional di tahun n								
OR KEGIAT	Jumlah guru yang dinilai angka kredit di tahun n								

AN									
NAMA PROGRAM No. 5	<b>Program Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</b>								
KEGIATAN AN 5.1	Produksi Media Pembelajaran								
PENAJAMAN KEGIATAN AN	Kegiatan Produksi Media Pembelajaran, kondisi existing dan yang diharapkan : 1. masih sedikitnya media pembelajaran yang menarik, baik berupa tayangan maupun tampilan yang dihasilkan dalam rangka memudahkan siswa mengingat dan menyerap materi pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik 2. Masih sedikitnya pendidik yang menggunakan media pembelajaran berbasis TIK dalam KBM untuk itu perlu menyediakan media pembelajaran berbasis TIK dan meningkatkan kompetensi pendidik dalam proses KBM berbasis TIK								
TUJUAN KEGIATAN AN	Penyediaan media pembelajaran berupa : 1. Media ABK (media bagi anak berkebutuhan khusus) 2. Bahan siar TV dan radio, film pendidikan, infografis 3. Peningkatan kapasitas PTK dalam kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan media TIK								
INDIKATOR KEGIATAN AN	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	Konten web jogja belajar	Konten web jogja belajar	1 website						
METAINDIKATOR	Dihitung dari jumlah pengunjung web (member) dalam tahun n								

KEGIATAN									
KEGIATAN 5.2	Layanan Media Pembelajaran Berbasis TIK								
PENAJAMAN KEGIATAN	Kegiatan Layanan Media Pembelajaran Berbasis TIK, kondisi existing dan yang diharapkan : Pemberian layanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan berbasis TIK, perlu diberikan ruang yang besar baik dalam bentuk inovasi, peningkatan kompetensi dalam bidang TIK dan pemberian fasilitas layanan berbasis TIK								
TUJUAN KEGIATAN	Peningkatan layanan pendidikan berbasis TIK, melalui : 1. Kejuaraan Ki Hajar (Kita Harus Belajar) 2. Pemeliharaan IDC dan BTS 3. Mobil Learning Service dan Instiusional								
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	1. Kejuaraan lomba Ki Hajar 2. Terpeliharanya IDC dan BTS 3. Tersedianya layanan Mobile Learning Service	1. pelaksanaan lomba Ki Hajar 2. Terpeliharanya IDC dan BTS 3. Tersedianya layanan	1. juara 1 2. 65 IDC dan 1 BTS 3. 25 titik	1. pelaksanaan lomba Ki Hajar 2. Terpeliharanya IDC dan BTS 3. Tersedianya layanan	1. juara 1 2. 65 IDC dan 1 BTS 3. 25 titik	1. pelaksanaan lomba Ki Hajar 2. Terpeliharanya IDC dan BTS 3. Tersedianya layanan	1. juara 1 2. 65 IDC dan 1 BTS 3. 25 titik	1. pelaksanaan lomba Ki Hajar 2. Terpeliharanya IDC dan BTS 3. Tersedianya layanan	1. juara 1 2. 65 IDC dan 1 BTS 3. 25 titik

		Mobile Learning Service		Mobile Learning Service		Mobile Learning Service		Mobile Learning Service	
META	dihitung dari capaian peringkat tingkat nasional pada tahun n								
INDIKATOR	dihitung dari jumlah IDC dan BTS yang dipelihara pada tahun n								
OR KEGIATAN	dihitung dari jumlah titik layanan pada tahun n								
NAMA PROGRAM No. 6	<b>Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Pendidikan Teknik</b>								
KEGIATAN 6.1	Pelayanan Pendidikan Pada BLUD								
PENAJAMAN KEGIATAN	Esensi dari BLUD adalah peningkatan layanan dan efisiensi anggaran untuk itu BLPT dibentuk untuk memberikan pelayanan pendidikan teknik pada siswa berupa kegiatan pembelajaran teknik dan produktivitas.								
TUJUAN KEGIATAN	Layanan teknik terstandart bagi siswa SMK spektrum teknik pertukangan, elektro dan informatika, otomotif, mesin, serta teknik sipil dan furniture.								
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
OR KEGIATAN	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
AN	layanan pendidikan	pelayanan pendidikan	siswa mendapat						

	teknis terstandar	teknik bagi siswa SMK 2045 siswa	pendidikan teknik yang terstandar	teknik bagi siswa SMK 2080 siswa	pendidikan teknik yang terstandar	teknik bagi siswa SMK 2113 siswa	pendidikan teknik yang terstandar	teknik bagi siswa SMK 2148 siswa	pendidikan teknik yang terstandar
META INDIKATOR KEGIATAN	dihitung dari jumlah siswa yang mengikuti pendidikan di BLPT pada tahun n								
NAMA PROGRAM No. 7	Program Layanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta								
KEGIATAN 7.1	Pelayanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta								
PENAJAMAN KEGIATAN	Kegiatan pelayanan pendidikan menengah kota yogyakarta eksisting dan yang diharapkan : Memberikan layanan pendidikan menengah yang berkualitas sesuai standar nasional pendidikan pada lingkup kabupaten/kota								
TUJUAN KEGIATAN	Mewujudkan Layanan pendidikan menengah di Kota Yogyakarta dengan bentuk : 1. BOSDA SMA dan SMK Negeri 2. Lomba PTK tingkat Kab/Kota 3. Lomba SMA tingkat kab/kota 4. Lomba SMK tingkat kab/kota								
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target

AN	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Yogyakarta	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Yogyakarta	11 SMA dan 8 SMK	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Yogyakarta	11 SMA dan 8 SMK	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Yogyakarta	11 SMA dan 8 SMK	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Yogyakarta	11 SMA dan 8 SMK
	Penyelenggaraan lomba PTK, SMA, dan SMK di tingkat Kota Yogyakarta	sukses penyelenggaraan lomba tingkat Kota Yogyakarta	3 jenis kejuaraan	sukses penyelenggaraan lomba tingkat Kota Yogyakarta	3 jenis kejuaraan	sukses penyelenggaraan lomba tingkat Kota Yogyakarta	3 jenis kejuaraan	sukses penyelenggaraan lomba tingkat Kota Yogyakarta	3 jenis kejuaraan
META INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah kejuaraan yang diselenggarakan di tingkat Kota Yogyakarta pada tahun n								
NAMA PROGRAM No. 8	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul								
KEGIATAN 8.1	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul								
PENAJAMAN	Kegiatan pelayanan pendidikan menengah Kabupaten Bantul eksisting dan yang diharapkan : Memberikan layanan pendidikan menengah yang berkualitas sesuai standar nasional pendidikan pada lingkup								

KEGIATAN	kabupaten/kota								
TUJUAN KEGIATAN	Mewujudkan Layanan pendidikan menengah di Kabupaten Bantul dengan bentuk : 1. Lomba PTK tingkat Kab/Kota 2. Lomba SMA tingkat kab/kota 3. Lomba SMK tingkat kab/kota								
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Bantul	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kab.Bantul	19 SMA dan 13 SMK	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kab.Bantul	19 SMA dan 13 SMK	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kab.Bantul	19 SMA dan 13 SMK	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kab.Bantul	19 SMA dan 13 SMK
	Penyelenggaraan lomba PTK, SMA, dan SMK di tingkat Kab Bantul	sukses penyelenggaraan lomba tingkat Kab Bantul	3 jenis kejuaraan	sukses penyelenggaraan lomba tingkat Kab Bantul	3 jenis kejuaraan	sukses penyelenggaraan lomba tingkat Kab Bantul	3 jenis kejuaraan	sukses penyelenggaraan lomba tingkat Kab Bantul	3 jenis kejuaraan
META INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah kejuaraan yang diselenggarakan di tingkat Kab Bantul pada tahun n								

NAMA PROGRAM No. 9	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul								
KEGIATAN 9.1	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul								
PENAJAMAN KEGIATAN	Kegiatan pelayanan pendidikan menengah Kabupaten Gunungkidul eksisting dan yang diharapkan : Memberikan layanan pendidikan menengah yang berkualitas sesuai standar nasional pendidikan pada lingkup kabupaten/kota								
TUJUAN KEGIATAN	Mewujudkan Layanan pendidikan menengah di Kabupaten Gunungkidul dengan bentuk : 1. Lomba PTK tingkat kab/kota 2. Lomba SMA tingkat kab/kota 3. Lomba SMK tingkat kab/kota								
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kab. Gunungkidul	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kab. Gunungkidul	11 SMA dan 13 SMK	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kab. Gunungkidul	11 SMA dan 13 SMK	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kab. Gunungkidul	11 SMA dan 13 SMK	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kab. Gunungkidul	11 SMA dan 13 SMK
	Penyelenggaraan lomba PTK,	sukses penyelengg	3 jenis kejuaraan						

	SMA, dan SMK di tingkat Kab Gunungkidul	araan lomba tingkat Kab Gunungkidul							
META INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah kejuaraan yang diselenggarakan di tingkat Kab Gunungkidul pada tahun n								
NAMA PROGRAM No. 10	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo								
KEGIATAN 10.1	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo								
PENAJAMAN KEGIATAN	Kegiatan pelayanan pendidikan menengah Kabupaten Kulon Progo eksisting dan yang diharapkan : Memberikan layanan pendidikan menengah yang berkualitas sesuai standar nasional pendidikan pada lingkup kabupaten/kota								
TUJUAN KEGIATAN	Mewujudkan Layanan pendidikan menengah kabupaten Kulon Progo dengan bentuk : 1. Lomba PTK tingkat kab/kota 2. Lomba SMA tingkat kab/kota 3. Lomba SMK tingkat kab/kota								
INDIKATOR	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	KELUARAN/HASI	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target

KEGIATAN	L								
AN	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kab. Kulon Progo	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kab. Kulon Progo	11 SMA dan 8 SMK	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kab. Kulon Progo	11 SMA dan 8 SMK	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kab. Kulon Progo	11 SMA dan 8 SMK	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kab. Kulon Progo	11 SMA dan 8 SMK
	Penyelenggaraan lomba PTK, SMA, dan SMK di tingkat Kab Kulon Progo	sukses penyelenggaraan lomba tingkat Kab Kulon Progo	3 jenis kejuaraan	sukses penyelenggaraan lomba tingkat Kab Kulon Progo	3 jenis kejuaraan	sukses penyelenggaraan lomba tingkat Kab Kulon Progo	3 jenis kejuaraan	sukses penyelenggaraan lomba tingkat Kab Kulon Progo	3 jenis kejuaraan
META INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah kejuaraan yang diselenggarakan di tingkat Kab Kulon Progo pada tahun n								
NAMA PROGRAM No. 11	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman								
KEGIATAN 11.1	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman								

PENAJAMAN KEGIATAN	Kegiatan pelayanan pendidikan menengah Kabupaten Sleman eksisting dan yang diharapkan : Memberikan layanan pendidikan menengah yang berkualitas sesuai standar nasional pendidikan pada lingkup kabupaten/kota									
TUJUAN KEGIATAN	Mewujudkan Layanan pendidikan menengah di Kabupaten Sleman dengan bentuk : 1. Lomba PTK tingkat kab/kota 2. Lomba SMA tingkat kab/kota 3. Lomba SMK tingkat kab/kota									
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	2019			2020		2021		2022	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	
	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kab. Sleman	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kab.Sleman	17 SMA dan 8 SMK	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kab.Sleman	17 SMA dan 8 SMK	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kab.Sleman	17 SMA dan 8 SMK	Layanan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Kab.Sleman	17 SMA dan 8 SMK	
	Penyelenggaraan lomba PTK, SMA, dan SMK di tingkat Kab Sleman	sukses penyelenggaraan lomba tingkat Kab Sleman	3 jenis kejuaraan	sukses penyelenggaraan lomba tingkat Kab Sleman	3 jenis kejuaraan	sukses penyelenggaraan lomba tingkat Kab Sleman	3 jenis kejuaraan	sukses penyelenggaraan lomba tingkat Kab Sleman	3 jenis kejuaraan	
META INDIKATOR	Jumlah kejuaraan yang diselenggarakan di tingkat Kab Sleman pada tahun n									

KEGIATAN									
NAMA PROGRAM No. 12	Program Pembinaan Kepemudaan								
KEGIATAN 12.1	Pembinaan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan								
PENAJAMAN KEGIATAN	Kegiatan pembinaan kepribadian generasi muda secara eksisting dan yang diharapkan : Semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat generasi muda padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk itu Peran pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak yang diwujudkan dengan memperkuat wawasan kebangsaan melalui kompetisi-kompetisi pemuda di tingkat nasional dan internasional.								
TUJUAN KEGIATAN	Kegiatan ini merupakan suatu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pemuda DIY melalui berbagai ajang kompetisi tingkat nasional dan internasional. Pemerintah daerah melakukan Seleksi, pembinaan dan pengiriman pemuda dalam kegiatan yang bersifat nasional dan internasional, yaitu : Pemuda antar negara, Kapal pemuda nusantara, dan Pemuda pelopor tingkat nasional								
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	Pembinaan dan pengiriman pemuda pada kompetisi tingkat nasional dan	1. pemuda yang dikirim untuk kegiatan Pemuda	1. Jumlah pemuda lolos seleksi dan dikirim mewakili Indonesia	1. pemuda yang dikirim untuk kegiatan Pemuda	1. Jumlah pemuda lolos seleksi dan dikirim mewakili Indonesia	1. pemuda yang dikirim untuk kegiatan Pemuda	1. Jumlah pemuda lolos seleksi dan dikirim mewakili Indonesia	1. pemuda yang dikirim untuk kegiatan Pemuda	1. Jumlah pemuda lolos seleksi dan dikirim mewakili Indonesia

	internasional	antar negara 2. pemuda yang dikirim untuk kegiatan Kapal pemuda nusantara 3. pemuda yang dikirim untuk kegiatan Pemuda pelopor tingkat nasional	sebanyak 4 orang 2. Jumlah pemuda lolos seleksi dan dikirim mewakili DIY di tingkat nasional sebanyak 5 orang 3. Jumlah pemuda lolos seleksi dan dikirim mewakili DIY di tingkat nasional sebanyak 5 orang	antar negara 2. pemuda yang dikirim untuk kegiatan Kapal pemuda nusantara 3. pemuda yang dikirim untuk kegiatan Pemuda pelopor tingkat nasional	sebanyak 4 orang 2. Jumlah pemuda lolos seleksi dan dikirim mewakili DIY di tingkat nasional sebanyak 5 orang	antar negara 2. pemuda yang dikirim untuk kegiatan Kapal pemuda nusantara 3. pemuda yang dikirim untuk kegiatan Pemuda pelopor tingkat nasional	sebanyak 4 orang 2. Jumlah pemuda lolos seleksi dan dikirim mewakili DIY di tingkat nasional sebanyak 5 orang	antar negara 2. pemuda yang dikirim untuk kegiatan Kapal pemuda nusantara 3. pemuda yang dikirim untuk kegiatan Pemuda pelopor tingkat nasional	sebanyak 4 orang 2. Jumlah pemuda lolos seleksi dan dikirim mewakili DIY di tingkat nasional sebanyak 5 orang
META INDIKATOR KEGIAT	Jumlah pemuda yang dikirim untuk kegiatan nasional dan internasional di tahun n								

AN									
KEGIATAN AN 12.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan								
PENAJAMAN KEGIATAN AN	Kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarpras kepemudaan secara eksisting dan yang diharapkan : Masih terbatasnya pemuda dalam membekali diri dengan ketrampilan atau keahlian yang dibutuhkan serta Memberi ruang gerak lebih kepada pemuda untuk menyalurkan prestasi dan potensi diri secara positif, untuk itu Pemda perlu memberikan fasilitasi sarana dan prasarana kepemudaan.								
TUJUAN KEGIATAN AN	kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas layanan di bidang kepemudaan melalui melalui pembangunan dan perbaikan sarana prasarana kepemudaan								
INDIKATOR KEGIATAN AN	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kepemudaan	bangunan/gedung kepemudaan yang direhabilitasi	2 unit						
META INDIKATOR KEGIATAN AN	Jumlah bangunan/gedung kepemudaan yang direhabilitasi di tahun n								
KEGIATAN AN 12.3	Pembinaan Kepribadian Generasi Muda								

PENAJAMAN KEGIATAN	Kegiatan pembinaan kepribadian generasi muda secara eksisting dan yang diharapkan : Peran pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak yang diwujudkan dengan memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab hak dan kewajiban sebagai warga negara.								
TUJUAN KEGIATAN	Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pembinaan karekter bagi pemuda untuk menyiapkan generasi muda yang mandiri dan berkepribadian, melalui kegiatan 1. Jambore Pemuda 2. Paskibraka 3. Kader anti Napza 4. Pameran Karya Pemuda 5. KNPI dan Kwarda								
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
AN	Pembinaan Kepribadian Generasi Muda (Jambore pemuda, pengiriman Paskibraka, pembentukan kader anti NAPZA, pameran pemuda)	1. pemuda yang mengikuti pembinaan kepribadian generasi muda 2. penguatan kelembagaan	1. 782 orang 2. 2 lembaga (KNPI dan Kwarda)	1. pemuda yang mengikuti pembinaan kepribadian generasi muda 2. penguatan kelembagaan	1. 782 orang 2. 2 lembaga (KNPI dan Kwarda)	1. pemuda yang mengikuti pembinaan kepribadian generasi muda 2. penguatan kelembagaan	1. 782 orang 2. 2 lembaga (KNPI dan Kwarda)	1. pemuda yang mengikuti pembinaan kepribadian generasi muda 2. penguatan kelembagaan	1. 782 orang 2. 2 lembaga (KNPI dan Kwarda)
META	Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan kepribadian generasi muda di tahun n								

INDIKATOR KEGIATAN									
KEGIATAN 12.4	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda								
PENAJAMAN KEGIATAN	<p>Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda, kondisi eksisting dan yang diharapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pemikiran di kalangan pemuda bahwa bekerja di perusahaan atau lembaga pemerintah lebih baik dibandingkan menjadi wirausahawan atau membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan.</li> <li>2. Tingginya tingkat pendidikan pemuda dengan lapangan pekerjaan yang tidak banyak.</li> </ol> <p>Untuk itu perlu pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dalam rangka menghasilkan wirausaha muda yang berprestasi dan berdaya saing serta meningkatkan peran serta pemuda untuk aktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam memanfaatkan potensi-potensi lokal.</p>								
TUJUAN KEGIATAN	<p>Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemberdayaan pemuda melalui kegiatan pelatihan Kewirausahaan dalam rangka menumbuhkan kemandirian secara ekonomi, dan pemberdayaan pemuda di kantong-kantong kemiskinan dalam pengelolaan potensi lokal melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan ketrampilan bagi pemuda di kantong kemiskinan</li> <li>2. agrobisnis</li> <li>3. sentra kewirausahaan pemuda</li> </ol>								
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	pemuda yang mengikuti pelatihan	330 orang						

		kewirausahaan		kewirausahaan		kewirausahaan		kewirausahaan	
META INDIKATOR KEGIATAN	jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan pada tahun n								
NAMA PROGRAM No. 13	Program Pembinaan Keolahragaan								
KEGIATAN 13.1	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga								
PENAJAMAN KEGIATAN	<p>Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga, kondisi eksisting dan yang diharapkan :  Sarana prasarana olahraga yang ada di DIY belum cukup baik dan mampu dimanfaatkan untuk standar penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat nasional dan internasional, dan yang diharapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberi ruang gerak lebih kepada masyarakat untuk menyalurkan prestasi dan potensi diri secara positif, untuk itu Pemda perlu memberikan fasilitasi sarana dan prasarana keolahragaan.</li> <li>2. Pemenuhan akreditasi sarpras keolahragaan (standar nasional dan internasional)</li> </ol>								
TUJUAN KEGIATAN	Kegiatan ini bertujuan untuk membangun dan menyediakan fasilitas olahraga yang terstandard. Fasilitas olahraga yang berstandard nasional : stadion mandala krida dan GOR Amongrogo. yang belum berstandard nasional : lapangan kenari dan Lapangan bulutangkis Sorowajan								
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target

AN	sarana dan prasarana olahraga yang dapat dimanfaatkan dengan baik untuk fasilitas olahraga	Fasilitas olahraga sesuai dengan standard nasional	1 fasilitas olahraga	Fasilitas olahraga sesuai dengan standard nasional	1 fasilitas olahraga	Fasilitas olahraga sesuai dengan standard nasional	1 fasilitas olahraga	Fasilitas olahraga sesuai dengan standard nasional	1 fasilitas olahraga
META INDIKATOR KEGIATAN	jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun pada tahun n								
KEGIATAN AN 13.2	Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional								
PENAJAMAN KEGIATAN	Kegiatan Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional, kondisi eksisting dan yang diharapkan : Belum optimalnya masyarakat dan prestasi olahraga dalam rangka mewujudkan pembinaan olahraga yang berkualitas oleh karena itu perlu dilakukan penguatan pembinaan olahraga.								
TUJUAN KEGIATAN	Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan prestasi olahraga bagi atlet pada ajang perlombaan di tingkat nasional melalui 1. Pembinaan Atlet Berbakat 2. Penguatan Kelembagaan NPC dan KONI 3. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah 4. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat regional dan nasional								
INDIKATOR	TAHUN	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
	KELUARAN/HASI	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target

KEGIATAN	L								
AN	Perolehan peringkat/rangking DIY pada kompetisi olahraga di tingkat nasional	1. Pembinaan dan pengiriman POPDA 2. Pembinaan dan Pengiriman POPNAS 3. Pembinaan kelembagaan olahraga (KONI dan NPC)	1. Meningkatkan prestasi pada kompetisi POPDA dengan penambahan jumlah medali. 2. Meningkatkan prestasi pada kompetisi POPNAS dengan penambahan jumlah medali 3. 2 Lembaga	1. Pembinaan dan pengiriman POPDA 2. Pembinaan dan pengiriman POPWIL 3. Pembinaan kelembagaan olahraga (KONI & NPC)	1. Meningkatkan prestasi pada kompetisi POPDA dengan penambahan jumlah medali. 2. Meningkatkan prestasi pada kompetisi POPWIL dengan penambahan jumlah medali. 2 lembaga	1. Pembinaan dan pengiriman POPDA 2. Pembinaan dan Pengiriman POPNAS 3. Pembinaan kelembagaan olahraga (KONI dan NPC)	1. Meningkatkan prestasi pada kompetisi POPDA dengan penambahan jumlah medali. 2. Meningkatkan prestasi pada kompetisi POPNAS dengan penambahan jumlah medali 3. 2 Lembaga	1. Pembinaan dan pengiriman POPDA 2. Pembinaan dan pengiriman POPWIL 3. Pembinaan kelembagaan olahraga (KONI & NPC)	1. Meningkatkan prestasi pada kompetisi POPDA dengan penambahan jumlah medali. 2. Meningkatkan prestasi pada kompetisi POPWIL dengan penambahan jumlah medali. 2 lembaga
META	jumlah kejuaraan yang diikuti pada tahun n								
INDIKAT	jumlah lembaga olahraga yang mendapat bantuan pada tahun n								

OR KEGIAT AN	
--------------------	--

*5.4.2. SINKRONISASI PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG IPM URUSAN PERPUSTAKAAN*

IKU	META PROGRAM		
ESEL ON III	NAM A PROG RAM	Diisi dengan Nama Program yang sudah ada di dalam RPJMD	Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
ESEL ON 4/ ESEL ON 5	KEGIA TAN 1	Diisi dengan nama kegiatan yang jelas, tidak ambigu dan mengga mbarkan	Pembinaan Perpustakaan

	aktivitas didalamnya.	
TUJUAN KEGIATAN	Merupakan tindakan lanjut atas aktivitas-aktivitas yang diperlukan dalam program. Gambaran kondisi umum dengan data-data pendukung) sehingga memerlukan kegiatan ini dalam rangka mendukung	<p>Tujuan kegiatan ini adalah Pendampingan dan pembinaan perpustakaan sesuai dengan SNP (Standar Nasional Perpustakaan). Pembinaan perpustakaan ini ditujukan untuk mempersiapkan perpustakaan agar mendapatkan akreditasi, hal ini dicapai melalui Bimtek Perpustakaan sesuai dengan SNP, Workshop Akreditasi, dan Akreditasi. Dengan adanya pembinaan dan pendampingan diharapkan perpustakaan dapat memenuhi kriteria terstandar dan berdampak pada peningkatan minat baca</p> <p>Pembinaan perpustakaan adalah upaya pemerintah daerah DIY melalui BPAD DIY dalam rangka membina perpustakaan yang menjadi kewenangan dan urusan Pemerintah Provinsi, mencakup perpustakaan setingkat sekolah lanjutan tingkat atas (SMA/SMK/MA), perpustakaan khusus (Perpustakaan OPD), dan perpustakaan sekolah khusus (SLB).</p> <p>Tahapan pembinaan perpustakaan: pembinaan perpustakaan melalui pelaksanaan bimtek perpustakaan, pendampingan, pada akhirnya dievaluasi melalui akreditasi.</p> <p>Standar perpustakaan disesuaikan dengan Pergub DIY No 18 Tahun 2018 (tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah) dan Perka Perpusnas No 12 Tahun 2017 (tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah)</p> <p>Jumlah total perpustakaan di DIY terdapat 522 perpustakaan sekolah SMA/SMK/MA/SLB, 41 OPD.</p> <p>19 Perpustakaan sekolah yang sudah terstandar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpus SMAN 1 Yogyakarta, 2. Perpus MAN III Yogyakarta, 3. Perpus MAN I Yogyakarta, 4. Perpus SMA Muh. 2 Yogyakarta, 5. Perpus SMA Muh. 1 Yogyakarta, 6. Perpus Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta, 7. Perpus SMAN 2 Bantul, 8. Perpus SMKN 1 Bantul, 9. Perpus SMA 8 Yogyakarta, 10. Perpus SMKN 6 Yogyakarta, 11. Perpus SMK 2 Depok Sleman, 12. Perpus MAN 2 Wates, 13. Perpus SMAN 9 Yogyakarta, 14. Perpus SMKN 1 Depok Sleman, 15. Perpus SMAN 1 Godean, 16. Perpus SMAN 1 Seyegan, 17. Perpus SMA De Brito Yogyakarta, 18. Perpus MAN 1 Wonosari, 19. Perpus SMAN 2 Yogyakarta.</li> </ol> <p>1 perpustakaan OPD yang terstandar: Perpustakaan Bandiklat DIY.</p>

	program. Diberikan waktu pelaksanaan kegiatan.										
INDIKATOR KEGIATAN	Output dan hasil kegiatan yang menunjukkan kondisi yang ada menjadi posisi menjadinya.	TAHUN	2019		2020		2021		2022		
		KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	
		Perpustakaan yang siap diakreditasi melalui pembinaan dalam Bimtek Perpustakaan sesuai dengan SNP, Workshop Akreditasi, dan Akreditasi	1. Bimtek perpustakaan yang sesuai dengan SNP2. workshop Akreditasi perpustakaan3. Akreditasi perpustakaan	1. 3 angt, 25 peserta/angkatan2. 2 kali, @60 peserta 3. 12 perpustakaan yang siap untuk diakreditasi	1. Bimtek perpustakaan yang sesuai dengan SNP2. workshop Akreditasi perpustakaan3. Akreditasi perpustakaan	1. 3 angt, 25 peserta/angkatan2. 2 kali, @60 peserta 3. 12 perpustakaan yang siap untuk diakreditasi	1. Bimtek perpustakaan yang sesuai dengan SNP2. workshop Akreditasi perpustakaan3. Akreditasi perpustakaan	1. 3 angt, 25 peserta/angkatan2. 2 kali, @60 peserta 3. 12 perpustakaan yang siap untuk diakreditasi	1. Bimtek perpustakaan yang sesuai dengan SNP2. workshop Akreditasi perpustakaan3. Akreditasi perpustakaan	1. 3 angt, 25 peserta/angkatan2. 2 kali, @60 peserta 3. 12 perpustakaan yang siap untuk diakreditasi	1. Bimtek perpustakaan yang sesuai dengan SNP2. workshop Akreditasi perpustakaan3. Akreditasi perpustakaan
META INDIKATOR	Menguraikan definisi,	Jumlah perpustakaan yang mendapatkan pembinaan di Tahun n									

	KEGIATAN	cara perhitungan, data dasar dan sumber datanya.	
ESELON 4/ ESELON 5	KEGIATAN 2	Diisi dengan nama kegiatan yang jelas, tidak ambigu dan menggambarkan aktivitas didalamnya.	Pemasyarakatan Perpustakaan dan Minat Baca
	TUJUAN KEGIATAN	Merupakan tindakan lanjut atas aktivitas-aktivitas yang diperlukan	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat, karena dgn meningkatnya minat baca diharapkan akan meningkatkan wawasan yang berdampak pada peningkatan ekonomi, sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan. Minat Baca di DIY saat ini baru mencapai 49 : 1000 orang ( Data BPAD Th 2016), sehingga kegiatan ini menjadi kegiatan yang strategis untuk meningkatkan minat baca. Aktivitas yang dilaksanakan dalam kegiatan ini antara lain bedah buku, lomba minat baca, forum perpustakaan, workshop karya tulis Pemasyarakatan perpustakaan dan minat baca adalah upaya untuk menempatkan perpustakaan menjadi bagian dari kehidupan dan aktivitas masyarakat sehingga masyarakat dapat nilai tambah informasi, ilmu pengetahuan dan jasa

	n dalam program. Gambaran kondisi umum (disertai dengan data-data pendukung) sehingga memerlukan kegiatan ini dalam rangka mendukung program. Diberikan waktu pelaksanaan kegiatan.	perpustakaan lainnya serta menumbuhkan minat baca masyarakat melalui kegiatan bedah buku, lomba minat baca (misalnya penulisan artikel, menulis cerpen untuk anak SD), workshop karya tulis dan Forum Komunikasi Perpustakaan (ajang koordinasi dan komunikasi antar perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah di DIY).									
INDIKATOR KEGIATAN	Output dan hasil kegiatan yang menunjang	KELUARAN/HASIL	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>		
			Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	
			jumlah pengunjung perpustakaan	1. Bedah buku 2. Lomba minat baca	1. 60 Bedah buku 2. 2 kali	1. Bedah buku 2. Lomba	1. 12 Bedah buku 2. 2 kali	1. Bedah buku 2. Lomba	1. 12 Bedah buku	1. Bedah buku 2.	1. 12 Bedah buku

		kan kondisi yang ada menjadi posisi menjadinya.	pada Perpustakaan yang siap diakreditasi memenuhi standar nasional	3. Forum Perpustakaan 4. Workshop Karya tulis	Lomba minat baca 3. 2 kali Forum Perpustakaan 4. 2 Workshop Karya tulis	minat baca 3. Forum Perpustakaan 4. Workshop Karya tulis	Lomba minat baca 3. 2 kali Forum Perpustakaan 4. 2 Workshop Karya tulis	minat baca 3. Forum Perpustakaan 4. Workshop Karya tulis	2. 2 kali Lomba minat baca 3. 2 kali Forum Perpustakaan 4. 2 Workshop Karya tulis	Lomba minat baca 3. Forum Perpustakaan 4. Workshop Karya tulis	2. 2 kali Lomba minat baca 3. 2 kali Forum Perpustakaan 4. 2 Workshop Karya tulis
	META INDIKATOR KEGIATAN	Menguraikan definisi, cara perhitungan, data dasar dan sumber datanya.	dihitung berdasarkan jumlah pengunjung perpustakaan yang akan diakreditasi minimal 12.000 pengunjung perperpustakaan pertahun								
ESELON III	NAMA PROGRAM	Diisi dengan Nama Program yang sudah	Program Pengembangan bahan pustaka dan informasi								

		ada di dalam RPJMD	
ESEL ON 4/ ESEL ON 5	KEGIA TAN 1	Diisi dengan nama kegiatan yang jelas, tidak ambigu dan menggariskan aktivitas didalamnya.	Pelestarian Bahan Pustaka
	TUJUAN KEGIATAN	Merupakan tindakan lanjut atas aktivitas-aktivitas yang diperlukan dalam program. Gambaran kondisi	Menyelamatkan nilai informasi Bahan Pustaka dan Menyelamatkan fisik Bahan Pustaka agar terlindungi dari serangan serangga, manusia, jamur, panas dan sebagainya. Dengan perawatan yang baik maka diharapkan bahan pustaka menjadi awet, lebih lama dipakai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan. aktivitas yang dilakukan antara lain: Fumigasi, termite control, perawatan buku, penyampulan buku, penjilidan surat kabar/majalah, perbaikan buku rusak, pembuatan kotak pelindung buku langka, alih huruf, alih bahasa jawa ke Indonesia, alih bahasa asing ke Indonesia, alih media, pengadaan alat preservasi, penambahan koleksi preservasi digital

	<p>umum (disertai dengan data-data pendukung) sehingga memerlukan kegiatan ini dalam rangka mendukung program. Diberikan waktu pelaksanaan kegiatan.</p>										
INDIKATOR KEGIATAN	Output dan hasil kegiatan yang menunjukkan kondisi yang ada menjadi	TAHUN	2019		2020		2021		2022		
		KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	
		Jumlah bahan pustaka yang dilestarikan melalui Fumigasi, Perawatan termite	1. Fumigasi 2. Perawatan	1. 3100 m3 2. 283.800 eks 3. 40 bendel 4. 2.000 eks 5. 607 buah 6. 30.000 lembar	1. Fumigasi 2. Perawatan buku 3.	1. 3100 m3 2. 280.000 eks 3. 40 bendel 4. 2.000 eks 5. 607 buah 6. 30.000	1. Fumigasi 2. Perawatan buku 3.	1. 3100 m3 2. 280.000 eks 3. 40 bendel 4. 2.000 eks 5. 607 buah	1. Fumigasi 2. Perawatan buku 3.	1. 3100 m3 2. 280.000 eks 3. 40 bendel 4. 2.000 eks 5. 607 buah	

		posisi menjadi ya.	control, perawatan buku, penyampulan buku, penjilidan surat kabar/majala h, perbaikan buku rusak, pembuatan kotak pelindung buku langka, alih huruf, alih bahasa jawa ke Indonesia, alih bahasa asing ke Indonesia, alih media	buku 3. Penjili dan surat kabar 4. perbai kan buku rusak 5. kotak pelind ung buku langka 6. alih media 7. Alih Bahasa dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesi a 8. Alih Tulisan dari Jawa ke Latin	7. 300 lembar 8. 1.500 lembar	Penjilida n surat kabar 4. perbaika n buku rusak 5. kotak pelindun g buku langka 6. alih media 7. Alih Bahasa dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesi a 8. Alih Tulisan dari Jawa ke Latin	lembar 7. 300 lembar 8. 1.500 lembar	Penjilidan surat kabar 4. perbaikan buku rusak 5. kotak pelindung buku langka 6. alih media 7. Alih Bahasa dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia 8. Alih Tulisan dari Jawa ke Latin	6. 30.000 lembar 7. 300 lembar 8. 1.500 lembar	Penjilida n surat kabar 4. perbaika n buku rusak 5. kotak pelindun g buku langka 6. alih media 7. Alih Bahasa dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesi a 8. Alih Tulisan dari Jawa ke Latin	4. 2.000 eks 5. 607 buah 6. 30.000 lembar 7. 300 lembar 8. 1.500 lembar
--	--	--------------------------	---	--	----------------------------------	--	---	--	---	---	--

				esia 8. Alih Tulisa n dari Jawa ke Latin								
	META INDIK ATOR KEGIA TAN	Mengurai kan definisi, cara perhitun gan, data dasar dan sumber datanya.	dihitung dari jumlah koleksi perpustakaan yang terselamatkan melalui Fumigasi, Ttermite control, perawatan buku, penyampulan buku, penjilidan surat kabar/majalah, perbaikan buku rusak, pembuatan kotak pelindung buku langka, alih huruf, alih bahasa jawa ke Indonesia, alih bahasa asing ke Indonesia, alih media									
ESEL ON 4/ESE LON 5	KEGIA TAN 2	Diisi dengan nama kegiatan yang jelas, tidak ambigu dan mengga mbarkan aktivitas	Pengelolaan Bahan Pustaka dan Pengembangan Koleksi									

		didalamnya.	
	TUJUAN KEGIATAN	Merupakan tindakan lanjut atas aktivitas-aktivitas yang diperlukan dalam program. Gambaran kondisi umum (disertai dengan data-data penduduk) sehingga memerlukan kegiatan ini dalam rangka mendukung program.	Tujuan kegiatan ini adalah untuk menambah koleksi perpustakaan yang baik dan seimbang, sehingga mampu melayani kebutuhan pengguna yang berubah dan tuntutan pengguna masa kini serta masa mendatang. Pengembangan koleksi adalah awal dari pembinaan koleksi perpustakaan bertujuan agar koleksi tetap sesuai dengan kebutuhan pengguna dan jumlah bahan pustaka selalu mencukupi. Mutu perpustakaan dibentuk oleh kegiatan pengembangan koleksi ini.

		Diberikan waktu pelaksanaan kegiatan.									
INDIKATOR KEGIATAN	Output dan hasil kegiatan yang menunjukkan kondisi yang ada menjadi posisi menjadinya.	Pengelolaan bahan pustaka dan pengembangan koleksi melalui pengadaan e-book, abstraksi budaya timur, penerbitan bibliografi daerah, penerbitan katalog induk daerah, penerbitan accesion list, pemantauan penerbit dan pengusaha rekaman, rencana kerja budaya timur	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>		
			Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	
			1. Pengolahan pemantauan penerbit dan pengusaha rekaman3. bibliografi daerah4. accesion list5. katalog induk daerah6. Bahan pustaka7. Bahan pustaka KCKR8. e-book	1. 10.000 eks 2. 200 Penerbit 3. 4 terbitan 4. 1 terbitan 5. 1 terbitan 6. 1.000 judul7. 5.000 judul 8. 1.000 judul	1. Pengolahan pemantauan penerbit dan pengusaha rekaman3. bibliografi daerah4. accesion list5. katalog induk daerah6. Bahan pustaka7. Bahan pustaka KCKR8. e-	1. 10.000 eks 2. 200 Penerbit3. 4 terbitan4. 1 terbitan5. 1 terbitan6. 1.000 judul7. 5.000 judul 8. 1.000 judul	1. Pengolahan pemantauan penerbit dan pengusaha rekaman3. bibliografi daerah4. accesion list5. katalog induk daerah6. Bahan pustaka7. Bahan pustaka KCKR8. e-book	1. 10.000 eks 2. 200 Penerbit3. 4 terbitan4. 1 terbitan5. 1 terbitan6. 1.000 judul7. 5.000 judul 8. 1.000 judul	1. Pengolahan pemantauan penerbit dan pengusaha rekaman3. bibliografi daerah4. accesion list5. katalog induk daerah6. Bahan pustaka7. Bahan pustaka KCKR8. e-book	1. 10.000 eks 2. 200 Penerbit3. 4 terbitan4. 1 terbitan5. 1 terbitan6. 1.000 judul7. 5.000 judul 8. 1.000 judul	

						book					pustaka KCKR8. e-book
	META INDIK ATOR KEGIA TAN	Mengurai kan definisi, cara perhitun gan, data dasar dan sumber datanya.	dihitung dari jumlah bahan pustaka dan koleksi yang dikelola melalui pengadaan e-book, abstraksi budaya timur, penerbitan bibliografi daerah, penerbitan katalog induk daerah, penerbitan accesion list, pemantauan penerbit dan pengusaha rekaman, rencana kerja budaya timur								
ESEL ON III	NAM A PROG RAM	Diisi dengan Nama Program yang sudah ada di dalam RPJMD	Program Layanan Perpustakaan								
ESEL ON 4/ESE LON 5	KEGIA TAN 1	Diisi dengan nama kegiatan yang jelas, tidak	Layanan Perpustakaan								

		ambigu dan menggambarkan aktivitas didalamnya.	
	TUJUAN KEGIATAN	Merupakan tindak lanjut atas aktivitas-aktivitas yang diperlukan dalam program. Gambaran kondisi umum (disertai dengan data-data pendukung) sehingga memerlukan kegiatan	Kegiatan layanan perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan BPAD DIY. Dengan adanya aktivitas layanan perpustakaan yang sudah dilakukan, masyarakat merasa terbantu dan tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan untuk memanfaatkan fasilitas yang ada sehingga jumlah pengunjung perpustakaan yang menjadi anggota perpustakaan akan meningkat. Sejumlah inovasi dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan program silang pinjam dengan mengedepankan fasilitas delivery order (pemesanan dan antar buku)</li> <li>2. menambah jumlah koleksi yang terkoneksi dengan RFID sehingga memudahkan proses layanan</li> <li>3. Mengembangkan fitur web Center of Excellent (COE) yang berisi kumpulan budaya yang ada di pulau Jawa. Konten yang berada di dalamnya merupakan kolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Seluruh pulau Jawa.</li> <li>4. Melakukan riset dan juga kajian indeks kepuasan pelanggan sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat kepuasan pemustaka yang mengakses layanan perpustakaan.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas Pelayanan dan mengoptimalkan waktu pelayanan perpustakaan hingga pukul 21.00</li> </ol>

		ini dalam rangka mendukung program. Diberikan waktu pelaksanaan kegiatan.									
	INDIKATOR KEGIATAN	Output dan hasil kegiatan yang menunjukkan kondisi yang ada menjadi posisi menjadi ya.	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
			KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target
			1. peningkatan indeks kepuasan pemustaka2. peningkatan jumlah pemustaka GTP3. peningkatan jumlah pemustaka JLC4. peningkatan jumlah pemustaka RBM5.	1. jumlah pemustaka GTP2. jumlah pemustaka JLC3. jumlah pemustaka RBM4. jumlah pemustaka ekstensi5. koleksi jaringan JLA6. layanan delivery order7. pemustaka pojok baca	1. 1% dari 186.850 menjadi 188.700 orang2. 1% dari 8.080 menjadi 8.160 orang3. 2% dari 35.700 menjadi 36.4004. 200	1. jumlah pemustaka GTP2. jumlah pemustaka JLC3. jumlah pemustaka RBM4. jumlah pemustaka ekstensi5. koleksi jaringan JLA6.	1. 1% 2. 1% 3. 2% 4. 200 orang5. 20.000 judul6. 240 orang 7. 1%	1. jumlah pemustaka GTP2. jumlah pemustaka JLC3. jumlah pemustaka RBM4. jumlah pemustaka ekstensi5. koleksi jaringan JLA6. layanan	1. 1% 2. 1% 3. 2% 4. 200 orang5. 20.000 judul6. 240 orang 7. 1%	1. jumlah pemustaka GTP2. jumlah pemustaka JLC3. jumlah pemustaka RBM4. jumlah pemustaka ekstensi5.	1. 1% 2. 1% 3. 2% 4. 200 orang5. 20.000 judul6. 240 orang 7. 1%

		<p>peningkatan jumlah pemustaka keliling6.</p> <p>peningkatan unjungan portal COE7.</p> <p>peningkatan koleksi jaringan JLA8.</p> <p>peningkatan jumlah buku yg terkoneksi RFID9.</p> <p>peningkatan jumlah fasilitas berkebutuhan khusus10.</p> <p>peningkatan layanan delivery order11.</p> <p>peningkatan pemustaka pojok baca12.</p> <p>jumlah anggota JLA yg menindaklanjuti kerjasama</p>		<p>orang5. 20.000 judul6. 240 orang 7. 1% dari 44.440 menjadi 44.880 orang</p>	<p>layanan delivery order7. pemustaka pojok baca</p>		<p>delivery order7. pemustaka pojok baca</p>		<p>koleksi jaringan JLA6. layanan delivery order7. pemustaka pojok baca</p>	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--

	META INDIK ATOR KEGIA TAN	Mengurai kan definisi, cara perhitun gan, data dasar dan sumber datanya.	Indeks kepuasan pemustaka dihitung dari hasil kajian indeks kepuasan pemustaka
			Peningkatan jumlah pengunjung baik itu GTP, JLC, RBM, perpus Keliling maupun Pojok baca dihitung dari jumlah pemustaka baru terhadap jumlah pemustaka n-1 dikali 100
			Kunjungan portal COE dihitung dari jumlah Peningkatan jumlah kunjungan pemustaka ke portal COE
			Koleksi jaringan JLA dihitung dari jumlah Peningkatan jumlah koleksi jaringan JLA yang bisa diakses masyarakat
			Jumlah buku RFID dihitung dari jumlah buku yang terkoneksi dengan sistem RFID
			Fasilitas layanan khusus dihitung dari jumlah Peningkatan fasilitas layanan berkebutuhan khusus
			Layanan delivery order dihitung dari jumlah Peningkatan Pemanfaatan fasilitas layanan Delivery Order
			peningkatan anggota JLA dihitung dari jumlah Peningkatan Jumlah Anggota JLA yang menindaklanjuti kerjasama

#### 5.4.3. SINKRONISASI PROGRAM KEGIATAN URUSAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

IKU	META PROGRAM									
ESELON III	NAMA PROGRA M	Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Sumber Daya Manusia								
ESELON 4/ ESELON 5	KEGIATA N 1	Penyusunan Kebijakan Sumber Daya Manusia								
	TUJUAN KEGIATA N	Kegiatan ini berupa penyusunan kajian kebijakan SDM, yang pelaksanaannya sekurangnya melalui proses : - identifikasi kebijakan terkait yang ada - identifikasi dan pemilihan isu strategis yang akan dijadikan rumusan bahan kebijakan - penyusunan kajian - perumusan bahan kebijakan Kegiatan ini dilakukan pada bulan Februari-Juli								
	INDIKAT OR KEGIATA	TAHUN	2019		2020		2021		2022	
		KELUARAN/H ASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target

	N	Kajian Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Sumber Daya Manusia	Penyusunan Kajian Kebijakan Pendidikan Inklusi	1 dokumen	Kajian pengelolaan dan penguatan kebijakan SDM	1 dokumen	Kajian pengelolaan dan penguatan kebijakan SDM	1 dokumen	Kajian pengelolaan dan penguatan kebijakan SDM	1 dokumen
		Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor sumber daya manusia	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Kebijakan pendidikan berkarakter	1 dokumen	Laporan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan SDM	1 dokumen	Kajian pengelolaan dan penguatan kebijakan SDM	1 dokumen	Kajian pengelolaan dan penguatan kebijakan SDM	1. 1 dokumen
			Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perpustakaan	1 dokumen						

			an SMA dan SMK berstandar nasional						
			Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan revitalisasi SMK (LSP 1,2,3)	1 dokumen					
			Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan UKS	1 dokumen					
	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan	Laporan Monitoring dan evaluasi	1 dokumen	Laporan Monitoring dan evaluasi	1 dokumen	Laporan Monitoring dan evaluasi	1 dokumen	Laporan Monitoring dan evaluasi	1 dokumen

		sektor sumber daya manusia	pelaksanaan kebijakan komitmen daerah tentang pemberian fasilitas atlet daerah berprestasi		pelaksanaan kebijakan SDM		pelaksanaan kebijakan SDM		pelaksanaan kebijakan SDM	
			Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan minat baca di lingkungan SMK/SMA/SLB	1 dokumen						
	META INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah rumusan bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan sumber daya manusia pada tahun n								
	KEGIATAN	Penyusunan Kebijakan Kebudayaan								

N 2										
TUJUAN KEGIATAN	Kegiatan ini berupa penyusunan kajian kebijakan kebudayaan, yang pelaksanaannya sekurangnya melalui proses : - identifikasi kebijakan terkait yang ada - identifikasi dan pemilihan isu strategis yang akan dijadikan rumusan bahan kebijakan - penyusunan kajian - perumusan bahan kebijakan Kegiatan ini dilakukan pada bulan Februari-Juli									
INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN	2019		2020		2021		2022		
	KELUARAN/HASIL	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	Keluaran	Target	
	Kajian Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Kebudayaan	n/a	n/a	Penyusunan Kajian Kebijakan Kebudayaan	1 dokumen	Penyusunan Kajian Kebijakan Kebudayaan	1 dokumen	Penyusunan Kajian Kebijakan Kebudayaan	1 dokumen	
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kebudayaan	n/a	n/a	Laporan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kebudayaan	1 dokumen	Laporan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kebudayaan	1 dokumen	Laporan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kebudayaan	1 dokumen	

		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kebudayaan	Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan tata nilai budaya di Perguruan Tinggi	1 dokumen	Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kebudayaan	1 dokumen	Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kebudayaan	1 dokumen	Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kebudayaan	1 dokumen
	META INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah rumusan bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan sumber daya manusia pada tahun n								

## BAB VI

# CATATAN PENUTUP

Sebagaimana telah di tegaskan di awal, penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mempertajam “Kerangka Kerja Logic” perencanaan program-program pendidikan demi tercapainya target dan sasaran prioritas pembangunan Pemerintah DIY, terutama **“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”**.

Dengan terselesaikannya penyusunan dokumen kajian strategis sektor pendidikan, maka posisi penting dari dokumen ini pada dasarnya adalah salah satu bagian dari perencanaan jangka pendek maupun jangka menengah untuk urusan pendidikan, perpustakaan, dan kebijakan otonomi daerah. Dimana arah dan sasaran perencanaan itu tertuju pada terwujudnya Indeks Pembangunan Manusia DIY yang lebih berkualitas di tahun-tahun yang akan datang.

Berbasiskan paradigma “pembangunan yang berpusat pada manusia” (*people-centered development*), yang memprioritaskan warga negara (*citizen*) sebagai basis perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program-program pembangunannya, Dokumen ini berupaya mengeksplorasi tiga hal penting berikut ini: **pertama**, mengeksplorasi program pendukung variabel Indeks Pembangunan Manusia DIY; **kedua**, memformulasikan rancangan program penentu Indeks Pembangunan Manusia DIY; dan **ketiga**, menyusun strategi pengembangan layanan pendidikan DIY.

Harapannya, semoga dokumen ini semakin mempertajam fokus perencanaan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan DIY sebagaimana yang telah termaktub dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022. Sehingga tercapailah juga Visi Gubernur DIY yaitu: **“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”**.

## DAFTAR PUSAKA

- Alkire, S. "2010 Human Development Definitions, Critiques, and Related Concepts." Human Development Research Paper 2010/10 and OPHI Working Paper No. 36.
- Alkire, S. 2005. "Why the Capability Approach?" *Journal of Human Development* 6(1): 115-135, DOI. 10.1080/14649880520003-4275
- Anand, S., and A. Sen. 2000. "Human development and economic sustainability." *World Development* 28(12): 2029-2049.
- Budiman, Arief. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hershberg, Eric & Christy Thornton (Ed.). 2005. *The Development Imperative: Toward a People-Centered Approach*, Social Science Research Council.
- Hikmat, Harry. 2014. Analisis dampak lingkungan sosial: strategi menuju pembangunan berpusat pada rakyat (people centred development). Tulisan Paper Andalsos: Staf Ahli bidang Dampak Sosial Kemensos.
- Hughes, Barry. 2013. *Development-Oriented Policies and Alternative Human Development Paths: Aggressive but Reasonable Interventions*, New York: UNDP Human Development Report Office.
- Hunt, A., and E. Samman. 2016. "Women's Economic Empowerment: Navigating Enablers and Constraints." Research Report. Overseas Development Institute, London. [www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resourcedocuments/10683.pdf](http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resourcedocuments/10683.pdf). diakses pada 2 November 2018.
- Kartono, Drajat Tri & Hanif Nurcholis. 2016. *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*, Universitas Terbuka.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga.

- McGinty, S. (2002). Community Capacity Building. ERIC – Search Education Resources. <https://eric.ed.gov/?id=ED473884>
- Nussbaum, M. 2000. “Women’s Capabilities and Social Justice.” *Journal for People-Centered Development* 1(2): 219-247.
- Nussbaum, M. 2003. “Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice.” *Feminist Economics* 9(2): 33-59.
- Nussbaum, M. 2011. “Capabilities, Entitlements, Rights: Supplementation and Critique.” *Journal of Human Development and Capabilities: A Multi-Disciplinary Journal for People-Centered Development* 12(1): 23-37.
- Nussbaum, M. 2015. “Philosophy and Economics in the Capabilities Approach: An Essential Dialogue.” *Journal of Human Development and Capabilities: A Multi-Disciplinary Journal for People-Centered Development* 16(1): 1-14.
- Purwowibowo, Kris Hendrijanto, Pra Adi Soelistijono, Peningkatan Kapasitas Manusia Sebagai Fokus dari People Centered Development dalam Jurnal Sosial Politik Humaniora /05/ Vol. 6. No.2. Tahun 2018, 283-300.
- Sen, A. 1980. “Equality of what?” In S. McMurrin, eds., *The Tanner Lectures on Human Values*. Salt Lake City, Utah.
- Sen, A. 1990. “Gender and Cooperative Conflicts.” In I. Tinker, ed., *Persistent Inequalities*. New York: Oxford University Press.
- Sen, A. 1992. *Inequality Reexamined*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Sen, A. 1995b. *Reflections on Human Development*. New York: Oxford University Press.
- Sen, A. 1997. “Human Capital and Human Capability.” In S. Fukuda-Parr and S. Kumar, 2003, *Readings in Human Development*. New York; Oxford University Press.
- Sen, A. 1999. *Development as Freedom*. New York: Knopf.
- Sen, A. 2004. “Elements of a theory of human rights.” *Philosophy & Public Affairs* 32(4): 315-356.

- Sen, A. 2008. "The Idea of Justice." *Journal of Human Development* 9(3): 331-342.
- Sen, A. 2009. *The Idea of Justice*. London: Allen Lane.
- Sen, A. 2013. "Nussbaum on the Capabilities Approach." *Journal of Human Development and Capabilities: A Multi-Disciplinary Journal for People-Centered Development* 14(1): 156-160.
- Sen, A.. 1989. "Development as Capability Expansion." *Journal of Development Planning* 17: 41-58.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan, Dilema, dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Todaro, Michael P. 1994. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi keempat. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Ul Haq, M. 1995a. "The Human Development Paradigm." In S. Fukuda-Parr and S. Kumar, 2003, *Readings in Human Development*. New York: Oxford University Press.
- UNDP. 1990. *Human Development Report 1990: Concept and Measurement of Human Development*. New York: Oxford University Press.
- UNDP. 2016. *Human Development Report 2016 Human Development for Everyone, New York*.
- Wahyu, Chandra, 2017. Membedah Indeks Pembangunan Manusia 2016 Kota Yogyakarta dalam <https://www.kompasiana.com/chandrawahyu/5a27c2b6fcf68155b8629642/membedah-indek-pembangunan-manusia-2016-kota-yogyakarta>

#### **Website**

<https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=11>

<https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=197>

<https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>

<https://yogyakarta.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>

[www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL\\_KES.../14\\_DIY\\_2017.pdf](http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES.../14_DIY_2017.pdf)  
<https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/887/indeks-pembangunan-manusia--ipm--d-i--yogyakarta-tahun-2017.html>  
[http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/index/379-indeks-pembangunan-manusia-ipm](http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/379-indeks-pembangunan-manusia-ipm)  
<https://www.acehtrend.com/2018/04/19/indeks-pembangunan-manusia-indonesia-2017-meningkat/>  
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/16/140451126/ipm-indonesia-naik-jadi-7081-harapan-hidup-lebih-panjang.>  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180416150138-4-11165/daftar-provinsi-dengan-tingkat-harapan-hidup-paling-tinggi>  
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3459978/bps-indeks-pembangunan-manusia-ri-capai-7081-pada-2017>  
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/04/16/1535/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-pada-tahun-2017-mencapai-70-81--kualitas-kesehatan--pendidikan--dan-pemenuhan-kebutuhan-hidup-masyarakat-indonesia-mengalami-peningkatan.html>  
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/10/ipm-terus-meningkat-kemendikbud-dorong-pemerataan-pendidikan-yang-berkualitas>